



REALIZING COMMITMENT
TO DELIVER SUSTAINABLE VALUES

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan ini dapat berisi beberapa pernyataan yang merupakan proyeksi dan pandangan masa depan yang menggambarkan cara pandang Perseroan terhadap kejadian-kejadian dan kinerja keuangan di masa depan, serta kondisi keuangan, hasil operasi dan hasil usaha, kondisi ekonomi, kondisi sektor, serta rencana dan tujuan terkait.

Pandangan-pandangan ini didasarkan pada beberapa estimasi dan asumsi saat ini yang dapat berubah seiring dengan ketidakpastian, kontijensi dan berbagai risiko bisnis, ekonomi dan kompetisi yang dapat berubah sewaktu-waktu; dapat menyebabkan hasil, kinerja dan kejadian sebenarnya berbeda secara material dari yang telah diprediksi atau diproyeksi; dan hal ini berada di luar kendali Perseroan dan Direksi. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak terkait baik secara langsung maupun secara eksklusif dengan fakta-fakta historis dan tidak mencerminkan niat, rencana, ekspektasi, asumsi dan keyakinan Perseroan mengenai kejadian-kejadian di masa datang. Tidak ada jaminan bahwa kejadian di masa datang akan muncul, proyeksi akan tercapai, atau asumsi Perseroan benar. Pernyataan-pernyataan tersebut bukan dan tidak dapat dianggap sebagai representasi atas kinerja Perseroan di masa datang.

Laporan tahunan ini memuat kata "TASPEN", dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT TASPEN (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

DISCLAIMER

This Annual Report may contain several statements that are future projections and views that describe the Company's perspective on future events and financial performance, financial conditions, operational and business results, economic conditions, sector conditions, and related plans and objectives.

These views are based on current estimates and assumptions, subject to change due to uncertainties, contingencies, and various business, economic and competitive risks that may change over time. They may cause actual results, performances, and events to differ materially from those predicted or projected, and these are beyond the control of the Company and the Board of Directors. These statements are not directly or exclusively related to historical facts and do not reflect the Company's intentions, plans, expectations, assumptions, and beliefs regarding future events. There is no guarantee that future events will occur, projections will be achieved, or that the Company's assumptions are correct. Accordingly, these statements are not and cannot be considered representations of the Company's performance in the future.

This annual report contains the words "TASPEN", and "The Company," hereinafter referred to as PT TASPEN (Persero), engaging in business activities in the Civil Servants Social Insurance Program field. The mention of the currency unit "Rupiah", "Rp", or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. Therefore, all financial information is presented in Rupiah currency.

TABLES AND CHARTS NOTIFICATION

The tables and charts in this Annual Report present numerical data using writing according to Indonesian language rules. Numerical presentations in the text adhere to both Indonesian and English standards based on context.

TEMA
THEMA



REALIZING COMMITMENT TO DELIVER SUSTAINABLE VALUES

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan pertumbuhan kinerja yang positif dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari sisi aset. Upaya Perseroan untuk terus mempertahankan keberlanjutan bisnisnya melalui penerapan inisiatif strategis mendorong pencapaian luar biasa tersebut. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk terus menciptakan dan memberikan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan Budaya Perseroan yaitu AKHLAK, penerapan Budaya Perseroan ini juga berdampak positif pada pencapaian kinerja ESG (*environment, social, governance*).

In 2023, the Company recorded positive and improved performance growth compared to the previous year, particularly in terms of assets. The Company's efforts to maintain business sustainability through the implementation of strategic initiatives have driven this remarkable achievement. The Company is committed to continuously creating and delivering added value to all stakeholders through the implementation of the Corporate Culture, namely AKHLAK. This corporate culture implementation also has a positive impact on achieving ESG (*environment, social, governance*) performance.

KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY

SUSTAINABLE PERFORMANCE THROUGH AKHLAK CORE VALUES 2022

Kami meyakini bahwa keberlanjutan merupakan sebuah upaya terus-menerus untuk memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan usaha yang bertanggung jawab. Pada tahun 2022, TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada peserta di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan telah memiliki budaya kerja AKHLAK yang merupakan implementasi dalam mendukung *Core Values* BUMN sebagai identitas dan perekat dalam budaya kerja yang mendorong peningkatan performa dengan mengadopsi *Core Values* BUMN dan menerjemahkannya ke dalam kompetensi dan indikator perilaku yang sejalan dengan kebutuhan bisnis, visi, dan misi Perseroan. TASPEN terus mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

We believe that sustainability is a continuous effort to provide benefits to all stakeholders through responsible business activities. In 2022, TASPEN committed to continuously improving its services to participants across Indonesia. To support this, the Company has embraced the AKHLAK work culture, which is an implementation in supporting of the Core Values of State-Owned Enterprises (SOEs) as an identity and adhesive element in a work culture that drives performance improvement by adopting the SOEs' Core Values and translating them into competencies and behavioral indicators that align with the Company's business needs, vision, and mission. TASPEN continues to support the government in addressing the pandemic and achieving Sustainable Development Goals (SDGs).



RESILIENCE AND OPTIMISM TOWARDS GROWTH 2021

Dinamika iklim usaha yang terjadi sepanjang tahun 2021 merupakan tantangan tersendiri bagi segenap manajemen PT TASPEN (Persero). Sinergi yang solid antar Insan Perseroan merupakan wujud komitmen TASPEN dalam menggapai kinerja ekselen secara berkelanjutan di tengah tantangan bayang-bayang ketidakpastian. Perseroan juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan terus berinovasi dan membuat terobosan dalam menghadapi perubahan demi capaian yang lebih tinggi. Seluruh upaya Perseroan dalam menjalankan bisnisnya dilakukan dengan asas keberlanjutan dengan memperhatikan keselarasan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

The dynamics of the business climate throughout 2021 posed a unique challenge for all management of PT TASPEN (Persero). The solid synergy among the Company's personnel manifests TASPEN's commitment to achieving sustainable excellent performance amidst the shadow of uncertainty challenges. The Company is also required to be able to adapt by continuously innovating and making breakthroughs in facing changes for higher achievements. All of the Company's efforts in running its business are carried out with the principle of sustainability, considering the harmony between economic, social, and environmental aspects.



CREATING SUSTAINABLE TRUST IN CHALLENGING TIMES 2020

Pandemi virus *COVID-19* dengan cepat mengganggu sektor bisnis dan aktivitas pelanggan secara global seiring dengan dampak kesehatannya. Dengan tantangan dan krisis global dan nasional ke depan, kami telah menyiapkan beberapa strategi baik yang sifatnya segera maupun jangka panjang. Menghadapi tantangan tersebut, Perseroan menciptakan lingkungan bisnis berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik. Perseroan fokus pada penguatan ketahanan internal, perbaikan sistem, dan melakukan efisiensi biaya. TASPEN menyadari bahwa nilai keberlanjutan didapat dengan hubungan yang harmonis antara memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, membangun Insan TASPEN, ikut serta membangun masyarakat, serta berperan aktif melindungi lingkungan hidup.

The COVID-19 pandemic quickly disrupted business sectors, global customer activities, and health impacts. With future global and national challenges and crises, we have prepared several immediate and long-term strategies. In the face of these challenges, the Company has created a sustainable business environment and increased public trust. The Company focuses on strengthening internal resilience, improving systems, and implementing cost efficiency. TASPEN realizes that sustainability value is achieved through a harmonious relationship between providing added value to shareholders, delivering the best services to customers, developing TASPEN personnel, actively participating in community development, and playing an active role in protecting the environment.



PENCAPAIAN KINERJA KEBERLANJUTAN

ACHIEVEMENT OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE

KILAS KINERJA EKONOMI

Economic Performance at a Glance

<p>PENDAPATAN Income</p> <p>Rp22,13 Triliun/Trillion</p>	<p>ASET Assets</p> <p>Rp376,99 Triliun/Trillion</p>	<p>EKUITAS Equity</p> <p>Rp12,63 Triliun/Trillion</p>	<p>LABA TAHUN BERJALAN Profit For The Year</p> <p>Rp804,77 Miliar/Billion</p>
--	---	---	---

KILAS KINERJA LINGKUNGAN

Environmental Performance at a Glance

<p>LISTRIK Electricity</p> <p>1.815 KWh/KWh</p>	<p>PENGGUNAAN AIR Water Usage</p> <p>900 M³/M³</p>	<p>BBM Fuel Oil</p> <p>2.000 Liter/Liter</p>	<p>PROGRAM PENGHIJAUAN Reforestation Program</p> <p>Pohon/Trees 7.000</p>
---	--	--	---

KILAS KINERJA SOSIAL

Social Performance at a Glance

<p>CUSTOMER SATISFACTION INDEX 2023 Customer Satisfaction Index 2023</p> <p>98,3% Sangat Puas Very Satisfied</p>	<p>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Employee Education and Training</p> <p>Rp24,19 Miliar/Billion</p>	<p>MITRA BINAAN NAIK KELAS Upgraded Foster Partners</p> <p>56 Mitra Binaan/Foster Partners</p>
<p>PROGRAM PENDANAAN UMK Micro-Small Business Funding (PUMK) Program</p> <p>Rp25,70 Miliar/Billion</p>		<p>NON PUMK Non-PUMK</p> <p>Rp14,08 Miliar/Billion</p>

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

- 3 Penjelasan Tema
Theme Explanation
- 4 Kesenambungan Tema
Theme Continuity
- 5 Pencapaian Kinerja Keberlanjutan 2023
Achievement Of Sustainability Performance In 2023
- 6 Daftar Isi
Table Of Contents
- 8 IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN**
SUSTAINABILITY PERFORMANCE OVERVIEW
- 10 SAMBUTAN DIREKSI**
MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
- 13 Penghargaan Dan Sertifikasi 2023
Awards And Certifications 2023
- 16 TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN**
ABOUT SUSTAINABILITY REPORT
- 17 Cakupan, Periode Dan Frekuensi Pelaporan
Reporting Scope, Period, and Frequency
- 17 Penyajian Kembali, Verifikasi Eksternal, Tanggapan Laporan Sebelumnya
Restatement, External Verification, Response to Previous Reports
- 19 Topik Material
Material Topics
- 19 Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholders Inclusiveness
- 22 PROFIL PERUSAHAAN**
COMPANY PROFILE
- 24 Identitas dan Profil Singkat Perusahaan
Company Identity and Brief Profile
- 25 Sejarah Singkat Perusahaan
Company Brief History
- 29 Jejak Langkah
Milestones
- 36 Visi, Misi, Budaya, dan Nilai Keberlanjutan
Vision, Mission, Culture, and Sustainability Values
- 38 Skala Usaha
Business Scale
- 38 Informasi Karyawan
Employee Information
- 48 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 52 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure
- 54 Kepemilikan Saham TASPEN
TASPEN Share Ownership
- 56 Daftar Anak Perusahaan dan Asosiasi
List of Subsidiaries and Associate Companies
- 64 Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Head Office and Branch Offices Addresses
- 68 Lokasi Operasional dan Pasar yang Dilayani
Operational Location and Served Markets
- 70 Kegiatan Usaha, Produk, dan Layanan
Business Activities, Products and Services
- 91 Keanggotaan Asosiasi
Membership in Associations
- 92 Perubahan Signifikan
Significant Changes
- 93 Rantai Pasokan
Supply Chain
- 94 KERANGKA DAN STRATEGI PENCAPAIAN**
TUJUAN KEBERLANJUTAN
FRAMEWORK AND STRATEGY FOR ACHIEVING
SUSTAINABILITY GOALS
- 97 Strategi Keberlanjutan Bagian Dari Manajemen Usaha Sehari-Hari
Sustainability Strategy as Part of Day-to-Day Business Management
- 97 Komitmen Kebijakan Keberlanjutan Sesuai Sifat Usaha dan Referensi Praktik Keberlanjutan Terbaik
Commitment to Sustainability Policy in accordance with the Nature of the Business and Best Sustainability Practices References
- 98 Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Contribution to Sustainable Development Goals
- 99 Tujuan Program TJSL TASPEN
TASPEN TJSL Program Objectives
- 99 Prinsip Program TJSL BUMN
SOEs TJSL Program Principles
- 99 Pilar Utama Program TJSL TASPEN
TASPEN TJSL Program Main Pillars
- 102 TATA KELOLA KEBERLANJUTAN**
SUSTAINABILITY GOVERNANCE
- 104 Struktur Tata Kelola
Governance Structure
- 108 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
- 128 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 131 Direksi
Board of Directors

- 136 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 137 Pengungkapan Mengenai Konflik Kepentingan
Disclosure Regarding Conflict of Interest
- 139 Pengembangan Kompetensi Keberlanjutan Dewan Komisaris, Direksi, Dan Pejabat/Unit Kerja Penanggung Jawab Keberlanjutan
Development of Sustainability Competencies for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Officials/Work Unit Responsible for Sustainability
- 139 Program Pengembangan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Development Program
- 140 Program Pengembangan Direksi
Board of Directors Development Program
- 143 Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for Audit Committee
- 143 Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program for Nomination and Remuneration Committee
- 144 Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi
Competency Development Program for Risk Management and Investment Monitoring Committee
- 144 Pendidikan Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Education
- 145 Evaluasi Kinerja Organ Tata Kelola
Performance Evaluation of Governance Organs

204

LEMBAR UMPAN BALIK
FEEDBACK SHEET

206

REFERENSI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NO. 51/POJK.03/2017
REFERENCE TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK) NO. 51/ POJK.03/2017

155

KINERJA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY PERFORMANCE

- 156 Kinerja Ekonomi
Economic Performance
- 160 Kinerja Lingkungan
Environmental Performance
- 163 Tanggung Jawab Sosial terhadap Peserta
Corporate Social Responsibility to Participants
- 167 Tanggung Jawab Sosial Masyarakat
Community Social Responsibility
- 194 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Capital Management
- 202 Tanggung Jawab Sosial terhadap Core Subjek Hak Azasi Manusia
Corporate Social Responsibility to Core Subjects of Human Rights
- 203 Tanggung Jawab Sosial terhadap Core Subjek Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility to Core Subjects of Fair Operations



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE OVERVIEW

KINERJA EKONOMI [B.1] [201-1] Economic Performance [B.1] [201-1]

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Kuantitas Jasa yang dijual	Kegiatan Usaha Business Activity	Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program JKK dan JKM Old-Age Savings Program (THT), Pension Program, JKK and JKM Programs	Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program JKK dan JKM Old-Age Savings Program (THT), Pension Program, JKK and JKM Programs	Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program JKK dan JKM Old-Age Savings Program (THT), Pension Program, JKK and JKM Programs	Quantity of Services Sold
Pendapatan	Miliar Rp Billion Rp	22.131,25	41.255,89	20.434,38	Income
Laba Tahun Berjalan	Miliar Rp Billion Rp	804,77	113,85	377,61	Profit for the year
Produk Ramah Lingkungan		-	-	-	Environmentally Friendly Products
Jumlah Pemasok Barang (Pemasok berdomisili di Indonesia)	Perusahaan Company	164	68	235	Number of Goods Suppliers (Suppliers domiciled in Indonesia)
Jumlah Pemasok Jasa (Pemasok berdomisili di Indonesia)	Perusahaan Company	251	163	234	Number of Service Suppliers (Suppliers domiciled in Indonesia)

KINERJA LINGKUNGAN [B.2] [302-1] Environmental Performance [B.2] [302-1]

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Listrik	Juta Rp Million Rp	14.065,30	14.410,46	12.052,17	Electricity
Air	Juta Rp Million Rp	897,78	942,63	788,37	Water
BBM	Juta Rp Million Rp	3.096,03	3.019,02	2.458,62	Fuel Oil
	Liter Liter	231.913	212.607	267.230	
Kertas	Juta Rp Million Rp	143,74	114,131	116,545	Paper
	Rim Ream	2.428	2.117	2.380	
Bina Lingkungan	Juta Rp Million Rp	6.464	6.874	8.178	Community Development

KINERJA SOSIAL [B.3][GRI 203-1][GRI 203-2]
Social Performance [B.3][GRI 203-1][GRI 203-2]

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Bantuan Korban Bencana Alam	Jutaan Rp Million Rp	-	-	735,47	Natural Disaster Victim Assistance
Bantuan Pendidikan/ Pelatihan	Jutaan Rp Million Rp	-	-	1.807,70	Education/Training Assistance
Bantuan Peningkatan Kesehatan	Jutaan Rp Million Rp	-	-	1.149,91	Health Improvement Assistance
Bantuan pengembangan prasarana/sarana umum	Jutaan Rp Million Rp	-	-	1.807,70	Assistance for Public Infrastructure/ Facilities Development
Bantuan Sarana Ibadah	Jutaan Rp Million Rp	-	-	665,45	Assistance for Worship Facilities
Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Jutaan Rp Million Rp	-	-	2.637,01	Social Community Assistance
Pilar Sosial	Jutaan Rp Million Rp	9.674,32	5.696,48	-	Social Pillar
Pilar Ekonomi	Jutaan Rp Million Rp	26.421,32	63.285,20	-	Economic Pillar
Pilar Lingkungan	Jutaan Rp Million Rp	3.681,47	4.932,22	-	Environmental Pillar
Pilar Hukum Dan Tata Kelola	Jutaan Rp Million Rp	-	-	-	Legal and Governance Pillar



SAMBUTAN DIREKSI [2-22, A.1, D.1] MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS [2-22, A.1, D.1]

RONY HANITYO APRIANTO
Plt. Direktur Utama
Acting CEO



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Melalui Laporan Keberlanjutan ini, atas nama Direksi, perkenankan saya melaporkan upaya dan inisiatif PT TASPEN (Persero) dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian ekonomi, dan kontribusi terhadap lingkungan serta kehidupan sosial dengan menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan sehingga dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kebijakan Merespon Tantangan

Di tengah perubahan global yang cepat, TASPEN telah menempatkan keberlanjutan sebagai pijakan strategis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab, melainkan juga peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami.

Adapun kebijakan kami dalam merespon tantangan keberlanjutan, kami telah mengadopsi pendekatan yang progresif dan holistik. Kami mengakui perlunya adaptasi terhadap perubahan iklim, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami telah memperkuat upaya kami dalam mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan praktik kerja yang adil dan aman, serta meningkatkan keterlibatan dengan komunitas di sekitar operasi kami.

Dalam menghadapi tantangan ini, kami telah mengembangkan berbagai strategi inovatif. Mulai dari investasi dalam teknologi ramah lingkungan, hingga pelatihan karyawan dalam praktik-praktik berkelanjutan, kami terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya keberlanjutan kami.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Through this Sustainability Report, on behalf of the Board of Directors, allow me to report on PT TASPEN (Persero)'s efforts and initiatives in balancing economic achievements with contributions to the environment and social life by implementing best corporate governance practices to support the attainment of Sustainable Development Goals (SDGs).

Policy in Responding to Challenges

Amidst rapid global changes, TASPEN has placed sustainability as a strategic cornerstone supporting sustainable growth. We believe that sustainability is not only a responsibility but also an opportunity to create long-term value for all our stakeholders.

Regarding our policy in responding to sustainability challenges, we have adopted a progressive and holistic approach. We acknowledge the need for adaptation to climate change, environmental protection, and community welfare as inseparable parts of responsible business growth. Therefore, we have strengthened our efforts to reduce environmental impacts, promote fair and safe work practices, and enhance engagement with communities around our operations.

In facing these challenges, we have developed various innovative strategies. From investing in environmentally friendly technologies to training employees in sustainable practices, we continually seek ways to improve the efficiency and effectiveness of our sustainability efforts.

Strategi Keberlanjutan

TASPEN berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif pencapaian tujuan pembangunan nasional berskala global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program TJSJ yang dilakukan oleh TASPEN juga senantiasa memperhatikan 4 (empat) pilar TPB yang selaras dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, kami telah menetapkan landasan yang kuat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Kami percaya bahwa keberlanjutan tidak hanya mengenai aspek lingkungan, tetapi juga mencakup aspek-aspek kualitas hidup yang tinggi, kesehatan, kemakmuran, dan keadilan sosial.

Kami memandang keberlanjutan sebagai upaya integral untuk memelihara kapasitas bumi sehingga dapat mendukung kehidupan dalam segala keanekaragaman hayati. Perseroan juga melakukan pembinaan kepada UMKM dan beberapa kegiatan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) lainnya sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Komitmen Perseroan adalah membangun lingkungan yang bersahaja dengan masyarakat dan alam yang ada, sehingga Perseroan akan mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan, kami mengintegrasikan nilai-nilai Perseroan sebagai panduan utama. Fokus kami pada peserta memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil selalu memperhatikan kebutuhan dan kepuasan mereka. Kami berkomitmen untuk mencapai prestasi terbaik dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek operasional kami.

Inisiatif dan Pencapaian Keberlanjutan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan serangkaian inisiatif dan pencapaian yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Perseroan melalui pendapatan di tahun 2023 mencapai Rp22.131,25 miliar.

Perseroan memiliki program TJSJ yang sejalan dengan program prioritas unggulan untuk mendukung pencapaian TPB dan program yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Shared Value* (CSV) bagi Perusahaan yaitu Bedah rumah ASN, Rumah sehat ASN/ Pensiunan, Program LANSIA Sehat TASPEN (LANTAS), dan Ambulance Instansi Pemerintah.

Salah satu program di bidang lingkungan adalah penanaman pohon bekerjasama dengan Pemerintah Daerah meliputi Denpasar, Bekasi, Semarang, Cirebon, Kupang, Tanjung Pinang dan Pontianak. TASPEN tidak melakukan investasi di industri *coal, oil, gas*, dan *mining*.

Sustainability Strategy

TASPEN is fully committed to supporting initiatives aimed at achieving national development goals on a global scale as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs). The TJSJ/CSR program conducted by TASPEN also consistently considers the 4 (four) pillars of SDGs aligned with the Company's business sectors. As part of our sustainability strategy, we have established a strong foundation for creating broader sustainable development. We believe that sustainability encompasses not only environmental aspects but also high quality of life, health, prosperity, and social justice.

We view sustainability as an integral effort to preserve the Earth's capacity to support life in all its biodiversity. The Company also provides support to MSMEs and various other Community Development activities as an effort to make a positive contribution to the surrounding community. The Company's commitment is to build a harmonious environment with the existing community and nature, enabling sustainable growth. In conducting sustainable business activities, we integrate the Company's values as our primary guide. Our focus on participants ensures that every step we take always considers their needs and satisfaction. We are committed to achieving the best performance and upholding integrity in every aspect of our operations.

Sustainability Initiatives and Achievements in 2023

In 2023, the Company recorded a series of significant initiatives and achievements in supporting sustainable development. The total economic value generated by the Company through income in 2023 reached Rp22,131.25 billion.

The Company has a TJSJ program aligned with priority programs to support the SDGs and programs supporting core business and Creating Shared Value (CSV) for the Company, namely ASN house renovations, ASN/ Pensioner Healthy Houses, TASPEN Health Elderly Program (LANTAS), and Government Agency Ambulances.

One of the environmental programs is tree planting in collaboration with Regional Governments including Denpasar, Bekasi, Semarang, Cirebon, Kupang, Tanjung Pinang, and Pontianak. TASPEN does not invest in coal, oil, gas, and mining industries.



Dengan pencapaian-pencapaian ini, kami menegaskan komitmen kami untuk terus menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami berharap bahwa melalui upaya-upaya ini, kami dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Strategi Pencapaian Target Keberlanjutan

Dalam mencapai target keberlanjutan Perseroan, kami telah merumuskan serangkaian strategi yang komprehensif dan terarah. Strategi ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Kami telah memastikan bahwa nilai-nilai keberlanjutan menjadi bagian integral dari setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil dalam menjalankan bisnis kami. Mulai dari perencanaan strategis hingga operasional harian, kami memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi pertimbangan utama.

Kami secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan kami. Dengan demikian, kami dapat mengidentifikasi area-area di mana kami dapat melakukan perbaikan dan terus meningkatkan dampak positif kami.

Apresiasi

Tentunya seluruh pencapaian Perseroan tidak dapat diraih tanpa dukungan, kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu atas nama Direksi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terdalam kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk para regulator, pemerintah, karyawan, pemasok, konsumen, dan para pemangku kepentingan lainnya dan berharap sinergi ini dapat terus terjaga dan terbina dengan baik kedepannya. Perseroan senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

With these achievements, we reaffirm our commitment to continue being an agent of sustainable change and providing positive impacts on the surrounding community and environment. We hope that through these efforts, we can continue to make meaningful contributions to sustainable development in Indonesia.

Strategy for Achieving Sustainability Targets

To achieve the Company's sustainability targets, we have formulated a comprehensive and targeted set of strategies. These strategies not only cover environmental aspects but also consider social and economic dimensions to create sustainable and comprehensive impacts.

We have ensured that sustainability values are an integral part of every decision and action we take in running our business. From strategic planning to daily operations, we ensure that sustainability principles are the primary considerations.

We regularly monitor and evaluate our sustainability performance. Thus, we can identify areas where we can make improvements and continually enhance our positive impacts.

Appreciation

Certainly, all of the Company's achievements cannot be attained without the support, hard work, dedication, and trust of all stakeholders. Therefore, on behalf of the Board of Directors, I extend my deepest gratitude and appreciation to all stakeholders, including regulators, government, employees, suppliers, consumers, and other stakeholders, and I hope that this synergy can continue to be maintained and nurtured well in the future. The Company always strives to provide its best performance for a better and sustainable future.

Atas Nama Direksi,
On Behalf of the Board of Directors,



RONY HANITYO APRIANTO
Plt. Direktur Utama
Acting CEO

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2023

AWARDS AND CERTIFICATIONS 2023

TABEL PENGHARGAAN 2023
Table of Awards 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN Award Name	PENYELENGGARA Organizer	TANGGAL PENYERAHAN Awarding Date	LINGKUP PENGHARGAAN Award Scope	KEHADIRAN PEJABAT/TOKOH NASIONAL/ TOKOH INTERNASIONAL Attendance of officials/ National Figures/ International Figures
1.	Indonesia <i>Digital Innovation Award</i> 2023 kategori <i>Top Configuration, Product offering, and Experience Innovation</i> Indonesia Digital Innovation Award 2023 in the category of Top Configuration, Product offering, and Experience Innovation	Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023 & Indonesia's Home-Grown Consumer Brands Award 2023 by The Economics	22/02/2023	Nasional National	BUMN SOEs
2.	Juara 3 Kategori <i>Best Social Media Ranger</i> 3rd Place in the Best Social Media Ranger Category	BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) by Kementerian BUMN BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) by the Ministry of SOEs	09/03/2023	Nasional National	BUMN SOEs
3.	Indonesia <i>Best CEO</i> 2023 " <i>Employee's Choice</i> "	Indonesia Best CEO Awards 2023 (Employee's Choice) 4 th Anniversary by The Economics	06/04/2023	Nasional National	BUMN SOEs
4.	<i>TOP CSR Awards</i> 2023 #Star 4 TOP CSR Awards 2023 #Star 4	Majalah Top Business Top Business Magazine	07/06/2023	Nasional National	BUMN SOEs
5.	<i>TOP Leader on CSR Commitment</i> 2023 TOP Leader on CSR Commitment 2023	Majalah Top Business Top Business Magazine	07/06/2023	Nasional National	BUMN SOEs
6.	<i>The Best Learning Organization</i> 2023 The Best Learning Organization 2023	Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 by First Indonesia Magazine	05/07/2023	Nasional National	BUMN SOEs
7.	<i>The Best Organization Structure</i> The Best Organization Structure	Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 by First Indonesia Magazine	05/07/2023	Nasional National	BUMN SOEs
8.	<i>The Best in Workforce Flexibility & Mobility</i> The Best in Workforce Flexibility & Mobility	Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 by First Indonesia Magazine	05/07/2023	Nasional National	BUMN SOEs
9.	<i>The Best CEO Focus on HC</i> atas nama Direktur Utama PT TASPEN, A. N. S. Kosasih The Best CEO Focus on HC on behalf of A. N. S. Kosasih, CEO of PT TASPEN	Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2023 by First Indonesia Magazine	05/07/2023	Nasional National	BUMN SOEs
10.	Piagam Penghargaan Kepada PT TASPEN (Persero) Atas Dukungannya dalam Kegiatan Pembekalan Purna Bakti Pegawai Serta sebagai Mitra Kerja dalam Pengelolaan Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Certificate of Appreciation to PT TASPEN (Persero) for its support in the Employee Retirement Training Program and as a working partner in managing the Civil Servant Pension Savings within the Ministry of Justice and Human Rights	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia The Ministry of Justice and Human Rights	18/8/2023	Nasional National	BUMN SOEs

NO	NAMA PENGHARGAAN Award Name	PENYELENGGARA Organizer	TANGGAL PENYERAHAN Awarding Date	LINGKUP PENGHARGAAN Award Scope	KEHADIRAN PEJABAT/TOKOH NASIONAL/ TOKOH INTERNASIONAL Attendance of officials/ National Figures/ International Figures
11.	Piagam Penghargaan Diberikan kepada Tabungan & Asuransi Pegawai Negeri Dalam Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas Certificate of Appreciation given to the Civil Servant Savings & Insurance in providing Disability-Friendly Public Information Services	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Central Information Commission of the Republic of Indonesia	14/9/2023	Nasional National	BUMN SOEs
12.	Bintang CSR Indonesia dan Sertifikat Review Indonesia 2023 CSR Indonesia Star and Indonesia Review 2023 Certificate	Indonesia CSR Summit 2023 by La Tofi School of Social Responsibility	25/10/2023	Nasional National	BUMN SOEs
13.	<i>Best Digital Technology and IoT Implementation 2023</i> Best Digital Technology and IOT Implementation 2023	The 3 rd Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023 by Majalah Business in Asia The 3rd Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023 by Business Magazine in Asia	09/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
14.	<i>Best Chief Technology officer (CTO) a.n. Ovita Susiana Rosya</i> Direktur SDM & Teknologi Informasi TASPEN Best Chief Technology officer (CTO) on behalf of Ovita Susiana Rosya, TASPEN's HC & Information Technology Director	The 3 rd Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023 by Majalah Business in Asia The 3rd Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023 by Business Magazine in Asia	09/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
15.	Penghargaan Kategori Bidang Ekonomi sebagai Perusahaan Pengelolaan Dana Pensiun Terpercaya di Indonesia Hingga di Level Internasional An Award in the Economic field category as the Most Trusted Pension Fund Management Company in Indonesia, even on an International Level	Gatra Awards 2023	17/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
16.	TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 untuk Program TOOS (TASPEN <i>One Hour Online Service</i>) TOP 45 Public Service Innovation 2023 for the TOOS (TASPEN One Hour Online Service) Program	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 by Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Public Services Innovation Competition (KIPP) 2023 by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB)	21/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
17.	Penghargaan <i>Best Brand Image</i> Best Brand Image Award	Best 50 Financial Institution Awards 2023 by The Economics	27/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
18.	Penghargaan <i>Best Customer Service Reputation Award</i> Best Customer Service Reputation Award	Best 50 Financial Institution Awards 2023 by The Economics	27/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
19.	<i>The Best Human Capital Team of The Year 2023</i> The Best Human Capital Team of The Year 2023	Human Capital & Performance Award 2023 by Indonesia Business News	29/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
20.	<i>The Best Human Capital Technology Strategy 2023</i> The Best Human Capital Technology Strategy 2023	Human Capital & Performance Award 2023 by Indonesia Business News	29/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs
21.	<i>The Best HC Women Director of The Year a.n. Ovita Susiana Rosya</i> Direktur SDM & TI <i>The Best HC Women Director of The Year on behalf of Ovita Susiana Rosya, HC & IT Director</i>	Human Capital & Performance Award 2023 by Indonesia Business News	29/11/2023	Nasional National	BUMN SOEs

NO	NAMA PENGHARGAAN Award Name	PENYELENGGARA Organizer	TANGGAL PENYERAHAN Awarding Date	LINGKUP PENGHARGAAN Award Scope	KEHADIRAN PEJABAT/TOKOH NASIONAL/ TOKOH INTERNASIONAL Attendance of officials/ National Figures/ International Figures
22.	TOP Digital Impementation 2023 # Level Stars 4 TOP Digital Impementation 2023 # Level Stars 4	TOP Digital Awards 2023 by Majalah IT Works TOP Digital Awards 2023 by IT Works Magazine	4/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
23.	TOP CIO on Digital Implementation 2023 TOP CIO on Digital Implementation 2023	TOP Digital Awards 2023 by Majalah IT Works TOP Digital Awards 2023 by IT Works Magazine	4/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
24.	Gold Winner pada kategori Elevating Human Lives – Brand Evolution in the Industry 5.0 Era Award: Impact of Innovation Towards Elevating Human Lives Gold Winner in Elevating Human Lives category – Brand Evolution in the Industry 5.0 Era Award: Impact of Innovation Towards Elevating Human Lives	BUMN Branding & Marketing Award 2023 by Majalah BUMN Track BUMN Branding & Marketing Award 2023 by BUMN Track Magazine	13/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
25.	Financial Inspiration SME Branding Award Financial Inspiration SME Branding Award	BUMN Branding & Marketing Award 2023 by Majalah BUMN Track BUMN Branding & Marketing Award 2023 by BUMN Track Magazine	13/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
26.	Best Corporate Secretary in Pension Funds Best Corporate Secretary in Pension Funds	Top GCG & Corporate Secretary Award 2023 by The Economics.	15/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
27.	Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Informative Public Body at the Public Information Disclosure Award for State-Owned Enterprises (SOEs) Category	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 by Komisi Informasi Pusat Public Information Disclosure Award 2023 by Indonesian Central Information Commission	19/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs
28.	Penghargaan Perusahaan Tepercaya Indonesia Most Trusted Companies	Penghargaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia by Institut Tata Kelola Perusahaan Indonesia (IICG) dan SWA Media Group Indonesia Good Corporate Governance Award organized by IICG and SWA Media Group	20/12/2023	Nasional National	BUMN SOEs

SERTIFIKASI 2023 Certifications 2023



(29 JULI 2023 - 28 JULI 2026)
(July 29, 2023 - July 28, 2026)

BSI Certificate of Registration Anti-Bribery Management System - ISO 37001:2016
BSI Certificate of Registration ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management Systems



(2022 - 2026)
(2022 - 2026)

Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Committee
Sertifikasi Kematangan Teknologi Informasi-ISO 27001:2013
ISO 27001:2013- Information Security Management Systems Certification for Maturity Level



(13 JULI 2021 - 12 JULI 2024)
(July 13, 2021 - July 12, 2024)

BSI Certificate of Registration Quality Management System - ISO 9001:2015
BSI Certificate of Registration ISO 9001:2015 - Quality Management Systems



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN [2-1] ABOUT SUSTAINABILITY REPORT [2-1]



Laporan Keberlanjutan (selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Laporan”) dari PT TASPEN (Persero) untuk tahun pelaporan 2023 ini merupakan edisi keenam. Laporan 2023 dari PT TASPEN (Persero) (selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Perseroan”, “TASPEN”, “Kami”) menggunakan rujukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta *in accordance* Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021.

Melalui Laporan ini, Perseroan memberi gambaran mengenai tantangan dan upaya mengelola keberlanjutan dari aktivitas usaha yang dilakukan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas. Dalam Laporan ini diungkapkan informasi mengenai dampak positif operasional Perseroan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta bagaimana Perseroan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Perseroan juga mengedepankan aspek transparansi dengan mengungkapkan upaya dalam mencegah dampak negatif dari operasional terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dalam upayanya memberikan dampak positif di berbagai aspek, Perseroan juga turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

The Sustainability Report (hereafter referred to as the “Report”) from PT TASPEN (Persero) for the reporting year 2023 marks its sixth edition. The 2023 Report from PT TASPEN (Persero) (hereafter referred to as “the Company,” “TASPEN,” or “We”) adheres to the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 regarding the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institutions, Issuers, and Publicly Listed Companies, and aligns with Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021.

Through this Report, the Company offers an overview of the challenges and efforts in managing sustainability across its business activities to meet stakeholders’ expectations and achieve broader sustainability objectives. The Report details the positive impacts of the Company’s operations on the economy, environment, and society, while emphasizing its commitment to protecting human rights for employees and the surrounding community. Furthermore, the Company underscores transparency by disclosing efforts to mitigate negative impacts on environmental and social aspects resulting from its operations. In its pursuit of making positive contributions across various domains, the Company also contributes to the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs).

CAKUPAN, PERIODE DAN FREKUENSI PELAPORAN [2-2, 2-3]

Laporan ini memuat kegiatan Perseroan yang mencakup kantor pusat dan kantor cabang yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Laporan ini memuat kinerja keberlanjutan Perseroan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang juga disesuaikan dengan periode pelaporan laporan keuangan teraudit. Walaupun demikian, dalam menerapkan prinsip transparansi untuk publik, Perseroan juga memasukkan perubahan-perubahan yang dianggap signifikan setelah periode pelaporan ke dalam Laporan ini. Perseroan menerbitkan Laporan ini secara tahunan berdampingan dengan Laporan Tahunan.

Informasi lebih lanjut terkait Laporan ini silahkan menghubungi:

Kontak Perusahaan Sekretaris Perusahaan PT TASPEN (Persero)

Jl. Letjen. Suprpto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Telp : (62-21) 424 1808
Fax : (62-21) 420 3809
Email : taspen@taspen.co.id
Website : www.taspen.co.id

PENYAJIAN KEMBALI, VERIFIKASI EKSTERNAL, TANGGAPAN LAPORAN SEBELUMNYA [2-4, 2-5]

Tidak terdapat penyajian kembali atas informasi pada laporan sebelumnya, termasuk pada laporan keuangan teraudit. Laporan ini tidak diverifikasi oleh pihak ketiga independen. [G.1] Walaupun demikian, semua data dan informasi internal yang disajikan dalam Laporan ini dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Pada tahun 2023, tidak terdapat tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap isi dari Laporan Keberlanjutan 2022.

Prinsip dan Proses Penetapan Konten Laporan

Sesuai dengan GRI Standards 2021, Penetapan konten laporan ini didasarkan pada prinsip, yakni:

1. Akurasi

Informasi yang disajikan harus akurat dan detail sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.

2. Keseimbangan

Kinerja perusahaan yang disajikan harus memuat aspek positif maupun negatif sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh.

3. Kejelasan

Informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk diakses.

REPORTING SCOPE, PERIOD, AND FREQUENCY [2-2, 2-3]

This report encompasses the Company's activities, including those of its head office and branch offices across various regions of Indonesia. It presents the Company's sustainability performance from January 1, 2023, to December 31, 2023, which coincides with the reporting period of audited financial statements. Nonetheless, in adherence to the transparency principle for the public, the Company has included significant changes occurring after the reporting period in this report. The Company publishes this report annually alongside the Annual Report.

For further information regarding this report, please contact:

Company Contact Corporate Secretary of PT TASPEN (Persero)

Jl. Letjen. Suprpto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Phone : (62-21) 424 1808
Fax : (62-21) 420 3809
Email : taspen@taspen.co.id
Website : www.taspen.co.id

RESTATEMENT, EXTERNAL VERIFICATION, RESPONSE TO PREVIOUS REPORTS [2-4, 2-5]

This report does not contain restated information from previous reports, including the audited financial statements. An independent third party has not verified this report. [G.1] Nevertheless, all internal data and information presented in this report are credible and verifiable. In 2023, stakeholders provided no feedback regarding the contents of the 2022 Sustainability Report.

Principles and Processes of Determining Report Content

In accordance with the GRI Standards 2021, the determination of report content is based on the following principles:

1. Accuracy

The information presented must be accurate and detailed so that stakeholders can use it to assess the Company's performance.

2. Balance

The Company's presented performance must include both positive and negative aspects to be assessed rationally and comprehensively.

3. Clarity

The information presented must be easy to understand and accessible to stakeholders.



4. Daya Banding

Informasi yang disajikan harus konsisten dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai perubahan kinerja yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dapat dengan menyertakan data dan informasi untuk beberapa tahun sebelum periode pelaporan yang digunakan.

5. Lengkap

Perusahaan harus memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan penilaian dampak perusahaan selama periode pelaporan.

6. Konteks Keberlanjutan

Perusahaan harus melaporkan informasi tentang dampaknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

7. Ketepatan Waktu

Laporan harus diterbitkan secara rutin sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan informasi yang tersedia.

8. Keandalan

Laporan harus memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan, yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan.

4. Comparability

The information presented must be consistent and usable by stakeholders to assess changes in the Company's performance over a specific period, potentially including data and information for several years before the reporting period.

5. Completeness

The Company must provide sufficient information to assess its impacts during the reporting period.

6. Sustainability Context

The Company must report information on its impacts within the broader context of sustainable development.

7. Timeliness

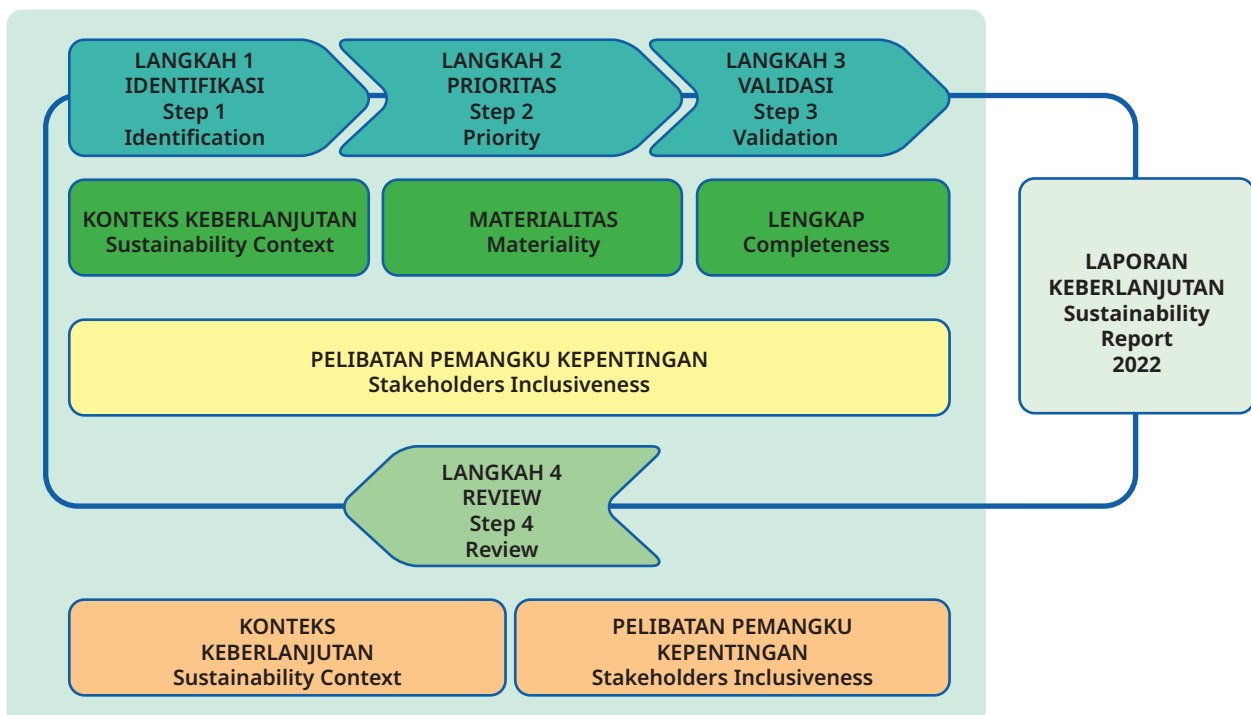
Reports must be regularly published so stakeholders can make timely decisions based on available information.

8. Reliability

Reports must contain and use information and processes used in preparing the report, which can be audited and reflect the quality and materiality of the information presented.

Langkah dalam menetapkan konten laporan dapat digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penetapan Konten Laporan sebagai berikut: [3-1]

The steps in determining report contents can be illustrated in the Flowchart of the Report Content Determination Process as follows: [3-1]



Daftar Topik Material [3-2][3-3]

Dari proses tersebut di atas diperoleh daftar topik material dan *boundary*-nya sebagai berikut:

List of Material Topics [3-2][3-3]

From the above process, the list of material topics and their boundaries are obtained as follows:

TOPIK MATERIAL Material Topic	ALASAN MATERIALITAS Materiality Reason	NOMOR DISCLOSURE Disclosure Number	BOUNDARY	
			DI DALAM PERSEROAN Inside the Company	DI LUAR PERSEROAN Outside the Company
Kinerja dan dampak ekonomi Economic Performance and Impacts	Berpengaruh pada pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya Influence shareholders and other stakeholders	201-1, 201-2, 201-3, 201-4	✓	✓
Praktik Pengadaan Procurement Practices	Berpengaruh pada ekonomi local Influences the local economy	204-1		✓
Energi Energy	Berpengaruh pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, di samping penghematan secara ekonomi bagi TASPEN Influences the sustainability and environmental conservation, in addition to economic savings for TASPEN	302-1, 302-4	✓	✓
Air Water	Berpengaruh pada keberlanjutan dan penghematan secara ekonomi bagi TASPEN Influences the sustainability and economic savings for TASPEN	303-1, 303-2	✓	✓
Kepegawaian Staffing	Berpengaruh pada kenyamanan dan kinerja karyawan Influences the comfort and performance of employees	401-1	✓	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significantly impacts stakeholders	403-1	✓	
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Berpengaruh pada semangat dan kinerja karyawan Influences the spirit and performance of employees	404-2	✓	
Keberagaman dan Kesetaraan Diversity and Equality	Berpengaruh pada kenyamanan dan kinerja karyawan Influences the comfort and performance of employees	405-1, 405-2	✓	✓

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [2-29, E.4]

TASPEN menyadari keberadaan pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan terpengaruh terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, serta mempunyai ekspektasi dan kepentingan yang berbeda-beda di tiap-tiap wilayah operasi. Perusahaan berharap dengan interaksi dan hubungan positif dapat memberikan *mutual benefit* antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menunjang keberhasilan usaha dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, TASPEN menyusun kerangka hubungan dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Perusahaan berupaya mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dan mengelompokkannya ke dalam 7 kelompok pemangku kepentingan, yakni:

STAKEHOLDERS INCLUSIVENESS [2-29, E.4]

TASPEN acknowledges the presence of stakeholders as parties who exert influence on and are influenced by the achievement of the Company's objectives, each having different expectations and interests in every operational region. The Company aims to foster mutual benefits through interaction and positive relationships between the Company and stakeholders, thereby supporting the business's long-term success.

Therefore, TASPEN has devised a framework for establishing and engaging stakeholders in company management activities. The Company endeavors to identify various stakeholders and classify them into 7 stakeholder groups, namely:



1. Pelanggan
2. Karyawan
3. Pemegang Saham
4. Masyarakat
5. Vendor atau Pemasok
6. Pemerintah
7. Media Massa

1. Customers
2. Employees
3. Shareholders
4. Society
5. Vendors or Suppliers
6. Government
7. Mass Media

Dari berbagai kegiatan interaksi dengan para pemangku kepentingan tersebut, TASPEN merealisasikan pola hubungan dan pembinaan dengan masing-masing kelompok kepentingan sesuai dengan topik-topik yang relevan. Pola pembinaan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan, demikian juga frekuensi pembinaan. Pola hubungan dan pembinaan disajikan dalam tabel berikut:

Through various interactions with these stakeholders, TASPEN discerns patterns of relationships and development within each stakeholder group concerning relevant topics. The development patterns are customized to the characteristics of each stakeholder group, and the frequency of interactions. The relationship and development patterns are outlined in the following table:

HUBUNGAN DAN PEMBINAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Relationships and Development with Stakeholders

PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholders	PENDEKATAN Approach		TOPIK Topics	TOPIK Topics
	METODE PELIBATAN Inclusiveness Method	FREKUENSI Frequency		
Pelanggan Customers	Survei Survey	Berkala Periodically	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan perbaikan layanan • Kepuasan dan kualitas pelayanan • Mekanisme perlindungan peserta dengan sistem pengaduan yang mengakomodir kepentingan Pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> • Service improvement feedback • Satisfaction and service quality • Participant protection mechanisms with a complaint system that accommodates customer interests
Karyawan Employees	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Berkala <i>Gathering</i> • Survei • Regular Meeting • Gathering • Survey 	Berkala Periodically	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim kerja yang kondusif untuk mendukung pencapaian target • Kesempatan untuk mengaktualisasikan keahlian, kompetensi, bakat dan minat • Keterangan yang jelas dan kesempatan mengaspirasikan pendapat • Arah dan pengembangan karir yang jelas dan terencana • Kesempatan kerja yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • A conducive working environment to support targets achievement • Opportunities to actualize skills, competencies, talents, and interests • Clear information and opportunities to voice opinions • Clear and planned career direction and development • Equal job opportunities
Pemegang Saham Shareholders	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS • Rapat Kerja • Laporan-laporan • GMS • Working meeting • Reports 	Berkala Periodically	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlangsungan usaha TASPEN • Pertumbuhan kinerja • Penerapan tata kelola perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • TASPEN's business sustainability • Performance growth • Implementation of corporate governance

PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholders	PENDEKATAN Approach		TOPIK Topics	TOPIK Topics
	METODE PELIBATAN Inclusiveness Method	FREKUENSI Frequency		
Masyarakat Community	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Social Responsibility Website Corporate Social Responsibility Website 	Berkala Periodically	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan akan lapangan pekerjaan Memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Memberikan dampak positif pada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> The need for employment opportunities Providing positive impacts on economic growth Providing positive impacts on society
Vendor atau Pemasok Vendors or Suppliers	Website	Sesuai Kebutuhan According to the needs	<ul style="list-style-type: none"> Praktik rantai pasokan yang baik Profesionalisme dalam bekerja Proses pengadaan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Good supply chain practices Professionalism at work Good procurement processes
Pemerintah Government	Pelaporan Kinerja Performance Reporting	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah Terkait Conducted throughout the year in accordance with invitations from the relevant governments	<ul style="list-style-type: none"> Development/ pengembangan usaha/ investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Business/investment development
Media Massa Mass Media	Konferensi Pers/ Siaran Pers/ Keterbukaan Informasi Press Conference/ Press Releases/ Information Disclosure	Sepanjang Tahun Throughout the year	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja usaha/tata kelola/ keterbukaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Business performance/ governance/ information disclosure





**PROFIL
PERUSAHAAN**
Company Profile
[2-1]



IDENTITAS DAN PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN [2-1] COMPANY IDENTITY AND BRIEF PROFILE [2-1]

NAMA PERUSAHAAN

Company Name

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

NAMA PANGGILAN

Nickname

PT TASPEN (Persero)

TANGGAL PENDIRIAN

Date of Establishment

17 April 1963
April 17, 1963

DASAR HUKUM PENDIRIAN

Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (Persero).

Government Regulation No. 15 of 1963 on the Establishment of Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) dated April 17, 1963, Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.749/MK/V/II/1970, Government Regulation No. 25 of 1981 and No. 26 of 1981, the legal entity of PERUM TASPEN was changed into PT TASPEN (Persero).

NAMA PERUSAHAAN SEBELUMNYA

Previous Company Name

- Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN), tanggal 17 April 1963
Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/ State Company of Civil Servants Saving Funds and Insurance (PN TASPEN), established on April 17, 1963
- PERUM TASPEN, tanggal 18 November 1970
PERUM TASPEN (Public Corporation) of TASPEN, established on November 18, 1970
- PT TASPEN (Persero), tanggal 04 Januari 1982
PT TASPEN (Persero), established on January 04, 1982

BIDANG USAHA [2-6]

Line of Business [2-6]

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Social Insurance for Civil Servants (PNS)

BENTUK BADAN HUKUM

Legal Entity Form

Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas
A State-Owned Enterprise (SOE), a Limited Liability Company

KEPEMILIKAN

Ownership

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
100% owned by the Republic of Indonesia

JUMLAH KARYAWAN

Number of Employees

1.406 orang
1,406 persons

KANTOR PUSAT [C.2]

Head Office [C.2]

Jl. Letjen. Suprpto No. 45, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10520, Indonesia

JARINGAN KANTOR [2-6]

Office Network [2-6]

57 Kantor Cabang, 16.800 titik bayar layanan
57 Branch offices (KC), 16,800 Services points of payment

KONTAK

Contact

- Telephone : (021) 424 1808
- Fax : (021) 420 3809
- Website : www.taspen.co.id
- Email : taspen@taspen.co.id
- Call Center : 1 500 919

MEDIA SOSIAL

Social Media

- Twitter : @taspen
- Instagram : @taspen
- Facebook : Taspen
- Youtube : TASPEN

SEJARAH PERUSAHAAN [2-1]

HISTORY OF THE COMPANY [2-1]



PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Persero, secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2081 tentang Asuransi Sosial Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407) dan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), commonly known as PT TASPEN (Persero), is a State-Owned Enterprise (SOE) entrusted by the Government to manage the Social Insurance Program for Civil Servants. This program encompasses the Civil Servants Pension Fund Program and the Old-Age Savings Program, as mandated by Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Social Insurance for Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 37; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3200). This regulation was later amended by Government Regulation Number 20 of 2013, modifying Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Social Insurance for Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 55; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5407), and Government Regulation Number 26 of 1981 concerning the Transformation of the Form of Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri into a State-Owned Company (Persero) (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 38 of 1981). The aim is to improve the welfare of Civil Servants as they approach retirement age.

Efforts to improve the welfare of Civil Servants and their families began as early as 1960, initiated through the Civil Servants Welfare Conference held on July 25-26, 1960, in Jakarta. The outcomes of this conference were



tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan kesejahteraan Pegawai Negeri. Keputusan Menteri Pertama tersebut di atas ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 yaitu tentang Pembelian dan Kesejahteraan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk melaksanakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara, PN TASPEN diubah menjadi PERUM TASPEN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970 tanggal 18 November 1970. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT TASPEN (Persero) Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti Notaris Imas Fatimah, SH Perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tambahan modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp10,00 miliar ditingkatkan menjadi sebesar Rp12,50 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp50,00 miliar. Perubahan ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C.2-14096-HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2207 Tahun 1999.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menambah modal Perseroan yaitu modal dasar sebesar Rp400.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Nomor 06 tanggal 26 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Umaran Mansjur, S.H. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01650.AH.01.02 tanggal 9 Januari 2009 sebagaimana yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 24 Februari 2009, tambahan Nomor 5625/2009. Kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 3 tanggal

documented in the First Minister of the Republic of Indonesia Decree Number 380/MP/1960 dated August 25, 1960, which, among other things, established the necessity of forming welfare assurances for Civil Servants. This First Minister decree was subsequently elevated to Government Regulation Number 9 of 1963, concerning the Expenditure and Welfare of Civil Servants, and Government Regulation Number 10 of 1963, concerning Savings and Insurance for Civil Servants. Government Regulation Number 15 of 1963 was enacted concerning the Establishment of Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) on April 17, 1963, to execute the Savings and Insurance for Civil Servants.

With the enforcement of Law Number 9 of 1969 concerning Forms of State-Owned Enterprises, PN TASPEN was transformed into PERUM TASPEN, as established by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number KEP.749/MK/V/II/1970 dated November 18, 1970. Subsequently, according to Government Regulation Number 26 of 1981, the legal entity of PERUM TASPEN was converted into PT TASPEN (Persero), as outlined in the Articles of Association of PT TASPEN (Persero) Number 3 of 1982 dated January 4, 1982, which underwent several changes, including Notarial Deed by Imas Fatimah, S.H. Number 53 dated March 17, 1988, and was further amended by Deed Number 10 of 1998 dated July 2, 1998, in the presence of Zulkifli Harahap, S.H., replacing Notary Imas Fatimah, SH. The changes in the Articles of Association were made in line with adjustments to Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies, which stipulated an increase in the paid-up capital, originally at Rp10.00 billion, raised to Rp12.50 billion to meet the 25% paid-up capital requirement of the total authorized capital of Rp50.00 billion. This alteration received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree Number C.2-14096-HT.01.04 of 1998, dated September 17, 1998, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2207 of 1999.

Implementing Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, aimed at increasing the Company's capital, resulted in adjustments to its authorized and paid-up capital. The authorized capital was raised to Rp400,000,000,000.00, and the paid-up capital to Rp100,000,000,000.00. These modifications were formally incorporated into the Articles of Association of the Company through Deed Number 06, dated November 26, 2008, executed before Notary Umaran Mansjur, S.H. The amended Articles of Association received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-01650.AH.01.02, dated January 9, 2009, as announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia, Number

9 Oktober 2017 dari Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH. yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0178536 Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 2017, dan diubah kembali dengan Akta Nomor 05 tanggal 07 Juni 2018, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0213433 tahun 2018 pada tanggal 07 Juni 2018. Terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 13 September 2018, dengan menambah modal dasar menjadi Rp2.000.000.000.000,- dan modal ditempatkan sebesar Rp500.000.000.000,- yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019269. AH.01.02. tahun 2018.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) terhitung mulai 1 Juli 2015. Dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk mengatur Program JKK dan JKM bagi Non-PNS dan Non-PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pemerintah menuangkan dalam ketentuan Pasal 99 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, khususnya Pasal 99 ayat (1) dan ayat (3), bahwa Pegawai Non-PNS diberikan perlindungan berupa manfaat JKK dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK, dimana JKK dan JKM bagi PPPK sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi ASN dikelola oleh PTTASPEN (Persero). Kemudian Pasal 99 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa pemberian JKK dan JKM bagi Non-PNS dan Non-PPPK diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.

Seiring perkembangan nilai dasar dan jaminan sosial Aparatur Sipil Negara maka pemerintah menetapkan aturan baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap peraturan pelaksanaannya masih berlaku efektif berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014.

16, dated February 24, 2009, Supplement Number 5625/2009. Further amendments were made through Notarial Deed Number 3, dated October 9, 2017, by Notary Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH. These alterations were accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-AH.01.03-0178536, Year 2017, dated October 9, 2017. Subsequent amendments occurred through Deed Number 05, dated June 7, 2018, which were accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-AH.01.03-0213433, Year 2018, on June 7, 2018. The most recent amendment was made through Deed Number 07, dated September 13, 2018, by increasing the authorized capital to Rp2,000,000,000,000 and the paid-up capital to Rp500,000,000,000. These changes were accepted and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Number AHU-0019269. AH.01.02, Year 2018.

In the context of implementing the provisions outlined in Article 92, paragraph (4), and Article 107 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, the Government issued Government Regulation No. 70 of 2015 on September 16, 2015. This regulation pertains to Work Accident Security and Death Security for State Civil Apparatus employees and is managed by PT TASPEN (Persero). It came into effect on July 1, 2015. Following this, the Government introduced Government Regulation Number 66 of 2017, dated December 29, 2017, which amended Government Regulation Number 70 of 2015. This amendment specifically addresses Work Accident Security (JKK) and Death Security (JKM) for State Civil Apparatus employees. Regarding regulating JKK and JKM programs for non-civil servants and non-PPPK (Government Employees with Work Agreements), Article 99 of Government Regulation No. 49 of 2018, concerning PPPK Management, stipulates in detail. Specifically, Article 99, paragraphs (1) and (3), state that non-civil servant employees are entitled to protection in the form of JKK and JKM benefits, similar to those applicable to PPPK. The management of JKK and JKM for PPPK, as outlined in Article 7 of Government Regulation No. 70 of 2015 concerning JKK and JKM for State Civil Apparatus, is managed by PT TASPEN (Persero). Article 99, paragraph (4) of Government Regulation No. 49 of 2018 mandates that the provision of JKK and JKM for non-civil servants and non-PPPK is to be stipulated by the Minister of PANRB through regulation.

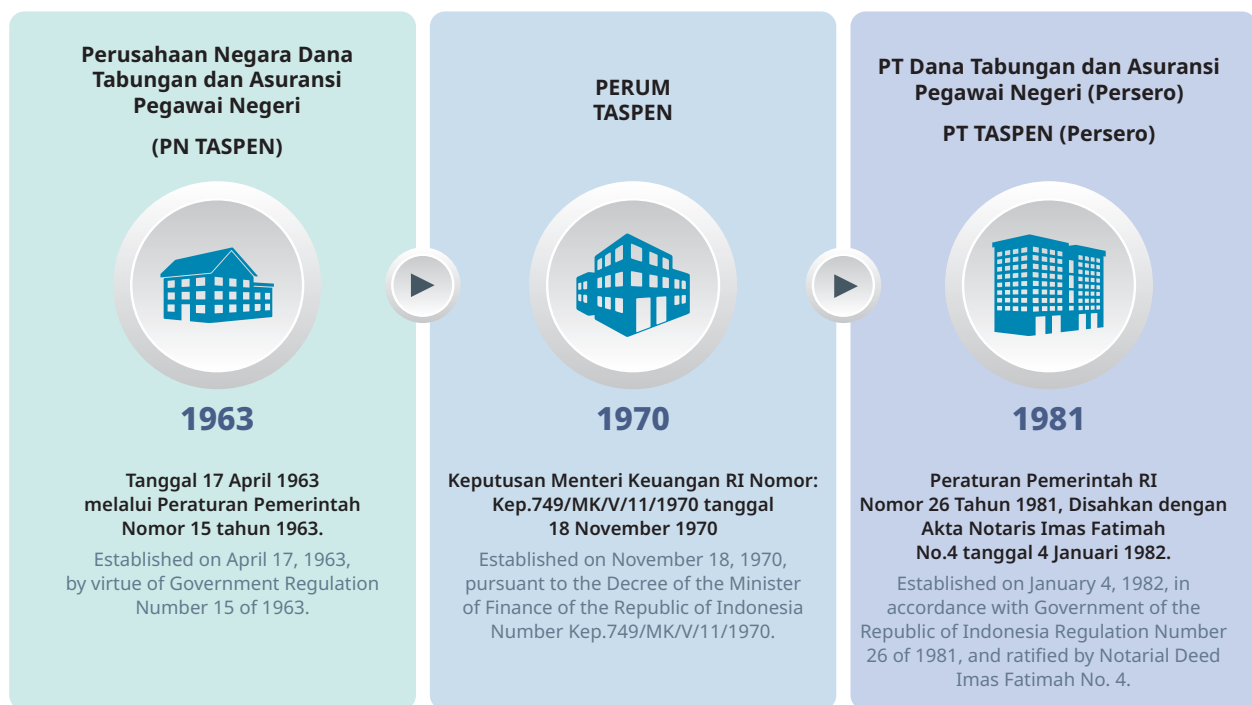
With the development of core values and social security for civil servants, the government has established new regulations concerning civil servants through the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2023. The implementing regulations are still effective based on Law Number 5 of 2014.



STATUS PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN STATUS OF COMPANY NAME CHANGE

Sejak pertama kali berdiri, PT TASPEN (Persero) tidak pernah mengalami perubahan nama. Namun demikian cikal bakal PT TASPEN (Persero) memiliki sejarah yang cukup panjang. Diawali dengan pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) pada tanggal 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan, PN TASPEN dilakukan perubahan menjadi PERUM TASPEN. Peningkatan status menjadi PERUM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep.749/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970. Kemudian Peningkatan status dari PERUM menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah No.4 tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT TASPEN (Persero).

Since its establishment, PT TASPEN (Persero) has never undergone a name change. However, the origins of PT TASPEN (Persero) have a rather extensive history. It commenced with the establishment of Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) on April 17, 1963, through Government Regulation No. 15 of 1963. Subsequently, to enhance its services, PN TASPEN underwent a transformation into PERUM TASPEN. The elevation to PERUM status was based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's Decree Number: Kep.749/MK/IV/11/1970, dated November 18, 1970. Later, there was a further progression from PERUM to a Limited Liability Company (Persero) based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 26 of 1981 concerning the Transformation of the Form of Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri into a Limited Liability Company (Persero). This transformation was ratified by Notarial Deed Imas Fatimah No.4 on January 4, 1982, under the name PT TASPEN (Persero).



JEJAK LANGKAH MILESTONES

Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25 – 26 Juli 1960 dengan hasil yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI No.388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara.

Sebagai realisasi dari konferensi tersebut, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1963 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1963 pada tanggal 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963 didirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat mencapai usia Pensiun.

1960

The Civil Servant Welfare Conference held on July 25-26, 1960, resulted in the issuance of the First Minister of the Republic of Indonesia Decree No. 388/MP/1960 on August 25, 1960. Among other things, this decree stipulates the necessity of establishing social insurance as a provision for Civil Servants and their families upon completing their service to the State.

1963

As a realization of that conference, Government Regulation Number 9 of 1963 and Government Regulation Number 10 of 1963 were established on April 17, 1963, through Government Regulation Number 15 of 1963. This led to the founding of Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) to enhance the welfare of civil servants upon retirement.

1970

Perubahan bentuk PN TASPEN menjadi PERUM TASPEN. Peningkatan status menjadi PERUM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep.749/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970.

The transformation of PN TASPEN into PERUM TASPEN. The elevation to PERUM status was based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: Kep.749/MK/IV/11/1970, dated November 18, 1970.

Peningkatan status dari PERUM menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah No. 4 tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT TASPEN (Persero).

The elevation of status from PERUM to a Limited Liability Company (Persero) based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 26 of 1981 concerning the Transformation of the Form of Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri into a Limited Liability Company (Persero). This was ratified by Notarial Deed Imas Fatimah No. 4 on January 4, 1982, under the name PT TASPEN (Persero).

1981

TASPEN ditunjuk sebagai penyelenggara pembayaran pensiun:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 dengan proyek awal di Bali, NTB, dan NTT.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1/1402/PUOD tanggal 14 November 1987, pembayaran pensiun untuk wilayah Sumatera.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 812/KMK.03/1988 tanggal 27 September 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-755 pada tanggal 23 Agustus 1988, pembayaran pensiun untuk wilayah Jawa dan Madura.
4. Pada 1 April 1990 berdasarkan Keputusan menteri keuangan Nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990, Pembayaran Pensiun PNS secara Nasional sudah dilakukan PT TASPEN (Persero).

TASPEN has been appointed as the pension payment administrator:

1. Based on the Minister of Finance Decree No. 822/KMK.03/1986, dated September 22, 1986, and the Minister of Home Affairs Decree No: 842.1-841, dated October 13, 1986, with the initial project in Bali, NTB, and NTT.
2. Based on the Minister of Finance Decree No. 702/KMK.03/1987, dated October 31, 1987, and the Minister of Home Affairs Decree No: 842.1/1402/PUOD dated November 14, 1987, pension payments for the Sumatera region.
3. Based on the Minister of Finance Decree No. 812/KMK.03/1988, dated September 27, 1988, and the Minister of Home Affairs Decree No: 842.1-755 on August 23, 1988, pension payments for the Java and Madura regions.
4. On April 1, 1990, based on the Minister of Finance Decree No. 79/KMK.03/1990 dated January 22, 1990, and the letter of the Minister of Home Affairs No: 842.1-099 dated February 12, 1990, the National Pension Payment for Civil Servants (PNS) was officially conducted by PT TASPEN (Persero).

1986
1990



Peningkatan modal dasar yang disetor dari semula Rp10 miliar menjadi Rp12,5 miliar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-14096HT.01.04.TH.'98 tanggal 17 September 1998.

The increase in paid-up capital from initially Rp10 billion to Rp12.5 billion as per the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Decree Number: C2-14096HT.01.04.TH.'98 dated September 17, 1998.

1999

2008

Peningkatan modal disetor dari Rp12,5 miliar menjadi Rp100 miliar sesuai Persetujuan Pemegang Saham Nomor KEP-17/ D1.MBU/2008 tanggal 26 November 2008, di hadapan Notaris Umaran Masyur, SH, modal Perseroan ditetapkan sebesar Rp400 miliar terbagi atas 400.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp100 miliar dengan cara:

There was an increase in paid-up capital from Rp12.5 billion to Rp100 billion, according to the shareholders' approval number KEP-17/D1.MBU/2008, dated November 26, 2008, before Notary Umaran Masyur, SH. The Company's authorized capital was then determined to be Rp400 billion, divided into 400,000 shares, each with a nominal value of Rp1 million. From this authorized capital, 25% (twenty-five percent) or a total of 100,000 shares with a nominal value of Rp100 billion have been issued and paid up through:

1. Sebesar Rp12,5 miliar merupakan setoran modal lama sesuai akta yang dibuat Notaris Imas Fatimah, S.H;
2. Sebesar Rp87,5 miliar berasal dari kapitalisasi penggunaan laba Perseroan tahun buku 2005

1. Rp12.5 billion as a contribution from the old capital, as stated in the deed made by Notary Imas Fatimah, S.H;
2. Rp87.5 billion was sourced from capitalizing the Company's profits for the 2005 fiscal year.

1. Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2008 dari Presiden RI sebagai Unit Pelayanan Publik Terbaik yang diwakili oleh KCU DKI, sedangkan 2010 diwakili oleh Kantor Cabang Jambi.

2010
2014

2. Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang "Integritas Sektor Publik di Indonesia" TASPEN dinyatakan sebagai unit pelayanan publik terbaik ke-3 untuk kategori instansi dan ke-4 untuk unit layanan.

1. In 2008, TASPEN received the Citra Pelayanan Prima Trophy from the President of the Republic of Indonesia as the Best Public Service Unit. The award was represented by the DKI Branch office (KCU DKI). In 2010, the representation was undertaken by the Jambi Branch office.

3. Peningkatan sistem dan layanan Pembayaran Pensiun dengan Pelaksanaan Elektronik Dapem (e-Dapem), Elektronik Klaim (e-Klaim), Layanan Online, Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), *Electronic Filing System (EFS)* di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor: SE-22/DIR/2011 Tahun 2011.

2. TASPEN earned an award from the Corruption Eradication Commission (KPK) for 'Integrity in the Public Sector in Indonesia.' It was acknowledged as the 3rd best public service unit in the agency category and the 4th best in the service unit category.

4. Tahun 2013 Prestasi yang membanggakan dicatat oleh TASPEN, sebagai berikut:

- *The Best Technology Innovation in the Financial Service Sector*
- Peringkat ke-3 Indonesia *Insurance Award*
- Peringkat ke-3 Implementasi GCG BUMN Non Tbk
- Peringkat ke-3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik

3. There was an improvement in the Pension Payment system and services through the implementation of Electronic Payment List (e-Dapem), Electronic Claim (e-Klaim), Online Services, utilization of the Electronic Employee Card (KPE), and Electronic Filing System (EFS) at the Branch offices (KCU/KC) of PT TASPEN (Persero). This enhancement was in accordance with the Board of Director's Circular Letter Number SE-22/DIR/2011 of 2011.

4. In 2013, TASPEN achieved notable accomplishments, including:

- The Best Technology Innovation in the Financial Service Sector
- 3rd place in the Indonesia Insurance Award
- 3rd place in the Implementation of GCG (Good Corporate Governance) for Non-Publicly State-Owned Enterprises
- 3rd place in Public Information Disclosure for Public Bodies

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Implementasi layanan klaim 1 jam di seluruh Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi No. PD-14/DIR/2014 tanggal 17 April 2014. 6. Layanan klaim otomatis (<i>auto claim</i>) kepada anggota legislatif yang berakhir masa tugasnya di periode 2009-2014. 7. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pengguna aplikasi SIM Gaji antara TASPEN dengan BKD Pemkot Bandung tanggal 12 Juni 2014. 8. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pada penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lain yang masih berada dalam ruang lingkup tugas PT TASPEN (Persero) melalui penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan, maka TASPEN melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor 119/1477/DUKCAPIL dan Nomor JAN-4/DIR/2014 tentang Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Data Base Kependudukan yang Berbasis Nomor Induk Kependudukan Dalam Layanan PT TASPEN (Persero). 9. Pengalihan Portofolio Program THT Bukan PNS ke TASPEN Life sesuai dengan Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: S-850/ MK.06/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Persetujuan Prinsip Pengalihan Portofolio Pertanggungjawaban Program THT Bukan PNS. 10. Pembentukan <i>Desk Change Management office</i> sebagai akselerator perubahan di Perseroan. 11. Perubahan nilai-nilai TASPEN yang semula adalah Tumbuh, Etika, Profesional, Akuntabel dan Integritas menjadi Integritas, Profesional, Inovatif, Kompetitif dan Tumbuh. 12. Pembentukan Komite Investasi untuk mengakselerasi pencapaian sasaran investasi serta memberikan masukan kepada Direksi dalam menentukan keputusan investasi strategis TASPEN. 13. Penyertaan langsung pada Bank Mantap hasil <i>joint venture</i> antara TASPEN, Bank Mandiri dan Pos Indonesia. 14. Perluasan dan peningkatan layanan proaktif kepada peserta menggunakan Mobil Layanan TASPEN (Mobtas) dan kantor Pemda yang disebut dengan <i>Service Point</i> berdasarkan Peraturan Direksi perihal Mobil Layanan TASPEN Nomor: PD-13/DIR/2014. Layanan proaktif ini juga dapat didapatkan melalui Titik Layanan Pembayaran Pensiun seluruh Mitra Bayar berdasarkan Peraturan Direksi perihal Mitra Layanan TASPEN (<i>office Channeling</i>) Nomor: PD-19/DIR/2014 tahun 2014. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Implementation of the 1-hour claim service across all Branch offices (KCU/KC) based on the Board of Directors Regulation No. PD-14/DIR/2014 dated April 17, 2014. 6. Automatic claim service (<i>auto claim</i>) for legislative members whose terms ended from 2009 to 2014. 7. A Cooperation Agreement was signed between TASPEN and the Regional Personnel Agency (BKD) of the City Government of Bandung for using the SIM Gaji application on June 12, 2014. 8. To enhance efficiency in implementing Old-Age Savings Program (including death insurance), Pension Fund (including Death Grief), civil servant welfare programs, and other social insurance programs still under the scope of PT TASPEN (Persero) duties through the use of the Electronic Identity Card (e-KTP) and Population Data based on the Population Identification Number, TASPEN signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Home Affairs No. 119/1477/DUKCAPIL and No. JAN-4/DIR/2014 regarding the Utilization of the Electronic Identity Card and Population Database based on the Population Identification Number in the Services of PT TASPEN (Persero). 9. Transfer the Non-Civil Servant THT Program Portfolio to TASPEN Life as per the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-850/MK.06/2014, dated December 17, 2014, concerning the Approval for the Transfer Principle of the Non-Civil Servant THT Program Portfolio. 10. Establishment of the Change Management office Desk as an accelerator of change within the Company. 11. Change in TASPEN's core values, transforming from Grow, Ethical, Professional, Accountable, and Integrity to Integrity, Professional, Innovative, Competitive, and Growth. 12. Formation of the Investment Committee to accelerate the achievement of investment targets and provide input to the Board of Directors in determining strategic investment decisions for TASPEN. 13. Direct participation in Bank Mantap resulting from the joint venture between TASPEN, Bank Mandiri, and Pos Indonesia. 14. Expansion and improvement of proactive services to participants using the TASPEN Service Cars (Mobtas) and Regional Government offices referred to as Service Points based on the Board of Directors' Regulation regarding TASPEN Service Cars No. PD-13/DIR/2014. This proactive service is also available through Pension Payment Service Points across all Payment Partners based on the Board of Directors' Regulation regarding TASPEN Service Partners (<i>office Channeling</i>) No. PD-19/DIR/2014 of 2014. |
|--|--|



2015

1. Peningkatan layanan kepada peserta melalui pembukaan Kantor Cabang Tarakan di Provinsi Kalimantan utara dan Kantor Cabang Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. TASPEN memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Pelayanan Klaim Maksimal Satu Jam dengan Dukungan Data yang Akurat untuk Produk Tabungan Hari Tua dan Pensiun.
3. Sebagai salah satu program internalisasi budaya TASPEN, diselenggarakan TASPEN *Best Frontliner Award* yang diikuti oleh *customer service*, kasir dan satuan pengamanan Kantor Cabang utama dan Kantor Cabang seluruh Indonesia.
4. Layanan Klaim Otomatis kepada Kepala Daerah yang telah selesai masa jabatan.
5. Implementasi Layanan Digital menggunakan Aplikasi TASPEN *Mobile* yang dapat diakses melalui Play Store dan App Store pada tahun 2015 berdasarkan PD-46/DIR/2015 - Aplikasi TASPEN *Mobile*.
6. Pada tanggal 16 September 2015, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, TASPEN diberikan amanat oleh pemerintah untuk mengelola Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN & Pejabat Negara.
7. Direktur Utama TASPEN, Iqbal Latanro, menerima Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Legiun Veteran RI.
8. TASPEN meraih Peringkat ke-3 pada *Annual Report Award 2014* dan Peringkat Pertama pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2015.

2016
2018

1. Perluasan jaringan Layanan TASPEN dengan pembukaan Kantor Cabang Jakarta Selatan, Kantor Cabang Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lhokseumawe di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 2. Kerjasama Integrasi Data Aplikasi SIMGAJI & SIMDA Keuangan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 3. Peningkatan kepemilikan saham pada PT Bank Mandiri Taspem Pos dari 20% menjadi 40% atas persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
 4. Perluasan jaringan Layanan TASPEN dengan pembukaan Kantor Cabang Lubuklinggau di Sumatera Selatan, Kantor Cabang Kepulauan Nias yang bertempat di Gunungsitoli Sumatera Utara.
 5. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 22 November 2018.
 6. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI PER-44/PB/2018 tentang pembaruan sistem otentikasi yang semula 1, 2, dan 6 bulan sekali menjadi 1, 2, dan 3 bulan sekali, maka disusunlah Otentikasi Berkala 1, 2, dan 3 sebagai mekanisme validasi identitas Penerima Pensiun/Tunjangan agar dibayarkan kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian.
1. The TASPEN service network was expanded with the opening of the South Jakarta Branch office, Ende Branch office in East Nusa Tenggara Province, and Lhokseumawe in Nanggroe Aceh Darussalam Province.
 2. Collaboration on the Integration of SIMGAJI & SIMDA Finance Application Data with the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).
 3. Increased ownership of shares in PT Bank Mandiri Taspem Pos from 20% to 40%, with the approval of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.
 4. The TASPEN service network was expanded with the opening of the Lubuklinggau Branch office in South Sumatera and the Nias Islands Branch office in Gunungsitoli, North Sumatera.
 5. Government Regulation Number 49 of 2018 was issued regarding the Management of Government Employees with Work Agreements on November 22, 2018.
 6. Based on the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Regulation PER-44/PB/2018 on Update of the Authentication System, changing the frequency from every 1, 2, and 6 months to every 1, 2, and 3 months. Thus, Periodic Authentication 1, 2, and 3 were formulated as a mechanism to validate the identity of Pension/ Allowance Recipients to be paid to those entitled according to applicable regulations based on the principle of caution.

2019
2020

1. Pada tanggal 16 September 2019, TASPEN melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *Government Employee Pension Service* (GEPS) Korea di Kantor Pusat TASPEN.
2. Perluasan layanan dengan membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik bekerjasama dengan KemenPAN RB dan Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) tentang Penyelenggaraan Layanan TASPEN Pada Mal Pelayanan Publik: MPP, Pemerintah Daerah Nomor: PD-27/DIR/2019 mulai tahun 2019.
3. Sistem pelayanan pembayaran pensiun berbasis teknologi Informasi yang disebut Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun yang terdiri dari Otentikasi by *phone*, *New e-Dapem*, dan TASPEN *Smartcard*.
4. Pembentukan TASPEN *Corporate University* (Corpu).
5. TASPEN menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, dengan perjanjian nomor: JAN-175/DIR/2020 tentang Pelaksanaan Penggunaan Bersama Jasa Konsultan terkait Aksi Korporasi atas Penyertaan Modal di PT Waskita Toll Road.
6. TASPEN mengimplementasikan Program inovatif guna mempersiapkan peserta dalam memiliki keterampilan untuk berwirausaha pada Usia Pensiun yang bernama WIRAUSAHA PINTAR (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan) pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) tentang Penyelenggaraan Program Wirausaha Pintar Nomor: PD-54/DIR/2020.
7. Pengembangan Inovasi TASPEN PESONA (Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan dengan Pelayanan Bebas Corona) untuk meningkatkan layanan kepada peserta dengan lebih cepat, tepat, aman dan mudah bagi ASN dan Pensiunan yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Peserta tanpa harus keluar rumah sebagai langkah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dengan mengganti interaksi tatap muka melalui digitalisasi.

2021

1. Refleksi 1 Tahun Implementasi Nilai AKHLAK BUMN PT TASPEN (Persero) Raih 3 Penghargaan dalam AKHLAK Award 2021.
2. PT TASPEN (Persero) bekerjasama dengan PT Mitsubishi Estate Co., salah satu perusahaan pengembang terbesar di dunia, dan PT Benhil Property untuk mengembangkan superblok Oasis Central Sudirman yang berkonsep *one-stop-service property* di atas lahan milik TASPEN Group di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
3. Implementasi TOOS sebagai *one stop solution* menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan meminimalisir waktu penyelesaian seluruh kebutuhan peserta yang memungkinkan seluruh peserta untuk mendapatkan layanan terbaik tanpa perlu datang secara fisik ke Kantor Layanan TASPEN



Tahun 2022 inovasi berupa pengembangan TOOS ke arah kerjasama dengan mitra kerja sehingga mempermudah peserta dalam melakukan klaim dan mengakses Layanan TASPEN dengan lebih dekat kepada peserta.

In 2022, an innovation involved the development of TOOS towards collaborations with working partners, making it easier for participants to make claims and access TASPEN services closer to them.

2022

2023

1. TASPEN berkomitmen meningkatkan peran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengembangkan potensi UMKM dan potensi kearifan lokal melalui Program Kampung Andalan TASPEN. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, TASPEN membangun Kampung Andalan TASPEN (Kampung ATAS) di Desa Melati Wangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Kampung ATAS, UMKM binaan TASPEN dapat memasarkan produknya dan para lansia dapat berolahraga menggunakan fasilitas yang disediakan khusus untuk lansia.
 2. Pembangunan *Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman*. *Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman* merupakan bagian kerjasama strategis antara Indonesia dan Jepang di bidang investasi dan properti yang akan mampu menciptakan keseimbangan kondisi geopolitik Indonesia. Pembangunan ini merupakan optimalisasi lahan TASPEN yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat. Pengembangannya dilakukan oleh Mitsubishi Estate, Co. Ltd sebagai pengembang *property* terbesar di Jepang yang juga merupakan salah satu pengembang properti terbesar di dunia.
 3. PT TASPEN (Persero) mampu membuktikan diri sebagai badan pengelola dana pensiun dan asuransi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpercaya di tingkat internasional dengan terpilih sebagai *Chairman of Asian Civil Service Pension Association (ACSPA)* dan tuan rumah *Asian Civil Service Pension Forum (ACSPF)* yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus – 1 September 2023, sebagai bagian dari rangkaian ASEAN Summit di Jakarta.
1. TASPEN is committed to enhancing the role of retired Civil Servants (ASN) in developing the potential of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and local wisdom through the TASPEN Reliable Village Program. TASPEN has established the TASPEN Reliable Village Program (Kampung ATAS) in Melati Wangi Village, Cilengkrang District, Bandung Regency, West Java, to realize this commitment. In Kampung ATAS, MSMEs fostered by TASPEN can market their products, and the elderly can engage in sports using facilities specifically provided for the elderly.
 2. The development of the *Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman*. The *Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman* is part of a strategic cooperation between Indonesia and Japan in investment and property that will balance Indonesia's geopolitical conditions. This development optimizes TASPEN's land located at Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Central Jakarta. The development is carried out by Mitsubishi Estate, Co. Ltd, the largest property developer in Japan and one of the world's largest property developers.
 3. PT TASPEN (Persero) has proven itself as a trustworthy pension fund and insurance manager for Civil Servants (ASN) at the international level by being selected as the Chairman of the Asian Civil Service Pension Association (ACSPA) and hosting the Asian Civil Service Pension Forum (ACSPF) held on August 31 - September 1, 2023, as part of the ASEAN Summit in Jakarta.

Rekap penghargaan TASPEN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diadakan secara tahunan oleh KEMENPAN RB.

Recapitulation of awards received by TASPEN in the annual Public Service Innovation Competition organized by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB)

PENGHARGAAN TASPEN INOVASI LAYANAN PUBLIK
TASPEN Awards on Public Innovation Awards

2023

TOOS

- **TASPEN One-Hour Online Service**
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023
- **Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023

TOOS

- **TASPEN One-Hour Online Service**
TOP 45 Public Service Innovation 2023
- **Informative Public Body in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards 2023

2022

TASPEN PESONA

- **Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan Dengan Pelayanan Bebas Corona**
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022
- **Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022

TASPEN PESONA

- **Responsive, Reliable, Saving Retirees with Corona-Free Services**
TOP 45 Public Service Innovation 2022
- **Informative Public Body in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards (KIP) 2022

2021

WIRAUSAHA PINTAR

- **Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara & Pensiunan Untuk Kesejahteraan**
TOP & Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021
- **Badan Publik Menuju Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021

WIRAUSAHA PINTAR

- **Entrepreneurship of Civil Servants & Retirees for Welfare**
TOP & Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021
- **Public Body Towards Informativeness in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards (KIP) 2021

2020

SAHABAT LATANRO

- **Sejahtera Berkat Layanan PT TASPEN (Persero)**
TOP & Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020
- **Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020

SAHABAT LATANRO

- **Prosperous Due to PT TASPEN (Persero) Services**
TOP & Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020
- **Informative Public Body in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards (KIP) 2020

2019

WIRAUSAHA PINTAR

- **Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara & Pensiunan Untuk Kesejahteraan**
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
- **Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019

WIRAUSAHA PINTAR

- **Entrepreneurship of Civil Servants & Retirees for Welfare**
TOP 45 Public Service Innovation 2019
- **Informative Public Body in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards (KIP) 2019

2018

Badan Publik Menuju Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2018

Public Body Towards Informativeness in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category

Public Information Disclosure Awards (KIP) 2018

2017

SAHABAT LATANRO

- **Sejahtera Berkat Layanan PT TASPEN (Persero)**
TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
- **Badan Publik Informatif Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2017

SAHABAT LATANRO

- **Prosperous Due to PT TASPEN (Persero) Services**
TOP 40 Public Service Innovation 2017
- **Informative Public Body in the State-Owned Enterprises (SOEs) Category**
Public Information Disclosure Awards (KIP) 2017



VISI DAN MISI [C.1] VISION AND MISSION [C.1]

PERNYATAAN PENINJAUAN VISI, DAN MISI

Visi dan misi Perseroan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja untuk memastikan keberlanjutan relevansinya. Visi, Misi dan Nilai-nilai PT TASPEN (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor PD-50/DIR/2020 dan KEP-22/DK-TASPEN/122020 tentang Visi, Misi, dan Nilai-nilai PT TASPEN (Persero).

STATEMENT OF VISION AND MISSION REVIEW

The Company's vision and mission undergo periodic reviews by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Heads of Work Units to ensure ongoing relevance. The vision, mission, and values of PT TASPEN (Persero) are established based on Joint Regulation Number PD-50/DIR/2020 and KEP-22/DK-TASPEN/122020 issued by the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) regarding the Vision, Mission, and Values of PT TASPEN (Persero).

"Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang **Unggul, Terpercaya** dan **Berkelanjutan** demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia."

"Becoming an **Excellent, Trusted, and Sustainable** Social Insurance and Pension Fund company, aiming to realize the well-being of participants and enhance Indonesia's economic and social value."



MISI
Mission



"Memastikan terwujudnya Layanan **Terbaik** dan Investasi yang **Andal** serta **Kepemimpinan Inovasi Bisnis** dan **Transformasi Digital** dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.**"

"Ensuring the realization of the **Best Services** and **Reliable Investments**, as well as **Leadership in Business Innovation** and **Digital Transformation**, supported by **Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative Human Capital.**"

BUDAYA PERUSAHAAN CORPORATE CULTURE

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Target Perusahaan. Dalam melaksanakan proses pengembangan mencapai visi Perusahaan "Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya dan Berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia." PT TASPEN (Persero) memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PD-50/DIR/2020 dan KEP-22/DK-TASPEN/122020 tentang Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT TASPEN (Persero).

STATEMENT ON CORPORATE CULTURE

The corporate culture plays a crucial role in managing the Company's human capital to realize its Vision, Mission, and Targets. Pursuing the Company's vision of "Becoming an Excellent, Trusted, and Sustainable Social Insurance and Pension Fund company, aiming to realize the well-being of participants and enhance Indonesia's economic and social value." PT TASPEN (Persero) adheres to core values as the Company's commitment to realizing its vision and mission based on global standards and implementing Good Corporate Governance. This adherence is in accordance with Circular Letter Number: SE-7/MBU/07/2020 regarding the Core Values of State-Owned Enterprises' Human Capital and the Joint Regulation of the Board of Directors and the Board of Commissioners PD-50/DIR/2020 and KEP-22/DK-TASPEN/122020 regarding the Vision, Mission, and Values of PT TASPEN (Persero).

AKHLAK

AMANAH KOMPETEN HARMONIS LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

AMANAH Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Holding steadfast to the trust given.	
KOMPETEN Competent	Terus belajar mengembangkan Kompetensi. Continuously learning and developing competencies.	
HARMONIS Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Caring for each other and valuing differences.	
LOYAL Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.	
ADAPTIF Adaptive	Terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Continuously innovate and be enthusiastic in driving and facing changes.	
KOLABORATIF Collaborative	Membangun kerjasama yang sinergis. Building synergistic cooperation.	



SKALA USAHA [C.3] [2-1-C]
Business Scale [C.3] [2-1-C]

RINGKASAN SKALA USAHA	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Summary of Business Scale
a. Informasi Keuangan					Financial Information
Pendapatan	Miliar Rp Billion Rp	22.131,25	41.255,89	20.434,38	Income
Laba Tahun Berjalan	Miliar Rp Billion Rp	804,77	113,85	377,61	Profit for the year
Aset	Miliar Rp Billion Rp	376.985,97	345.669,64	306.731,50	Assets
Liabilitas	Miliar Rp Billion Rp	364.360,93	334.660,09	294.151,02	Liabilities
Ekuitas	Miliar Rp Billion Rp	12.625,04	11.009,55	12.580,48	Equity
b. Jumlah Karyawan	Orang Person	1.406	1.556	1.657	Number of employees
c. Kepemilikan Saham					Shareholding
100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia	%	100%	100%	100%	100% owned by the Republic of Indonesia
d. Wilayah Operasional					Operational Areas
Kantor Cabang Utama		-	6	6	Branch Offices (KCU)
Kantor Cabang		57	51	51	Branch Offices (KC)
Titik Bayar Layanan		16.800	18.481	19.039	Service Point of Payment

INFORMASI KARYAWAN [2-7] [2-8]

TASPEN menjunjung tinggi keberagaman dan tidak membedakan gender, ras, agama, suku dan golongan, dalam seluruh tingkatan dan jajaran karyawan serta manajemen baik dalam penerimaan karyawan maupun sistem remunerasi dan jabatan. TASPEN memberikan kesempatan terbuka baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. TASPEN berkomitmen dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, kesempatan untuk mengembangkan potensi, dan meningkatkan karir. Pada tahun 2023, jumlah pegawai TASPEN sebanyak 1.406 orang yang terdiri dari 762 pegawai laki-laki dan 644 pegawai perempuan.

EMPLOYEE INFORMATION [2-7] [2-8]

TASPEN upholds diversity and does not discriminate based on gender, race, religion, ethnicity, or social status at all levels of employees and management, both in the recruitment of employees and in the remuneration and position systems. TASPEN provides equal opportunities for both male and female employees. TASPEN is committed to creating a conducive work environment and opportunities for personal potential development and career advancement. In 2023, the number of TASPEN employees was 1,406, consisting of 762 male employees and 644 female employees.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Employees Based on Employment Status

NO	URAIAN	31 Desember 2023 December 31, 2023			Description
		PRIA/Male	WANITA/Female	JUMLAH/Total	
1	Dipekerjakan	1	0	1	Hired
2	Diperbantukan	7	2	9	Seconded
3	MPP	1	0	1	Pre-Retirement Period (MPP)
4	Pegawai Kontrak	4	1	5	Contract Employee
5	Pegawai Prohire	7	7	14	Prohire Employee
6	Pegawai Tetap	738	633	1371	Permanent Employee
7	PGS	4	1	5	Acting Officials
	Jumlah	762	644	1406	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Employees for Each Employment Status

STATUS KEPEGAWAIAN	2021			2022			Employment Status
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Calon Karyawan							Prospective Employee
CPP	15	4	19	6	5	11	CPP
Dipekerjakan	3	-	3	1	0	1	Hired
Karyawan <i>Staff</i>	2	2	4	5	0	5	Staff Employee
Pejabat	361	196	557	344	203	547	Official
Perbantukan	8	-	8	6	2	8	Seconded
<i>Prohire</i>	13	3	16	13	11	24	Prohire
<i>Staff</i>	423	353	776	488	421	909	Staff
Kontrak	159	115	274	12	38	50	Contract
CDTP		-	-	0	1	1	CDTP
Jumlah	984	673	1.657	875	681	1.556	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING LEVEL PENDIDIKAN
Number of Employees for Each Education Level

LEVEL PENDIDIKAN	2021			2022			2023			Education Level
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
S3	-	-	-	1	0	1	1	0	1	Doctoral Degree
S2	51	31	82	80	59	139	71	56	127	Master's Degree
S1	577	384	961	537	426	963	466	408	874	Bachelor's Degree
D3	112	135	247	79	110	189	75	104	179	Diploma 3
<D3	244	123	367	178	86	264	149	76	225	< Diploma 3
Jumlah	984	673	1.657	876	680	1.556	762	644	1.406	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING STATUS JABATAN
Number of Employees for Each Position Status

STATUS JABATAN	2021			2022			2023			Position Status
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Fungsional	73	68	141	83	76	159	108	91	199	Functional
Staff	588	473	1.061	502	463	965	439	431	870	Staff
Struktural	323	132	455	290	142	432	215	122	337	Structural
Jumlah	984	673	1.657	876	680	1.556	762	644	1.406	Total



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI
Number of Employees Based on Organizational Level

NO	URAIAN	31 Desember 2023 December 31, 2023			Description
		PRIA/Male	WANITA/Female	JUMLAH/Total	
1	Branch Manager Kelas 1	3	0	3	Branch Manager Class 1
2	Branch Manager Kelas 2	3	0	3	Branch Manager Class 2
3	Branch Manager Kelas 3	7	6	13	Branch Manager Class 3
4	Branch Manager Kelas 4	17	4	21	Branch Manager Class 4
5	Branch Manager Kelas 5	14	3	17	Branch Manager Class 5
6	Fungsional 13	56	47	103	Functional 13
7	Fungsional 14	12	14	26	Functional 14
8	Fungsional 15	8	13	21	Functional 15
9	Fungsional 16	13	6	19	Functional 16
10	Fungsional 17	5	3	8	Functional 17
11	Fungsional 18	2	1	3	Functional 18
12	Karyawan Staf KP	0	0	0	Head Office Staff Employee
13	Manager	23	30	53	Manager
14	Prohire KP	1	0	1	Prohire Head Office
15	Section Head	74	38	112	Section Head
16	Sector Head	42	27	69	Sector Head
17	Senior Manager	21	9	30	Senior Manager
18	Staff Direksi	11	3	14	Directorate Staff
19	Staff KC	339	335	674	Branch Office Staff
20	Staff KP	100	100	200	Head Office Staff
21	SVP	10	4	14	SVP (Senior Vice President)
22	VP	1	1	2	VP (Vice President)
	Jumlah	762	640	1406	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING LEVEL ORGANISASI
Number of Employees for Each Organizational Levels

LEVEL ORGANISASI	2022			Organizational Levels
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
<i>Branch Manager</i>	44	9	53	Branch Manager
<i>Departement Head</i>	25	7	32	Departement Head
<i>VP</i>	2	2	4	VP (Vice President)
<i>SVP</i>	10	5	15	SVP (Senior Vice President)
<i>Fungsional</i>	69	67	136	Functional
<i>Section Head</i>	91	56	147	Section Head
<i>Sector Head</i>	59	19	78	Sector Head
<i>Staff</i>	503	469	972	Staff
<i>Staff Direksi</i>	10	2	12	Board of Directors Staff
<i>Karyawan Staff</i>	2	0	2	Staff Employees
<i>Sub Departement Head</i>	25	27	52	Sub Departement Head
<i>Unit Head</i>	2	0	2	Unit Head
<i>Prohire KP</i>	1	-	1	Prohire KP
Jumlah	843	663	1.556	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING UNIT KERJA PADA KANTOR PUSAT
Number of Employees for Each Work Unit at Head Office

LEVEL JABATAN	2021			2022			2023			Position Level
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Desk Anggaran dan Analisis Kinerja	10	3	13	9	6	15	8	5	13	Budgeting and Performance Analysis Desk
<i>Desk Change Management Office</i>			0	-	-	-	0	0	0	Change Management Office Desk
<i>Desk Corporate University</i>	8	5	13	7	4	11	10	6	16	Corporate University Desk
Divisi Aktuaria	8	10	18	8	7	15	7	9	16	Actuary Division
Divisi Akuntansi	14	9	23	11	10	21	14	8	22	Accounting Division
Divisi Analisis Investasi	10	10	20	11	9	20	11	11	22	Investment Analysis Division
Divisi Bisnis Strategis dan Investasi Langsung	10	6	16	9	5	14	11	7	18	Strategic Business and Direct Investment Division
<i>Divisi Enterprise Management System</i>	5	7	12	8	9	17	2	4	6	Enterprise Management System Division



LEVEL JABATAN	2021			2022			2023			Position Level
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Divisi Hukum	10	7	17	9	13	17	5	12	17	Legal Division
Divisi Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang	16	8	24	17	10	27	14	11	25	Capital and Money Market Investment Division
Divisi Kepatuhan	7	6	13	5	7	12	9	6	15	Compliance Division
Divisi Kepesertaan	12	4	16	11	5	16	6	6	12	Membership Division
Divisi Layanan dan Pemasaran	8	9	17	5	11	16	11	24	35	Services and Marketing Division
Desk Manajemen Risiko	5	4	9	4	7	11	21	17	38	Risk Management Desk
Divisi Pengadaan dan Pemeliharaan	16	8	24	15	5	20	14	6	20	Procurement and Maintenance Division
Divisi Perbendaharaan	16	15	31	18	15	33	17	15	32	Treasury Division
Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis	13	12	25	10	10	20	12	12	24	Strategic Planning and Business Development Division
Divisi Sumber Daya Manusia	8	12	20	10	11	21	9	18	27	Human Capital Division
Divisi Teknologi Informasi	32	6	38	31	15	46	36	14	50	Information Technology Division
Satuan Pengawasan Internal	27	17	44	13	11	24	14	11	25	Internal Audit Unit
Sekretariat Perusahaan	19	14	33	16	19	35	19	20	39	Corporate Secretary
Unit Investasi Syariah	2	2	4	2	4	6	1	3	4	Sharia Investment Unit
Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	4	3	7	4	3	7	3	4	7	Social and Environmental Responsibility Unit
Direktorat Perencanaan & Aktuaria							1	0	1	
Direktorat Utama							8	2	10	
Jumlah	248	169	417	234	196	430	237	213	494	Total

JUMLAH PEGAWAI DI KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
Number of Employees at Branch Offices (KCU)/Branch Offices (KC)

KANTOR CABANG	2021			2022			2023			Branch Office
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Kantor Cabang Jakarta I	24	21	45	19	26	45	9	17	26	Jakarta Branch Office I
Kantor Cabang Bandar Lampung	15	6	21	14	8	22	13	8	21	Bandar Lampung Branch Office
Kantor Cabang Bengkulu	7	8	15	5	8	13	4	7	11	Bengkulu Branch Office
Kantor Cabang Palembang	16	13	29	11	13	24	7	12	19	Palembang Branch Office
Kantor Cabang Palangkaraya	11	4	15	9	5	14	6	4	10	Palangkaraya Branch Office
Kantor Cabang Pontianak	8	10	18	9	8	17	9	5	14	Pontianak Branch Office
Kantor Cabang Pangkal Pinang	9	3	12	7	2	9	8	1	9	Pangkal Pinang Branch Office
Kantor Cabang Serang	11	7	18	11	6	17	7	6	13	Serang Branch Office
Kantor Cabang Tangerang	8	8	16	6	10	16	6	6	12	Tangerang Branch Office
Kantor Cabang Banjarmasin	13	7	20	12	5	17	11	3	14	Banjarmasin Branch Office
Kantor Cabang Samarinda	11	5	16	10	4	14	10	2	12	Samarinda Branch Office
Kantor Cabang Jakarta Selatan	9	8	17	0	0	0	5	6	11	Jakarta Selatan Branch Office
Kantor Cabang Tarakan	10	0	10	9	0	9	9	0	9	Tarakan Branch Office
Kantor Cabang Lubuk Linggau	11	2	13	11	2	13	10	1	11	Lubuk Linggau Branch Office
Kantor Cabang Medan	20	20	40	18	21	39	13	16	29	Medan Branch Office
Kantor Cabang Banda Aceh	14	14	28	12	14	26	10	13	23	Banda Aceh Branch Office
Kantor Cabang Pematang Siantar	13	7	20	14	10	24	9	9	18	Pematang Siantar Branch Office



KANTOR CABANG	2021			2022			2023			Branch Office
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Kantor Cabang Bukittinggi	9	7	16	0	0	0	6	3	9	Bukittinggi Branch Office
Kantor Cabang Padang	9	10	19	13	15	28	7	11	18	Padang Branch Office
Kantor Cabang Pekanbaru	11	7	18	13	8	21	9	8	17	Pekanbaru Branch Office
Kantor Cabang Jambi	9	7	16	11	7	18	10	5	15	Jambi Branch Office
Kantor Cabang Tanjung Pinang	10	1	11	13	0	13	12	0	12	Tanjung Pinang Branch Office
Kantor Cabang Lhokseumawe	11	3	14	13	3	16	11	3	14	Lhokseumawe Branch Office
Kantor Cabang Kepulauan Nias	8	1	9	10	0	10	9	0	9	Kepulauan Nias Branch Office
Kantor Cabang Bandung	24	16	40	21	19	40	12	17	29	Bandung Branch Office
Kantor Cabang Bogor	12	16	28	14	21	35	11	10	21	Bogor Branch Office
Kantor Cabang Tasikmalaya	23	2	25	17	3	20	11	3	14	Tasikmalaya Branch Office
Kantor Cabang Cirebon	15	6	21	15	6	21	11	7	18	Cirebon Branch Office
Kantor Cabang Depok	7	7	14	0	0	0	1	8	9	Depok Branch Office
Kantor Cabang Bekasi	6	11	17	6	13	19	2	13	15	Bekasi Branch Office
Kantor Cabang Semarang	29	11	40	19	23	42	15	18	33	Semarang Branch Office
Kantor Cabang Purwokerto	21	9	30	14	16	30	9	12	21	Purwokerto Branch Office
Kantor Cabang Surakarta	20	10	30	18	13	31	14	9	23	Solo Branch Office
Kantor Cabang Yogyakarta	15	14	29	17	13	30	8	13	21	Yogyakarta Branch Office
Kantor Cabang Pekalongan	9	10	19	9	11	20	7	8	15	Pekalongan Branch Office
Kantor Cabang Surabaya	27	18	45	19	19	38	14	13	27	Surabaya Branch Office

KANTOR CABANG	2021			2022			2023			Branch Office
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Kantor Cabang Malang	15	13	28	14	15	29	9	13	22	Malang Branch Office
Kantor Cabang Madiun	11	8	19	11	7	18	10	5	15	Madiun Branch Office
Kantor Cabang Kediri	20	2	22	13	4	17	8	6	14	Kediri Branch Office
Kantor Cabang Denpasar	13	8	21	12	8	20	13	5	18	Denpasar Branch Office
Kantor Cabang Jember	11	5	16	12	6	18	8	7	15	Jember Branch Office
Kantor Cabang Kupang	14	6	20	11	6	17	8	7	15	Kupang Branch Office
Kantor Cabang Mataram	11	4	15	13	6	19	11	4	15	Mataram Branch Office
Kantor Cabang Ende	5	5	10	7	6	13	6	5	11	Ende Branch Office
Kantor Cabang Pamekasan	6	6	12	5	8	13	4	7	11	Pamekasan Branch Office
Kantor Cabang Makassar	18	20	38	17	21	38	12	14	26	Makassar Branch Office
Kantor Cabang Manado	11	7	18	13	6	19	10	8	18	Manado Branch Office
Kantor Cabang Palu	9	7	16	8	9	17	7	8	15	Palu Branch Office
Kantor Cabang Kendari	9	8	17	10	9	19	7	9	16	Kendari Branch Office
Kantor Cabang Ambon	8	7	15	9	9	18	6	8	14	Ambon Branch Office
Kantor Cabang Jayapura	10	8	18	10	7	17	10	6	16	Jayapura Branch Office
Kantor Cabang Gorontalo	8	4	12	8	4	12	8	4	12	Gorontalo Branch Office
Kantor Cabang Ternate	8	3	11	8	2	10	9	2	11	Ternate Branch Office
Kantor Cabang Mamuju	7	4	11	8	4	12	7	4	11	Mamuju Branch Office
Kantor Cabang Manokwari	9	5	14	10	5	15	8	5	13	Manokwari Branch Office



KANTOR CABANG	2021			2022			2023			Branch Office
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Kantor Cabang Palopo	7	5	12	7	5	12	4	5	9	Palopo Branch Office
Kantor Cabang Bone	5	5	10	9	4	13	9	4	13	Bone Branch Office
Jumlah	708	428	1.136	634	483	1.117	499	413	912	Total

JUMLAH PEGAWAI UNTUK MASING-MASING LEVEL JABATAN
Number of Employees for Each Position Level

LEVEL JABATAN	2022			2023			Position Level
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Golongan 9-12	503	467	970	438	433	871	Grade 9-12
Golongan 13-14	203	134	337	169	118	287	Grade 13-14
Golongan 15-16	92	56	148	93	66	159	Grade 15-16
Golongan 17-18	50	17	67	40	22	62	Grade 17-18
Golongan 19	10	2	12	9	1	10	Grade 19
Golongan 20-21	18	4	22	13	4	17	Grade 20-21
Jumlah	876	680	1.556	762	644	1.406	Total

JUMLAH PEGAWAI DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN
Number of Seconded/Employed Employees

UNIT KERJA DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN	2021			2022			2023			Seconded/ Employed Work Unit
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
Taspen Properti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Taspen Properti
Taspen Life	3	0	3	3	2	5	4	2	6	Taspen Life
DP Taspen	4	0	4	3	0	3	3	0	3	DP Taspen/ Taspen Pension Fund
Bank Mantap	3	0	3	1	0	1	1	0	1	Bank Mantap
TSP Abadi Sentosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TSP Abadi Sentosa
PT RSP	1	0	1	0	0	0	0	0	0	PT RSP
Lainnya	2	1	3	0	0	0	0	0	0	Others
Jumlah	13	1	14	7	2	9	8	2	10	Total

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN USIA
Number of Employees By Age

USIA	2021			2022			2023			Age
	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	PRIA Male	WANITA Female	JUMLAH Total	
<30 Tahun	478	425	903	402	401	803	335	309	644	<30 years old
30-45 Tahun	133	132	265	198	222	420	287	283	570	30-45 years old
> 45 Tahun	373	116	489	81	252	333	140	52	192	>45 years old
Jumlah	984	673	1.657	681	875	1.556	762	644	1.406	Total

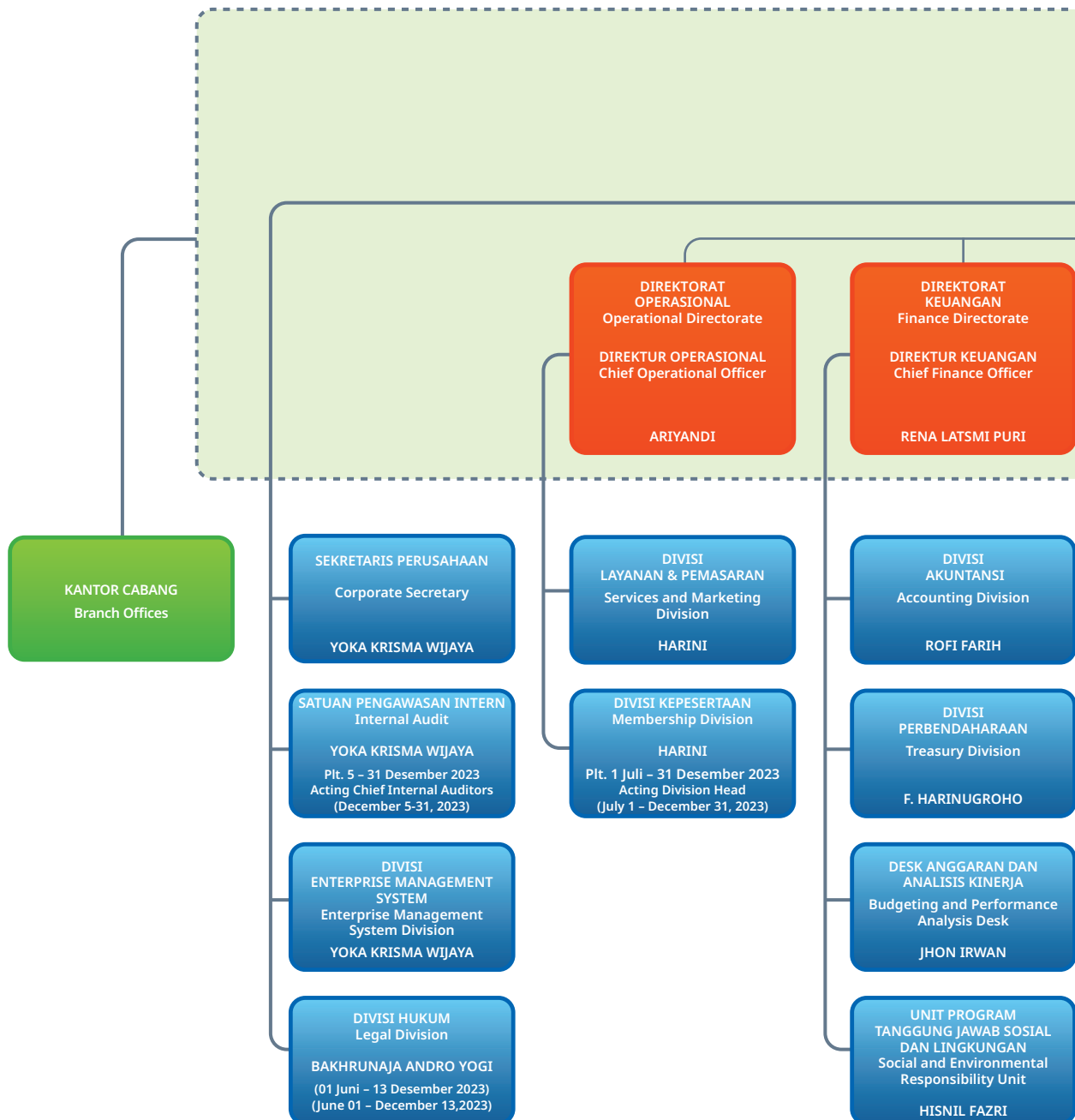


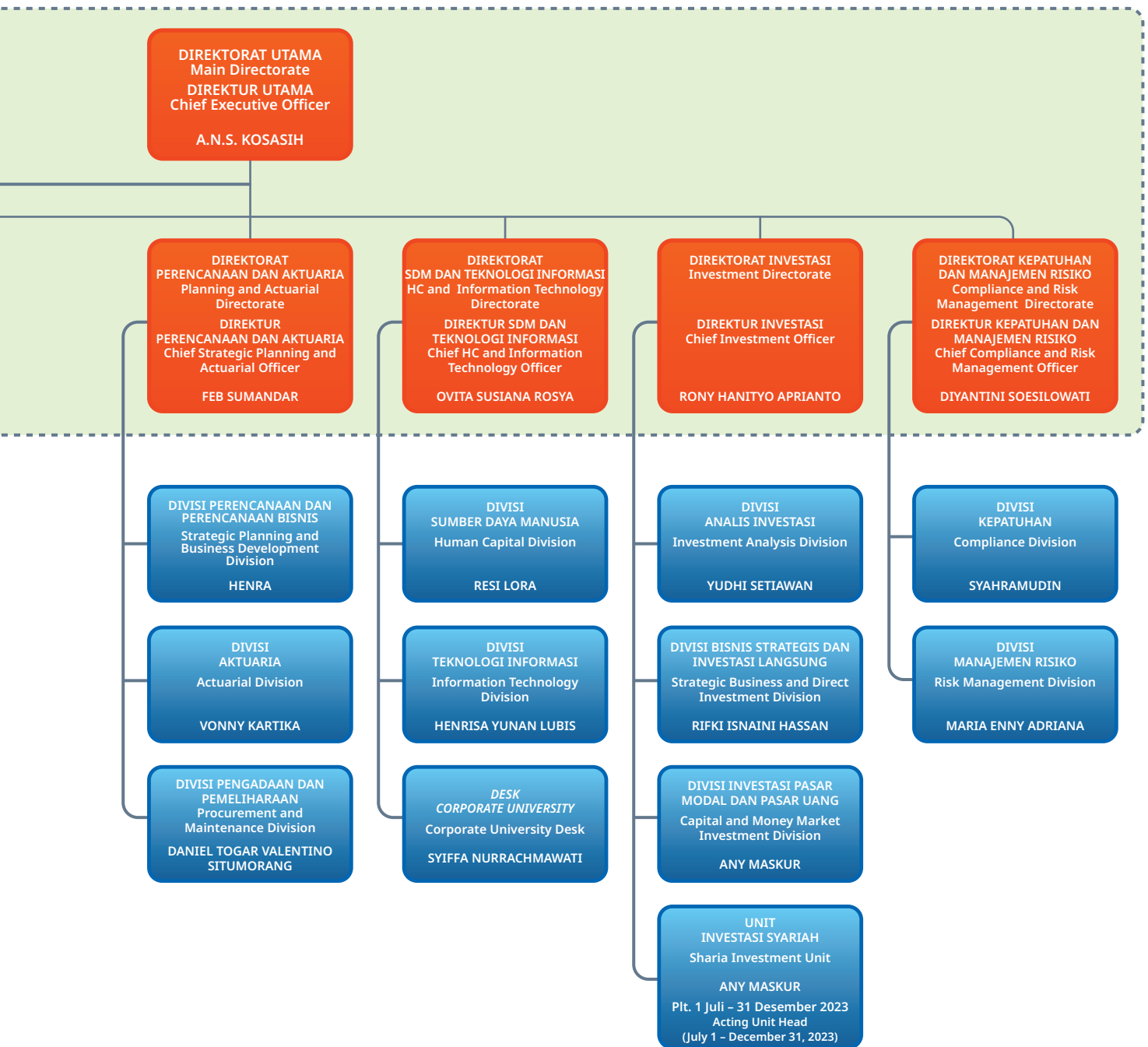


STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Organisasi PT TASPEN (Persero) berdasarkan PD-8/DIR/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor PD-25/DIR/2021 Tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

The organization of PT TASPEN (Persero), as outlined in PD- 8/DIR/2023 dated May 15, 2023, which pertains to the Second Amendment to the Board of Directors Regulation Number PD-25/DIR/2021 regarding the Organizational Structure of PT TASPEN (Persero), is as follows:

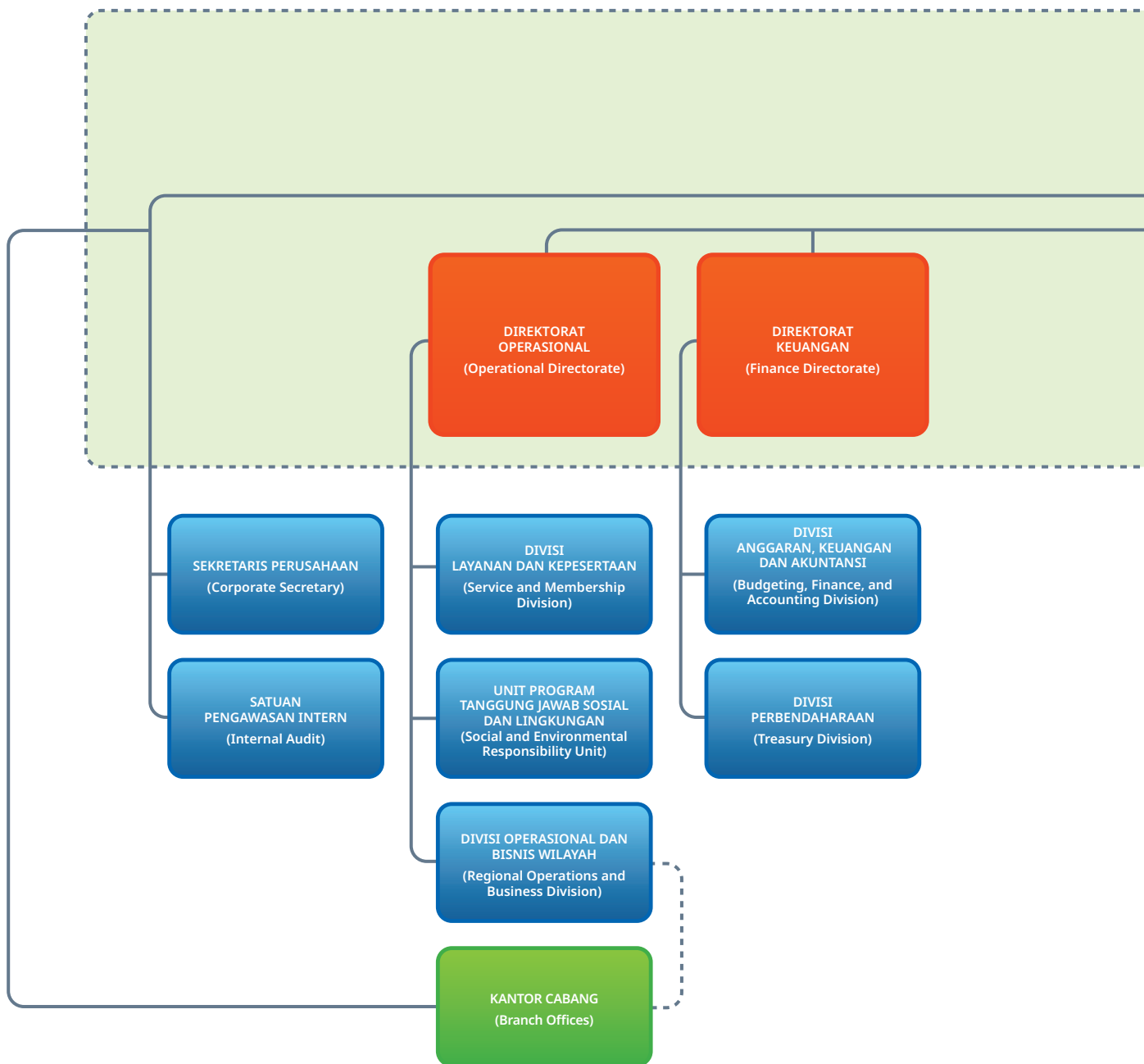


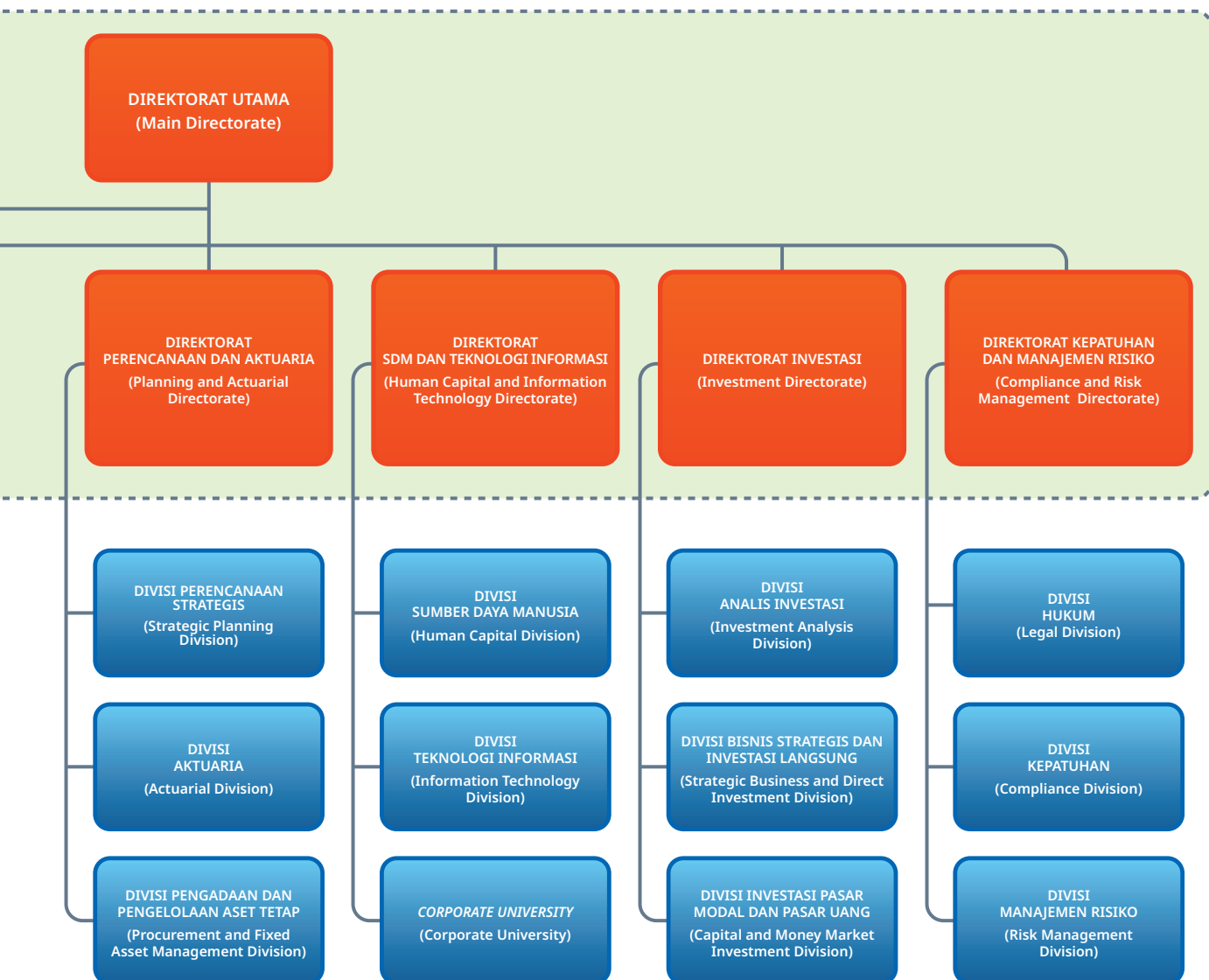




Pada tanggal 31 Oktober 2023 terdapat perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor PD-32/DIR/2023 Tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero). Namun terdapat masa transisi selama 6 bulan setelah Peraturan Direksi ditetapkan. Perubahan Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

On October 31, 2023, a change in the organizational structure occurred based on the Regulation of the Board of Directors of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Number PD-32/DIR/2023 regarding the Organizational Structure of PT TASPEN (Persero). However, there was a transition period of 6 (six) months after the establishment of the Board of Directors Regulation. The change in the organizational structure of PT TASPEN (Persero) was as follows:







STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN COMPANY GROUP STRUCTURE

STRUKTUR GRUP ANAK PERUSAHAAN PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2023 Subsidiary Group Structure of PT TASPEN (Persero) In 2023

INVESTASI LANGSUNG Direct Investment

KONSOLIDASI Consolidation



**BIDANG USAHA
ASURANSI JIWA**
Life Insurance Business

99,97%



**BIDANG USAHA
PROPERTI**
Property Business

90,13%

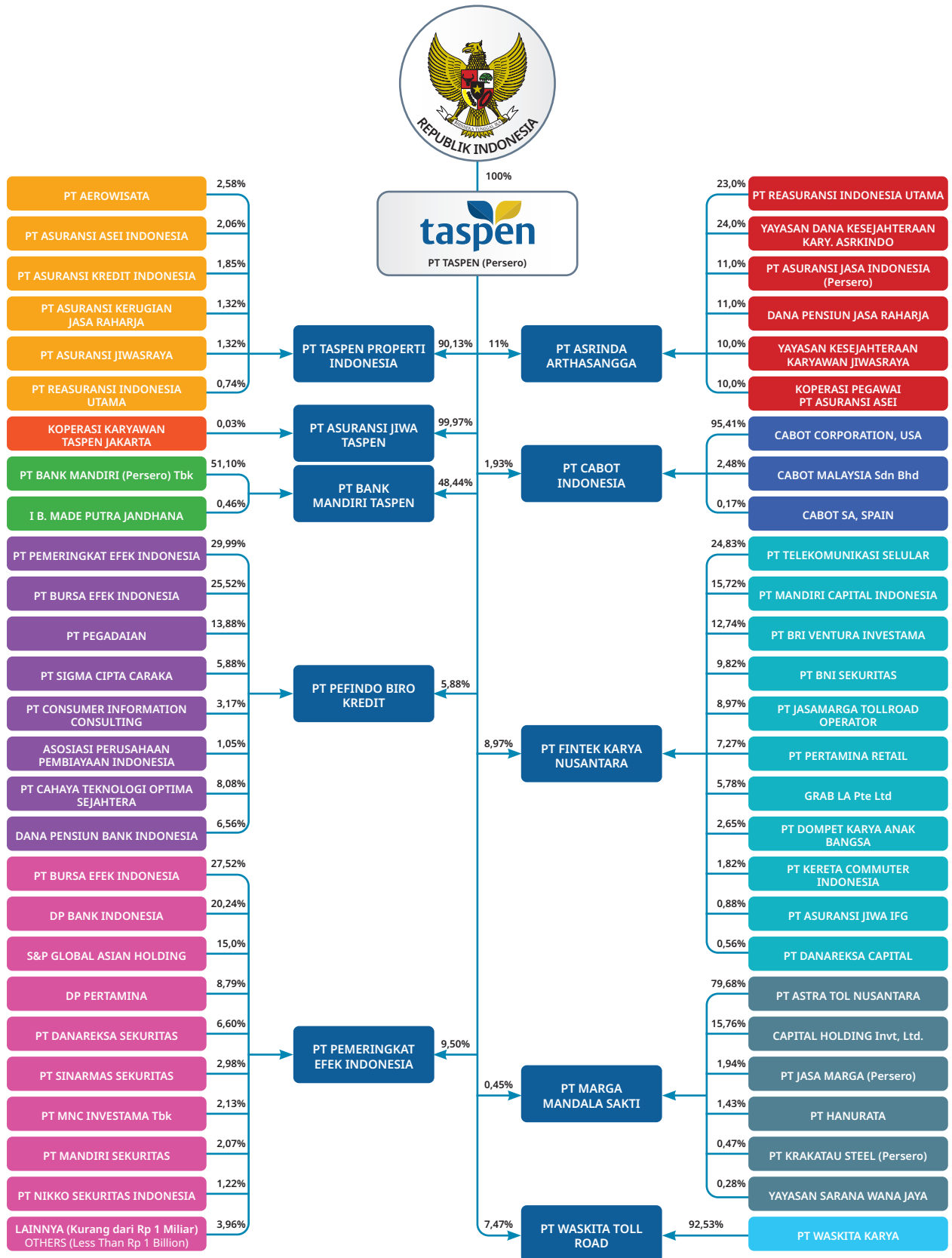
ENTITAS ASOSIASI Associate Companies



**BIDANG USAHA
PERBANKAN**
Banking Business

48,44%

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN Company Group Structure





KEPEMILIKAN SAHAM TASPEN TASPEN SHARE OWNERSHIP

PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri No. 7 Tanggal 13 September 2018 untuk Kepemilikan Saham dapat dijelaskan sebagai berikut:

PT TASPEN (Persero) is a State-Owned Enterprise in which 100% (one hundred percent) of the shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State-Owned of the Republic of Indonesia. In accordance with the Statement of Shareholders' Resolutions of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) No. 7, dated September 13, 2018, Share Ownership, can be explained as follows:

MODAL SAHAM DAN KEPEMILIKAN Shares Capital and Ownership

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM Total Shares	NILAI NOMINAL Nominal Value	Description
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000,-	Authorized Capital
Modal yang Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000.000,-	Issued and Paid-up Capital



PEMANG SAHAM DENGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN 5 % ATAU LEBIH

Hingga 31 Desember 2023, saham 100% dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, persentase kepemilikan sebesar 5% atau lebih adalah Negara Republik Indonesia.

SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP PERCENTAGE OF 5% OR MORE

Until December 31, 2023, 100% of shares were controlled by the Republic of Indonesia. In other words, the Republic of Indonesia owned a percentage of ownership of 5% or more.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2023, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di bursa efek manapun sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan ialah Negara Republik Indonesia sebesar 100%. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak memiliki saham di PT TASPEN (Persero). Uraian serta verifikasi disajikan dalam tabel berikut:

SHARES OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2023, the Company had not listed its shares on any stock exchange, so the composition of the Company's share ownership was 100% owned by the Republic of Indonesia. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT TASPEN (Persero) did not own shares in PT TASPEN (Persero). The description and verification are presented in the following table:

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
Table of Share Ownership of the Board of Commissioners

NO	NAMA Name	JABATAN Position	KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM Information on Share Ownership	JUMLAH LEMBAR SAHAM YANG DIMILIKI Number of Shares Owned	JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG DIMILIKI Total Nominal of Shares Owned	PERSENTASE Percentage
1	Suhardi Alius	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2	Bima Haria Wibisana	Komisaris Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
3	Muhammad Edhie Purnawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
4	Lilie Mayasari	Komisaris Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
5	Mardiasmo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
6	Alex Denni	Komisaris Commissioner	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
Table of Share Ownership of the Board of Directors

NO	NAMA Name	JABATAN Position	KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM Information on Share Ownership	JUMLAH LEMBAR SAHAM YANG DIMILIKI Number of Shares Owned	JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG DIMILIKI Total Nominal of Shares Owned	PERSENTASE Percentage
1	A.N.S. Kosasih	Direktur Utama CEO	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2	Feb Sumandar	Direktur Perencanaan dan Aktuaria Chief Strategic Planning and Actuarial Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
3	Rony Hanityo Aprianto	Direktur Investasi Chief Investment Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
4	Diyantini Soesilowati	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Chief Compliance and Risk Management Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
5	Rena Latsmi Puri	Direktur Keuangan Chief Finance Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
6	Ariyandi	Direktur Operasional Chief Operational Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None
7	Ovita Susiana Rosya	Direktur SDM dan Teknologi Informasi Chief HC and Information Technology Officer	Tidak Memiliki Saham di Perseroan Has no shares in the Company	Nihil None	Nihil None	Nihil None



DAFTAR ANAK PERUSAHAAN DAN ASOSIASI LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE COMPANIES

TABEL DAFTAR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI PT TASPEN (PERSERO) TAHUN 2023
Table of List of Subsidiaries and/or Associate Companies of PT TASPEN (Persero) in 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN Name of Company	ALAMAT Address	JENIS USAHA Type of Business	KLASIFIKASI Classification	STATUS OPERASI Operation Status	KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM Composition of Shares Ownership			TOTAL ASET TAHUN BUKU 2023 Total Assets for 2023 Fiscal Year	
						PEMEGANG SAHAM Shareholders	LEMBAR SAHAM Shares	%		
1	PT Taspem Properti Indonesia	Kantor Pusat: Head office: Gedung Menara Gedung TASPEN Jl. Letjen. Suprpto No. 45 Blok C lantai 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp: 021-2512470 Fax: 021-2512507 Website: www.taspemproperti.co.id	Penyewaan Gedung Perkantoran dan <i>Developer</i> Office Building Rental and <i>Developer</i>	Entitas Anak Perusahaan Subsidiary	Telah beroperasi Already operational	1	PT TASPEN (Persero)	40.095.763	90,13%	Rp 1.483.246.289.400
						2	PT Aerowisata	1.147.811	2,58%	
						3	PT Asuransi ASEI Indonesia	916.979	2,06%	
						4	PT Asuransi Kredit Indonesia	823.269	1,85%	
						5	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)	587.187	1,32%	
						6	PT Asuransi IFG	587.187	1,32%	
						7	PT Reasuransi Indonesia Utama	328.910	0,74%	
						TOTAL		44.487.106	100,00%	
2	PT Asuransi Jiwa Taspem	Kantor Pusat: Head office: Gedung TASPEN Jl. Letjen. Suprpto No. 45 Blok B lantai 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp: 021-4205388 Fax: 021- 4205383 Website: www.taspemlife.com	Asuransi Jiwa Life Insurance	Entitas Anak Perusahaan Subsidiary	Telah beroperasi Already operational	1	PT TASPEN (Persero)	299.900	99,97%	7.526.560.681.531
						2	Koperasi Pegawai Karyawan TASPEN Jakarta Employee Cooperative of TASPEN Jakarta	100	0,03%	
						TOTAL		300.000	100,00%	
3	PT Bank Mandiri Taspem	Kantor Pusat: Head office: Graha Mantap Jl. Cikini Raya No.42 Menteng Telp: (62-21) 21231772 Fax: (62-21) 21231984 Website: www.bankmantap.co.id	Perbankan Banking	Entitas Asosiasi Associate Companies	Telah beroperasi Already operational	1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	837.303.519	51,10%	60.537.056.000.000 (unaudited)
						2	PT TASPEN (Persero)	793.687.754	48,44%	
						3	I. B. Made Putra Jandhana	7.617.432	0,46%	
						TOTAL		1.638.608.705	100,00%	

PT TASPEN PROPERTI INDONESIA

PT Taspén Properti Indonesia berlokasi di Gedung TASPEN Blok C lantai 3 Jalan Letjen Suprpto No.45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan Perseroan sebesar 90,13%. PT Taspén Properti Indonesia dibentuk berdasarkan Akta Notaris Ny. Soenardi Adisasmilo Nomor 24 tanggal 14 April 1988, dengan bidang usaha sebagai berikut:

- a. Bisnis penyewaan gedung perkantoran, antara lain: restoran, pertokoan serta sarana penunjang yang ada kaitannya dengan bisnis tersebut dalam arti yang seluas-luasnya.
- b. Bergerak dalam bidang jasa, pada umumnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan Perseroan kecuali jasa dalam bidang hukum.

Pendirian entitas anak ini sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-307/MK.013/1988 tanggal 29 Februari 1988. Pengembangan areal tanah PT Taspén Properti Indonesia disetujui Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-750/MK.013/1990 tanggal 18 September 1990 dimana pembiayaan proyek pengembangan areal tanah PT Taspén Properti Indonesia tersebut dilakukan bersama dengan 6 (enam) BUMN lain.

Modal dasar PT Taspén Properti Indonesia adalah sejumlah Rp250.000.000.000 yang terbagi atas 250.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000 per saham. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Nomor 7 tanggal 23 Februari 1988 terdapat perubahan modal dasar PT Taspén Properti Indonesia menjadi Rp177.500.000.000 yang terbagi atas 177.500.000 saham dengan nominal Rp1.000 per saham dan kepemilikan Perseroan menjadi 90,13%. Dari jumlah modal dasar sebesar Rp177.500.000.000 tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp11.582.222.000 sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa PT Taspén Properti Indonesia tanggal 23 Februari 1998.

Pada tanggal 9 September 2008 diadakan RUPS Luar Biasa tentang Pengesahan Konversi Agio Saham Menjadi Saham berdasarkan Persentase kepemilikan Modal Saham, sehingga jumlah modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh bertambah dari sebesar Rp11.582.222.000 menjadi sebesar Rp44.487.106.000 atau sebesar 25,06% dari jumlah modal dasar dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

PT TASPEN PROPERTI INDONESIA

PT Taspén Properti Indonesia is located at TASPEN Building Block C, 3rd floor, Jalan Letjen Suprpto No.45, Cempaka Putih, Central Jakarta, with the Company's ownership percentage at 90.13%. PT Taspén Properti Indonesia was established based on Notarial Deed of Mrs. Soenardi Adisasmilo Number 24 dated April 14, 1988, with the following business fields:

- a. office building rental business, including restaurants, shops, and supporting facilities broadly related to such business.
- b. Engaging in general services directly related to the Company's activities, except legal services.

The establishment of this subsidiary is according to the approval letter from the Minister of Finance Number S-307/MK.013/1988, dated February 29, 1988. The Minister of Finance approved the development of PT Taspén Properti Indonesia's land area through letter Number: S-750/MK.013/1990 dated September 18, 1990, where the project financing for the development of PT Taspén Properti Indonesia's land area was carried out jointly with 6 (six) other state-owned enterprises.

The authorized capital of PT Taspén Properti Indonesia is an amount of Rp250,000,000,000 divided into 250,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000 per share. Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) Resolution Number 7, dated February 23, 1988, there was a change in the authorized capital of PT Taspén Properti Indonesia to Rp177,500,000,000, divided into 177,500,000 shares with a nominal value of Rp1,000 per share, and the Company's ownership became 90.13%. From the authorized capital of Rp177,500,000,000, an amount of Rp11,582,222,000 has been issued and fully paid up according to the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution of PT Taspén Properti Indonesia on February 23, 1998.

On September 9, 2008, an Extraordinary General Meeting of Shareholders was held regarding the Approval of the Conversion of Agio Shares into Shares based on the Percentage of Ownership of Share Capital, so the total issued and fully paid-up share capital increased from Rp11,582,222,000 to Rp44,487,106,000, or 25.06% of the total authorized capital, with the ownership composition as follows:



TABEL KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PT TASPEN PROPERTI INDONESIA
Table of Share Ownership Composition of PT Taspen Properti Indonesia

	JUMLAH SAHAM Number of Shares	%
PT TASPEN (Persero)	40.095.763.000	90,13%
PT Aerowisata	1.147.811.000	2,58%
PT Asuransi ASEI Indonesia (Persero)	916.979.000	2,06%
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	823.269.000	1,85%
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	587.187.000	1,32%
PT Asuransi Jiwa IFG	587.187.000	1,32%
PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	328.910.000	0,74%
Jumlah/Total	44.487.106.000	100,00%

PT ASURANSI JIWA TASPEN

PT Asuransi Jiwa Taspen berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan persentase kepemilikan Perseroan sebesar 99,97%. PT Asuransi Jiwa Taspen dibentuk berdasarkan akta notaris P. Sutrisno A. Tampubolon Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, dengan bidang usaha sebagai berikut:

- Menerima pertanggungan asuransi jiwa secara kumpulan dan/atau perorangan;
- Melakukan kegiatan investasi dan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Perseroan asuransi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pendirian entitas anak Perseroan ini sesuai dengan surat persetujuan Menteri Negara BUMN Nomor S-82/MBU/2014 tanggal 21 Februari 2014, Modal dasar PT Asuransi Jiwa Taspen adalah sejumlah Rp1.000.000.000.000 yang terbagi atas 1.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30% atau sejumlah 300.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

PT ASURANSI JIWA TASPEN

PT Asuransi Jiwa Taspen is domiciled and headquartered in the Central Administrative City of Jakarta, with the Company's ownership percentage at 99.97%. PT Asuransi Jiwa Taspen was established based on the notarial deed of P. Sutrisno A. Tampubolon Number 19, dated February 26, 2014, with the following business activities:

- Accepting life insurance coverage collectively and/or individually;
- Conducting investment activities and other activities commonly carried out by insurance companies in accordance with the provisions of laws and regulations.

The establishment of this subsidiary of the Company is in accordance with the approval letter from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-82/MBU/2014 dated February 21, 2014. The authorized capital of PT Asuransi Jiwa Taspen is an amount of Rp1,000,000,000,000 divided into 1,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share. of the authorized capital, 30% or 300,000 shares with a total nominal value of Rp300,000,000,000 has been issued and fully paid up, with the ownership composition as follows:

TABEL KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA TASPEN
Table of Share Ownership Composition of PT Asuransi Jiwa Taspen

	JUMLAH SAHAM Number of Shares	%
PT TASPEN (Persero)	299.900.000.000	99,97%
Koperasi Karyawan TASPEN Jakarta TASPEN Jakarta Employee Cooperative	100.000.000	0,03%
Jumlah/Total	300.000.000.000	100,00%

PT BANK MANDIRI TASPEN

Investasi pada Entitas Asosiasi merupakan bagian dari upaya penyelesaian kasus Bank Mandiri melalui akta perdamaian antara Bank Mandiri dengan PT TASPEN (Persero) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 250/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 12 November 2013. Sesuai akta perjanjian tersebut, Perseroan menerima saham PT Bank Mandiri Taspen Pos sebanyak 202.000.000 lembar senilai Rp175.000.000.000 atau 20,20% melalui mekanisme penyetoran langsung oleh pihak Bank Mandiri ke PT Bank Mandiri Taspen untuk 202.000.000 lembar saham tersebut sebesar Rp101.000.000.000.

Sesuai surat KJPP Adnan, Hamidi & Rekan No. DH.013.App-SV/T-LL/II/16 tanggal 17 Februari 2016 perihal Penilaian Saham Perseroan, nilai wajar penyertaan Perseroan pada PT Bank Mandiri Taspen pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp273.104.000.000 (Rp1.352 per lembar saham).

Pada tanggal 30 Juni 2016 telah diterima Surat dari Made Lely Nawaksari perihal Penawaran Penjualan Saham atas nama I Made Madia (Almarhum) selaku pemegang 6.547.776 lembar saham pada PT Bank Mandiri Taspen dengan harga Rp1.375 per lembar saham.

Pada tanggal 16 September 2016 telah diterima surat dari PT Bank Mandiri Taspen Nomor DIR/0805/2016 perihal Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas rencana PT Bank Mandiri Taspen melakukan *rights issue* untuk menambah permodalan sebesar minimal Rp600.000.000.000 secara bertahap dalam 2 tahun, yakni: (i) Tahap I di tahun 2016 sebesar minimal Rp400.000.000.000 dan (ii) Tahap II di tahun 2017 sebesar minimal Rp200.000.000.000. *Rights issue* Tahap I akan dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah 249.000.000 lembar saham baru dengan nilai pasar sesuai hasil valuasi KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (RSR) yakni sebesar Rp1.067 per lembar saham.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri Taspen yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 53 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. dengan 2 (dua) pokok keputusan, yaitu:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan dengan pengeluaran/penerbitan saham baru sejumlah 249.000.000 lembar saham. Atas penerbitan saham baru tersebut disetujui untuk diambil bagian oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT TASPEN (Persero), sedangkan pemegang saham lainnya menyatakan melepaskan serta mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

PT BANK MANDIRI TASPEN

Investment in Associate Companies is part of the efforts to resolve the Bank Mandiri case through a peace agreement between Bank Mandiri and PT TASPEN (Persero), issued by the South Jakarta District Court with Number 250/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL dated November 12, 2013. According to the agreement, the Company received 202,000,000 shares of PT Bank Mandiri Taspen Pos with a value of Rp175,000,000,000 or 20.20%, through a direct deposit mechanism by Bank Mandiri to PT Bank Mandiri Taspen for these 202,000,000 shares amounting to Rp101,000,000,000.

According to the valuation letter from KJPP Adnan, Hamidi & Rekan No. DH.013.App-SV/T-LL/II/16 dated February 17, 2016, concerning the Valuation of the Company's Shares, the fair value of the Company's participation in PT Bank Mandiri Taspen on December 31, 2015, was Rp273,104,000,000 (Rp1,352 per share).

On June 30, 2016, a letter was received from Made Lely Nawaksari regarding the offer to Sell Shares on behalf of I Made Madia (deceased), the holder of 6,547,776 shares in PT Bank Mandiri Taspen at Rp1,375 per share.

On September 16, 2016, a letter was received from PT Bank Mandiri Taspen Number DIR/0805/2016 regarding the offer of Preemptive Rights concerning PT Bank Mandiri Taspen's plan to carry out a rights issue to increase capital by at least Rp600,000,000,000 gradually over 2 (two) years, namely: (i) Phase I in 2016 at least Rp400,000,000,000 and (ii) Phase II in 2017 at least Rp200,000,000,000. Rights issue Phase I would be conducted by issuing 249,000,000 new shares with a market value according to the valuation results of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan (RSR) at Rp1,067 per share.

On October 31, 2016, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of PT Bank Mandiri Taspen was held, documented in the Minutes of EGM Number 53 made by and in the presence of Notary I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. The meeting resulted in two main resolutions:

1. Approval of the increase in the Company's authorized capital, issued capital, and paid-up capital through the issuance of 249,000,000 new shares. The issuance of these new shares was approved to be subscribed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT TASPEN (Persero), while other shareholders expressed their release and waiver of their rights to subscribe, resulting in the following composition of the Company's shareholders:



**TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN RUPSLB
TANGGAL 31 OKTOBER 2016**

Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspem Shareholders Based on EGM on October 31, 2016

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	742.416.052	371.208.026.000	59,44
PT TASPEN (Persero)	291.052.224	145.526.112.000	23,31
PT Pos Indonesia (Persero)	202.000.000	101.000.000.000	16,17
Ida Bagus Made Putra Jandhana	6.983.948	3.491.974.000	0,56
Drs I Made Madia (Almarhum/Deceased)	6.547.776	3.273.888.000	0,52
Jumlah/Total	1.249.000.000	624.500.000.000	100,00

2. Persetujuan rencana pengalihan/penjualan seluruh saham PT Pos Indonesia (Persero) atau sejumlah 202.000.000 lembar saham kepada PT TASPEN (Persero), sehingga dengan pengalihan saham dari PT Pos Indonesia (Persero) kepada PT TASPEN (Persero) serta pengambilan bagian saham baru oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana butir 1 di atas, komposisi pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
2. Approval of the plan to transfer/sell all shares of PT Pos Indonesia (Persero) or 202,000,000 shares to PT TASPEN (Persero). With the transfer of shares from PT Pos Indonesia (Persero) to PT TASPEN (Persero) and the subscription of new shares by the Company's shareholders, as mentioned in point 1 above, the composition of the Company's shareholders would be as follows:

**TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN RUPSLB
TANGGAL 31 OKTOBER 2016**

Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspem Based on EGM on October 31, 2016

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	742.416.052	371.208.026.000	59,44
PT TASPEN (Persero)	493.052.224	246.526.112.000	39,48
Ida Bagus Made Putra Jandhana	6.983.948	3.491.974.000	0,56
Drs I Made Madia (Almarhum/Deceased)	6.547.776	3.273.888.000	0,52
Jumlah/Total	1.249.000.000	624.500.000.000	100,00

Pada tanggal 15 November 2016 telah diterima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-681/MBU/11//2016 perihal Permohonan Persetujuan Pembelian Saham PT Bank Mandiri Taspem atas nama I Made Madia (Almarhum) yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. Nomor 28 tanggal 17 Desember 2016. Kepemilikan saham PT TASPEN (Persero) pada PT Bank Mandiri Taspem menjadi 23,83% dengan jumlah saham 297.600.000 lembar.

On November 15, 2016, a letter was received from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-681/MBU/11/2016 regarding the Request for Approval of the Purchase of PT Bank Mandiri Taspem Shares on behalf of I Made Madia (late), which was documented in the Share Purchase Deed by Notary I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. Number 28 dated December 17, 2016. PT TASPEN (Persero)'s ownership of PT Bank Mandiri Taspem shares became 23.83%, with a total of 297,600,000 shares.

Pada tanggal 30 November 2016 telah diterima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-704/MBU/11/2016 perihal Persetujuan Peningkatan Kepemilikan Saham PT TASPEN (Persero) pada PT Bank Mandiri Taspen yang telah tercatat dalam Surat Keterangan dari Notaris Andalia Farida S.H., M.H. tanggal 28 Desember 2016. Kepemilikan saham PT TASPEN (Persero) pada PT Bank Mandiri Taspen menjadi 40,00% dengan jumlah saham 544.848.868 lembar, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

On November 30, 2016, a letter was received from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-704/MBU/11/2016 regarding the Approval of the Increase in PT TASPEN (Persero)'s Ownership of PT Bank Mandiri Taspen Shares, as recorded in the Certificate from Notary Andalia Farida S.H., M.H. dated December 28, 2016. PT TASPEN (Persero)'s ownership of PT Bank Mandiri Taspen shares became 40.00%, with a total of 544,848,868 shares, thus the composition of the Company's shareholders is as follows:

TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN SURAT DARI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR S-704/MBU/11/2016 TANGGAL 30 NOVEMBER 2016
Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspen Based on Letter from The Minister of State-Owned Enterprises Number S-704/Mbu/11/2016 Dated November 30, 2016

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	809.655.870	404.827.935.000	59,44
PT TASPEN (Persero)	544.848.868	272.424.434.000	40,00
Ida Bagus Made Putra Jandhana	7.617.432	3.808.716.000	0,56
Jumlah/Total	1.362.122.170	681.061.085.000	100,00

Pada tanggal 16 November 2018 telah diterima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-773/MBU/11/2018 perihal Persetujuan atas Rencana Pembelian Saham dan Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap), yang menyatakan:

On November 16, 2018, a letter was received from the Minister of State-Owned Enterprises Number S-773/MBU/11/2018 regarding the Approval of the Plan to Purchase Shares and Capital Increase of PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap), stating:

1. Menyetujui pembelian saham 8,39% kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di PT Bank Mandiri Taspen atau sebesar 114.292.502 lembar saham dengan harga Rp3.539 per lembar saham sesuai indikasi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin, & Rekan (KJPP RSR) atau sebesar Rp404.481.164.578.
2. Menyetujui penambahan setoran modal ke PT Bank Mantap melalui mekanisme *right issue* sesuai porsi kepemilikan saham 48,39% atau sebesar Rp241.953.838.845.

1. Approving the purchase of 8.39% of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk's share ownership in PT Bank Mandiri Taspen, equivalent to 114,292,502 shares at a price of Rp3,539 per share, according to the valuation indication by the Public Appraisal office Ruky, Safrudin, & Rekan (KJPP RSR), or Rp404,481,164,578 in total.
2. Approving the additional capital injection into PT Bank Mantap through a right issue mechanism according to the share ownership portion of 48.39%, totaling Rp241,953,838,845.

Pada tanggal 30 November 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri Taspen sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 112 tanggal 30 November 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., dengan keputusan persetujuan penambahan modal dengan mekanisme *right issue*, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

On November 30, 2018, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) was held for PT Bank Mandiri Taspen, as documented in the Deed of Minutes of EGM Number 112 dated November 30, 2018, made by Notary I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. The resolution approved the capital increase through a right issue mechanism, resulting in the following composition of the Company's shareholders:



**TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN RUPSLB
TANGGAL 30 OKTOBER 2018**

Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspen Based on EGM on October 30, 2018

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	695.363.368	347.681.684.000	51,05
PT TASPEN (Persero)	659.141.370	329.570.685.000	48,39
Ida Bagus Made Putra Jandhana	7.617.432	3.808.716.000	0,56
Jumlah/Total	1.362.122.170	681.061.085.000	100,00

Pemegang Saham Perorangan Ida Bagus Made Putra Jandhana tidak mengambil bagian dalam *right issue*, sehingga kepemilikan PT TASPEN (Persero) menjadi 48,416%, dengan rincian sebagai berikut:

Individual Shareholder Ida Bagus Made Putra Jandhana did not participate in the right issue, resulting in PT TASPEN (Persero) owning 48.416%, with the details as follows:

**TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN RUPSLB
TANGGAL 30 OKTOBER 2018**

Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspen Based on EGM on October 30, 2018

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	767.488.261	383.744.130.500	51,08
PT TASPEN (Persero)	727.509.225	363.754.612.500	48,42
Ida Bagus Made Putra Jandhana	7.617.432	3.808.716.000	0,50
Jumlah/Total	1.502.614.918	751.307.459.000	100,00

Pada tanggal 11 September 2020 menerima surat dari PT Bank Mandiri Taspen No. DIR/535/2020 perihal Penawaran Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas rencana PT Bank Mandiri Taspen melakukan *right issue* untuk menambah permodalan sebesar minimal Rp500.000.000.000. *Right issue* dilakukan dengan menerbitkan saham baru dan mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 136.686.714 lembar saham baru dengan nilai pasar sesuai hasil valuasi KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, yakni sebesar Rp3.658 per lembar saham.

On September 11, 2020, a letter was received from PT Bank Mandiri Taspen No. DIR/535/2020 regarding the offering of Preemptive Rights (HMETD) for PT Bank Mandiri Taspen's plan to increase capital through right issue by at least Rp500,000,000,000. The right issue is carried out by issuing new shares and releasing shares in the portfolio, totaling 136,686,714 new shares with a market value according to the valuation results of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, which amounts to Rp3,658 per share.

Pada tanggal 14 Desember 2020, PT TASPEN (Persero) telah menerima surat dari Menteri BUMN No. S-1147/MBU/12/2020 perihal Persetujuan atas Penambahan Modal PT TASPEN (Persero) pada Bank Mantap berupa uang sebesar Rp242.081.059.082 yang berasal dari dana program THT tahun 2020.

On December 14, 2020, PT TASPEN (Persero) received a letter from the Minister of SOEs No. S-1147/MBU/12/2020 concerning Approval for Capital Increase of PT TASPEN (Persero) in Bank Mantap in the form of funds amounting to Rp242,081,059,082 sourced from the 2020 THT program.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Mandiri TASPEN nomor 41 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, dengan keputusan persetujuan penambahan modal dengan mekanisme *right issue*, komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Based on Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions of PT Bank Mandiri Taspen No. 41 dated December 28, 2020, drawn up and before Notary I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, with the resolution to approve the capital increase through the right issue mechanism, the composition of the Company's shareholders is as follows:

TABEL KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT BANK MANDIRI TASPEN BERDASARKAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK MANDIRI TASPEN NOMOR 41 TANGGAL 28 DESEMBER 2020

Table of Shareholders Composition of PT Bank Mandiri Taspén Based on Deed of Shareholders' Circular Resolutions Statement of PT Bank Mandiri Taspén No. 41 On December 28, 2020

PEMEGANG SAHAM Shareholders	SAHAM (LEMBAR) Shares	NOMINAL	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	837.303.519	418.651.759.500	51,10
PT TASPEN (Persero)	793.687.754	396.843.877.000	48,44
Ida Bagus Made Putra Jandhana	7.617.432	3.808.716.000	0,46
Jumlah/Total	1.638.608.705	819.304.352.500	100,00

Nilai investasi PT TASPEN (Persero) pada Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.527.788.287.349 dan Rp2.257.683.602.663. Perseroan mencatat investasi pada Entitas Asosiasi menggunakan metode ekuitas. Pada setiap tanggal laporan, Perseroan mengakui saldo Laba/Rugi Entitas Asosiasi ke dalam laba rugi sesuai dengan persentase kepemilikan.

The investment value of PT TASPEN (Persero) in the Associate Companies as of December 31, 2021, and 2020, amounted to Rp2,527,788,287,349 and Rp2,257,683,602,663, respectively. The Company recorded its investment in the Associate Companies using the equity method. On each reporting date, the Company recognizes the Profit/Loss balance of the Associate Companies in the income statement in accordance with the ownership percentage.



ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG

ADDRESSES OF HEAD OFFICE AND BRANCH OFFICES

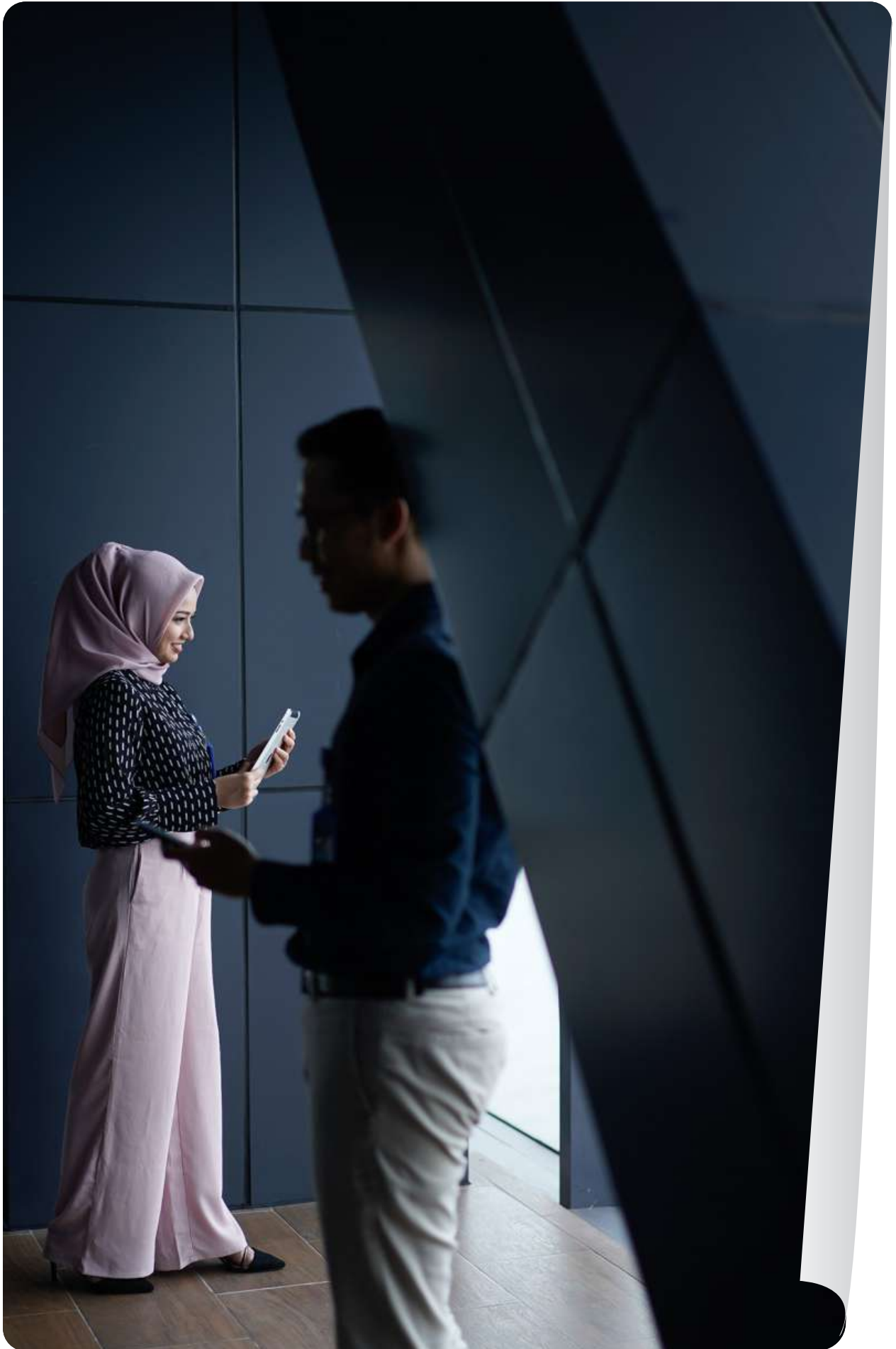
TABEL ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG 2023
Table of Head Office and Branch offices Addresses for 2023

NO	KANTOR PUSAT/ KANTOR CABANG Head Office/ Branch Office	ALAMAT Address	NO. TELEPON Phone Number	NO. FAKS Fax Number
1	Kantor Pusat Head office	Jl. Letjen. Suprpto no. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520	(021) 424 1808	(021) 420 3809
2	Cabang Jakarta I	Jl. Ampera Raya No. 10 B, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520	(021) 227 77944	(021) 227 77943
3	Cabang Jakarta II	Jl. Letjen. Suprpto no. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520	(021) 424 1808	(021) 420 3809
4	Cabang Bandar Lampung	Jl. Drs. Warsito No.3 Teluk Betung Bandar Lampung 35221	(0721) 488 934, 488 935	(0721) 488 936
5	Cabang Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirja No.65 KM. 7, Bengkulu 38225	(0736) 252 82, 347 763	(0736) 252 83
6	Cabang Palembang	Jl. Jendral Sudirman No. 732 Km. 4,5, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Palembang 30126	(0711) 312 060, 313 889	(0711) 312058
7	Cabang Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut KM. 3, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya 73112	(0536) 3239874	(0536) 3222003
8	Cabang Pontianak	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121	(0561) 731 192, 741 905	(0561) 737 269
9	Cabang Pangkal Pinang	Jl Jend Sudirman Gabek II, Pangkalpinang 33117	(0717) 434 995, 432 580	(0717) 435 408
10	Cabang Serang	Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No.80, Serang 42117	(0254) 203085, 202106, 202107	(0254) 200865
11	Cabang Banjarmasin	Jl. Jend Acmad Yani Km 3,5 No.10, Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70236	(0511) 325 6003	(0511) 325 1850
12	Cabang Samarinda	Jl. D.I. Pandjaitan No. 46, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117	(0541) 771 400, 771 401	(0541) 771 404
13	Cabang Tangerang	Jl. KH Hasyim Ashari, Kel. Poris Plawad Indah, Kec Cipondoh, Kota Tangerang 15141	(021) 222 61960, 222 60763	(021) 222 61374
14	Cabang Tarakan	Jl. Mulawarman 1A Rt 54, Kel.Karang Anyar, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan 77111	(0551) 236 87	(0551) 232 74
15	Cabang Lubuk Linggau	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II RT 04, Kel. Tanah Periuk, Kec. Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau 31625	(0733) 328 1400	-
16	Cabang Medan	Jl. H Adam Malik No.64, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Medan 20114	(061) 661 9600	(061) 661 9316
17	Cabang Banda Aceh	Jl. Tengku Abdullah Ujong Rimba No. 22, Kel. Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh 23242	(0651) 333 82, 317 87,742 8977	(0651) 229 85
18	Cabang Lhokseumawe	Jl. Merdeka Timur No.198A, Kec. Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe 24351	(0645) 650 0320	-
19	Cabang Pematang Siantar	Jl. Sisingamangaraja No.98, Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar 21143	(0622) 219 96	-
20	Cabang Padang	Jl.Sudirman No 63, Ujung Gurun, Padang Barat, Kota Padang 25114	(0751) 31154,31152	(0751) 338 05

NO	KANTOR PUSAT/ KANTOR CABANG Head Office/ Branch Office	ALAMAT Address	NO. TELEPON Phone Number	NO. FAKS Fax Number
21	Cabang Pekanbaru	Jl. Jenderal sudirman No. 317, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru 28131	(0761) 235 31, 235 16	(0761) 217 60
22	Cabang Jambi	Jl. Slamet Riyadi - Broni, Kel. Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Jambi 36124	(0741) 645 20, 645 83	(0741) 645 29
23	Cabang Tanjung Pinang	Jl. Daeng Celak Km 8 Sungai carang, Kel. Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur 29122	(0771) 4500000	-
24	Cabang Kepulauan Nias	Jl. Pelabuhan Udara Binaka KM.9 Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli 22183	0813 624 195 64	-
25	Cabang Bandung	Jl. PH.H. Mustofa No.78, Cikutra, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung 40124	(022) 720 6545	(022) 720 6482
26	Cabang Bogor	Jl. Raya Pajajaran No. 17 A, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Bogor 16153	(0251) 831 6177, 831 6944, 835	(0251) 831 6433
27	Cabang Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda No.17, Kel. Sukamulya Kec. Bungursari, Tasikmalaya 46151	(0265) 320 255, 320 266	(0265) 320 220
28	Cabang Cirebon	Jl. dr. Wahidin Soedirohoesodo No.12, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon 45122	(0231) 233 326	(0231) 233 134
29	Cabang Bekasi	Jl. Kemakmuran Raya no. 39, Kel.Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17141	(021) 285 19766, 894 52577	(021) 285 19763
30	Cabang Semarang	Jl. MT Haryono No 892, Kel. Wonodiri, Kec. Semarang Selatan, Semarang 50242	(024) 831 4225	(024) 841 5004
31	Cabang Purwokerto	Jl. Prof. Dr. Suharso No. 54, Kel. Bancar Kembar, Kec. Purwokerto Utara, Banyumas 53121	(0281) 634 145, 634 146, 634 147	(0281) 634 144
32	Cabang Surakarta	Jl. Veteran No.305, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Surakarta 57155	(0271) 714 189	(0271) 711 751
33	Cabang Yogyakarta	Jl. Ipda Tut Harsono No. 55 Timoho, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta 55165	(0274) 565 124, 548 154, 565 579, 565 585	(0274) 565 125
34	Cabang Pekalongan	Jl. Kurinci No. 6 Pekalongan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan 51111	(0285) 425 476, 425 477	(0285) 424 850
35	Cabang Surabaya	Jl. Diponegoro No.193, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya 60241	(031) 567 6356, 567 8702	(031) 567 1029
36	Cabang Malang	Jl. Raden Intan, Kel. Polowijen, Kec. Blimbing Kota Malang 65126	(0341) 495 633	-
37	Cabang Madiun	Jl. D.I Panjaitan No. 7, Kel. Pandean, Kec. Taman, Madiun 63133	(0351) 456 691, 456 692, 456 693	(0351) 456 694
38	Cabang Kediri	Jl. Jaksa Agung Suprpto no 28, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kediri 64112	(0354) 770 888	-
39	Cabang Denpasar	Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon No. 21, Kel. Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, Denpasar 80234	(0361) 231 418	(0361) 231 420
40	Cabang Jember	Jl. Riau No. 10A, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember 68121	(0331) 338 256, 338 257	(0331) 332 740
41	Cabang Kupang	Jl. Alfonsus Nisoni No. 8, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kupang 85119	(0380) 833 527,833 333	(0380) 829 999
42	Cabang Mataram	Jl. Langko No 62, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Mataram 83114	(0370) 632 722	(0370) 632 722
43	Cabang Ende	Jl. Eltari, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Ende 86317	(0381) 250 0032	-

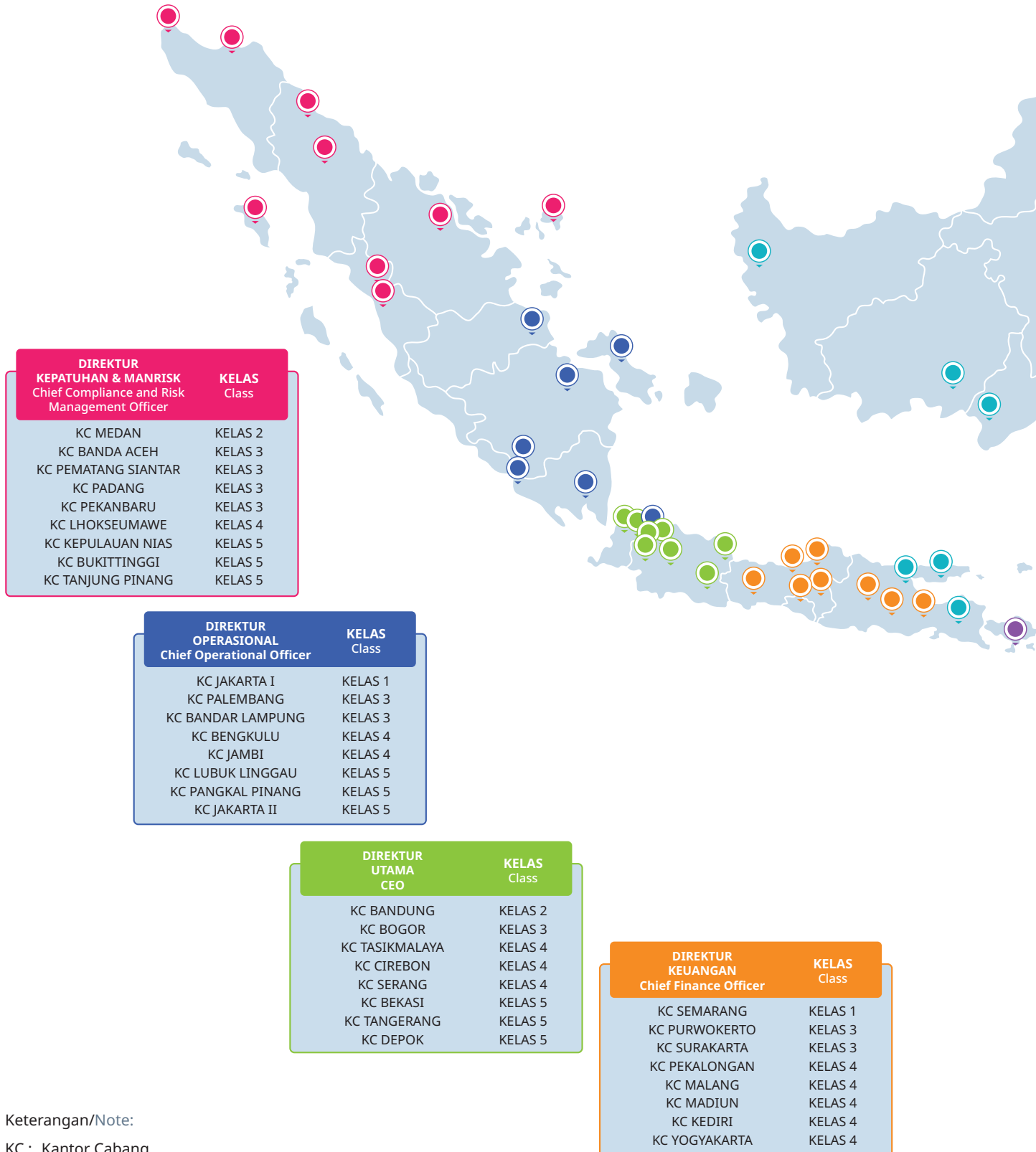


NO	KANTOR PUSAT/ KANTOR CABANG Head Office/ Branch Office	ALAMAT Address	NO. TELEPON Phone Number	NO. FAKS Fax Number
44	Cabang Pamekasan	Jl. Kabupaten No. 110, Kel. Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur 69316	(0324) 351 0790	(0324) 351 0554
45	Cabang Makassar	Jl. Boto Lempangan No. 27, Kel. Sawerigading, Kec. Ujung Pandang, Makassar 90113	(0411) 362 0627, 362 0628	(0411) 363 1271
46	Cabang Manado	Jl. Jend. Achmad Yani No. 7, Kel. Sario Tumpaan, Kec. Sario, Manado 95114	(0431) 861 491, 861 220, 861 030	(0431) 860 951
47	Cabang Palu	Jl. Professor Moh Yamin No.21, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Palu 94231	(0451) 451 744, 451 746	-
48	Cabang Kendari	Jl. Mayjen. Sutoyo No.55, Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kendari 93122	(0401) 312 3475	(0401) 312 2877
49	Cabang Ambon	Jl. Tulukabessy Mardika No. 50, Kel. Rijali, Kec. Sirimau, Ambon, 97126	(0911) 312 719	(0911) 312 720
50	Cabang Jayapura	Jl. Raya Abepura No. 100, Kel. Abepantai, Kec. Abepura, Jayapura 99351	(0967) 582 778, 582 660	(0967) 582 080
51	Cabang Gorontalo	Jl. Achmad Nadjamuddin No. 9, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo	(0435) 827 984, 827 985	(0435) 826 526
52	Cabang Ternate	Jl. Raya Mangga Dua Selatan No.793, Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Ternate 97734	(0921) 311 0972, 311 0973	-
53	Cabang Mamuju	Jl. RE Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju 91512	(0426) 232 5111	(0426) 232 5222
54	Cabang Manokwari	Jl Drs Esau Sesa No 38, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, Manokwari 98312	(0986) 214 666	(0986) 211 083
55	Cabang Palopo	Jl. Andi Djemma No. 129, Kel. Tompotika, Kec. Wara, Palopo 91921	(0471) 320 5155	(0471) 320 1821
56	Cabang Bone	Jl. Ahmad Yani No.15, Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang, Bone 92713	(0481) 292 3674	(0481) 292 3764
57	Cabang Depok	Jl. Raya Kalimulya No.04, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok 16413	(021) 7721 8733	(021) 7721 2844
58	Cabang Bukittinggi	Jl. M.Syafei No. 11, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi 26138	(0752) 625 990	(0752) 625 991



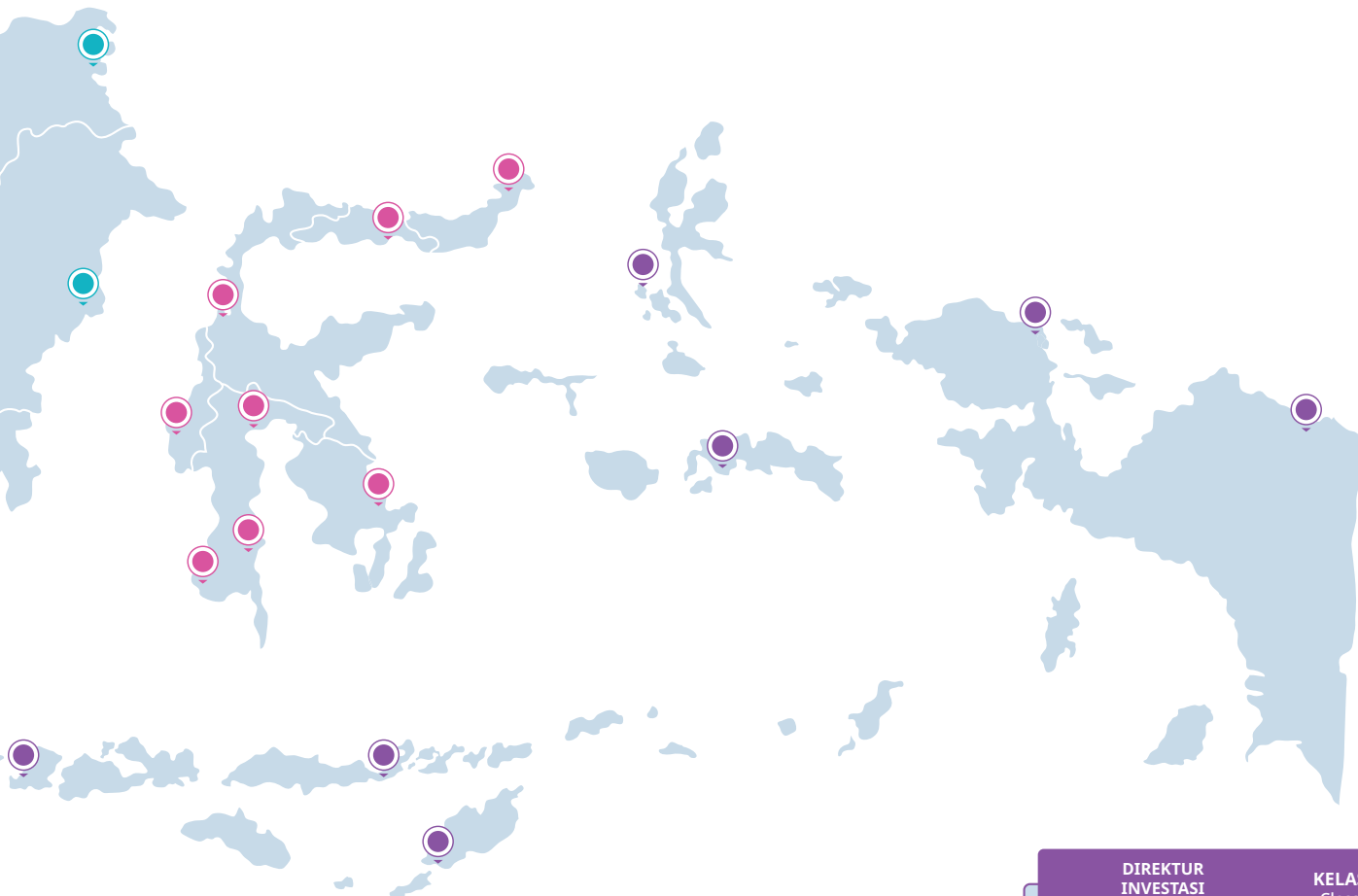


LOKASI OPERASIONAL DAN PASAR YANG DILAYANI [C.3][2.1] OPERATIONAL LOCATION AND SERVED MARKETS [C.3][2.1]



Keterangan/Note:

KC : Kantor Cabang
Branch Office



DIREKTUR SDM & TEKNOLOGI INFORMASI Chief HC and Information Technology Officer	KELAS Class
KC SURABAYA	KELAS 1
KC BANJARMASIN	KELAS 3
KC PALANGKARAYA	KELAS 4
KC PONTIANAK	KELAS 4
KC SAMARINDA	KELAS 4
KC JEMBER	KELAS 4
KC TARAKAN	KELAS 5
KC PAMEKASAN	KELAS 5

DIREKTUR PERENCANAAN & AKTUARIA Chief Strategic Planning and Actuarial Officer	KELAS Class
KC MAKASSAR	KELAS 2
KC MANADO	KELAS 3
KC PALU	KELAS 4
KC KENDARI	KELAS 4
KC PALOPO	KELAS 5
KC GORONTALO	KELAS 5
KC MAMUJU	KELAS 5
KC BONE	KELAS 5

DIREKTUR INVESTASI Chief Investment Officer	KELAS Class
KC DENPASAR	KELAS 3
KC KUPANG	KELAS 3
KC MATARAM	KELAS 4
KC AMBON	KELAS 4
KC JAYAPURA	KELAS 4
KC MANOKWARI	KELAS 4
KC ENDE	KELAS 5
KC TERNATE	KELAS 5



KEGIATAN USAHA, PRODUK, DAN LAYANAN [2-6] [C.4] BUSINESS ACTIVITIES, PRODUCTS AND SERVICES [2-6] [C.4]

“Berdasarkan Anggaran Dasar TASPEN, Bidang Usaha TASPEN adalah sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).”

“According to TASPEN’s Articles of Association, the Company is involved in the provision of Social Security for Civil Servants (PNS), specifically through programs such as the Old-Age Savings (THT) Program, Pension Program, Work Accident Security (JKK) Program, and Death Security (JKM) Program.”



PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT) Old-Age Savings (THT) Program

Merupakan Program Asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

The Old-Age Savings Program is an insurance program that consists of Endowment Insurance linked to retirement age, combined with Death Insurance.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

Asuransi Dwiguna diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (Askem) diberikan bagi peserta apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia.

Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Kepesertaan Program THT dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan pada tanggal pengangkatan sebagai calon PNS. Kewajiban membayar iuran dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta. (pasal 6 PP 25 tahun 1981).

- Meninggal dunia;
- Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program THT terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS Departemen Pertahanan-Keamanan; dan
- Pejabat Negara.

Based on Government Regulation Number 25 of 1981, amended by Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 regarding the Social Insurance for Civil Servants. The Old-Age Savings Program is an insurance program that consists of Endowment Insurance linked to retirement age combined with Death Insurance.

Endowment Insurance is provided to participants upon retirement age or to their heirs if the participant passes away before retirement age. Death Insurance (Askem) is provided to participants if the spouse/child passes away or to their heirs if the participant passes away.

Death Insurance for a child is provided if the child is under 21 or 25 years old if still in school and unmarried. Membership in the THT Program begins when the individual is appointed as a candidate for Civil Servant. The obligation to pay contributions starts in the month the participant receives income and ends at the end of the month in which they cease to be a participant. (Article 6 of Government Regulation No. 25 of 1981).

- Death;
- No longer being a participant for other reasons based on applicable laws and regulations.

Participants in the THT Program consist of:

- Civil Servants, except for Civil Servants in Department of Defense and Security; and
- State officials.

Manfaat Program THT terdiri dari:

- a. Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun; dan
- b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, istri/suami dan anak peserta meninggal dunia.

Pembayaran klaim Asuransi Dwiguna menggunakan kombinasi formula masa kerja dan gaji pokok tahun 1997 serta masa kerja dan gaji pokok tahun 2015.

Formula Manfaat Program THT bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: 128/PMK.02/2016 dan 23/PMK.02/2023 adalah sebagai berikut :

The benefits of the THT program consist of:

- a. Endowment Insurance Benefits are provided to participants upon reaching retirement age or to their heirs in the event of the participant dies before reaching retirement age; and
- b. Death Insurance (Askem) benefits are paid when the participant, spouse, and child of the participant pass away.

Claim payments of Endowment Insurance use a combination of the length of service and the basic salary formula for the year 1997, as well as the length of service and the basic salary formula for the year 2015.

The Benefit Formula for Civil Servants THT Program according to the Minister of Finance Regulations number: 128/PMK.02/2016 and 23/PMK.02/2023 was as follows:

TABEL RUMUS FORMULA MANFAAT ASURANSI DWIGUNA PNS
Table of Formula for Civil Servants Endowment Insurance Benefits

PENSIUN Pension	MENINGGAL Passed Away	KELUAR Retired
$\{0.60 \times MI1 \times P1\} + \{0.60 \times MI2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$	$\{0.60 \times Y1 \times P1\} + \{0.60 \times Y2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$	$\{F1 \times P1\} + \{F2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$

TABEL MANFAAT ASURANSI KEMATIAN (ASKEM) HAKIM
Table Formula for Death Insurance Benefits

SENDIRI Participant	PASANGAN Spouse	ANAK Child
8.000.000	6.000.000	4.000.000

Formula Manfaat Program THT bagi Hakim sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: 159PMK.02/2016 dan 21/PMK.02/2023 adalah sebagai berikut :

The Benefit Formula for Judges THT Program, according to the Minister of Finance Regulations number: 159/PMK.02/2016 and 21/PMK.02/2023, was as follows:

TABEL RUMUS FORMULA MANFAAT ASURANSI DWIGUNA HAKIM
Table of Formula for Judges Endowment Insurance Benefits

PENSIUN Pension	MENINGGAL Passed Away	KELUAR Retired
$\{0.55 \times MI1 \times P1\} + \{0.60 \times MI2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$	$\{0.55 \times Y1 \times P1\} + \{0.60 \times Y2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$	$\{F1 \times P1\} + \{F2 \times (P2 - P1)\} + \sum(SI + HP)$

TABEL MANFAAT ASURANSI KEMATIAN (ASKEM) HAKIM
Table Formula for Death Insurance Benefits

SENDIRI Participant	PASANGAN Spouse	ANAK Child
8.000.000	6.000.000	4.000.000



Formula Manfaat Program THT bagi Pejabat Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor: 107/PMK.02/2010 adalah sebagai berikut:

The Benefit Formula for State Officials THT Program, according to the Minister of Finance Regulation number: 107/PMK.02/2010, was as follows:

TABEL RUMUS FORMULA MANFAAT ASURANSI DWIGUNA PEJABAT NEGARA
Table of Formula for State Officials Endowment Insurance Benefits

PENSIUN Pension	MENINGGAL Passed Away	KELUAR Retired
$0.55 \times MI1 \times P1$	$0.55 (5+B/12).P$	$0.55 \times MI1 \times P1$

TABEL MANFAAT ASURANSI KEMATIAN (ASKEM) PEJABAT NEGARA (HANYA DIBERIKAN PADA PESERTA AKTIF)
Table of Formula For State Officials Death Insurance Benefits (only given to active participants)

SENDIRI Participant	PASANGAN Spouse	ANAK Child
$2 \times P$	$1,5 \times P$	$0,75 \times P$

Kewajiban Peserta Program THT:

- Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak) setiap bulan;
- Keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta; dan
- Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri keluarga peserta.

Obligations of THT Program Participants:

- Pay Contribution of 3.25% of the employee's income (basic salary plus spouse allowance and child support) every month;
- Provide information about the participant's personal and family data; and
- Report any changes in income data or changes in the participant's family data.

PENGELOLAAN DANA PROGRAM THT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

THT PROGRAM FUND MANAGEMENT

Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021 of 2021 concerning Procedures for the Management of Contributions and Reporting on the Implementation of Old-Age Savings Programs, Work Accident Security, and Death Security for State Civil Apparatus Employees, Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police.



PROGRAM PENSIUN Pension Program

Program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya mengabdikan pada negara.

The Pension Program is a program that provides monthly income to pension recipients as an old-age security and as an appreciation for their dedicated services to the country.

PROGRAM PENSIUN PNS

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintah.

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1969 tersebut antara lain disebutkan bahwa sambil menunggu terbentuknya Dana Pensiun sesuai amanat UU tersebut, maka untuk sementara sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*pay as you go*). Pelaksanaan pembayaran pensiun pada awalnya dibayarkan melalui KPKN/Kas Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, pemotongan iuran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah 3,25% untuk program THT dan 4,75% untuk program pensiun. Untuk program THT pengelolaannya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) dan untuk pensiun disimpan pada bank pemerintah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, Pemerintah mengalihkan pengelolaan potongan iuran pensiun kepada PT TASPEN (Persero) melalui surat Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985 dan mengalihkan pembayaran manfaat pensiun yang semula dilakukan oleh KPKN/Kas Negara kepada PT TASPEN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Bali, NTB, NTT terhitung 1 Januari 1987;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-1402 tanggal 14 November 1987 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Sumatera terhitung 1 Januari 1988;

PENSION PROGRAM FOR CIVIL SERVANTS (PNS)

Pension provides income to pension recipients every month as an old-age security and as an appreciation for the services of Civil Servants who have worked for years in government service.

The implementation of pension payments was based on Law Number 11 of 1969 concerning Civil Servant Pensions and Widow/Widower Pensions. Article 2 of Law Number 11 of 1969 stipulates that while waiting to establish the Pension Fund according to the law, the temporary source of pension payment funds comes from the State Budget (*pay-as-you-go*). Initially, pension payments were made through KPKN/State Treasury.

Based on Presidential Decree Number 8 of 1977 concerning Amendments and Additions to Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 56 of 1974 concerning the Division, Use, Deduction Method, Deposit, and the amount of contributions collected from Civil Servants, State officials, and Pension Recipients, the deduction of contributions for Civil Servants and State officials is 3.25% for the THT program and 4.75% for the pension program. The management of the THT program is entrusted to PT TASPEN (Persero), and pensions are deposited in a government bank.

With the enactment of Government Regulation Number 25 of 1981, the Government transferred the management of pension contribution deductions to PT TASPEN (Persero) through a letter Number S-244/MK.011/1985 dated February 21, 1985. The payment of pension benefits, which KPKN/State Treasury originally carried out, was also transferred to PT TASPEN (Persero) based on a letter from the Minister of Finance as follows:

- a. The Minister of Finance Decree Number 822/KMK.03/1986 dated September 22, 1986, and the Minister of Home Affairs Decree Number 842.1-841 dated October 13, 1986, regarding the assignment of pension payments in the Bali, NTB, NTT regions, effective January 1, 1987;
- b. The Minister of Finance Decree Number 702/KMK.03/1987, dated October 31, 1987, and the Minister of Home Affairs Decree Number 842.1-1402, dated November 14, 1987, regarding the assignment of pension payments in the Sumatera region, effective January 1, 1988;



- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-755 tanggal 27 September 1988 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Jawa dan Madura terhitung 1 Januari 1989; dan
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990 tentang penugasan pembayaran pensiun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur terhitung 1 April 1990.

Kebijakan Pemerintah atas penugasan pengelolaan akumulasi iuran pensiun yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. S-1517/MK.013/1987 Perihal Biaya Penyelenggaraan Pensiun Dari Dana Pensiun, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Kebijakan Pemerintah atas penugasan pembayaran Pensiun:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. PMK-82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) dan peraturan pelaksanaannya melalui PER-44/PB/2018; dan
- c. PMK-211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) yang telah diubah dengan PMK Nomor 39/PMK.02/2021.

- c. The Minister of Finance Decree Number 812/KMK.03/1988, dated August 23, 1988, and the Minister of Home Affairs Decree Number 842.1-755, dated September 27, 1988, regarding the assignment of pension payments in the Java and Madura regions, effective January 1, 1989; and
- d. The Minister of Finance Decree Number 79/KMK.03/1990, dated January 22, 1990, and the Minister of Home Affairs Decree Number 842.1-099, dated February 12, 1990, regarding the assignment of pension payments in the Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, and East Timor regions, effective April 1, 1990.

Government policies on the management assignment of pension contribution accumulation are:

- a. Minister of Finance Regulation Number 169/PMK.02/2019 concerning Reporting on AIP Management of Civil Servants and State officials;
- b. Government of the Republic of Indonesia Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Social Insurance for Civil Servants;
- c. Decree of the Minister of Finance Number: 511/KMK.06/2002 concerning Pension Fund Investment, which has been amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 52/PMK.02/2021 concerning Management of Accumulated Pension Contributions of Civil Servants, State Officials, Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, and Members of the National Police of the Republic of Indonesia; and
- d. S-1517/MK.013/1987 Regarding the Cost of Organizing Pensions From Pension Funds, which has been amended by the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 39/PMK.02/2021 concerning the Operational Costs for the Payment of Pension Benefits carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero).

Government policies for assigning pension payments:

- a. Law Number 11 of 1969 concerning Civil Employee Pension and Employee Widows/Widower Retirement;
- b. PMK-82/PMK.02/2015 concerning Procedures for Calculation, Provision, Disbursement, and Accountability of Pension Expenditure Funds Conducted by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) and its implementing regulation through PER-44/PB/2018; and
- c. PMK-211/PMK.02/2015 concerning Operational Costs of Payment of Pension Benefits Implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero), which has been amended by PMK Number 39/PMK.02/2021.

d. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016

d. Recipients of Veteran Allowance and Honor Funds are paid based on Government Regulation Number 67 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 15 of 2012 concerning Veterans of the Republic of Indonesian, as amended by Government Regulation Number 23 of 2016.

Dalam perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing Akumulasi luran Pensiun PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, namun sejak tahun 2009 sepenuhnya (100%) bersumber dari APBN.

In its development, the payment of civil servant pensions aside from the APBN also originated from the sharing of the accumulation of PNS pension contributions based on the Decree of the Minister of Finance, but since 2009, it has fully (100%) been sourced from the State Budget (APBN).

Komposisi *sharing* pembayaran pensiun adalah sebagai berikut:

The sharing composition for pension payments is as follows:

TABEL KOMPOSISI SHARING PEMBAYARAN PENSIUN
Table of Sharing Composition for Pension Payments

NO	PERIODE Period	PEMBAGIAN Sharing			KETERANGAN Description
		APBN State Budget	AIP PNS		
1	Januari - Maret 1994 January - March 1994	0%	100%	684,48	Surat Menteri Keuangan No 1204/MK03/1993 Letter of Minister of Finance No 1204/MK03/1993
2	April - Desember 1994 April - December 1994	77,50%	22,50%	462,03	Surat DJA No S-1684/A/56/0394 Letter of DJA No S-1684/A/56/0394
3	Januari - Desember 1995 January - December 1995	77,50%	22,50%	761,00	Surat DJA No S-1684/A/56/0394 Letter of DJA No S-1684/A/56/0394
4	Januari - Desember 1996 January - December 1996	77,50%	22,50%	921,88	Surat DJA No S-1684/A/56/0394 Letter of DJA No S-1684/A/56/0394
5	Januari - Maret 1997 January - March 1997	77,50%	22,50%	1.106,78	Surat DJA No S-1684/A/56/0394 Letter of DJA No S-1684/A/56/0394
6	April - Desember 1997 April - December 1997	77%	23%		Surat DJA No S-993/A/67/0297 Letter of DJA No S-993/A/67/0297
7	Januari - Desember 1998 January - December 1998	77%	23%	1.443,70	Surat DJA No S-993/A/67/0297 Letter of DJA No S-993/A/67/0297
8	Januari - Desember 1999 January - December 1999	75%	25%	2.116,44	Surat DJA No S-3389/A/1999 Letter of DJA No S-3389/A/1999
9	Januari - Desember 2000 January - December 2000	75%	25%	1.750,61	Surat DJA No S-3389/A/1999 Letter of DJA No S-3389/A/1999
10	10 Januari - Desember 2001 January 10 - December 2001	75%	25%	3.367,91	Surat DJA No S-3389/A/1999 Letter of DJA No S-3389/A/1999
11	11 Januari - Desember 2002 January 11 - December 2002	75%	25%	3.394,75	Surat DJA No S-3389/A11999 Letter of DJA No S-3389/A11999
12	12 Januari - Desember 2003 January 12 - December 2003	79%	21%	3.391,81	Surat Menteri Keuangan No S-6878/MK2/2002 Letter of Minister of Finance No S-6878/MK2/2002
13	13 Januari - Desember 2004 January 13 - December 2004	79%	21%	3.368,83	Surat Menteri Keuangan No S-6878/MK2/2002 Letter of Minister of Finance No S-6878/MK2/2002
14	14 Januari - Desember 2005 January 14 - December 2005	79%	21%	3.609,06	Surat Menteri Keuangan No S-6878/MK2/2002 Letter of Minister of Finance No S-6878/MK2/2002
15	15 Januari - Desember 2006 January 15 - December 2006	82,50%	17,50%	3.772,13	Surat Menteri Keuangan No S-07/MK2/2006 Letter of Minister of Finance No S-07/MK2/2006
16	16 Januari - Desember 2007 January 16 - December 2007	82,50%	14,50%	3.386,23	Surat Menteri Keuangan No S-3/MK2/2007 Letter of Minister of Finance No S-3/MK2/2007
17	17 Januari - Desember 2008 January 17 - December 2008	91%	9%	2.473,86	Surat Menteri Keuangan No S-05/MK2/2008 Letter of Minister of Finance No S-05/MK2/2008
				36.011,52	



Penggunaan *sharing* dari Akumulasi Iuran Pensiun selanjutnya diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Kelompok Penerima Pensiun adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
2. Pegawai Negeri Daerah Otonom;
3. Pejabat Negara;
4. Hakim;
5. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan;
6. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989;
7. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan;
8. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI; dan
9. Penerima Pensiun Pegadaian.

b. Hak-hak Peserta Program Pensiun:

1. Pensiun Sendiri ($2,5\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{Masa Kerja}$) + Tunjangan;
2. Pensiun Janda/Duda ($36\% \times \text{Gaji Pokok}$) + Tunjangan;
3. Pensiun Yatim Piatu ($36\% \times \text{Gaji Pokok}$) + Tunjangan;
4. Pensiun Orang Tua ($20\% \times 72\% \times \text{Gaji Pokok}$) + Tunjangan;
5. Uang Duka Wafat (Jika pensiunan meninggal dunia):
 - a. 3 x Penghasilan kotor terakhir (PNS/Pejabat/TNI/POLRI)
 - b. 2 x Tunjangan Veteran (veteran Sendiri) / 1 x Tunjangan Veteran Janda/ Duda (Jd/Dd Veteran)
6. Uang Pensiun Terusan, jika masih terdapat ahli waris yang berhak pensiun Janda/Duda/Yatim-piatu
 - a. Selama 4 bulan (PNS/Pejabat)
 - b. Selama 6/12/18 bulan (TNI/POLRI/Veteran)
 - c. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tidak ada Pensiun Terusan

Peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya.

The use of sharing from the Accumulation of Pension Contributions is further regulated in Government Regulation Number 20 of 2013 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 52/PMK.02/2021 concerning Management of Accumulated Pension Contributions for Civil Servants, State officials, Indonesian National Armed Forces Soldiers, and Members of the State Police of the Republic of Indonesia.

a. Pension Recipients are:

1. Central Civil Servants;
2. Autonomous Regional Civil Servants;
3. State officials;
4. Judges;
5. Recipients of Independence Pioneer Benefits;
6. Pension Recipients of dismissed ABRI members with pension rights before April 1989;
7. Recipients of Veteran Benefits and Honor Funds;
8. Retirement Recipients of former Civil Servants of the Ministry of Transportation at PT KAI; and
9. Pawn Pension Recipients.

b. Pension Program Participant Rights:

1. Self-Retirement ($2.5\% \times \text{Basic Salary} \times \text{Working Period}$) + Allowances;
2. Pension of a Widow / Widower ($36\% \times \text{Basic Salary}$) + Allowances;
3. Orphans' Pension ($36\% \times \text{Basic Salary}$) + Allowances;
4. Parent's Pension ($20\% \times 72\% \times \text{Basic Salary}$) + Allowances;
5. Death Grief Money (In case of retiree's passed away):
 - a. 3 x Last Gross Income (Civil Servant/Official/Military/Police)
 - b. 2 x Veteran Allowance (Veteran themselves) / 1 x Veteran Allowance for Widow/Widower (Veteran Widow/Widower)
6. Continuous Pension if eligible heirs are still present for pension of Widow/Widower/ Orphan:
 - a. For 4 months (Civil Servant/Official)
 - b. For 6/12/18 months (Military/Police/Veteran)
 - c. Founding Fathers of the Republic of Indonesia (PKRI)/Central Indonesian National Committee (KNIP) are not eligible for Continuous Pension.

Participants who quit not due to retirement or die (retire without pension rights) receive a pension contribution return (4.75%) along with its development.

TABEL RUMUS FORMULA MANFAAT PENSIUN
Table of Retirement Benefits Formula

PESERTA PNS Civil Servant Participants	PEJABAT NEGARA State Officials	JANDA/DUDA/YATIM PIATU Widow/Widower/Orphans	PENSIUN ORANG TUA Parent's Pension
<p>Normal (2,5% x Masa Kerja x Gapok) + Tunjangan (2.5% x Years of Service x Basic Salary) + Allowances</p> <p>Cacat/Disability (75% x Gapok) + Tunjangan (75% x Basic Salary) + Allowances</p>	<p>Normal (1% x Masa Kerja Dalam Bulan x Gapok) + Tunjangan (1% x Months of Services x Basic Salary) + Allowances</p>	<p>(36% x dasar pensiunan) + Tunjangan (36% x basic pension) + Allowance</p>	<p>(20% x Pensiun janda duda) + Tunjangan (20% x widow widower pension) + Allowance</p>

c. Kewajiban Peserta dan Penerima Manfaat Program Pensiun:

1. Peserta Aktif

Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak) setiap bulan dan melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya;

2. Penerima Pensiun

Melaporkan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.

d. Sumber Dana Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Pensiun

Kebijakan pemerintah terkait pembayaran pensiun sesuai Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 serta terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015.

1. PT TASPEN (Persero) menyampaikan surat tagihan belanja pensiun dengan dilampiri kuitansi/tanda terima sesuai jumlah bruto pembayaran pensiun yang tercatat dalam Dapem Induk, Dapem Susulan dan Non-Dapem;
2. PT TASPEN (Persero) bertanggungjawab mutlak sepenuhnya atas penggunaan dana belanja pensiun yang diterima;

c. Obligations of Participants and Beneficiaries of Pension Program:

1. Active Participants

Pay contributions of 4.75% of employee income (basic salary plus wife and child allowances) every month and report changes in participant and family data;

2. Pension Recipient

Report changes in data on pension recipients and their families.

d. Source of Funds for the Purposes of Pension Payments

Government policies related to pension payments are in accordance with Law number 11 of 1969 and the issuance of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury which was followed by Regulation of the Minister of Finance Number PMK 82/PMK.02/2015 dated April 23, 2015 concerning Procedures for Calculation, Provision, Disbursement and Accountability of Pension Expenditure Funds implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as well as Regulation of the Director General of Treasury Number PER-44/PB/2018 dated December 31, 2018 concerning the Second Amendment to Regulation of the Director General of Treasury Number PER-19/PB/2015.

1. PT TASPEN (Persero) submits a retirement expenditure billing accompanied by receipts in accordance with the gross amount of pension payments recorded in List of Principal Payment (Dapem Induk), List of Follow-Up Payment (Dapem Susulan), and Non-List of Payment (Non-Dapem);
2. PT TASPEN (Persero) is absolutely responsible for the use of the received pension expenditure;



3. PT TASPEN (Persero) harus memotong, menyimpan, membayar atau, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan potongan belanja pensiun yang menjadi hak Negara/Daerah untuk keuntungan Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
4. Mekanisme tagihan belanja pensiun dibayarkan sebesar 100% oleh Pemerintah.

Dengan adanya kewenangan dan beban tanggung jawab yang lebih besar dalam pembayaran pensiun kepada PT TASPEN (Persero), maka perlu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas penyaluran dan pertanggungjawaban pembayaran yang dilakukan baik secara langsung oleh PT TASPEN (Persero) maupun oleh mitra bayar (pos/perbankan).

e. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS

Pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam PMK ini dijelaskan bahwa dana akumulasi iuran Pensiun berupa aset investasi dapat ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri berupa: Surat Berharga Negara, Deposito Berjangka, Saham yang tercatat di bursa efek, Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan dalam bursa efek, Reksadana dan Penyertaan Langsung. Selain itu, PMK ini juga mengatur besaran *fee* yang diterima Perseroan sebagai pengelola Dana AIP PNS.

Pengelolaan administrasi dan laporan dana akumulasi iuran pensiun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

f. Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS tahun 2020 dihitung berdasarkan alokasi beban kerja sebesar 70,22% dari total biaya usaha Perseroan setelah diperhitungkan dengan *negative list* (tantiem, jasa produksi, babinroh, baporseni, perayaan, sekata, periptas, sumbangan/retribusi, perjalanan dinas luar negeri direksi, seminar/lokakarya direksi, *sponsorship*, tanggap darurat, imbalan kerja, iuran OJK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

3. PT TASPEN (Persero) must withhold, store, pay or, hand over, manage and account for pension expenditure deductions that are the right of the State/Region for the benefit of the State Treasury/Regional Treasury in accordance with the provisions of the laws and regulations; and
4. The mechanism of the pension expenditure billing is paid 100% by the Government.

With the greater authority and burden of responsibility in pension payments to PT TASPEN (Persero), it needs to be followed by an increase in accountability for distribution and accountability of payments made both directly by PT TASPEN (Persero) and by payment partners (post/banking).

e. The Management of Civil Servants Pension Contribution Accumulation

The management of the Civil Servant Pension Accumulation Fund is carried out based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number PMK 52/PMK.02/2021 concerning the Management of Accumulated Pension Contributions for Civil Servants, State officials, Indonesian National Armed Forces Soldiers, and Members of the National Police of the Republic of Indonesia.

In this PMK it is explained that the development of pension contribution accumulation in the form of investment assets can be placed in domestic investment instruments in the form of Government Securities, Time Deposits, Shares listed on the stock exchange, Corporate Debt and Corporate Sukuk listed and traded on the stock exchange, Mutual Funds and Direct Participation. This PMK also regulates the amount of fees received by the Company as manager of AIP PNS Funds.

Administrative management and pension contribution accumulated fund reports are carried out based on Regulation of the Minister of Finance Number 169/PMK.02/2019 concerning Reports on the Management of Accumulated Pension Contribution for Civil Servants and State officials.

f. Operating Costs (BOP) on Payments for Civil Servant Pension Benefits

The Operating Cost (BOP) of Civil Servant Pension Benefit Payment in 2020 is calculated based on the allocation of workload amounting to 70.22% of the Company's total operating costs after being calculated with a negative list (tantiem, production services, babinroh, baporseni, celebration, sekata, periptas, donations/retribution, directors' foreign service trips, directors' seminars/workshops, *sponsorship*, emergency response, employee benefits, OJK contributions in accordance

Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) serta implementasi hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal (Inspektorat III).

Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-786/MK.05/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun PT TASPEN (Persero) Tahun Anggaran 2020, Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun Anggaran 2020 maksimal sebesar realisasi BOP Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun Anggaran 2019 yaitu Rp717.538.351.000.

Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS tahun 2022 dan 2021 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). PMK tersebut mencabut PMK Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) menjelaskan bahwa besaran BOP dan biaya satuan yang diberikan kepada PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 513/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2021 yang telah menetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2021 sebesar Rp691.275.368.730 dan Biaya Satuan penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2021 sebesar Rp19.984 per penerima manfaat pensiun per bulan.

Pada tanggal 15 September 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 370/KMK.02/2021 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) Tahun 2022 yang telah menetapkan besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2022 sebesar Rp665.789.740.909 dan Biaya Satuan penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) untuk tahun 2022 sebesar Rp18.521 per penerima manfaat pensiun per bulan.

with Minister of Finance Regulation Number 211/PMK.02/2015 concerning the Operational Costs of Implementing Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as well as the implementation of audit results conducted by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Inspectorate General (Inspektorat III).

In accordance with the Letter of the Minister of Finance Number S-786/MK.05/2020 dated September 7, 2020 regarding the Amount of Operational Costs for the Implementation of Payment of Pension Benefits of PT TASPEN (Persero) for Fiscal Year 2020, the amount of Operational Costs for Payment of Pension Benefits for Fiscal Year 2020 is a maximum of the realization of BOP for Payment of Pension Benefits for Fiscal Year 2019, which is Rp717,538,351,000.

Implementation of Operational Costs (BOP) for Payment of PNS Pension Benefits in 2022 and 2021 is regulated by Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.02/2021 concerning Operational Costs of Payment of Pension Benefits implemented by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero). The PMK revokes the PMK Number 211/PMK.02/2015 concerning Operational Costs for Payment of Pension Benefits carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) explains that the amount of BOP and unit costs given to PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) determined by the Decree of the Minister of Finance.

On December 22, 2021, the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 513/KMK.02/2021 concerning the Amount of Operational Fees for Payment of Pension Benefits implemented by PT TASPEN (Persero) in 2021 that has determined the Amount of Operational Costs and Unit Fees for Payment of Pension Benefits implemented by PT TASPEN (Persero) in 2021 has determined the amount of Operational Costs for the Implementation of the payment of pension benefits implemented by PT TASPEN (Persero) for 2021 amounting to Rp691,275,368,730 and the Unit Cost of implementing pension benefit payments carried out by PT TASPEN (Persero) for 2021 amounting to Rp19,984 per pension benefit recipient per month.

On September 15, 2022, the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 370/KMK.02/2021 was issued concerning the Amount of Operational Costs and Unit Cost of Implementation and Unit Costs of Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) in 2022, which has determined the amount of Operational Costs for the implementation of pension benefits payments implemented by PT TASPEN (Persero) for 2022 amounting to Rp665,789,740,909 and the Unit Cost of implementing pension benefit payments implemented by PT TASPEN (Persero) for 2022, amounting to Rp18,521 per pension benefit recipient per month.



Pembiayaan atas Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2021 berasal dari hasil pengembangan Dana AIP PNS, selanjutnya untuk tahun 2022 akan didanai oleh pemerintah melalui APBN.

g. Perubahan PP Nomor 25/1981 dengan PP Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil, pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini adalah:

1. Akumulasi iuran merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh Pemerintah.
2. Pengenaan sanksi apabila terdapat keterlambatan penyeteroran iuran.
3. Iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua dikelola dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.
4. Iuran pemberi kerja (yang menjadi kewajiban Pemerintah) yaitu iuran pensiun dan THT PNS, besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
5. Dalam hal Pemerintah (pemberi kerja) belum melaksanakan pembayaran untuk iuran tersebut, Pemerintah membayar seluruh atau sebagian manfaat pensiun dan membayar kewajiban masa lalu program THT yang belum terpenuhi dari APBN.

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pokok-pokok yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:
 - a. PNS
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.
2. Batas Usia Pensiun:
 - a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

Funding for the Operating Costs (BOP) of Pension Benefit Payments in 2021 came from the results of the development of the Civil Servant AIP Fund; then, for 2022, it would be funded by the Government through the State Budget (APBN).

g. Amendment to PP Number 25/1981 with PP Number 20 of 2013

Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendment to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants Insurance, the principles set out in this Regulation are:

1. Accumulated Contributions are funds belonging to participants collectively controlled by the Government.
2. Imposition of sanctions if there are late contributions.
3. Pension contributions and old-age savings are managed and developed by considering the aspects of liquidity, solvency, prudence, security of funds and adequate returns.
4. Employer contributions (which are the Government's obligation) are pension contributions and PNS THT. A separate Government Regulation will determine the amount.
5. In the event that the Government (employer) has not yet made payment for the contribution, the Government pays all or part of the pension benefit and pays the past obligations of the THT program that have not been fulfilled from the APBN.

h. Law Number 5 of 2014

The principles stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus are as follows:

1. Civil Servants (ASN) consist of:
 - a. Civil Servants
ASN employees who are appointed as permanent employees by the Employee Supervisory officers and have a national employee ID number.
 - b. Government Employees with Work Agreements (PPPK)
ASN employees who are appointed as employees with a work agreement by the Staffing officer in accordance with the needs of Government agencies and the provisions of the ASN Law.
2. Retirement Age Limits:
 - a. 58 years for Administrative officer;
 - b. 60 years for High Management officers.

3. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
 - c. Mencapai batas usia pensiun; dan
 - d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
 5. Jaminan pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
 6. Jaminan pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS mencakup Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional.
 7. Sumber pembiayaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
 8. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Bantuan Hukum.
 9. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PPPK berupa:
 - a. Jaminan Hari Tua;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Bantuan Hukum.
 10. Perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 11. Perlindungan berupa bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi dipengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
3. Civil servants who stop working are entitled to pension and old-age insurance in accordance with the statutory provisions.
 4. Civil Servants are provided with pension benefits, if:
 - a. Passed away;
 - b. At their own request with a certain age and years of service;
 - c. Reached the retirement age limit; and
 - d. Streamline the organization or government policies that result in early retirement or are physically and/or spiritually incapable so they cannot carry out their duties and obligations.
 5. Civil servant pension benefits and civil servant old-age insurance are provided as a protection for the continuation of retirement income, as a right and as an appreciation for civil servants' service.
 6. Civil servant pension benefits and civil servant old-age savings insurance include pension benefits and old-age savings provided in national social security programs.
 7. Sources of funding for pension benefits and old-age insurance come from the Government as the employer and the contributions of the relevant civil servants.
 8. The Government is obliged to provide protection in the form of:
 - a. Health Insurance;
 - b. Work Accident Security;
 - c. Death Security; and
 - d. Legal Aid.
 9. The Government is obliged to provide protection to PPPK in the form of:
 - a. Old-Age Insurance;
 - b. Health Insurance;
 - c. Work Accident Security;
 - d. Death Security; and
 - e. Legal Aid.
 10. Protection in the form of Old-Age Insurance, Health Insurance, Work Accident Security and Death Security is implemented in accordance with the National Social Security System.
 11. Protection in the form of legal aid in the form of providing legal assistance in cases faced in court related to the implementation of their duties.



JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Work Accident Security (JKK)

JAMINAN KEMATIAN (JKM) Death Security (JKM)



PROGRAM JKK DAN JKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 dan 106 Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengelolaan Program JKK dan JKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Program Jaminan Kematian (JKM) merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

a. Pokok-pokok yang diatur dalam PP ini adalah:

1. Peserta Program JKK dan JKM

- Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Pegawai Negeri Sipil;
- Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Pejabat negara; dan

JKK AND JKM PROGRAMS

Based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Articles 92 and 106, the Government is obliged to provide protection in the form of Old-Age Insurance, Health Insurance, Work Accident Security, and Death Security which are implemented in accordance with the national social security system. The implementation of the Work Accident Security (JKK) Program and the Death Security (JKM) Program is regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2015 concerning Work Accident Security and Death Security for Civil Servant Apparatus Employees, has undergone amendments with Government Regulation Number 66 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Security and Death Security for State Civil Apparatus Employees, and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Employees with Work Agreements.

Management of the JKK and JKM Programs is carried out based on Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021 of 2021 concerning Procedures for the Management of Contributions and Reporting on the Implementation of Old-Age Savings Programs, Work Accident Security, and Death Security for State Civil Apparatus Employees, Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police.

The Work Accident Security (JKK) Program is a protection against the risk of work accidents or occupational diseases in the form of care, compensations, and disability benefits. The Death Security (JKM) Program is a protection against the risk of death not due to workplace accidents in the form of death benefits.

a. The principles set out in this PP are:

1. JKK and JKM Participant Program:

- Candidates for Civil Servants;
- Civil Servants;
- Government officials with Employment Agreements (PPPK);
- State officials; and

- e) Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecuali Pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kepesertaan Program JKK dan JKM dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan sebelum tanggal 1 Juli 2015 dan jika peserta diangkat pada atau setelah tanggal 1 Juli 2015 kepesertaannya terhitung mulai gajinya dibayarkan.

Kepesertaan Program JKK dan JKM berakhir dalam hal:

- a) PNS, Pejabat Negara, dan Pimpinan Anggota DPRD:
- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pensiun;
 - 3) Tidak lagi menjadi peserta karena sebab-sebab lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) PPPK:
- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Diputus hubungan kerja.

2. Manfaat Program JKK

1. Perawatan diberikan sesuai kebutuhan medis dan diberikan kepada peserta sampai sembuh.
2. Santunan diberikan kepada ahli waris dan dibayarkan sekaligus, terdiri:
 - a. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% x 80 x gaji terakhir.
 - b. Uang Duka Tewas sebesar 6 x gaji terakhir.
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000 sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
 - d. Bantuan beasiswa diberikan kepada anak peserta yang tewas, dengan ketentuan:
 - Belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di Tingkat Dasar sebesar Rp45.000.000.
 - Duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp35.000.000.

- e) Leaders/members of the Regional People's Representative Council (DPRD), except ASN Employees within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police.

Participation in the JKK and JKM Programs starts from the date of appointment, and the salary is paid before July 1, 2015, and if the participants are appointed on or after July 1, 2015, membership starts from the date their salary is paid.

The JKK and JKM Program participation ended in the event of:

- a) Civil Servants, State officials and DPRD Leaders/Members:
- 1) Passed Away;
 - 2) Pension;
 - 3) No longer a participant due to other reasons based on applicable statutory regulations.
- b) PPPK:
- 1) Passed Away;
 - 2) Termination of employment.

2. Benefits of the JKK Program

1. Treatment is given according to medical needs and given to participants until recovery.
2. Compensation is given to the heirs and paid at once, consisting of:
 - a. Death benefit due to work accident is 60% x 80 x last salary.
 - b. Dead Grieves amounted to 6 x the last salary.
 - c. Funeral costs of Rp10,000,000 in exchange for the cost of the coffin and its equipment as well as the burial ground and costs at the burial place.
 - d. Scholarship assistance is given to children of participant who died, provided that:
 - Not yet entering school age up to elementary school level of Rp45,000,000.
 - Seated at a Junior High School of Rp35,000,000.



- Duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar Rp25.000.000.
 - Duduk di Tingkat Diploma, Sarjana, atau setingkat sebesar Rp15.000.000.
 - Diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah, berusia maksimal 25 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja.
- Seated at a Senior High School Level of Rp25,000,000.
 - Seated at the Diploma, Bachelor Degree, or a level of Rp15,000,000.
 - Given to 2 (two) children who have not entered school age or are still in school or college, a maximum age of 25 years, have never been married and have not worked.

3. Tunjangan Cacat diberikan apabila peserta:
- a. Mengalami cacat dan diberhentikan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan, dan dibayarkan sampai peserta meninggal dunia.
 - b. Persentase tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ.

3. Disability benefits are given if a participant:
- a. Having a disability and being dismissed as an employee of the State Civil Apparatus or terminated as PPPK due to disability is evidenced by a Decree, and is paid until the participant dies.
 - b. A certain percentage of salary for the reduction or loss of organ function.

3. Manfaat Program JKM

Bagi Peserta yang wafat, akan diberikan santunan kematian kepada ahli waris, berupa:

- a. Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris sebesar Rp15.000.000.
- b. Uang Duka Wafat sebesar 3 x gaji terakhir.
- c. Biaya Pemakaman sebesar Rp7.500.000 sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- d. Bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000 diberikan kepada anak peserta yang wafat dengan ketentuan:
 - 1) Diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah, berusia maksimal 25 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja.
 - 2) Bantuan Beasiswa diberikan apabila kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3. JKM Program Benefits

For Participants who die, death compensation will be given to the heirs, in the form of:

- a. Death benefit is given to the heirs in the amount of Rp15,000,000.
- b. Death Grief for 3 x the last salary.
- c. Funeral expenses of Rp7,500,000 in exchange for the cost of the coffin and its equipment as well as burial ground and costs at the burial place.
- d. Scholarship assistance in the amount of Rp15,000,000 is given to participant's children who die with the following provisions:
 - 1) Given to 2 (two) children who have not entered school age or are still in school or college, a maximum age of 25 years, have never been married and have not worked.
 - 2) Scholarship assistance is given if membership reaches at least 3 (three) years.

4. Iuran JKK dan JKM

- a. Iuran JKK dan JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja, yang meliputi:
 - 1) Program JKK sebesar 0,24% dari gaji peserta per bulan.

4. JKK and JKM Contributions

- a. JKK and JKM contributions are borne by the Employer, which includes:
 - 1) The JKK program is 0.24% of the participant's salary per month.

- | | |
|--|---|
| <p>2) Program JKM 0,30% dari gaji peserta perbulan, yang mengalami perubahan sejak 1 Juli 2017 menjadi 0,72%.</p> <p>b. Peserta yang gajinya dibayar melalui APBN, iuran diterima dari Pemerintah Pusat. Peserta yang gajinya dibayar melalui APBD, iuran diterima dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.</p> | <p>2) The JKM program is 0.30% of the participant's monthly salary, which has changed since July 1, 2017 to 0.72%.</p> <p>b. Participants whose salaries are paid through the State Budget, contributions are received from the Central Government. For participants whose salaries are paid through the APBD, contributions are received from the Provincial/District/City Government.</p> |
|--|---|

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT

a. PROGRAM THT

Program THT terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

b. PROGRAM PENSIUN

Program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

c. PROGRAM JKK

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

d. PROGRAM JKM

Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.

a. OLD-AGE SAVINGS (THT) PROGRAM

The THT program consists of Endowment Insurance linked to retirement age plus Death Insurance.

b. PENSION PROGRAM

A program that offers monthly income to pension recipients as old-age insurance and appreciation for the past services of the Civil Servants for many years working in the government service.

c. WORK ACCIDENT SECURITY (JKK) PROGRAM

The Work Accident Security (JKK) Program is a protection against the risks of work accidents or occupational diseases, in the form of treatment, compensation, and disability benefits.

d. DEATH SECURITY (JKM) PROGRAM

The Death Security (JKM) Program is a protection against the risks of death not caused by workplace accidents, in the form of death benefits.



PRODUK DAN / ATAU JASA YANG DIHASILKAN PRODUCTS AND/OR SERVICES PRODUCED

A. LAYANAN KLAIM OTOMATIS

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Direksi Nomor PD-02/DIR/2015 tentang Layanan Klaim Otomatis.
- b. Peraturan Direksi Nomor SE-05/DIR/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Klaim Otomatis.

2. Pengertian

Layanan Klaim Otomatis adalah peran aktif PT TASPEN (Persero) yang terintegrasi dengan instansi terkait Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan lainnya untuk memperoleh persyaratan dalam proses pengurusan dan pembayaran hak kepada penerima manfaat yang diyakini kebenarannya. Semua administrasi persyaratan klaim diurus TASPEN dan Instansi, sehingga Peserta tidak harus datang ke TASPEN.

B. TOOS (TASPEN ONE HOUR ONLINE SERVICES)

1. Dasar Pelaksanaan

Surat Edaran Direksi nomor SE-22/DIR/2011 tentang Pelaksanaan Elektronik Dapem (e-Dapem), Elektronik Klaim (E-Klaim), Layanan *Online*, Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), *Electronic Filing System* (EFS) di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang PT TASPEN (Persero).

2. Pengertian

TOOS merupakan layanan satu pintu untuk pengajuan klaim dan non-klaim secara *online* yang memberikan akses pengajuan secara langsung oleh peserta, mitra bayar, dan instansi peserta, sehingga dapat mereplikasikan fungsi layanan pada kantor cabang TASPEN.

Beberapa keunggulan TOOS adalah sebagai berikut:

- a) Digital klaim dimodifikasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta serta dapat diakses menggunakan *device* PC/Laptop, tablet, dan *Smartphone*.
- b) Pengajuan Klaim dapat dilacak menggunakan nomor tiket pengajuan dan dapat dipantau progresnya serta informasi mengenai kekurangan berkas atau berhak/tidak berhak terhadap manfaat yang diajukan.

A. AUTOMATIC CLAIM SERVICE

1. Basis of Implementation

- a. Board of Directors Regulation Number PD-02/DIR/2015 concerning Automatic Claim Services.
- b. Board of Directors Regulation Number SE-05/DIR/2015 concerning Implementation Guidelines for Automatic Claim Services.

2. Definition

Automatic Claim Service is the active role of PT TASPEN (Persero) integrated with relevant institutions such as the National Civil Service Agency (BKN), Regional Civil Service Agency (BKD), Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD)/Regional Financial and Asset Management Service (DPKAD), and others to obtain requirements in the process of managing and disbursing entitlements to beneficiaries believed to be valid. TASPEN and the institutions handle all claim requirement administrations, eliminating the need for participants to visit TASPEN.

B. TOOS (TASPEN ONE HOUR ONLINE SERVICES)

1. Basis of Implementation

Circular Letter of the Board of Directors No. SE-22/DIR/2011 regarding the Implementation of an Electronic List of Payment (e-Dapem), Electronic Claim (E-Klaim), Online Services, Utilization of Electronic Employee Cards (KPE), and Electronic Filing System (EFS) at Branch Offices (KCU/KC) of PT TASPEN (Persero).

2. Definition

TOOS is a one-stop service for the online submission of claims and non-claims, providing direct access to submission for participants, payment partners, and participant agencies. This replicates the service functions at TASPEN branch offices.

Some advantages of TOOS include:

- a) Digital claims adapted to technological advancements and participant needs, accessible through PC/Laptop, tablet, and smartphone devices.
- b) Claim submissions can be tracked using a submission ticket number, allowing monitoring of progress and information on document deficiencies or eligibility for the claimed benefits.

- c) TOOS tidak hanya dapat diakses oleh peserta saja, namun telah diberikan akses kepada Pemerintahan Daerah, Instansi, Kementerian/Lembaga untuk pengajuan klaim pegawainya secara individu maupun kelompok. Selain itu, Mitra Bayar sebagai Mitra Layanan TASPEN juga dapat mengakses TOOS guna proaktif terhadap peserta yang menggunakan layanan perbankan masing-masing.
- d) Dengan integrasi data dan sistem, TOOS memberikan akses untuk peserta untuk mendapatkan Layanan Klaim Otomatis, di mana tidak perlu ada pengurusan dokumen. Kewajiban peserta hanya konfirmasi data diri dan pemutakhiran data nomor rekening dan keluarga secara berkala.
- c) TOOS is not only accessible to participants but also grants access to Local Governments, Institutions, Ministries/Agencies for the individual or group submission of employee claims. Additionally, Payment Partners, as TASPEN Service Partners, can access TOOS to assist participants in using their respective banking services proactively.
- d) Through data and system integration, TOOS provides participants access to Automatic Claim Services, where no document processing is required. Participants only need to confirm personal data and periodically update account numbers and family data.

C. MPP (MALL PELAYANAN PUBLIK)

1. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) nomor PD-27/DIR/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan TASPEN Pada MAL Pelayanan Publik: MPP, Pemerintah Daerah

2. Pengertian

Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Melalui gerai TASPEN MPP, peserta dapat melakukan pengurusan kebutuhan keTASPENan, termasuk layanan informasi klaim, pengumpulan berkas klaim sampai dengan tahap verifikasi berkas klaim yang diterima dari peserta, pelayanan non klaim dan bantuan penggunaan aplikasi Layanan TASPEN. Dengan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik melalui empat program perlindungan, yakni program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pelayanan optimal akan terus diupayakan melalui beragam bentuk, baik secara digital maupun tatap muka, seperti layanan pada gerai TASPEN di Mal Pelayanan Publik.

C. MPP (PUBLIC SERVICE MALL)

1. Basis of Implementation

Board of Directors Regulation No. PD-27/DIR/2019 on the Implementation of TASPEN Services at Public Service Malls: MPP, Regional Governments.

2. Definition

Public Service Mall is a venue for the implementation of public services for goods, services, and/or administrative services. It expands integrated service functions at both central and regional levels and services from SOEs/ROEs/Private, aiming to provide fast, easy, affordable, safe, and comfortable services.

Through the TASPEN MPP outlets, participants can manage their needs related to TASPEN, including information on claims, claim document collection, verification stages of claim documents received from participants, non-claim services, and assistance with using the TASPEN service application. Committed to delivering optimal services through four protection programs: Old-Age Savings (THT), Pensions, Work Accident Security, and Death Security. Optimal services will continue to be provided in digital and face-to-face forms, such as services at TASPEN outlets in Public Service Malls.



D. MITRA LAYANAN TASPEN (*OFFICE CHANNELING*)

1. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Direksi Nomor: PD-19/DIR/2014 tentang Mitra Layanan TASPEN (*office Channeling*), Surat Edaran Direksi Nomor: SE-20/DIR/2015 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direksi Nomor: SE-16/DIR/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan dan Evaluasi Mitra Layanan TASPEN.

2. Pengertian

Mitra Layanan TASPEN adalah Layanan kepada peserta TASPEN yang dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Cabang Mitra Bayar dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan. Mitra Layanan TASPEN bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan pelayanan yang melebihi harapan peserta/penerima pensiun. Mitra Layanan TASPEN dilandasi dengan semangat saling menghormati demi terciptanya pelayanan yang semakin baik dan melebihi harapan para peserta/penerima pensiun.

Tugas Mitra Layanan TASPEN:

- a. Melayani informasi KeTASPENan.
- b. Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan klaim dari peserta/ahli waris.
- c. Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Non Klaim (Usul Skep, Janda/Duda, Mutasi, tambah keluarga).
- d. Meneruskan permohonan klaim dan non klaim kepada Kantor Cabang TASPEN.

E. AUTENTIKASI BIOMETRIK

1. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor: PD-30/DIR/2019 tentang Peraturan Direksi tentang Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun

2. Pengertian

Autentikasi Biometrik adalah proses autentikasi yang dilakukan berdasarkan data biometrik yang telah dilakukan melalui proses *enrollment*. Dalam melakukan autentikasi biometrik, sistem akan melakukan pencocokan data biometrik antara lain:

a. Wajah

Verifikasi dilakukan metode *face recognition* yaitu membandingkan data foto wajah yang sebelumnya telah dilakukan *enrollment*

D. TASPEN SERVICE PARTNERS (*OFFICE CHANNELING*)

1. Basis of Implementation

Board of Directors Regulation Number: PD-19/DIR/2014 concerning TASPEN Service Partners (Office Channeling), Board of Directors Circular Number: SE-20/DIR/2015 concerning Amendments to the Board of Directors Circular Number: SE-16/DIR/2014 concerning Implementation Guidelines of Determination and Evaluation of TASPEN Service Partners.

2. Definition

TASPEN Service Partners are services to TASPEN participants carried out through cooperation with Payment Partner Branch Offices to expand service coverage. The aim of TASPEN Service Partners is to facilitate, expedite, and provide services that exceed the expectations of participants/pension recipients. TASPEN Service Partners are based on the spirit of mutual respect for the creation of better and beyond-expectation services for participants/pension recipients.

Duties of TASPEN Service Partners:

- a. Providing information about TASPEN.
- b. Receiving and examining the completeness of claim applications from participants/heirs.
- c. Receiving and examining the completeness of non-claim applications (proposed decree of widows/widowers, mutations, and family additions).
- d. Forwarding claim and non-claim applications to TASPEN Branch Offices.

E. BIOMETRIC AUTHENTICATION

1. Basis of Implementation

PT TASPEN (Persero) Board of Directors Regulation Number: PD-30/DIR/2019 concerning Board of Directors Regulation on the Digitalization of Pension Payment Services.

2. Definition

Biometric Authentication is an authentication process based on biometric data that has been obtained through the enrollment process. In performing biometric authentication, the system will match biometric data, including:

a. Face

Verification is done using face recognition methods, comparing the facial photo data that has been enrolled with the face

dengan wajah yang dimasukkan dalam sistem. System juga melakukan deteksi gerakan peserta sesuai dengan perintah yang disampaikan melalui sistem guna mengetahui bahwa peserta masih hidup.

b. Suara

Verifikasi juga dilakukan dengan mencocokkan suara pensiunan dengan data suara yang sudah direkam sebelumnya (*voice recognition*) sesuai dengan instruksi pada sistem.

c. Sidik jari

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan sidik jari peserta. Peserta dapat memilih jari yang akan dilakukan autentikasi.

entered into the system. The system also detects participant movements according to the instructions conveyed through the system to ensure that the participant is still alive.

b. Voice

Verification is also done by matching the retiree's voice with the previously recorded voice data (voice recognition) according to the instructions in the system.

c. Fingerprint

Verification is done by matching the participant's fingerprints. The participant can choose which finger to use for authentication.

F. TCARE

1. Dasar Pelaksanaan

official Letter dari Sekretaris Perusahaan SRT132/A/082020 kepada Para Branch Manager Cabang Utama/Cabang.

2. Pengertian

TASPEN *Care* adalah layanan terintegrasi dari PT TASPEN (Persero) yang dapat digunakan peserta TASPEN baik aktif maupun pensiunan untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan dengan *system ticketing, download* formulir pengajuan klaim dan berisi kamus keTASPENan. Penerapan TCare pada PT TASPEN (Persero) dimulai sejak September 2019.

3. Person In Charge

Petugas/Admin aplikasi TCare pada Kantor Pusat:

- *Public Information Management Sub Dept. Head*
- *Public Information Management Staff*

Petugas/Admin aplikasi TCare pada Kantor Cabang:

- Manajer Bidang Umum dan SDM
- Asisten Manajer Umum dan SDM
- Pelaksana Umum dan SDM

G. PROSES KLAIM 45 MENIT

Proses klaim 45 menit adalah proses penyelesaian klaim yang di mulai dari Peserta memperoleh Nomor Antrian sampai dengan klaim diotorisasi maksimal paling lambat 45 menit. TASPEN memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Proses Layanan Klaim 45 Menit dengan Dukungan Data yang Akurat untuk Produk Tabungan Hari Tua dan Pensiun;

F. TCARE

1. Basis of Implementation

Official Letter from the Corporate Secretary SRT132/A/082020 to the Branch Offices Managers (KCU/KC).

2. Definition

TASPEN Care is an integrated service from PT TASPEN (Persero) that can be utilized by both active and retired TASPEN participants to submit questions and complaints using a ticketing system, download claim application forms, and includes a TASPEN glossary. The implementation of TCare at PT TASPEN (Persero) started in September 2019.

3. Person in Charge

Officers/ TCare Application Administrators at the Head Office:

- Public Information Management Sub Department Head
- Public Information Management Staff

Officers/ TCare Application Administrators at Branch Offices:

- General Affairs and HC Managers
- General Affairs and HC Assistant Managers
- General Affairs and HC Staff/Implementers

G. 45-MINUTE CLAIM PROCESS

The 45-minute claim process is the process of settling claims, starting from the participant obtaining a Queue Number until the claim is authorized, with a maximum processing time of 45 minutes. TASPEN obtained ISO 9001:2015 Quality Management System certification with the scope of a 45-Minute Claims Service Process with Accurate Data Support for Old-Age Savings and Pension products.



H. SMS/WA NOTIFIKASI

Short Message Service (SMS)/ WhatsApp Notifikasi merupakan media informasi satu arah yaitu pengiriman SMS/WA dari PT TASPEN (Persero) kepada peserta untuk memberitahukan berbagai informasi baik secara personal/individu maupun grup/massal, dengan maksud dan tujuan:

- Sebagai media dalam menyebarluaskan atau memberikan berbagai informasi yang dapat meningkatkan kedekatan dan membangun ikatan dengan peserta lebih efektif;
- Mempercepat proses informasi kepada peserta;
- Meminimalisir jumlah penipuan yang terjadi kepada peserta;
- Memberikan keterangan dan kepastian informasi kepada peserta;
- Memberikan notifikasi klaim saat proses pengajuan klaim

H. NOTIFICATION SMS/WA

Notification Short Message Services (SMS)/ WhatsApp serve as a one-way information medium, wherein PT TASPEN (Persero) sends SMS/WhatsApp messages to participants to provide various types of information, both personal/individual and group/mass, for the following purposes:

- As a medium to disseminate or provide various information that can enhance closeness and build a more effective bond with participants;
- Speeding up the information process for participants;
- Minimizing fraud against participants;
- Providing information and certainty of information to participants;
- Notifying participants during the claim submission process.

CARA KERJA APLIKASI How the Application Works



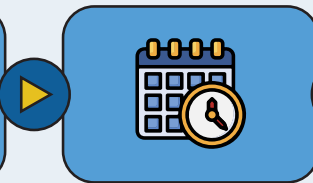
Peserta aktif, pensiunan, dan Masyarakat Umum dapat mengajukan permintaan informasi atau menyampaikan keluhan melalui aplikasi TCare (tcare.taspen.co.id).

Active participants, retirees, and the general public can submit information requests or complaints through the TCare application (tcare.taspen.co.id).



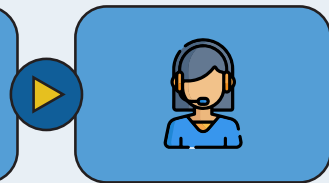
PIC TCare melakukan *monitoring* setiap harinya pada aplikasi TCare di jam operasional perusahaan. Setiap pertanyaan atau keluhan yang masuk wajib segera di respon maksimal dalam waktu 60 menit.

The TCare Person in Charge (PIC) monitors the TCare application daily during the Company's operational hours. Any received questions or complaints must be responded to within a maximum of 60 minutes.



Jam operasional yang berlaku pada PT TASPEN (Persero) adalah pada Senin s.d Kamis pukul 08.00-17.00 WIB, Jumat 07.30-16.30 WIB. Setiap permintaan informasi atau penyampaian keluhan peserta yang diajukan di luar jam kerja maka pertanyaan tersebut akan otomatis masuk ke Kantor Pusat dan dijawab oleh *Agent Call Center* TASPEN.

The operational hours for PT TASPEN (Persero) are from Monday to Thursday, 08:00-17:00 WIB, and Friday, 07:30-16:30 WIB. Any information requests or complaints submitted outside working hours will automatically be directed to the Head office and answered by TASPEN Call Center Agents.



Permintaan informasi atau penyampaian keluhan peserta yang akan ditangani oleh *Agent Call Center* melalui TCare adalah di luar jam operasional yang berlaku di PT TASPEN (Persero).

Information requests submission of complaints from participants that Call Center Agents will handle through TCare are those submitted outside the operational hours of PT TASPEN (Persero).

KEANGGOTAAN ASOSIASI [2-28][C.5]

MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS [2-28][C.5]

TASPEN turut berperan aktif di dalam berbagai asosiasi yang relevan dan mendukung dengan kegiatan usaha Perseroan. TASPEN menyakini dengan keikutsertaan dalam asosiasi-asosiasi tersebut menambah nilai manfaat jaringan dan informasi berbagai perkembangan yang terkait pengelolaan bisnis, serta membantu menyuarakan aspirasi para pemangku kepentingan. Daftar asosiasi yang diikuti oleh TASPEN sampai dengan periode pelaporan, adalah sebagai berikut:

TASPEN actively participates in various relevant associations and supports them through the Company's business activities. TASPEN believes that participation in these associations adds value by providing a network and information related to business management developments, as well as helping to voice the aspirations of stakeholders. The list of associations that TASPEN has participated in up to the reporting period was as follows:

KEANGGOTAAN ASOSIASI Membership in Associations

NO	NAMA ASOSIASI Name of Association	TIPE KEANGGOTAAN Type of Membership	STATUS KEANGGOTAAN Status of Membership
1	FH BUMN Public Relations Forum of SOEs	Anggota Member	Aktif Active
2	FCHI BUMN Indonesia Human Capital Forum of SOEs	Anggota Member	Aktif Active
3	BUMN Muda Young SOEs	Anggota Member	Aktif Active



PERUBAHAN SIGNIFIKAN [C.6] SIGNIFICANT CHANGES [C.6]

- a. Pada tanggal 1 Maret 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/45/DIK.00/01/03/2024 tentang penyidikan atas kegiatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Antonius N.S. Kosasih (selaku Direktur Investasi PT TASPEN (Persero) pada saat itu) atas kegiatan investasi PT TASPEN (Persero) tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh PT Insight Investment Management (IIM) yakni Reksa Dana Insight Tunas Bangsa *Balanced Fund 2* yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019.

Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kronologis penyidikan yang terjadi, proses hukum yang berlangsung saat ini mengarah kepada perbuatan pribadi/personal dan karena pemeriksaan sebelumnya dilakukan kepada personal perorangan dan bukan PT TASPEN (Persero) secara korporasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) Nomor KEP-08/DKTASPEN/032024 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT TASPEN (Persero) dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT TASPEN (Persero) memutuskan memberhentikan sementara Sdr. Antonius N.S. Kosasih dari jabatan Direktur Utama PT TASPEN (Persero) dan menunjuk Sdr. Rony Hanityo selaku Direktur Investasi untuk melaksanakan tugas Direktur Utama PT TASPEN (Persero).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, dampak dari proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Perseroan belum dapat diperkirakan.

- b. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-263/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tahun 2023 telah disampaikan bahwa Pemerintah menetapkan dan mengakui adanya UPSL pada program THT yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero) sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp25.871.215.355.337, terdiri atas:
- UPSL di tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2023 sebesar Rp22.176.507.759.421;
 - UPSL tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916.

- a. On March 1, 2024, the Corruption Eradication Commission (KPK) issued Investigation Warrant Number Sprin.Dik/45/DIK.00/01/03/2024 regarding the investigation into alleged corruption committed by Antonius N.S. Kosasih (as an Chief Investment Officer of PT TASPEN (Persero) at that time) regarding the investment activities of PT TASPEN (Persero) for the fiscal year 2019 managed by PT Insight Investment Management (IIM), namely the Insight Tunas Bangsa *Balanced Fund 2* Mutual Fund conducted on May 31, 2019.

Currently, the investigation process is still ongoing and does not have a legally binding decision. Based on the chronology of the investigation, the ongoing legal process is directed towards personal actions and because previous examinations were conducted on individual persons and not on PT TASPEN (Persero) as a corporation.

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) Number KEP-08/DKTASPEN/032024 regarding the Temporary Dismissal of the CEO of PT TASPEN (Persero) and the Appointment of the Acting CEO of PT TASPEN (Persero), it is decided to temporarily dismiss Mr. Antonius N.S. Kosasih from the position of CEO of PT TASPEN (Persero) and appoint Mr. Rony Hanityo as the Chief Investment Officer to carry out the duties of the CEO of PT TASPEN (Persero).

Until the issuance of the consolidated financial statements, the impacts of the legal process regarding alleged corruption in the management of the Company's finances and investment funds cannot be estimated.

- b. Based on the Letter from the Ministry of Finance Number S-263/MK.02/2024 dated March 18, 2024, regarding the Recognition and Determination of the Unfunded Past Service Liability (UPSL) of the Old-Age Savings (THT) Program managed by PT TASPEN (Persero) in 2023, it has been conveyed that the Government has determined and recognized the UPSL in the THT program managed by PT TASPEN (Persero) until 2023 amounting to Rp25,871,215,355,337, consisting of:
- UPSL in 2022, as stipulated in the Letter from the Minister of Finance Number S-75/MK.02/2023, amounting to Rp22,176,507,759,421;
 - UPSL in 2023 amounting to Rp3,694,707,595,916.

RANTAI PASOKAN [2-6]

SUPPLY CHAIN [2-6]

Kegiatan bisnis Perseroan membutuhkan kontribusi dari para pemasok dan distributor lain dalam satu rangkaian proses bisnis yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan pengembangan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif dan efisien. Sistem pengadaan ini membantu Perseroan untuk dapat menjalankan proses secara sehat dan transparan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [3-3]

Secara khusus, Perusahaan telah memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Peraturan Direksi PT TASPEN (Persero) Nomor: PD-38/DIR 2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pemeliharaan dan Penghapusbukuan Aset Tetap Perusahaan.

TASPEN memiliki komitmen dan berupaya secara maksimal untuk terus mendorong keterlibatan Pemasok Nasional termasuk Pemasok pada Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perseroan. Diharapkan Pemasok Nasional termasuk dapat semakin maju, berkembang dan berdaya saing yang akan berdampak positif bagi perekonomian Nasional.

Dalam rangka menjaga kualitas hasil kinerja pemasok, TASPEN melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak barang dan jasa. Hasil penilaian tersebut, menjadi masukan dan saran perbaikan terhadap proses Pemilihan Pemasok berikutnya.

The Company's business activities require contributions from other suppliers and distributors in an interconnected business process. Therefore, we continue to develop an information technology-based procurement system to ensure that the procurement process runs effectively and efficiently. This procurement system assists the Company in conducting the healthy and transparent process according to applicable laws and regulations. [3-3]

Specifically, the Company has procurement guidelines for goods and services that apply principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, reasonableness, accountability and include the rights and obligations of suppliers according to the prevailing regulations as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT TASPEN (Persero) Number: PD-38/DIR 2021 dated October 13, 2021, concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and/or Services, Maintenance, and Disposal of Company Fixed Assets.

TASPEN is committed and makes maximum efforts to encourage the involvement of National Suppliers, including Suppliers, in the Procurement of Goods and Services within the Company's environment. It is expected that National Suppliers can progress, develop, and become more competitive, which will positively impact the national economy.

To maintain the quality of supplier performance, TASPEN conducts monitoring and assessment the implementation of goods and services contracts. The results of these assessments serve as input and recommendations for improving the supplier selection process in the future.

JUMLAH PEMASOK BARANG

Number of Goods Suppliers

LOKASI GEOGRAFIS PEMASOK	JUMLAH PEMASOK BARANG Number of Goods Suppliers			NILAI KONTRAK PEKERJAAN Work Contract Value			Geographical Locations
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	
Nasional (Lokal)	164	68	235	72.563.088.548	21.986.758.576	165.147.227.663	National (Local)
Internasional	-	-	-	-	-	-	International
Jumlah	164	68	235	72.563.088.548	21.986.758.576	165.147.227.663	Total

JUMLAH PEMASOK JASA

Number of Services Suppliers

LOKASI GEOGRAFIS PEMASOK	JUMLAH PEMASOK BARANG Number of Goods Suppliers			NILAI KONTRAK PEKERJAAN Work Contract Value			Supplier Geographical Locations
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	
Nasional (Lokal)	251	163	234	195.300.681.399	161.264.737.652	193.143.371.341	National (Local)
Internasional	-	-	-	-	-	-	International
Jumlah	251	163	234	195.300.681.399	161.264.737.652	193.143.371.341	Total





**KERANGKA
DAN STRATEGI
PENCAPAIAN
TUJUAN
KEBERLANJUTAN**
Framework
and Strategy
for Achieving
Sustainability Goals



ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) ROADMAP

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun *Environmental, Social, Governance (ESG) Roadmap*.

TAHUN BASELINE

PT TASPEN (Persero) mulai menyiapkan **ESG Firm Infrastructure**: 1. Organ Khusus (*Lead facilitator*), 2. Kebijakan Direksi (tertulis & turunannya), 3. Kajian *baseline* lanjutan, termasuk mempersiapkan sistem informasi pelaporan yang *online & real time* dari seluruh unit kerja terkait ESG.

BASELINE YEAR

PT TASPEN initiates the establishment of **ESG Firm Infrastructure**: 1. Special Organ (*Lead facilitator*), 2. Board of Directors Policies (written & derivatives), 3. Further baseline studies, including the preparation of an online & real-time reporting information system from all work units related to ESG.

TAHUN PEMENUHAN AWAL

Organ khusus ESG PT TASPEN (Persero) Bersama unit kerja terkait: 1. Mengembangkan sistem pengungkapan (*disclosure*) yang *online*, 2. Mempersiapkan penjaminan (*assurance*) atas laporan pengungkapan, 3. Mengajukan diri untuk mengikuti ESG *risk rating* kepada ESG rating provider (*Sustainalytics*).

INITIAL COMPLIANCE YEAR

PT TASPEN's ESG special organ, along with relevant work units: 1. Developing an online disclosure system, 2. Preparing assurance for disclosure reports 3. Applying to undergo ESG risk rating with an ESG rating provider (*Sustainalytics*).

TAHUN PENCAPAIAN AWAL

Hasil ESG *risk ratings* sudah mencapai peringkat **low risk**. Namun, hasil tersebut tidak mengendurkan pelaksanaan setiap program kerja ESG. Organ khusus ESG PT TASPEN (Persero) mulai mengembangkan mekanisme perbaikan program kerja secara terus menerus.

INITIAL ACHIEVEMENT YEAR

The results of ESG risk ratings have reached a low-risk rating. However, this result does not slacken the implementation of each ESG work program. PT TASPEN's ESG special organ begins to develop a mechanism for continuous improvement of work programs.

TAHUN PERSIAPAN

PT TASPEN (Persero) melalui organ khusus ESG mulai 1. Menginisiasi program ESG baru, 2. Mengintegrasikan program kerja lama ke program kerja ESG baru, 3. Bersama unit kerja terkait mulai melaksanakan operasional program kerja ESG.

PREPARATION YEAR

Through the ESG special organ, PT TASPEN begins: 1. Initiating new ESG programs, 2. Integrating old work programs into new ESG work programs, 3. Starting the implementation of the operational ESG work programs together with relevant work units.

TAHUN PERCEPATAN PEMENUHAN

Hasil ESG *risk ratings* menjadi dasar bagi organ khusus ESG PT TASPEN (Persero) Bersama Direksi melakukan percepatan-percepatan pemenuhan program kerja ESG. Investasi yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan pemenuhan program kerja menjadi semakin fleksibel.

COMPLIANCE ACCELERATION YEAR

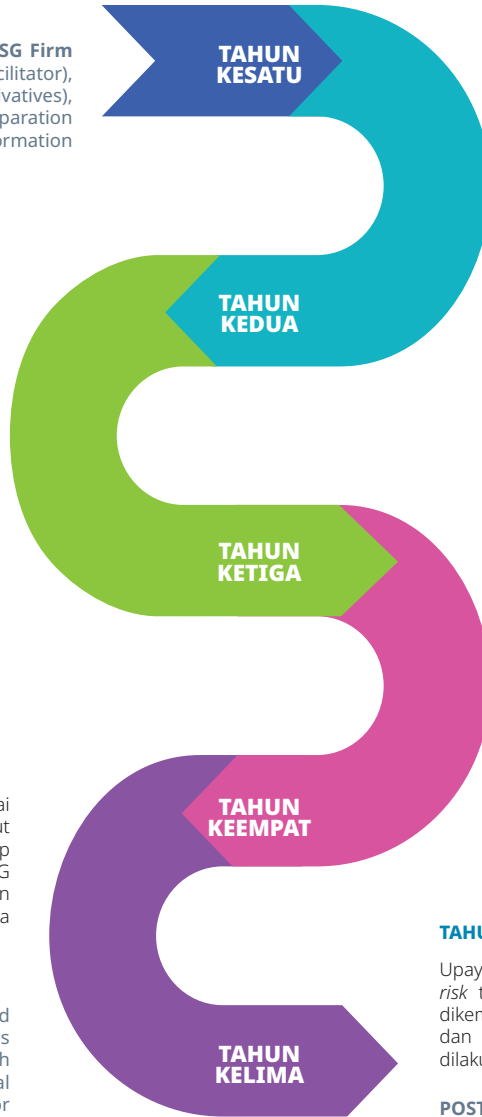
The results of ESG risk ratings become the basis for PT TASPEN's ESG special organ, together with the Board of Directors, to accelerate compliance with ESG work programs. The investment needed to accelerate compliance with work programs becomes more flexible.

TAHUN PASCA 2027

Upaya mempertahankan peringkat ESG *low risk* tetap diperkuat. Program kerja ESG dapat dikembangkan lebih lanjut melalui inovasi-inovasi dan upaya perbaikan terus menerus tetap dilakukan.

POST-2027 YEAR

Efforts to maintain the low-risk ESG rating are continuously strengthened. ESG work programs can be further developed through innovations and continuous improvement efforts.



TAHUN
KESATU

TAHUN
KEDUA

TAHUN
KETIGA

TAHUN
KEEMPAT

TAHUN
KELIMA

STRATEGI KEBERLANJUTAN BAGIAN DARI MANAJEMEN USAHA SEHARI-HARI [2-2]

Perseroan belum memiliki strategi khusus mengenai keberlanjutan namun Perseroan memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan program sosial kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi bagian dari standar operasi pengelolaan Perseroan sehari-hari yang juga memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu aspek utama yang mendasari terciptanya kebijakan-kebijakan yang memperhatikan aspek keberlanjutan adalah identifikasi pemangku kepentingan. Perseroan mempertimbangkan pengaruh dan kepentingan pihak internal dan eksternal terhadap bisnis Perseroan dan manfaat keberlanjutan yang dapat dihasilkan oleh Perseroan.

KOMITMEN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN SESUAI SIFAT USAHA DAN REFERENSI PRAKTIK KEBERLANJUTAN TERBAIK [2-23, 2-24]

Sesuai dengan bidang usaha TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM), program-program keberlanjutan Perseroan difokuskan kepada:

- Pengelolaan Kinerja Ekonomi
- Pengelolaan Aspek Lingkungan
- Tanggung Jawab Kepada Konsumen
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Komitmen keberlanjutan yang ditunjukkan Perseroan bersinggungan dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan skala global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) menerapkan pendekatan dengan program *Creating Shared Value* (CSV) yang menjadikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar memberikan dan berkontribusi pada penciptaan nilai-nilai positif dan nilai tambah bagi perusahaan, dengan pendekatan CSV akan memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi di lingkungan masyarakat.

SUSTAINABILITY STRATEGY AS PART OF DAILY BUSINESS MANAGEMENT [2-2]

The Company does not yet have a specific sustainability strategy, but it has several policies related to environmental management and social programs for the community. These policies are part of the Company's daily operational standards, which also consider sustainability aspects. One of the key aspects that underlie the creation of sustainability policies is the identification of stakeholders. The Company considers the influence and interests of both internal and external parties on its business and the sustainability benefits that the Company can generate.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY POLICY ACCORDING TO THE NATURE OF BUSINESS AND BEST SUSTAINABILITY PRACTICES REFERENCES [2-23, 2-24]

In line with TASPEN's line of business as a provider of Civil Servant Social Insurance, including the Old-Age Savings Program (THT), Pension Program, Work Accident Security Program (JKK), and Death Security Program (JKM), the Company's sustainability programs are focused on:

- Economic Performance Management
- Environmental Aspect Management
- Consumers Responsibility
- Human Capital Management
- Social Responsibility
- Occupational Health and Safety

The sustainability commitment demonstrated by the Company aligns with the global achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000 as a program implementation guide. This aims to achieve more measurable, impactful, and sustainable results in the State-Owned Enterprises Social and Environmental Responsibility (BUMN TJSL) Program. In realizing the goals of Social and Environmental Responsibility, the Minister of SOEs Regulation Number PER-1/MBU/3/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. PT TASPEN (Persero) carried out the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) adopting the *Creating Shared Value* (CSV) program approach, which aims to create positive values and add value to the Company. With the CSV approach, the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) is intended to provide appropriate and sustainable solutions in addressing social, environmental, and economic issues within the community.



Setiap program ditetapkan dengan seksama untuk dapat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara luas. Lebih dari sekedar mengantisipasi dampak negatif, namun Perseroan juga berupaya untuk memberikan dampak positif yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pengelolaan kinerja ekonomi dan keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian. Pada kinerja ekonomi, Perseroan memiliki sistem manajemen risiko untuk melindungi Perseroan dari risiko usaha yang material. Keselamatan dan kesehatan kerja juga mempertimbangkan aspek kehati-hatian dengan berbagai upaya pencegahan untuk melindungi karyawan dan memastikan aktivitas usaha berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Selain mempertimbangkan aspek kehati-hatian, Perseroan juga senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia juga dipraktikkan dalam tanggung jawab kepada konsumen dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Melalui kedua aspek tersebut, Perseroan membuktikan diri sebagai entitas bisnis bertanggung jawab yang terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan.

Setiap program yang ditetapkan tentunya telah proses telaah internal, pengawasan, dan evaluasi. Dewan Komisaris dan Direksi juga menerima laporan dari tim terkait dan memberikan tanggapan serta keputusannya mengenai rencana terkait aspek-aspek keberlanjutan yang ingin dijalani Perseroan. [2-12]

KONTRIBUSI TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program-program keberlanjutan yang dijalankan Perseroan bersinggungan dengan SDG dan dengan demikian, Perseroan juga berperan dalam memastikan tujuan SDG tercapai dalam lingkup usaha yang dijalankan. Perseroan tidak serta-merta mempertimbangkan aspek SDG saat menjalankan program keberlanjutan karena perlu adanya relevansi antara program dengan tujuan SDG. Saat ini tujuan utama dari program keberlanjutan Perseroan selalu berfokus pada bidang usaha TASPEN.

Each program is carefully defined to consider sustainability aspects comprehensively. It goes beyond anticipating negative impacts and strives to provide positive impacts that benefit stakeholders. For example, economic performance management and occupational health and safety are managed cautiously. The Company has a risk management system to protect against material business risks. Occupational health and safety also consider caution by implementing various preventive measures to protect employees and ensure smooth business activities without hindrances.

In addition to considering caution, the Company always respects human rights. This is evident in responsible management of human capital in compliance with regulations, particularly the Manpower Law No. 13 of 2003. Respect for human rights is also practiced in consumer responsibility and social community responsibility. Through these two aspects, the Company demonstrates itself as a responsible business entity that continually strives to provide positive impacts to all stakeholders.

Every program is thoroughly reviewed internally, monitored, and evaluated. The Board of Commissioners and the Board of Directors also receive reports from the relevant teams and provide responses and decisions on the sustainability aspects the Company intends to pursue.

CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The sustainability programs implemented by the Company are in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, the Company also plays a role in ensuring that the SDG objectives are achieved within the scope of its business activities. The Company does not automatically consider SDG aspects when implementing sustainability programs because there needs to be relevance between the programs and the SDG objectives. Currently, the Company's sustainability programs' primary objectives always focus on the TASPEN business sector.

TUJUAN PROGRAM TJSL BUMN

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

PRINSIP PROGRAM TJSL BUMN

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

PILAR UTAMA PROGRAM TJSL BUMN

Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, dan pengelolaan dampak program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian atas tujuan kegiatan dengan berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN memiliki 4 (empat) pilar utama dengan 17 (tujuh belas) poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu:

1. Sosial

Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Sosial meliputi tujuan:

- a. Tanpa Kemiskinan (TPB 1);
- b. Tanpa Kelaparan (TPB 2);
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3);
- d. Pendidikan Berkualitas (TPB 4);
- e. Kestaraan Gender (TPB 5).

THE OBJECTIVES OF THE SOES TJSL PROGRAM

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development, and legal and governance development for the Company.
2. Contributing to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, directed, and measurable in their impacts and accountability.
3. Nurturing micro and small businesses to be more resilient and independent, as well as the communities surrounding the Company.

THE PRINCIPLES OF THE SOES TJSL PROGRAM

1. Integrated, based on risk analysis and interconnected business processes with stakeholders.
2. Directed, with a clear direction, to achieve the Company's objectives.
3. Measurable impact, providing contributions and benefits that lead to changes or added value for stakeholders and the Company.
4. Accountability, being accountable to prevent potential misuse and deviations.

THE MAIN PILLARS OF THE SOES TJSL PROGRAM

The SOEs TJSL Program is carried out systematically and comprehensively to ensure the implementation, achievement of success, and management of the impacts of the TJSL program in accordance with priorities and/or the achievement of activity objectives based on the work plan. The SOEs TJSL Program has 4 (four) main pillars with 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) points, namely:

1. Social

The attainment of quality and equitable fulfillment of basic human rights to enhance the well-being of all members of society. The Social Pillar includes the following objectives:

- a. No Poverty (SDG 1);
- b. Zero Hunger (SDG 2);
- c. Good Health and Well-Being (SDG 3);
- d. Quality Education (SDG 4);
- e. Gender Equality (SDG 5).





2. Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Lingkungan meliputi tujuan:

- Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6);
- Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (TPB 11);
- Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (TPB 12);
- Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13);
- Ekosistem Lautan (TPB 14);
- Ekosistem Daratan (TPB 15).



2. Environment

Sustainable management of natural resources and the environment as a support for all life. The Environment pillar includes goals:

- Clean Water and Sanitation (SDG 6);
- Sustainable Cities and Communities (SDG 11);
- Responsible Consumption and Production (SDG 12);
- Climate Action (SDG 13);
- Life Below Water (SDG 14);
- Life on Land (SDG 15).

3. Ekonomi

Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar Ekonomi meliputi tujuan:

- Energi Bersih dan Terjangkau (TPB 7);
- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8);
- Industri, Inovasi dan Infrastruktur (TPB 9);
- Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10);
- Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17).



3. Economy

Achievement of quality economic growth through sustainable job and business opportunities, innovation, inclusive industries, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported partnerships. The Economic pillar includes goals:

- Affordable and Clean Energy (SDG 7);
- Decent Work and Economic Growth (SDG 8);
- Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9);
- Reduced Inequalities (SDG 10);
- Partnerships for the Goals (SDG 17).

4. Hukum dan Tata Kelola

Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (TPB 16).



4. Law and Governance

The realization of effective, transparent, accountable, and participatory legal certainty and governance to create security stability and achieve a rule-of-law-based state. The Legal and Governance pillar includes the goal of Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16).







TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainability Governance

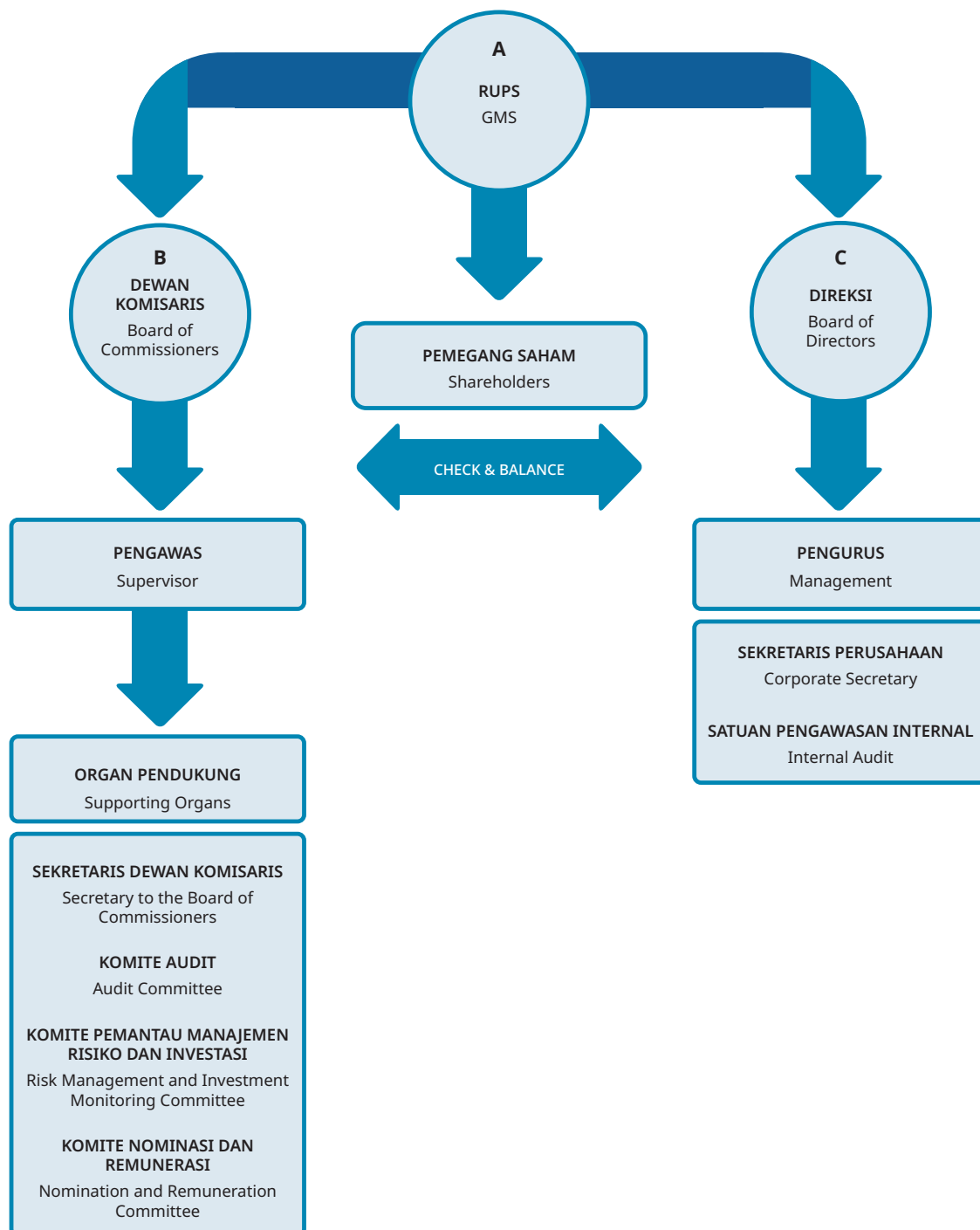


STRUKTUR TATA KELOLA [2-9, 2-10, 2-11]

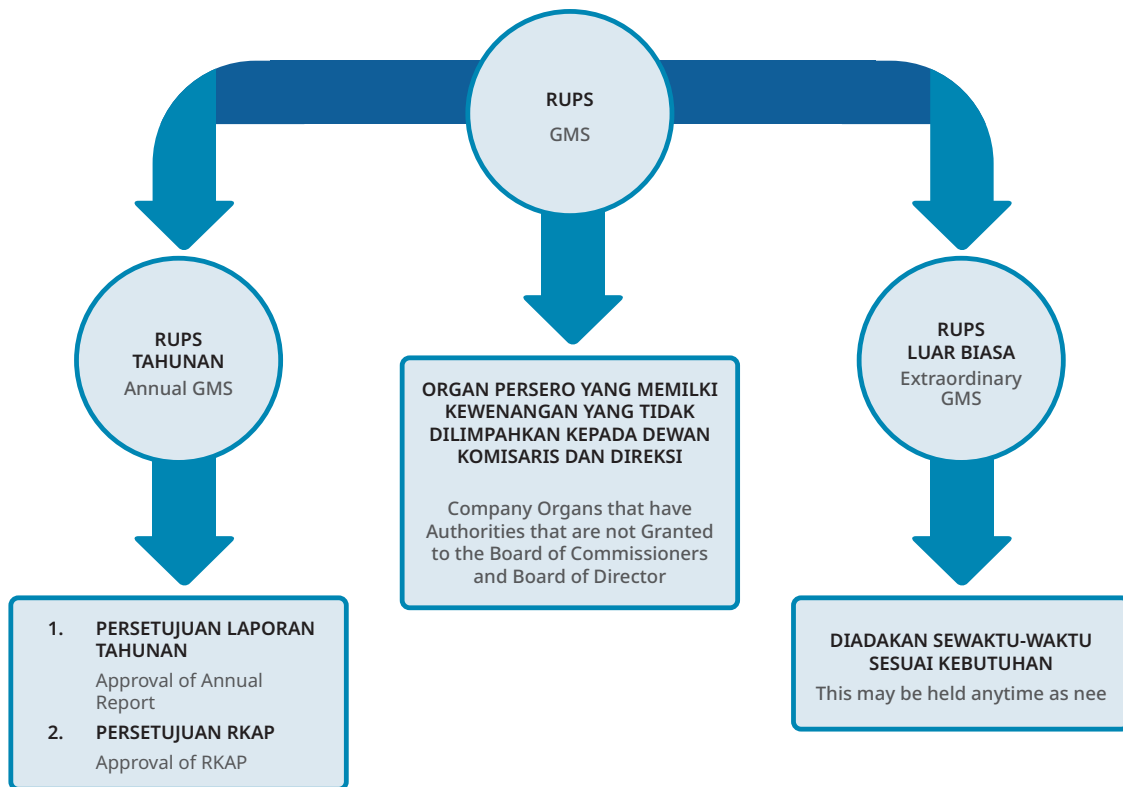
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

GOVERNANCE STRUCTURE [2-9, 2-10, 2-11]

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational infrastructure of a Limited Liability Company encompasses the interests of shareholders expressed through the General Meeting of Shareholders (GMS); the Board of Directors with its responsibility for management; and the Board of Commissioners, which performs oversight. The management system of a Limited Liability Company adheres to a two-tier system consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, each with clear authorities and responsibilities as mandated by laws and regulations.

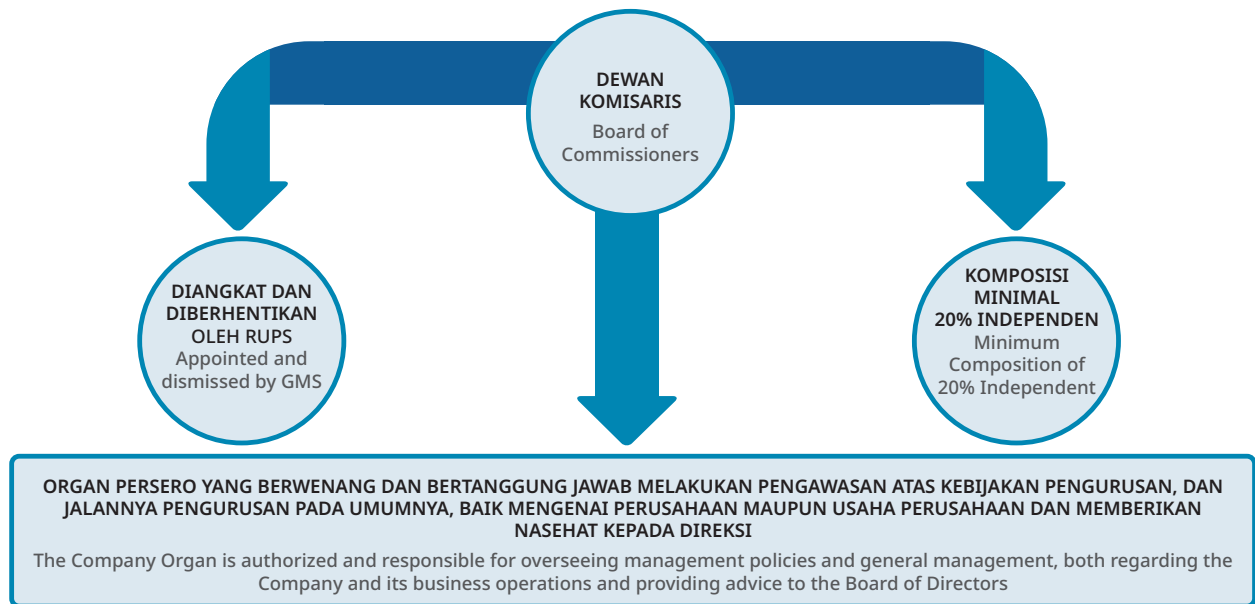


RUPS
General Meeting Of Shareholders

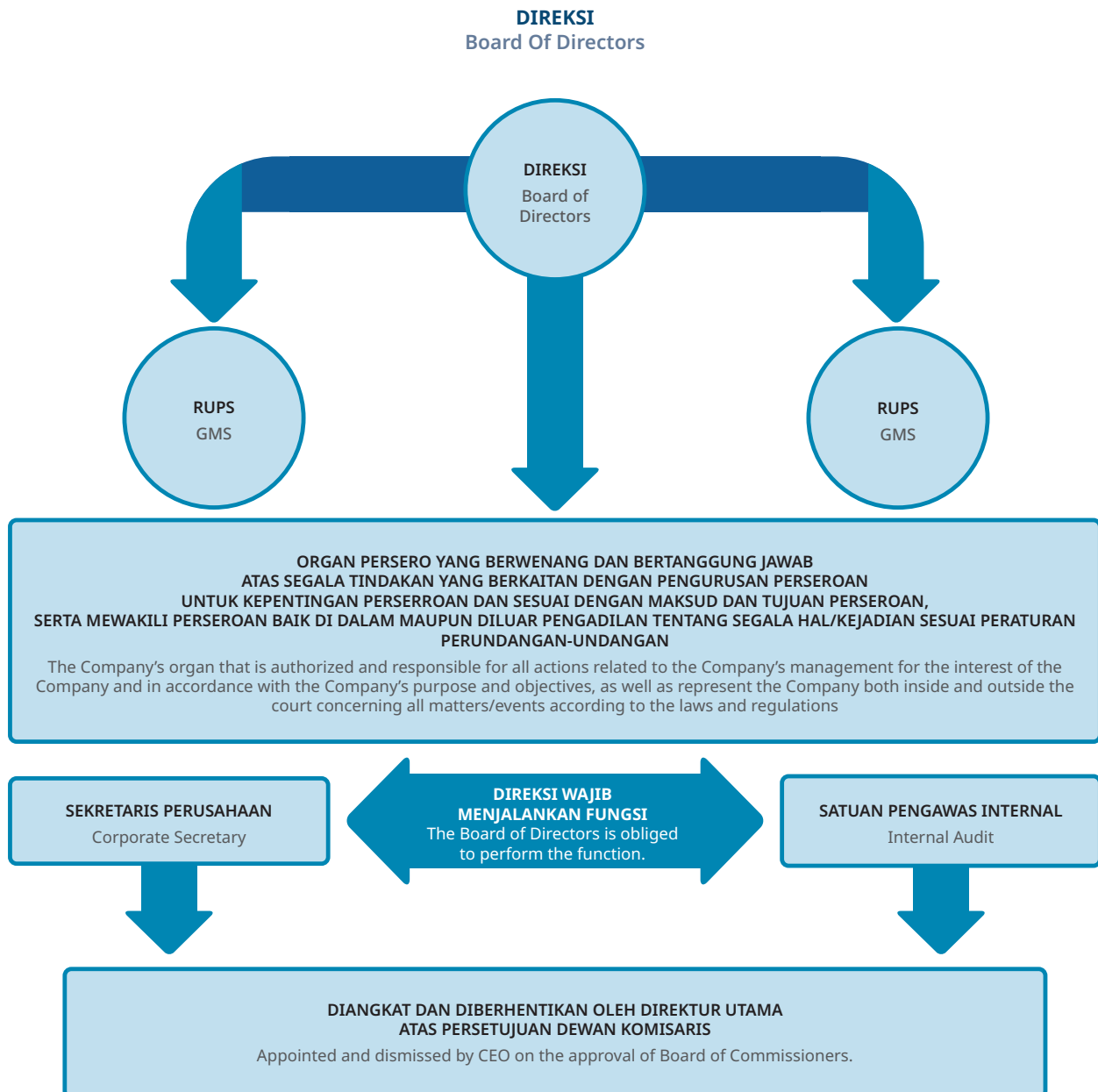




DEWAN KOMISARIS DAN ORGAN PENDUKUNGNYA Board Of Commissioners And Supporting Organs



		KEDUDUKAN: SETARA (KOLEGIAL) Position: Equal (Collegial)
ORGAN PENDUKUNG Supporting Organs	SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS Secretariat of the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris dan Sekretariat Dewan Komisaris • Diangkat & diberhentikan oleh Komisaris Utama • Sekretaris Dewan Komisaris (dari luar Perusahaan) • Tanggung Jawab: Menyusun RKAP dan Laporan-laporan Dewan Komisaris, mempersiapkan, menyelenggarakan dan membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mengadministrasikan & menyimpan seluruh dokumen kegiatan Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • BOC Secretary and Secretariat • Appointed & dismissed by the President Commissioner • BOC Secretary (from external party) • Responsibility: preparing BOC Work Plan and Budget and reports, preparing, organizing and making BOC Minutes of Meeting as well as administering & archiving all documents of BOC's activities.
	KOMITE AUDIT Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota • Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris • Ketua: Anggota Dewan Komisaris Independen • Anggota: bisa anggota Dewan Komisaris / luar perusahaan • Tugas: Memastikan efektifitas pengendalian intern, eksternal auditor dll. <ul style="list-style-type: none"> • Consists of 1 Chairman and 2 members. • Appointed and dismissed by the BOC • Chairman: Independent BOC Member • Member: can be appointed from BOC members/external party • Duties: Ensuring the effectiveness of internal controls, external auditors etc.
	KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI Risk Management and Investment Monitoring Committee	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 1 ketua, wakil dan 3 anggota • Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris • Ketua: Anggota Dewan Komisaris Independen • Tugas: Memantau dan monitoring pelaksanaan Manajemen Risiko dan Investasi pada PT TASPEN (Persero) <ul style="list-style-type: none"> • Consists of 1 (one) Chairman, Deputy Chairman, and 3 (three) members • Appointed and dismissed by the Board of Commissioners • Chairman: Independent Board of Commissioners Member • Duties: Overseeing and monitoring the implementation of Risk Management and Investment at PT TASPEN (Persero)
	KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Nomination and Remuneration Committee	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 1 ketua, wakil dan 2 anggota • Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris • Ketua: Komisaris Utama • Tugas: membantu mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan nominasi eksekutif Perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup pula Bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Consists of 1 (one) Chairman, Deputy Chairman and 2 (two) members • Appointed and dismissed by the Board of Commissioners • Chairman: President Commissioner • Duties: Assisting in supervising the implementation of the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors and nominations of the Company Executives according to the Articles of Association and applicable laws and regulations, including Good Corporate Governance (GCG)



Fungsi pengawasan dan manajemen juga diterapkan dalam hal keberlanjutan, dimana Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas melalui kegiatan telaah yang melibatkan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan fungsi tata kelola keberlanjutan yang berjalan saat ini di Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi. [2-12, 2-13, 2-14, E.1]

The supervisory and management functions are also applied in the context of sustainability, where the Board of Commissioners acts as a supervisor through a review activity that involves recommendations and advice to the Board of Directors. The current implementation of sustainability governance functions in the Company is the responsibility of the Board of Directors. [2-12, 2-13, 2-14, E.1]



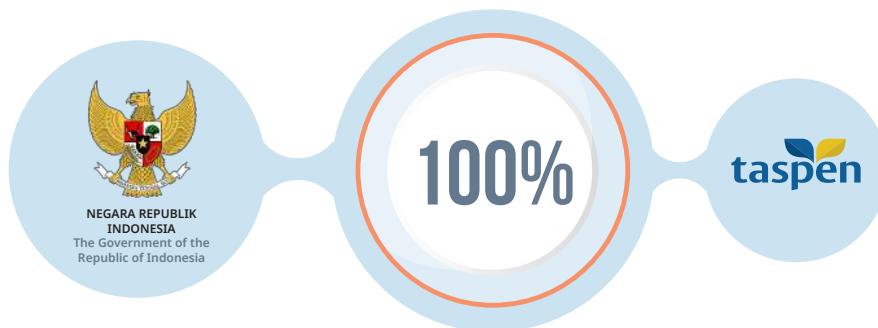
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham utama dan pengendali TASPEN adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku (RUPS) dalam seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities who legally own shares in the Company. Shareholders do not intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The major and controlling shareholder of TASPEN is the Republic of Indonesia, which holds 100% of the Company's shares. In accordance with Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, the Minister of State-Owned Enterprises acts as the General Meeting of Shareholders (GMS) for all shares owned by the Republic of Indonesia.



PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN 2023

Selama 2023, TASPEN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
2. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Tahun buku 2022.

IMPLEMENTATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) 2023

Throughout 2023, TASPEN held the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) twice, namely:

1. GMS for Approval of the 2023 Corporate Work Plan and Budget.
2. GMS for Approval of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 Fiscal Year.

RUPS PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2023

Kegiatan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 15.30 WIB s.d selesai, diselenggarakan secara fisik di Ruang Rapat Lt. 8 Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta.

GMS FOR APPROVAL OF THE 2023 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET

The GMS for Approval of the 2023 Corporate Work Plan and Budget was held on January 30, 2023, from 15:30 WIB until completion. It was conducted physically at the 8th-floor Meeting Room of the Ministry of State-Owned Enterprises, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Mekanisme Pelaksanaan RUPS RKAP 2023

1. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama dan selanjutnya menyerahkan kepada Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun selaku Kuasa Pemegang Saham seluruh saham PT TASPEN (Persero) untuk memimpin rapat. Pimpinan Rapat menyatakan, bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Selanjutnya Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun memimpin jalannya RUPS.
2. Pemaparan Direksi PT TASPEN (Persero) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSJL Tahun 2023.
3. Pemaparan tanggapan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSJL Tahun 2023.
4. Pembahasan dan tanya jawab oleh Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSJL Tahun 2023.
5. Pembacaan keputusan RUPS.
6. Penandatanganan Risalah RUPS, Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023 (secara sirkuler).
7. Pimpinan rapat menutup RUPS.

Mechanism of the GMS Implementation

Mechanism of the GMS Implementation for the 2023 RKAP

1. The President Commissioner opened the GMS and then handed the proceeding over to the Acting Assistant Deputy for Insurance and Pension Fund Services, serving as the Shareholders' Proxy for all shares of PT TASPEN (Persero) to lead the Meeting. The Chairman of the Meeting declared that with the fulfillment of juridical requirements as per the Company's Articles of Association, the GMS was valid and entitled to make binding decisions. Subsequently, the Acting Assistant Deputy for Insurance and Pension Fund Services led the GMS proceedings.
2. Presentation by the Board of Directors of PT TASPEN (Persero) regarding the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the 2023 Work Plan and Budget of the TJSJL Program.
3. Presentation of the response from the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) regarding the 2023 Corporate Work Plan and Budget and the 2023 Work Plan and Budget of the TJSJL Program.
4. Discussion and Q&A session by Shareholders regarding the 2023 Corporate Work Plan and Budget and the 2023 Work Plan and Budget of the TJSJL Program.
5. Reading of the GMS resolutions.
6. The signing of the GMS Minutes, the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders, and the Management Contract between the Board of Commissioners with the Shareholders for 2023 (circularly).
7. The Chairman of the Meeting closed the GMS.



Risalah RUPS RKAP 2023

Adapun agenda pembahasan dan hasil keputusan RUPS RKAP 2023 akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Minutes of the GMS for 2023 RKAP

The agenda for discussion and the resolutions of the GMS for 2023 RKAP were outlined in the following table.

TABEL AGENDA PEMBAHASAN DAN HASIL KEPUTUSAN RUPS RKAP 2023
Table of Agenda for Discussion and GMS Resolutions for 2023 RKAP

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
1	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko PT TASPEN (Persero) pada kuadran Sistemik A, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023.</p> <p>Ratified the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), including the Determination of Risk Classification for PT TASPEN (Persero) in Systemic A Quadrant, and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2023.</p>	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko PT TASPEN (Persero) pada kuadran Sistemik A, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023</p> <p>Ratified the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), including the Determination of Risk Classification for PT TASPEN (Persero) in Systemic A Quadrant, and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2023.</p> <p>Adapun pokok-pokok pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT TASPEN (Persero) tahun 2023 sebagai berikut: The main points of ratification for the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT TASPEN (Persero) were as follows:</p> <p>1.1 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Projection of Consolidated Statements of Financial Position</p> <p>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT TASPEN (Persero) per 31 Desember 2023 diproyeksikan ditutup dengan jumlah Aset sebesar Rp354.197,46 miliar, liabilitas sebesar Rp341.087,44 miliar dan ekuitas sebesar Rp13.110,02 miliar dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>The Consolidated Statements of Financial Position of PT TASPEN (Persero) as of December 31, 2023, were projected to close with total assets of Rp354,197.46 billion, liabilities of Rp341,087.44 billion, and equity of Rp13,110.02 billion, with the breakdown as follows:</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions		PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
		URAIAN Description	RKAP 2023 (Rp miliar) 2023 RKAP (Rp billion)	
		Aset Investasi Investment Assets	329.842,30	
		Aset non investasi Non-Investment Assets	24.355,16	
		Total Aset Total Assets	354.197,46	
		Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Future Policy Benefit Liability	112.871,17	
		Estimasi liabilitas klaim Estimated Claims Liability	774,97	
		Cadangan teknis Technical Reserves	726,35	
		Utang Klaim Claim Payable	8,17	
		Dana AIP PNS AIP PNS Fund	224.543,55	
		Dana Selisih Iuran Contribution Difference Fund	1.358,93	
		Liabilitas lainnya Other Liabilities	804,31	
		Total Liabilitas Total Liabilities	341.087,44	
		Total Ekuitas Total Equity	13.110,02	

1.2 Proyeksi Laporan Laba/Rugi Konsolidasian

Projection of Consolidated Statements of Profit or Loss

Laporan laba/rugi konsolidasian PT TASPEN (Persero) tahun 2023 ditargetkan mencatat Laba Tahun Berjalan sebesar **Rp140,22 miliar**, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

The Consolidated Statements of Profit or Loss of PT TASPEN (Persero) for 2023 were targeted to record Profit for the Year of Rp140.22 billion, with the calculation details as follows:



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions		PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
		URAIAN Description	RKAP 2023 (Rp miliar) 2023 RKAP (Rp billion)	
		Premi dan Iuran Premium and Contribution	9.172,53	
		Hasil investasi Investment Income	9.241,82	
		Pendapatan Kekurangan Pendanaan Underfunding Income	0,00	
		Pendapatan Lain Other Income	1.590,44	
		Jumlah pendapatan Total Income	20.004,79	
		Manfaat Klaim Claim Benefits	17.106,84	
		Kenaikan LMPMD Increase in LMPMD	1.258,10	
		Kenaikan (penurunan) estimasi liabilitas klaim Increase (Decrease) in Estimated Claim Liabilities	1,95	
		Kenaikan (penurunan) cadangan teknis Increase (Decrease) in Technical Reserves	44,01	
		Beban Usaha Operating Expenses	1.895,57	
		Penggantian BOP Operating Expenses Reimbursement	(693,32)	
		Beban di luar usaha Non-Operating Expenses	13,83	
		Jumlah beban Total Expenses	19.626,97	
		Laba (rugi) sebelum pajak Profit (Loss) Before Tax	377,83	
		Laba (rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the Year	140,22	

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

1.3 **Proyeksi Laporan Arus Kas**

Projection of Statements of Cash Flows

Laporan arus kas PT TASPEN (Persero) per 31 Desember 2023 diproyeksikan ditutup dengan jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun sebesar **Rp119,70** miliar, dengan rincian sebagai berikut:

The Statements of Cash Flows of PT TASPEN (Persero) as of December 31, 2023, were projected to close with Cash and Cash Equivalents of Rp119.70 billion, with details as follows:

URAIAN Description	RKAP 2023 (Rp miliar) 2023 RKAP (Rp billion)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	13.113,39
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(13.247,98)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in funding activities	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(134,59)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	254,29
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	119,70



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

1.4 **Rencana Belanja Modal**

Capital Expenditure Plan

Belanja Modal PT TASPEN (Persero) tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp142,15 miliar**, dengan rincian sebagai berikut:

The Capital Expenditure of PT TASPEN (Persero) for 2023 was budgeted at Rp142.15 billion, with details as follows:

URAIAN Description	RKAP 2023 (Rp miliar) 2023 RKAP (Rp billion)
HGB Building Use Rights (HGB)	0,09
Gedung Kantor Office Buildings	15,00
Kendaraan Vehicles	0,32
Komputer Computers	57,74
Investaris Kantor Office Inventories	9,77
Lisensi Licenses	59,24
Total	142,15

1.5 **Target Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023**

Target Company Health Level Assessment for 2023

- 1) Skor Tingkat Kesehatan : 90
Health Level Score: 90
- 2) Predikat Penilaian : Sehat AA
Assessment Predicate: Healthy AA

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
2	<p>Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023.</p> <p>Ratification of the 2023 Work Plan and Budget of Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL)</p>	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 PT TASPEN (Persero)</p> <p>RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan nomor RIS-13/DSI.MBU.B/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Ratified the 2023 Work Plan and Budget of Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) of PT TASPEN (Persero)</p> <p>The GMS ratified the 2023 Work Plan and Budget of Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) as per the Minutes of the Meeting on the Discussion of the Work Plan and Budget of Social and Environmental Responsibility Program Number RIS-13/DSI.MBU.B/12/2022 dated December 23, 2022, with details as follows:</p> <p>2.1 Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) Tahun 2023 2023 Micro Small Business Funding (PUMK)</p> <p>Jumlah penyaluran PUMK tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp27.200.000.000 atau 44,95% dari prognosa tahun 2022 sebesar Rp60.513.000.000,- yang akan disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>The budget for the PMK disbursement in 2023 was set at Rp27,200,000,000 or 44.95% of the 2022 prognosis of Rp60,513,000,000, to be disbursed through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>

Berikut rincian Dana Tersedia dan Penyaluran PUMK PT TASPEN (Persero) tahun 2023:

The details of Available Funds and PUMK Disbursement of PT TASPEN (Persero) in 2023 were as follows:

NO	DANA TERSEDIA Available Funds	PROGNOSA S/D DES 2022 Prognosis until December 2022	RKA 2023 2023 RKA	%
		2	3	4=(3/2)
Dana Tersedia: Available Funds:				
1	Saldo awal 1 Januari Opening balance on January 1	1.528.372.242	1.126.373.309	73,70
2	Pengembalian Pokok Pinjaman dari Mitra Binaan Principal Loan Repayment from Foster Partners	25.064.554.775	24.813.909.227	99,00
3	Pengembalian Pokok Pinjaman Sinergi Synergy Loan Principal Repayment	32.120.108.333	550.000.000	1,71



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions		
4		Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income	2.788.945.850	1.546.917.277	55,47
5		Pendapatan Jasa Giro Bank (net) Bank Current Account Service Income (net)	137.392.109	42.055.800	30,61
6		Dana Tersedia Available Funds	61.639.373.309	28.079.255.613	45,55
7		Penyaluran Dana: Fund Disbursement:			
8		Penyaluran Pinjaman MB Foster Partner (MB) Loan Distribution	31.795.000.000	-	-
9		Penyaluran PUMK Kolaborasi BUMN SOEs Collaborative PUMK Distribution	28.718.000.000	27.200.000.000	94,71
10		Hibah PUMK PUMK Grant	-	-	-
11		Jumlah Penyaluran Dana Total Fund Disbursement	60.513.000.000	27.200.000.000	44,95
12		Saldo Akhir 31 Des Tersedia Available End balance on December 31	1.126.373.309	879.255.613	78,06

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

2.2 Program Non PUMK Tahun 2023

Non-PUMK Program for 2023

Pengelompokan program TJSJ RKA tahun 2023 dengan prioritas sebagai berikut:

The grouping of the TJSJ programs for the 2023 RKA with priorities was as follows:

NO	PROGRAM	RUPIAH
Program di Bidang Pendidikan Programs in the Education Field		
1	Beasiswa Anak Karyawan TASPEN dan ASN Scholarships for Children of TASPEN Employees and Civil Servants	180.000.000
2	Bantuan Renovasi Sekolah, Perpustakaan dan sarana TIK, lainnya Assistance for School Renovation, Libraries, and other Information and Communication Technology facilities	240.000.000
3	Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan Collaborative Education Assistance Programs	1.220.000.000
Jumlah Total		1.640.000.000
Program di Bidang Lingkungan Programs in the Environmental Field		
TASPEN LESTARI		
1	Penanaman Pohon (Pemda) Tree Planting (Local Government)	240.000.000
2	Konservasi Satwa Wildlife Conservation	240.000.000
3	Taman Kota (Pemda) City Parks (Local Government)	300.000.000
4	Desa Pangan Food Village	500.000.000
Jumlah Total		1.280.000.000
Program di Bidang Pengembangan UMK Programs in the Micro Small Business (UMK) Development Field		
TASPENpreneur		
1	Pelatihan dan Pendampingan MB ASN dan Non ASN Training and Assistance for Civil Servant and Non-Civil Servant Foster Partners	300.000.000
2	Kurasi/Pameran Mitra Binaan Curation/Exhibition of Foster Partners	240.000.000
3	<i>Branding Outlet</i> Mitra Binaan Branding of Foster Partners Outlets	270.000.000
4	Sertifikasi Produk Product Certification	180.000.000
5	Sentra UMKM MSMEs Center	500.000.000
Jumlah Total		1.490.000.000



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
3	<p>Penetapan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.</p> <p>Determination of Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders for 2023</p>	<p>Menetapkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT TASPEN (Persero) Tahun 2023</p> <p>Menetapkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) dengan Pemegang Saham PT TASPEN (Persero) tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini.</p> <p>Determined Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders of PT TASPEN (Persero) for 2023</p> <p>Determined Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) with the Shareholders of PT TASPEN (Persero) for 2023, referring to the Minister of SOEs Regulation Number PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of Board of Directors of State-Owned Enterprises, attached herewith and an integral part of this Minutes.</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>
4	<p>Penetapan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023.</p> <p>Determination of Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Commissioners with the Shareholders for 2023</p>	<p>Menetapkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT TASPEN (Persero) Tahun 2023</p> <p>Menetapkan Kontrak Manajemen (<i>Key Performance Indicators</i>) antara Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) dengan Pemegang Saham PT TASPEN (Persero) tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/11/2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah ini.</p> <p>Determined Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT TASPEN (Persero) for 2023</p> <p>Determined Management Contracts (<i>Key Performance Indicators</i>) between the Board of Commissioners of PT TASPEN (Persero) and the Shareholders of PT TASPEN (Persero) for 2023, referring to the Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/11/2011 jo Number PER-09/MBU/2012 concerning Good Corporate Governance, attached herewith and an integral to this Minutes.</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>

RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI TAHUN BUKU 2022

Kegiatan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 15.00 WIB s.d selesai, Offline: Auditorium Lantai 6, PT TASPEN (Persero), Jalan Letjend. Suprpto Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Online melalui aplikasi Zoom: Meeting ID: 240 646 8836 Passcode: RUPS2022.

GMS FOR APPROVAL OF ANNUAL REPORT AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) FOR THE 2022 FISCAL YEAR

The General Meeting of Shareholders (GMS) for the approval of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 fiscal year was held on May 31, 2023, starting at 3:00 PM WIB until completion. The Meeting took place offline at the 6th-floor Auditorium of PT TASPEN (Persero), located at Jalan Letjend. Suprpto No. 45, Cempaka Putih, Central Jakarta, and online through the Zoom application with Meeting ID: 240 646 8836 and Passcode: RUPS2022.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Mekanisme Pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Tahun Buku 2022

1. Rapat dibuka oleh Komisaris Utama PT TASPEN (Persero). Komisaris Utama menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Selanjutnya Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) menyerahkan kepada Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun selaku Kuasa Pemegang Saham untuk memimpin jalannya RUPS.
2. Pemaparan Direksi mengenai Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan TJSI Tahun Buku 2022.
3. Pemaparan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan TJSI Tahun 2022.
4. Pembahasan dan tanya jawab oleh Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan TJSI Tahun 2022.
5. Pembacaan keputusan RUPS.
6. Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022.
7. Pimpinan rapat menutup RUPS.

Risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Tahun Buku 2022

Adapun agenda pembahasan dan hasil keputusan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Tahun Buku 2022 akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Mechanism of the GMS Implementation

Mechanism of the GMS Implementation for Approval of Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 Fiscal Year

1. PT TASPEN (Persero)'s President Commissioner opened the Meeting. The President Commissioner declared that with the fulfillment of juridical requirements according to the Company's Articles of Association, the GMS was valid and entitled to make binding decisions. Subsequently, the President Commissioner handed the proceeding over to the Acting Assistant Deputy for Insurance and Pension Fund Services as the Shareholders' Proxy to lead the GMS.
2. Presentation by the Board of Directors regarding the Annual Report for the 2022 fiscal year and the Annual Report on the Social and Environmental Responsibility (TJSI) Implementation for the 2022 fiscal year.
3. Presentation of the Supervisory Report by the Board of Commissioners for the 2022 fiscal year, submission of the Board of Commissioners' response to the Annual Report for the 2022 fiscal year, and the Annual Report on the TJSI Implementation for 2022.
4. Discussion and Q&A session by Shareholders regarding the Annual Report for the 2022 fiscal year and the Annual Report on the TJSI Implementation for 2022.
5. Reading of GMS resolutions.
6. Signing of the Minutes of the GMS for Approval of the Annual Report and Validating Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.
7. The Chairman of the Meeting closed the GMS.

Minutes of the GMS for Approval of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 Fiscal Year

The agenda for discussion and the GMS Resolutions for Approval of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 fiscal year will be elaborated in the following table.



TABEL AGENDA PEMBAHASAN DAN HASIL KEPUTUSAN RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI TAHUN BUKU 2022

Table of Agenda for Discussion and GMS Resolutions for Approval of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) for the 2022 Fiscal Year

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions																
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022</p> <p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai dengan laporannya nomor 00065/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/III/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquite et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.</p> <p>Adapun pokok-pokok Laporan Keuangan tahun buku 2022 sebagai berikut:</p> <p>Approved the Annual Report for the 2022 fiscal year, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 fiscal year, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan, as stated in their report number 00065/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/III/2023 dated February 20, 2023, with "an unqualified opinion in all material respects." Additionally, granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquite et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year ending on December 31, 2022, provided that such actions were not criminal acts or in violation of applicable laws and regulations and legal procedures, reflected in the Company's books, and did not cause any losses to the Company.</p> <p>The main points of the Financial Statements for the 2022 fiscal year were as follows:</p> <p>1.1. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>URAIAN Description</th> <th>31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Bilion)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan premi dan iuran Premium and contribution income</td> <td>8.681,33</td> </tr> <tr> <td>Hasil investasi Investment income</td> <td>8.677,48</td> </tr> <tr> <td>Hasil investasi entitas anak Subsidiaries Investment income</td> <td>350,41</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan kekurangan pendanaan Underfunding income</td> <td>22.176,51</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan lain Other income</td> <td>436,43</td> </tr> <tr> <td>Fee Pengelolaan Dana AIP BOP for the management of AIP funds</td> <td>933,73</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pendapatan Total Income</td> <td>41.255,89</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Bilion)	Pendapatan premi dan iuran Premium and contribution income	8.681,33	Hasil investasi Investment income	8.677,48	Hasil investasi entitas anak Subsidiaries Investment income	350,41	Pendapatan kekurangan pendanaan Underfunding income	22.176,51	Pendapatan lain Other income	436,43	Fee Pengelolaan Dana AIP BOP for the management of AIP funds	933,73	Jumlah Pendapatan Total Income	41.255,89	<p>Telah direalisasikan Have been realized</p>
URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Bilion)																		
Pendapatan premi dan iuran Premium and contribution income	8.681,33																		
Hasil investasi Investment income	8.677,48																		
Hasil investasi entitas anak Subsidiaries Investment income	350,41																		
Pendapatan kekurangan pendanaan Underfunding income	22.176,51																		
Pendapatan lain Other income	436,43																		
Fee Pengelolaan Dana AIP BOP for the management of AIP funds	933,73																		
Jumlah Pendapatan Total Income	41.255,89																		

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions		PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
		URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)	
		Beban manfaat klaim Claim benefit expenses	16.326,13	
		Kenaikan LMPMD Increase in Future Policy Benefit Liability (LMPMD)	23.692,97	
		Kenaikan (penurunan) estimasi liabilitas klaim Increase (decrease) in estimated claim liabilities	(87,39)	
		Kenaikan (penurunan) cadangan teknis Increase (decrease) in technical reserves	(60,26)	
		Beban usaha Operating expenses	1.602,54	
		Penggantian BOP Operating Expenses reimbursement	(613,60)	
		Beban diluar usaha Outside operating expenses	13,15	
		Jumlah Beban Total expenses	40.873,54	
		Beban Pajak Tax expense	(268,50)	
		Laba (rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the Year	113,85	
		Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk Profit for the Year Attributable to the Equity holder of the parent company	112,38	



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

1.2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)
Aset investasi THT, JKK, JKM & Entitas Anak Investment Assets of THT, JKK, JKM & Subsidiaries	115.825,89
Aset investasi AIP AIP Investment Assets	194.125,40
Aset non investasi AIP AIP Non-Investment Assets	10.614,46
Aset non investasi lainnya Other Non-Investment Assets	25.103,89
Total aset Total Assets	345.669,64
Dana AIP AIP Fund	203.114,40
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Future Policy Benefit Liability	127.492,52
Cadangan teknis Technical Reserves	684,69
Estimasi liabilitas klaim Estimated Claim Liability	736,14
Liabilitas lainnya Other Liabilities	2.632,34
Total liabilitas Total Liabilities	334.660,09
Ekuitas Equity	11.009,55

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

1.3. **Laporan Arus Kas Konsolidasian**
Consolidated Statements of Cash Flows

URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	13.264,37
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(13.848,92)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in funding activities	(3,78)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalents	(588,33)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	841,15
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	252,82

1.4. **Skor Kinerja Perusahaan**
Company Performance Score

- 1) Tingkat Kesehatan: Sehat (AA) skor 90.
- 2) Skor KPI: 101,75.
- 1) Health Level: Healthy (AA) with a score of 90.
- 2) KPI Score: 101.75.



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions												
2	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022</p> <p>Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2022 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Fiscal Year</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya nomor 00148/2.1030/AU.2/12/1698-1/0/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquite et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah dilaksanakan pada tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.</p> <p>Approved the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program and ratified the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the fiscal year ending on December 31, 2022, audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in their report number 00148/2.1030/AU.2/12/1698-1/0/II/2023 dated February 20, 2023, with “an unqualified opinion in all material respects.” Also, granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquite et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions of the Social and Environmental Responsibility Program of the State-Owned Enterprises (SOEs) carried out in the 2022 fiscal year, provided that such actions were not criminal acts or in violation of applicable laws and regulations and legal procedures, reflected in the Company's books, and did not cause any losses to the Company.</p> <p>Adapun pokok-pokok Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku 2022 sebagai berikut:</p> <p>The main points of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program for the 2022 fiscal year were as follows:</p> <p>a. Realisasi Pelaksanaan Program TJSL TJSL Program Implementation Realization</p> <table border="1" data-bbox="497 1346 1136 1794"> <thead> <tr> <th data-bbox="497 1346 908 1464">URAIAN Description</th> <th data-bbox="908 1346 1136 1464">31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="497 1464 908 1541">Pilar Sosial Social Pillar</td> <td data-bbox="908 1464 1136 1541">5.696,48</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1541 908 1608">Pilar Ekonomi Economic Pillar</td> <td data-bbox="908 1541 1136 1608">63.285,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1608 908 1675">Pilar Lingkungan Environmental Pillar</td> <td data-bbox="908 1608 1136 1675">4.932,22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1675 908 1742">Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar</td> <td data-bbox="908 1675 1136 1742">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 1742 908 1794">Total</td> <td data-bbox="908 1742 1136 1794">73.913,90</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)	Pilar Sosial Social Pillar	5.696,48	Pilar Ekonomi Economic Pillar	63.285,20	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	4.932,22	Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	-	Total	73.913,90	<p>Telah direalisasikan Have been realized</p>
URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)														
Pilar Sosial Social Pillar	5.696,48														
Pilar Ekonomi Economic Pillar	63.285,20														
Pilar Lingkungan Environmental Pillar	4.932,22														
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar	-														
Total	73.913,90														

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
----	----------------------------	-----------------------------------	---

b. **Realisasi Program PUMK**
PUMK Program Realization

URAIAN Description	31 DESEMBER 2022 (Rp Miliar) December 31, 2022 (Rp Billion)
Dana Tersedia Available Funds	
Saldo Awal Initial Balance	1.528,37
Tambahkan dana dari BUMN Pembina Additional funds from the Supervising SOEs	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Loan Repayment from Foster Partner	27.181,02
Pengembalian dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur Refund from Other Supervising SOEs/ Distributor Agencies	32.120,11
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income	2.900,38
Pendapatan lain Other Income	229,64
Dana Tersedia Available Funds	63.959,52
Penyaluran Dana Fund Disbursement	
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Loan Disbursement to Partners	33.550,00
Penyaluran PUMK kerja sama sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Distribution of PUMK in synergy with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.718,00
Jumlah Penyaluran Dana Total Fund Disbursement	62.268,00
Saldo Dana Fund Balance	1.691,52



NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
3	<p>Penetapan Tantiem/ Insentif Kinerja/ Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>Determination of Bonuses/ Performance Incentives/Special Incentives for the Performance of the 2022 Fiscal Year and Salaries/ Honorariums including Facilities and Allowances for the 2023 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners</p>	<p>Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>Determination of bonuses/performance incentives/special incentives for the performance of the 2022 fiscal year and salaries/honorariums, including facilities and allowances for the 2023 fiscal year for the Board of Directors and Board of Commissioners, would be determined separately.</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>
4	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022</p> <p>Determination of the Use of Net Profit for 2022</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 sebesar Rp112.382.597.095,- ditetapkan sebagai cadangan.</p> <p>Determined that the use of the net profit for the current year attributable to the equity holders of the parent company for the 2022 fiscal year was Rp112,382,597,095, determined as reserves.</p>	<p>Telah direalisasikan Has been realized</p>

NO	AGENDA RUPS GMS Agendas	KEPUTUSAN RUPS GMS Resolutions	PELAKSANAAN HASIL KEPUTUSAN RUPS Implementation of GMS Resolutions
5	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2023.</p> <p>Appointment of a Public Accounting Firm (PAF) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year.</p>	<p>a. Menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2023.</p> <p>Appointed Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as the Public Accounting Firm (PAF) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year.</p> <p>b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk yang berkenaan dengan PT TASPEN (Persero) selaku pengelola Program Asuransi Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.</p> <p>Delegated authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees, additions/adjustments scope beyond what has been decided above, including those related to PT TASPEN (Persero) as the manager of the Social Insurance Program for Civil Servants (ASN), and other reasonable appointment requirements for the said PAF.</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.</p> <p>Granted authority the Board of Commissioners to appoint a Substitute PAF in case Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) could not complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the Social and Environmental Responsibility Program, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, including determining the amount of audit service fees and other requirements for the Substitute PAF.</p>	<p>Telah direalisasikan Have been realized</p>



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi TASPEN. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara *independent*.

Seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai suatu *board* memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri asuransi, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan hubungan keuangan dan keluarganya dengan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham, serta dilarang mengambil keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat manajemen Perseroan, Dewan Komisaris TASPEN dibantu oleh tiga Komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan

The Board of Commissioners is an Organ of the Company whose main responsibility is to supervise the Board of Directors' policies in managing the Company and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring the implementation of GCG principles in each business activity at all levels of TASPEN's organization. The Board of Commissioners carries out their duties and responsibilities independently.

All members of the Board of Commissioners as a board possess the core competency that is required to ensure the effectiveness of the duties implementation of Board of Commissioners, covering the fields of accounting, finance, strategic capabilities, business comprehension, managerial experience and depth, knowledge of insurance industry, regulations understanding as well as risk management and control. Members of the Board of Commissioners are obliged to provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities.

Members of Board of Commissioners are also required to disclose their share ownership and financial and family relationships with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and Shareholders, and are prohibited from taking personal advantage from the Company, other than the remuneration and facilities determined by the GMS.

In implementing their supervisory and advisory functions on the Company's management, TASPEN's Board of Commissioners is assisted by three Committees, namely Audit Committee, Risk Management and Investment Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. These supervisory and

dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan Perseroan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perseroan. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan *monitoring* pelaksanaan Manajemen Risiko pada TASPEN. Komite ini juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perseroan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pada Tahun 2023, jumlah anggota Dewan Komisaris TASPEN sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 2 (dua) Komisaris Independen, dan 3 (tiga) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris TASPEN tidak melebihi jumlah anggota Direksi TASPEN. Seluruh anggota Dewan Komisaris TASPEN berdomisili di Indonesia, dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Susunan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:

advisory functions are carried out through regular meetings held with the Board of Directors and through duties and authorities delegation to each related Committee.

Audit Committee assists the Board of Commissioners in reviewing the Company's financial statements before being submitted to Shareholders and other stakeholders and reviewing the Company's internal assessment reports. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in monitoring the implementation of Risk Management in TASPEN. Besides, this Committee also reviews the adequacy, completeness, and effectiveness of implementing the Company's risk management procedures and provides recommendations for policy directions if needed.

NUMBER, COMPOSITION, AND APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, the number of members of the TASPEN Board of Commissioners was 6 (six) people, consisting of 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. The number of TASPEN Board of Commissioners does not exceed the number of TASPEN Board of Directors members. All members of the TASPEN Board of Commissioners are domiciled in Indonesia, with a term of office of 5 (five) years. The composition of the TASPEN Board of Commissioners (Persero) is as follows:

NO	NAMA Name	JABATAN Position	DASAR HUKUM PENUNJUKAN Legal Basis of Appointment	DIANGKAT Appointed	BERAKHIR End of Term
1	Suhardi Alius	Komisaris Utama President Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-203/MBU/06/2020. Appointed as President Commissioner on June 15, 2020, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-203/MBU/06/2020.	15 Juni 2020 June 15, 2020	15 Juni 2025 June 15, 2025
2	Bima Haria Wibisana	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 9 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-226/MBU/2016 dan diangkat kembali sebagai Komisaris sejak tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-271/MBU/08/2021. Appointed as Commissioner on September 9, 2016, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-226/MBU/2016, and reappointed as Commissioner on August 16, 2021, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-271/MBU/08/2021.	09 September 2021 September 09, 2021	09 September 2026 September 09, 2026



NO	NAMA Name	JABATAN Position	DASAR HUKUM PENUNJUKAN Legal Basis of Appointment	DIANGKAT Appointed	BERAKHIR End of Term
3	Muhammad Edhie Purnawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-118/MBU/05/2019. Appointed as Independent Commissioner on May 29, 2019, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-118/MBU/05/2019.	29 Mei 2019 May 29, 2019	29 Mei 2024 May 29, 2024
4	Lilie Mayasari	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-118/MBU/05/2019. Appointed as Commissioner on May 29, 2019, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-118/MBU/05/2019.	29 Mei 2019 May 29, 2019	29 Mei 2024 May 29, 2024
5	Mardiasmo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-203/MBU/06/2020. Appointed as Independent Commissioner on June 15, 2020, based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number SK-203/MBU/06/2020.	15 Juni 2020 June 15, 2020	15 Juni 2025 June 15, 2025
6	Alex Denni	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor: SK-71/MBU/03/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Appointed as a member of the Board of Commissioners on March 9, 2022, based on the Copy of the Minister of State-Owned Enterprises Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Number: SK-71/MBU/03/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).	09 Maret 2022 March 09, 2022	09 Maret 2027 March 09, 2027

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Direksi berfungsi sebagai Organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegal dalam mengelola kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yakni memaksimalkan nilai Perseroan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi didahului dengan *proses fit and proper test*.

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN PENGANGKATAN DIREKSI

Pada Tahun 2023, jumlah anggota Direksi TASPEN adalah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 6 (enam) Direktur. Seluruh anggota Direksi TASPEN telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari OJK. Seluruh anggota Direksi TASPEN berdomisili di Indonesia, dengan masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Komposisi anggota Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Board of Directors is the Company organ that is fully authorized and responsible for the management of the Company for the Company's interest according to the Company's purposes and objectives and responsible for representing the Company inside and outside the court, according to the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors is assigned and fully responsible in a collegial manner in the management for the Company's interest according to the Company's purposes and objectives, namely maximizing the Company's values by utilizing all existing resources optimally. The Board of Directors is appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS). The process of selection and appointment of the Board of Directors is preceded by a fit and proper test.

NUMBER, COMPOSITION, AND APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS

As of 2023, the number of TASPEN Board of Directors members was 7 (seven), consisting of 1 (one) CEO and 6 (six) Directors. All TASPEN Board of Directors members have passed the Fit and Proper Test and obtained approval from the Financial Services Authority (OJK). All TASPEN Board of Directors members are domiciled in Indonesia, with a term of office for 5 (five) years. The composition of the Board of Directors as of December 31, 2023, was as follows:



NAMA Name	JABATAN Position	DASAR HUKUM PENUNJUKAN Legal Basis of Appointment	DIANGKAT Appointed	BERAKHIR End of Term
A.N.S. Kosasih	Direktur Utama CEO	Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-23/MBU/01/2020. Appointed as CEO since January 17, 2020, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-23/MBU/01/2020.	17 Januari 2020 January 17, 2020	5 April 2024 April 5, 2024
Feb Sumandar	Direktur Perencanaan dan Aktuaria Chief Strategic Planning and Actuarial Officer	Diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 sebagai Direktur SDM, Teknologi Informasi, dan Kepatuhan. Kemudian sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 30 Juni 2021 Nomor: SK- 217/MBU/06/2021, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur SDM dan Teknologi Informasi. Pada 20 Januari 2022, terdapat pengalihan penugasan semula sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Perencanaan dan Aktuaria berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-27/MBU/01/2022. Appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-23/MBU/01/2020 dated January 17, 2020, as the Human Capital, Information Technology, and Compliance Director. Then, as per the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises dated June 30, 2021, Number: SK-217/MBU/06/2021, there was a change in nomenclature to become the Chief HC and Information Technology Officer. On January 20, 2022, there was a reassignment from the position of Chief HC and Information Technology Officer to the position of Chief Strategic Planning and Actuarial Officer based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-27/MBU/01/2022.	17 Januari 2020 January 17, 2020	17 Januari 2024 January 17, 2024
Rony Hanityo Aprianto	Direktur Investasi Chief Investment Officer	Diangkat sebagai Direktur Investasi sejak tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-37/MBU/01/2020. Appointed as Chief Investment Officer since January 30, 2020, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-37/MBU/01/2020.	30 Januari 2020 January 30, 2020	30 Januari 2025 January 30, 2025

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR HUKUM PENUNJUKAN Legal Basis of Appointment	DIANGKAT Appointed	BERAKHIR End of Term
Diyantini Soesilowati	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Chief Compliance and Risk Management Officer	Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-217/MBU/06/2021 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Appointed as Chief Compliance and Risk Management Officer since June 30, 2021, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-217/MBU/06/2021 concerning Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	30 Juni 2021 June 30, 2021	30 Juni 2026 June 30, 2026
Rena Latsmi Puri	Direktur Keuangan Chief Finance Officer	Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Appointed as Chief Finance Officer on January 20, 2022, based on a Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Number SK-27/MBU/01/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).	20 Januari 2022 January 20, 2022	20 Januari 2027 January 20, 2027



NAMA Name	JABATAN Position	DASAR HUKUM PENUNJUKAN Legal Basis of Appointment	DIANGKAT Appointed	BERAKHIR End of Term
Ariyandi	Direktur Operasional Chief Operational Officer	Diangkat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Appointed as Chief Operational Officer on January 20, 2022, based on a Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Number SK-27/MBU/01/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).	20 Januari 2022 January 20, 2022	20 Januari 2027 January 20, 2027
Ovita Susiana Rosya	Direktur SDM dan Teknologi Informasi Chief HC and Information Technology Officer	Diangkat sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi sejak tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Appointed as Chief HC and Information Technology Officer on January 20, 2022, based on a Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Number SK-27/MBU/01/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).	20 Januari 2022 January 20, 2022	20 Januari 2027 January 20, 2027

STRUKTUR ORGANISASI TJSL PERUSAHAAN

Pembentukan anggota kepengurusan komite TJSL dengan melibatkan divisi lain telah terbentuk sejak tanggal 20 April 2021. Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Operasional

Sekretaris : *Social and Env. Responsibility Unit Head*

Anggota :

1. *Services and Marketing Division Head*
2. *Human Capital Division Head*
3. *Corporate Secretary*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TJSL

- a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL;
- b. melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL;
- c. melakukan pembahasan dan perencanaan Program TJSL yang berhubungan dengan *core* bisnis Perseroan;
- d. membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL; dan
- e. Komite TJSL melaksanakan rapat komite, rapat perencanaan, dan rapat evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Komite TJSL dapat meminta revidi dari unit kerja terkait termasuk namun tidak terbatas pada unit kerja yang membidangi Hukum, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Satuan Pengawasan Internal.

Komite TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL kepada Dewan Komisaris.

COMPANY TJSL ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The formation of the TJSL committee management members involving other divisions has been established since April 20, 2021. The organizational structure is as follows:

Chairman : Chief Operational Officer

Secretary : *Social and Environmental Responsibility Unit Head*

Members :

1. *Services and Marketing Division Head*
2. *Human Capital Division Head*
3. *Corporate Secretary*

Duties and Responsibilities of the TJSL Committee

- a. Coordinating among units/directorates to formulate the objectives and implementation guidelines of the TJSL Program;
- b. Mapping and preparing the TJSL Program;
- c. Discussing and planning the TJSL Program related to the Company's *core* business;
- d. Assisting the Board of Directors in evaluating the implementation of the TJSL Program; and
- e. The TJSL Committee conducts committee meetings, planning meetings, and evaluation meetings at least once a year.

In carrying out its main duties and functions, the TJSL Committee may request reviews from relevant work units including but not limited to units responsible for Legal, Risk Management, Compliance, and Internal Audit.

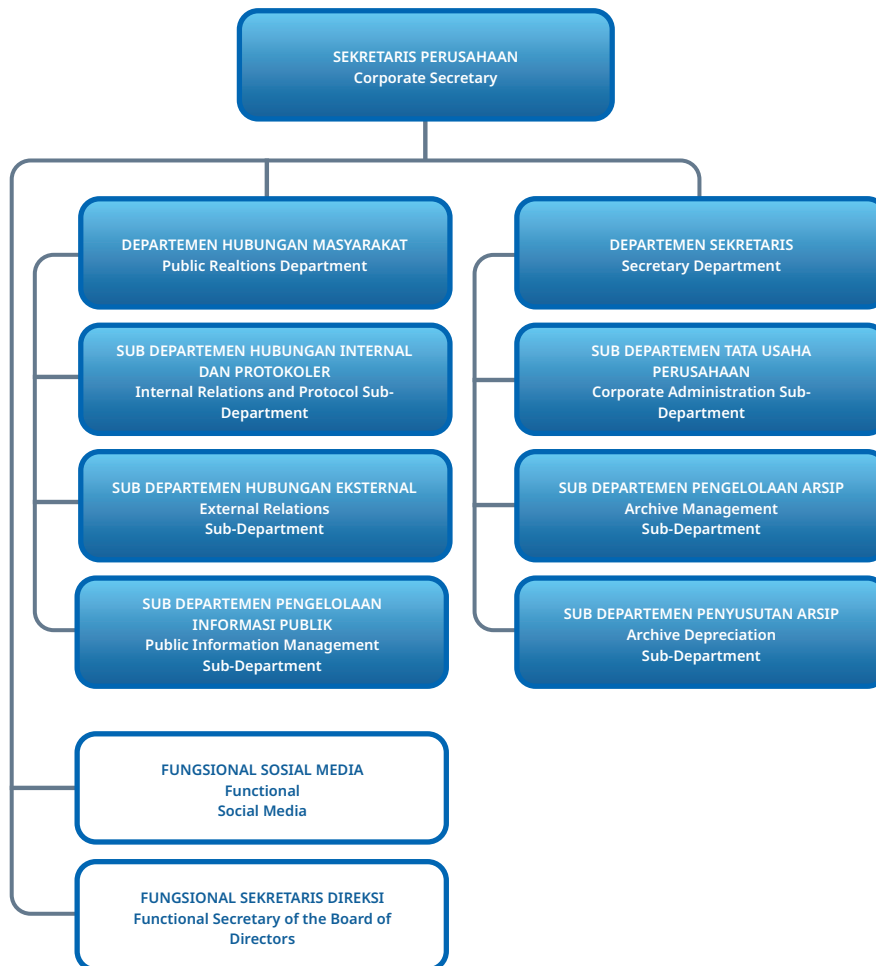
The TJSL Committee as referred to in paragraph (1) submits financial statements and reports on the implementation of the TJSL Program to the Board of Commissioners.



SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan organ di bawah Direksi yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa TASPEN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan. Kedudukan Sekretaris Perusahaan PT TASPEN (Persero) memiliki wilayah kewenangan dari kesekretariatan di dalam Perseroan, yang digambarkan sebagai berikut:

The Corporate Secretary is an organ under the Board of Directors whose duties include ensuring that TASPEN complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Board of Directors is obliged to organize the corporate secretary's function. The position of the Corporate Secretary of PT TASPEN (Persero) has jurisdiction over secretarial affairs within the Company, as depicted below:



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

YOKA KRISMA WIJAYA
Acting Corporate Secretary

Profil Pgs. Sekretaris Perusahaan TASPEN, yaitu Yoka Krisma Wijaya telah diuraikan dalam pembahasan Profil Pejabat Senior.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

YOKA KRISMA WIJAYA
Acting Corporate Secretary

The profile of the Acting Corporate Secretary of TASPEN, Yoka Krisma Wijaya, has been described in the discussion of Senior Executives Profile.

PENGUNGKAPAN MENGENAI KONFLIK KEPENTINGAN [2-15]

Sampai dengan akhir 2023, tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Sekretaris Perusahaan yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan juga sudah memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Sekretaris Perusahaan tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan.

KOMUNIKASI MASALAH PENTING MELALUI SISTEM LAPORAN PELANGGARAN [2-16, 2-25, 2-26, 2-27]

Perseroan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat ataupun pemangku kepentingan terkait bila ada isu penting yang dapat mempengaruhi upaya keberlanjutan Perseroan. Jalur komunikasi tersebut dibuat melalui sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS).

Penerapan kebijakan *Whistleblowing System* dalam pengelolaan Perseroan diatur dalam sebuah keputusan bersama yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yaitu PD-43/DIR/2021 dan KEP-09/DK-TASPEN/122021 tanggal 6 Desember 2021 tentang *Whistleblowing System* PT TASPEN (Persero) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dugaan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada Tim Pengelola WBS melalui saluran yang telah disediakan sebagai berikut :

1. Surat : Tim Pengelola WBS PT TASPEN (Persero)
2. Website : wbs.taspen.co.id
3. E-mail : pengaduan@taspen.co.id
4. SMS/Whatsapp : 081 1144 666

Sebagai wujud komitmen TASPEN untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, ditetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor, terlapor dan pengelola WBS meliputi:

1. Perlindungan kerahasiaan pelapor, karir dan perlindungan fisik dan hukum
2. Perlindungan identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti dan catatan yang merugikan dalam *Curriculum Vitae*-nya jika dugaan pelanggaran tidak terbukti
3. Perlindungan atas ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun terhadap pengelola WBS

DISCLOSURE REGARDING CONFLICT OF INTEREST [2-15]

As of the end of 2023, none of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Corporate Secretary were recorded as shareholders of the Company, either directly or indirectly. The Company has also ensured that all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or the Corporate Secretary did not hold concurrent positions in other companies that could result in a conflict of interest.

COMMUNICATION OF IMPORTANT ISSUES THROUGH WHISTLEBLOWING SYSTEM [2-16, 2-25, 2-26, 2-27]

The Company provides a channel for the public and stakeholders to report important issues that may affect the sustainability efforts of the Company. This communication channel is established through a Whistleblowing System (WBS).

The implementation of the Whistleblowing System policy in corporate management is governed by a joint decree established by the Board of Directors and the Board of Commissioners, namely PD-43/DIR/2021 and KEP-09/DK-TASPEN/122021 dated December 6, 2021, regarding the Whistleblowing System of PT TASPEN (Persero), as well as the Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

These alleged violations can be reported to the WBS Management Team through the provided channels as follows:

1. Letter: PT TASPEN (Persero) WBS Management Team
2. Website: wbs.taspen.co.id
3. Email: pengaduan@taspen.co.id
4. SMS/WhatsApp: 081 1144 666

As a manifestation of TASPEN's commitment to maintaining the confidentiality of reporting data, a protection policy is established for whistleblowers, the reported parties, and WBS managers, including:

1. Protection of the whistleblower's confidentiality, career, and physical and legal protection.
2. Protection of the reported party's identity until the alleged violation is proven and unfavorable records in their Curriculum Vitae if the alleged violation is not proven.
3. Protection against threats, intimidation, or unpleasant actions from any party towards the WBS managers.



Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Direksi membentuk organisasi yang terdiri dari :

a. Tim Pengelola

Pengarah :

- Pemegang Saham
- Komisaris Utama
- Direktur Utama

Pelaksana :

- Ketua : *Compliance Division Head*
- Sekretaris : *Senior Manager pada Compliance Division*

b. Tim Investigasi

1. Auditor Internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
2. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Komisaris Utama untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris dan jika dibutuhkan, dapat melibatkan Auditor Internal.

To handle reports of alleged violations, the Board of Directors establishes an organization consisting of:

a. Management Team

Advisors:

- Shareholders
- President Commissioner
- CEO

Executors:

- Chairman: *Compliance Division Head*
- Secretary: *Senior Manager at Compliance Division*

b. Investigation Team

1. Internal Auditors and other officials appointed by the CEO to investigate alleged violations committed by employees.
2. The President Commissioner appoints External Auditors to investigate alleged violations committed by Supporting Organs of the Board of Commissioners and, if necessary, may involve Internal Auditors.

TAHUN Year	JUMLAH PELANGGARAN Number Of Violations	STATUS PENYELESAIAN Resolution Status
2021	0	Selesai / Completed
2022	2	Selesai / Completed
2023	0	Selesai / Completed

Sepanjang periode Januari - Desember terdapat sebanyak 133 laporan pengaduan dugaan pelanggaran yang masuk melalui media/saluran WBS. Tim pelaksana WBS telah melakukan analisa dan verifikasi terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran yang diterima dan tidak terdapat laporan yang memenuhi kriteria lingkup pelaporan pengaduan pelanggaran *Whistleblowing System* sepanjang periode Januari - Desember 2023.

Kegiatan Politik

Pada tahun 2023, TASPEN bersikap netral dengan tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik termasuk diantaranya aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun. Berikut perwujudan netralitas aktivitas politik Perseroan seperti namun tidak terbatas pada:

1. Tidak melakukan kegiatan politik dan memberikan sumbangan serta bantuan dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan partai politik.
2. Tidak memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornament partai politik

Throughout the period of January to December, there were a total of 133 reports of alleged violations received through the WBS media/channels. The WBS implementation team has conducted analysis and verification of all received reports of alleged violations, and there were no reports that met the criteria within the scope of Whistleblowing System violation reporting from January to December 2023.

Political Activities

In 2023, TASPEN remained neutral by abstaining from participating in political activities, including partisan political activities, and refrained from providing donations or contributions in any form. The manifestation of the Company's political neutrality includes but is not limited to:

1. Abstaining from engaging in political activities and providing contributions or assistance in any form on behalf of the Company, including the use of Company facilities, resources, and funds for political party purposes.
1. Refraining from displaying, exhibiting, or wearing symbols, images, and/or ornaments of political parties.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEBERLANJUTAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEBERLANJUTAN [2-17, E.2]

SUSTAINABILITY COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND OFFICIAL/WORK UNIT RESPONSIBLE FOR SUSTAINABILITY [2-17, E.2]

PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan fungsi pengawasan Perseroan. Daftar program pengembangan yang diikuti oleh Dewan Komisaris pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, the Board of Commissioners has participated in several competency development programs to support their duties and responsibilities in performing the supervisory function of the Company. The list of development programs attended by the Board of Commissioners during 2023 is as follows:

TABEL PELATIHAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023
Table of Training for Board of Commissioners Members in 2023

NO	NAMA Name	JENIS Type	PELATIHAN Training	TANGGAL PELATIHAN Training Date
1	Suhardi Alius	Risk Management	GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
			Boards and Risks	20 September 2023 s.d 21 September 2023 September 20, 2023 to September 21, 2023
			Governance, Risk, and Compliance For Executive	29 September 2023 September 29, 2023
		Enrichment	BUMN Leadership Forum	Maret March
2	Bima Haria Wibisana	Risk Management	GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
		Leadership	Sertifikasi Komisaris/ Commissioner Certification	29 September 2023 September 29, 2023
		Finance	Finance for Non-Financial Managers	21 September 2023 s.d 23 September 2023 September 21, 2023 to September 23, 2023
3	Muhammad Edhie Purnawan	Risk Management	GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
		Leadership	High Performance Leadership Program	06 s.d 10 November 2023 November 06 to 10, 2023
		Audit	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) - Bali/National Seminar on Internal Audit (SNIA) - Bali	06 s.d 07 Desember 2023 Desember 06 to 07, 2023
		Enrichment	BUMN Leadership Forum	Maret March



NO	NAMA Name	JENIS Type	PELATIHAN Training	TANGGAL PELATIHAN Training Date
4	Lilie Mayasari	<i>Risk Management</i>	GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
		<i>Leadership</i>	Tamasek Holding Singapore	07 Desember s.d 09 Desember 2023 December 07, 2023 to December 09, 2023
5	Mardiasmo	<i>Risk Management</i>	<i>Certificate in Governance Practice</i>	12 s,d 14 September 2023 September 12 to 14, 2023
			GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
6	Alex Denni	<i>Risk Management</i>	GRC Forum	29 September 2023 September 29, 2023
		<i>Leadership</i>	<i>High Performance Leadership Program</i>	05 s.d 11 September 2023 September 05 to 11, 2023

PROGRAM PENGEMBANGAN DIREKSI

Selama tahun 2023, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa program pengembangan dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengelolaan Perseroan. Daftar program pengembangan yang diikuti adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS DEVELOPMENT PROGRAM

Throughout 2023, members of the Company's Board of Directors have participated in various development programs aimed at supporting their duties and responsibilities in managing the Company. The list of development programs attended was as follows:

No	Peserta Participant	Jenis Type	Nama Pembelajaran Learning Name	From	To
1	A.N.S. Kosasih	<i>Risk Management</i>	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		<i>Investment</i>	<i>Investing in Sustainable Timberland and Agriculture</i> Investing in Sustainable Timberland and Agriculture	21/11/2023	22/11/2023
		<i>Data Management</i>	<i>Data for Executive Decision Making</i> Data for Executive Decision Making	23/11/2023	24/11/2023
		<i>Accounting</i>	<i>Management Accountants' Pioneering the Path: Leveraging the Circular Economy for Sustainable Growth</i> Management Accountants' Pioneering the Path: Leveraging the Circular Economy for Sustainable Growth	24/11/2023	25/11/2023

No	Peserta Participant	Jenis Type	Nama Pembelajaran Learning Name	From	To
2	Feb Sumandar	Accounting	PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i> PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i>	10/05/2023	11/05/2023
		Leadership	ASEAN <i>Global Leadership Program</i> (AGLP) ASEAN <i>Global Leadership Program</i> (AGLP)	15/05/2023	19/05/2023
		Risk Management	<i>Fundamental of Governance Risk and Compliance</i> (GRC) <i>Fundamental of Governance Risk and Compliance</i> (GRC)	08/06/2023	08/06/2023
		Actuary	Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i> Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i>	23/06/2023	23/06/2023
		Information Technology	<i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i> <i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i>	14/09/2023	15/09/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		Actuary	Indonesia <i>Actuaries Summit</i> Indonesia <i>Actuaries Summit</i>	22/11/2023	25/11/2023
3	Rony Hanityo Aprianto	Accounting	PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i> PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i>	10/05/2023	11/05/2023
		Leadership	<i>Leading Innovation in Global Academic Program</i> <i>Leading Innovation in Global Academic Program</i>	18/09/2023	22/09/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
4	Diyantini Soesilowati	Accounting	PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i> PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i>	10/05/2023	11/05/2023
		Human Capital	GRCE GRCE	12/06/2023	12/06/2023
		Risk Management	GRC <i>Summit</i> GRC <i>Summit</i>	24/08/2023	25/08/2023
		Risk Management	<i>Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2023</i> <i>Risk and Governance Summit (RGS) 2023</i>	30/11/2023	30/11/2023
		Information Technology	<i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i> <i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i>	14/09/2023	15/09/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		Business Development	Seminar Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi BUMN Seminar on the Implementation of Corporate Governance Guidelines and Corporate Activities for State-Owned Enterprises (SOEs)	26/10/2023	27/10/2023
		Risk Management	<i>Boards and Risks</i> <i>Boards and Risks</i>	20/11/2023	21/11/2023



No	Peserta Participant	Jenis Type	Nama Pembelajaran Learning Name	From	To
5	Rena Latsmi Puri	Accounting	PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i> PSAK 71 : <i>Expected Credit Loss</i>	10/05/2023	11/05/2023
		Risk Management	<i>Fundamental of Governance Risk and Compliance (GRC)</i> Fundamental of Governance Risk and Compliance (GRC)	08/06/2023	08/06/2023
		Actuary	Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i> Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i>	23/06/2023	23/06/2023
		Information Technology	<i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i> Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage	14/09/2023	15/09/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		Accounting	IAMI <i>Management Accountant Conference</i> IAMM Management Accountant Conference	24/11/2023	25/11/2023
6	Ariyandi	Information Technology	<i>Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage</i> Digital Transformation For Sustainable Competitive Advantage	14/09/2023	15/09/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		Business Development	Seminar Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi BUMN Seminar on the Implementation of Corporate Governance Guidelines and Corporate Activities for State-Owned Enterprises (SOEs)	26/10/2023	27/10/2023
7	Ovita Susiana Rosya	Human Capital	GRCE GRCE	12/06/2023	12/06/2023
		Actuary	Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i> Asia Pacific PAI – SOA <i>Joint Symposium</i>	23/06/2023	23/06/2023
		Human Capital	<i>Industrial & Employee Relation Conference 2023</i> Industrial & Employee Relation Conference 2023	23/08/2023	26/08/2023
		Risk Management	GRC Forum GRC Forum	29/09/2023	29/09/2023
		Human Capital	<i>Chief Human Resource Officers (CHRO) School Tahun 2023</i> Chief Human Resource Officers (CHRO) School Year 2023	13/10/2023	08/12/2023
		Leadership	<i>The Leading Future of Work Event Series</i> The Leading Future of Work Event Series	21/11/2023	22/11/2023
		Actuary	Indonesia <i>Actuaries Summit</i> Indonesia Actuaries Summit	22/11/2023	25/11/2023

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sampai dengan akhir tahun 2023, Komite Audit mengikuti beberapa kegiatan pengembangan. Daftar program pengembangan yang diikuti adalah sebagai berikut:

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM OF AUDIT COMMITTEE

Until the end of 2023, the Audit Committee participated in several activities. The list of development programs attended was as follows:

TABEL PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT
Table of Training and/or Competency Enhancement of the Audit Committee

NAMA Name	NAMA PELATIHAN Name of Training	TEMPAT PELATIHAN DAN TANGGAL PELATIHAN Location and Date of Training	PENYELENGGARA Organizer
Darius Singkuang	Seminar Transformasi Internal Audit dan Penandatanganan MoU PwC Indonesia dan IKAI Seminar on Internal Audit Transformation and Signing of MoU between PwC Indonesia and IKAI	9 Mei 2023 May 9, 2023	PwC
Henny Irniawan	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni – Oktober 2023 June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Darius Singkuang	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni – Oktober 2023 June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Henny Irniawan	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/CRGP Integrated Risk Governance Specialist	Jakarta, 28 November 2023 November 28, 2023	LSPMR
Darius Singkuang	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/CRGP Integrated Risk Governance Specialist	Jakarta, 28 November 2023 November 28, 2023	LSPMR

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Daftar program pengembangan yang diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi pada periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAMS OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee of the Company participated in several competency development programs to support its duties and responsibilities. The list of development programs attended by the Nomination and Remuneration Committee during 2023 was as follows:

TABEL PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Table of Training and/or Competency Enhancement of the Nomination and Remuneration Committee

NAMA Name	NAMA PELATIHAN Name of Training	TEMPAT PELATIHAN DAN TANGGAL PELATIHAN Location and Date of Training	PENYELENGGARA Organizer
Darmin	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni – Oktober 2023 June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Amrizal	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni – Oktober 2023 June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Amrizal	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/CRGP Integrated Risk Governance Specialist	Jakarta, 28 November 2023 November 28, 2023	LSPMR



**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMITE PEMANTAU
MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI**

**COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAMS OF RISK
MANAGEMENT AND INVESTMENT MONITORING
COMMITTEE**

**TABEL PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN
INVESTASI**

Table of Training and/or Competency Enhancement of the Risk Management and Investment Monitoring Committee

NAMA Name	NAMA PELATIHAN Name of Training	TEMPAT PELATIHAN DAN TANGGAL PELATIHAN Location and Date of Training	PENYELENGGARA Organizer
Sigit Rohmadi	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni - Oktober 2023 Jakarta, June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Priyanto Soedarsono	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni - Oktober 2023 Jakarta, June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Rini Komala sari	GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program 2023	Jakarta, Juni - Oktober 2023 Jakarta, June - October, 2023	Kementerian BUMN The Ministry of SOEs
Sigit Rohmadi	Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi/ CRGP Integrated Risk Governance Specialist	Jakarta, 28 November 2023 November 28, 2023	LSPMR
Priyanto Soedarsono	Certified Securities Analyst Certified Securities Analyst	Jakarta, November 2023 Jakarta, November 2023	CSA Institute

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMITE TJSL

**COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAMS OF TJSL
COMMITTEE**

TABEL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMITE TJSL
Table Of Competence Development Programs of TJSL Committe

NAMA Name	NAMA PELATIHAN Name of Training	TEMPAT PELATIHAN DAN TANGGAL PELATIHAN Location and Date of Training	PENYELENGGARA Organizer

**PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUSAHAAN**

PENGEMBANGAN

SEKRETARIS

**COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAMS OF
CORPORATE SECRETARY**

NAMA Name	PELATIHAN Training	TANGGAL PELATIHAN Training Date	PENYELENGGARA Organizer
Yoka Krisma Wijaya	E-learning PADI KPK Batch 2 E-learning of KPK's Basic Anti- Corruption Knowledge and Integrity (PADI) for Batch 2	20-30 Januari 2023 January 20-30, 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi Corruption Eradication Commission
	Leader Enhancement Acceleration Program Leader Enhancement Acceleration Program	15-18 Februari 2023 February 15-18, 2023	PT TASPEN (Persero) PT TASPEN (Persero)
	Pendalaman Kompetensi BOD-1 Deepening Competence BOD-1	02-06 Desember 2023 December 02-06, 2023	Daya Dimensi Indonesia Daya Dimensi Indonesia
	Indonesia Leadership Forum Indonesia Leadership Forum	09-10 Maret 2023 March 09-10, 2023	FHCI BUMN FHCI BUMN

EVALUASI KINERJA ORGAN TATA KELOLA [2-18]

PERFORMANCE EVALUATION OF GOVERNANCE ORGANS [2-18]

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun, dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) secara garis besar dengan memberikan kontribusi dan dukungan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi PT TASPEN (Persero) dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan, serta melakukan *monitoring* untuk tercipta dan berkembangnya di PT TASPEN (Persero) dengan terlebih dahulu:

1. Dewan Komisaris wajib mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) kepada RUPS untuk ditetapkan.
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Pemegang Saham/ Menteri.

Hingga akhir tahun 2023 Dewan Komisaris melakukan penilaian atas pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris secara kolegal maupun individual, dengan hasil sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

1. Penilaian Kolegal

Komposisi KPI Dewan Komisaris tahun 2023 terdiri dari 3 aspek, yaitu: Aspek Pengawasan dan Pengarahan, Aspek Pelaporan dan Aspek Dinamis. Target pencapaian KPI dalam Tahun 2023 adalah memperoleh skor 100%, dan berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian skor atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris selama kurun waktu tahun 2023 diperoleh skor 100.00%.

2. Penilaian Individual

Penilaian individual Dewan Komisaris, dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran dalam menghadiri rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Adapun penilaian individual Dewan Komisaris pada tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

The assessment of the Board of Commissioners' performance is conducted annually, utilizing Key Performance Indicators (KPIs) broadly to contribute to and support the implementation of PT TASPEN (Persero)'s Vision and Mission in the current year's work programs while adhering to the Company's values. It also involves monitoring to ensure the creation and development of PT TASPEN (Persero) by first:

1. The Board of Commissioners is required to propose Key Performance Indicators (KPIs) to the GMS for approval.
2. Key Performance Indicators serve as a measure of assessing the success of the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties and responsibilities implementation according to the provision of laws and regulations and/or the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is required to provide quarterly progress reports on the realization of Key Performance Indicators to the Shareholders/the Minister.

Until the end of 2023, the Board of Commissioners assessed the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Commissioners collectively and individually, with the following results:

a. The Board of Commissioners

1. Collective Assessment

The composition of the KPIs for the Board of Commissioners in 2023 consisted of 3 aspects: Supervision and Direction Aspects, Reporting Aspects, and Dynamic Aspects. The target achievement for KPIs in 2023 was to attain a score of 100%, and based on the recapitulation of scores for the implementation of the Board of Commissioners' work programs during the 2023 period, a score of 100.00% was achieved.

2. Individual Assessment

The individual assessment of the Board of Commissioners is based on the attendance rate at the Board of Commissioners meetings, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, which are held regularly every month. The individual assessment of the Board of Commissioners in 2023 was as follows:



NO	NAMA Name	JABATAN	Position	SKOR Score
1.	Suhardi Alius	Komisaris Utama	President Commissioner	100,00%
2.	Bima Haria Wibisana	Komisaris	Commissioner	100,00%
3.	M. Edhie Purnawan	Komisaris Independen	Independent Commissioner	100,00%
4.	Lilie Mayasari	Komisaris	Commissioner	100,00%
5.	Mardiasmo	Komisaris Independen	Independent Commissioner	100,00%
6.	Alex Denni	Komisaris	Commissioner	100,00%

Pada tahun 2023, pemenuhan target individual masing-masing Dewan Komisaris tercapai sebesar 100,00%.
In 2023, the individual target fulfillment of each Board of Commissioners member was achieved at 100.00%.

b. Direksi

Penilaian Kolegial

Nilai target KPI Direksi di tahun 2023, terdiri dari: Aspek Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Aspek Inovasi Model Bisnis, Aspek Kepemimpinan Teknologi, Aspek Peningkatan Investasi dan Aspek Pengembangan Talenta.

b. Board of Directors

Collegial Assessment

The target KPIs values for the Board of Directors in 2023 comprised Economic and Social Value Aspects for Indonesia, Business Model Innovation Aspects, Technology Leadership Aspects, Investment Enhancement Aspects, and Talent Development Aspects.

KEBIJAKAN REMUNERASI [2-19, 2-20, 2-21]

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dapat bersifat tetap maupun bersifat variabel. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan sesuai kinerja masing-masing anggota, dan juga kinerja serta situasi Perseroan, dengan melibatkan Komite Nominasi dan Remunerasi – organ yang bertanggung jawab dalam proses penetapan nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah diketahui dan ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Dalam RUPS Tahunan terdapat agenda rutin untuk menentukan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan juga mempertimbangkan rasio perbandingan gaji antara karyawan, terutama yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dengan karyawan bergaji tertinggi dan terendah. Perhitungan ini dilakukan untuk memastikan adanya keadilan yang merata dalam hal peningkatan gaji bagi setiap karyawan.

REMUNERATION POLICY [2-19, 2-20, 2-21]

Remuneration provided to the Board of Commissioners and Board of Directors can be fixed or variable. The remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on the performance of each member, as well as the performance and situation of the Company, involving the Nomination and Remuneration Committee - the organ responsible for the nomination and remuneration determination process of the Board of Commissioners and Board of Directors members. The determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is known and established by shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders includes a routine agenda to determine the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company also considers the ratio of salary comparisons among employees, especially those involving the Board of Commissioners and Board of Directors, with the highest and lowest-paid employees. This calculation is carried out to ensure fair and equitable salary increases for every employee.

Transparansi Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Transparansi mengenai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Transparency of the Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors in 2023

Transparency regarding the remuneration for the Board of Commissioners and Directors throughout 2023 is as follows:

TABEL REKAPITULASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2023 DAN 2022
Table of Recapitulation of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration for 2023 and 2022

	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration	15.540.933.865	18.983.897.318
Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration	39.301.565.005	45.527.432.067

TASPEN beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia, yang berimbas pada pemberian upah minimum bagi pegawai. Perbedaan pemberian upah minimum tergantung pada wilayah kerja karyawan tersebut. Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Besaran upah minimum sangat tergantung pada masing-masing daerah, yang umumnya menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya.

TASPEN operates in various regions across Indonesia, which impacts the provision of minimum wages for employees. The differences in minimum wage provisions depend on the employees' work regions. In accordance with Law No. 13 of 2003 on Manpower, the provision of minimum wages is aimed at achieving a decent standard of living for employees. The minimum wage amount greatly depends on each region, generally adjusting to the prices of basic necessities, inflation rates, living standards, and other variables.

INFORMASI TENTANG RASIO GAJI DI LINGKUP PERSEROAN

Information about the Salary Ratio within the Company

NO	WILAYAH Region	2023			2022		
		UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage	UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage
1	KC MEDAN	3.624.117	9.278.000	256%	3.370.645	8.769.000	260%
2	KC BANDA ACEH	3.540.555	10.599.284	299%	3.280.327	8.129.194	248%
3	KC PEMATANG SIANTAR	2.710.493	6.160.000	227%	2.523.361	5.864.000	232%
4	KC PADANG	2.742.476	6.160.000	225%	2.512.539	5.864.000	233%
5	KC PEKANBARU	3.319.023	6.160.000	186%	3.049.675	5.864.000	192%
6	KC LHOKSEUMAWE	3.413.666	9.278.000	272%	3.166.460	8.769.000	277%
7	KC KEPULAUAN NIAS	2.723.199	6.160.000	226%	2.560.336	5.864.000	229%
8	KC BUKITTINGGI	2.742.476	9.278.000	338%	2.512.539	5.864.000	233%
9	KC TANJUNG PINANG	3.053.619	9.278.000	304%	3.279.194	8.769.000	267%
10	KC JAKARTA I	4.901.798	6.160.000	126%	4.641.854	5.864.000	126%
11	KC PALEMBANG	3.565.409	9.278.000	260%	3.565.409	8.129.194	228%



NO	WILAYAH Region	2023			2022		
		UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage	UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage
12	KC BANDAR LAMPUNG	2.991.394	6.160.000	206%	2.770.794	5.864.000	212%
13	KC BENGKULU	2.601.802	9.278.000	357%	2.422.444	8.769.000	362%
14	KC JAMBI	2.943.033	6.160.000	209%	2.698.940	5.864.000	217%
15	KC LUBUK LINGGAU	3.404.177	6.160.000	181%	3.144.446	5.864.000	186%
16	KC PANGKAL PINANG	3.640.000	11.371.936	312%	3.264.880	8.129.194	249%
17	KC JAKARTA II	4.901.798	6.160.000	126%	4.641.854	5.864.000	126%
18	KC BANDUNG	4.048.462	6.160.000	152%	3.774.860	5.864.000	155%
19	KC BOGOR	4.639.429	6.160.000	133%	4.330.249	5.864.000	135%
20	KC TASIKMALAYA	2.533.341	6.160.000	243%	2.363.389	5.864.000	248%
21	KC CIREBON	2.456.516	6.160.000	251%	2.304.943	5.864.000	254%
22	KC SERANG	4.090.799	6.160.000	151%	3.850.526	5.864.000	152%
23	KC BEKASI	5.137.574	10.424.370	203%	4.816.921	8.077.134	168%
24	KC TANGERANG	4.584.519	9.278.000	202%	4.285.798	8.769.000	205%
25	KC DEPOK	4.694.493	10.599.284	226%	4.377.231	5.864.000	134%
26	KC SEMARANG	3.060.348	6.160.000	201%	2.835.021	5.864.000	207%
27	KC PURWOKERTO	2.118.123	6.160.000	291%	1.983.261	5.864.000	296%
28	KC SURAKARTA	2.174.169	6.160.000	283%	2.034.810	5.864.000	288%
29	KC PEKALONGAN	2.305.822	6.160.000	267%	2.156.000	5.864.000	272%
30	KC MALANG	3.194.144	6.160.000	193%	2.994.144	5.864.000	196%
31	KC MADIUN	1.958.410	6.160.000	315%	2.154.251	5.864.000	272%
32	KC KEDIRI	2.318.117	6.160.000	266%	2.118.119	5.864.000	277%
33	KC YOGYAKARTA	2.324.776	6.160.000	265%	2.153.970	5.864.000	272%
34	KC SURABAYA	4.525.479	6.160.000	136%	4.375.479	5.864.000	134%
35	KC BANJARMASIN	3.200.035	9.278.000	290%	3.000.371	8.769.000	292%
36	KC PALANGKARAYA	3.226.753	9.278.000	288%	2.972.541	8.769.000	295%
37	KC PONTIANAK	2.750.644	6.160.000	224%	2.579.616	5.864.000	227%
38	KC SAMARINDA	3.329.199	9.278.000	279%	3.137.676	8.769.000	279%
39	KC JEMBER	2.555.663	6.160.000	241%	2.355.663	5.864.000	249%
40	KC TARAKAN	4.055.357	9.278.000	229%	3.774.378	9.915.370	263%
41	KC PAMEKASAN	2.133.655	6.160.000	289%	1.939.686	5.864.000	302%
42	KC MAKASSAR	3.529.181	6.160.000	175%	3.294.982	5.864.000	178%
43	KC MANADO	3.530.000	8.408.398	238%	3.394.489	8.769.000	258%
44	KC PALU	3.073.895	9.278.000	302%	2.848.203	8.769.000	308%
45	KC KENDARI	2.993.731	9.278.000	310%	2.823.315	10.090.284	357%
46	KC PALOPO	3.384.876	10.476.682	310%	3.165.876	8.769.000	277%
47	KC GORONTALO	2.989.350	10.599.284	355%	2.800.580	8.129.194	290%

NO	WILAYAH Region	2023			2022		
		UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage	UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA Regency/City Minimum Wage	IMBAL JASA KARYAWAN TINGKAT TERENDAH Lowest Level Employee Benefits	PERSENTASE Percentage
48	KC MAMUJU	2.904.645	9.278.000	319%	2.715.637	8.112.398	299%
49	KC BONE	3.384.876	6.160.000	182%	3.165.876	5.864.000	185%
50	KC DENPASAR	2.994.646	9.278.000	310%	2.802.906	8.769.000	313%
51	KC KUPANG	2.123.994	10.435.790	491%	1.975.000	9.926.790	503%
52	KC MATARAM	2.598.079	9.278.000	357%	2.416.953	8.769.000	363%
53	KC AMBON	2.812.827	9.278.000	330%	2.619.312	8.769.000	335%
54	KC JAYAPURA	3.864.696	9.278.000	240%	3.561.932	8.769.000	246%
55	KC MANOKWARI	3.282.000	9.278.000	283%	3.200.000	8.769.000	274%
56	KC ENDE	2.123.994	10.383.835	489%	1.975.000	8.769.000	444%
57	KC TERNATE	3.040.000	9.278.000	305%	2.900.000	8.769.000	302%

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [E.3, E.5]

TASPEN menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Bagi TASPEN, manajemen risiko sangat membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perseroan. Untuk dapat memperoleh legitimasi di seluruh organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko perlu ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA [GRI 2-18]

a. Pengelolaan Risiko Strategis

Perusahaan melakukan penyusunan dan penetapan strategi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), *policy statement* dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Penilaian risiko strategis dilakukan secara terintegrasi dengan proses penyusunan rencana strategi Perusahaan. Pedoman Rencana Kerja Berbasis Risiko dikembangkan untuk mengintegrasikan proses perencanaan strategis dengan pengelolaan risiko.

Pemantauan penanganan risiko strategis merupakan proses yang terintegrasi dengan pemantauan pencapaian kinerja dan program kerja yang terkait dari unit kerja yang bersangkutan. Hasil pemantauan penanganan risiko dilaporkan kepada

RISK ASSESSMENT ON SUSTAINABILITY FINANCE IMPLEMENTATION [E.3, E.5]

TASPEN realizes that risk is an integral part of every operational activity of the Company and can influence the Company's business results and performance. For TASPEN, risk management is highly beneficial in decisionmaking by considering uncertainty and its impacts on the achievement of the Company's strategic objectives. Recognizing the risks faced, the Company proactively seeks to improve the Company's risk management capabilities. The risk management implementation policy needs to be emphasized through management commitments aligned with applicable regulations to gain legitimacy throughout the organization.

TYPES OF RISKS AND THEIR MANAGEMENT [[GRI 2-18]

a. Strategic Risk Management

The Company formulates and establishes strategies outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP), policy statements, and the Corporate Work Plan and Budget.

Strategic risk assessment is integrated into the Company's strategic planning process. Risk-based Work Plan guidelines are developed to integrate the strategic planning process with risk management.

The monitoring of strategic risk handling is an integrated process with performance achievement monitoring and related work programs for the respective work units. The results of risk handling monitoring are reported to the Board of Directors



Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

b. Pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas (Risiko Pasar, Kredit dan Likuiditas)

Pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas, dalam hal ini mencakup pengelolaan risiko pasar, kredit dan likuiditas, sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian aset dan liabilitas serta mengoptimalkan profit perusahaan. Pengelolaan risiko ini membutuhkan pemahaman karakteristik bisnis (aset dan liabilitas) serta program yang dikelola Perusahaan.

Penetapan liabilitas Perusahaan kepada peserta dihitung berdasarkan regulasi pemerintah. Demikian pula dari sisi aset, batasan-batasan investasi telah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Kebijakan Internal Perusahaan terkait investasi. Dengan memahami karakteristik bisnis Perusahaan, pengelolaan risiko aset dan liabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja *Asset Liability Management* (ALMA) dimana pengelolaan portfolio aset dilakukan dengan mempertimbangkan liabilitas perusahaan (*liability-driven investment*).

c. Pengelolaan Risiko Operasional

Perusahaan telah menciptakan suatu metodologi dan proses penilaian risiko yang dapat menjangkau *people, process, system, external events*.

1. Pada aspek sumber daya manusia, Perusahaan memiliki kebijakan, kerangka, dan sistem *Human Capital* yang mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia *berbasis individual talent*. Perusahaan juga mengembangkan *succession plan* yang baik guna memastikan proses pergantian pemimpin (terutama karena pensiun) terlaksana dengan baik. Selain itu Perusahaan membangun komitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap *fraud* (*zero tolerance*).
2. Untuk tujuan pengendalian yang efektif, efisien, dan integrasi antar proses pada lini pertahanan pertama, kedua, dan ketiga diwujudkan sebagai bagian dari proses bisnis yang rutin dan didukung sistem yang memadai. Pada aspek GCG, Perusahaan menyusun Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Pada aspek teknologi dan informasi, Perusahaan memiliki tata kelola dan standar pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang mencakup arsitektur teknologi, pengelolaan infrastruktur, manajemen keamanan data, manajemen aplikasi, *database*, prosedur *backup*, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen

and Board of Commissioners periodically, at least once every 3 (three) months.

b. Asset and Liability Risk Management (Market, Credit, and Liquidity Risks)

Asset and Liability Risk Management, which includes market, credit, and liquidity risk management, is essential to ensure the suitability of assets and liabilities and optimize the Company's profits. This risk management requires an understanding of business characteristics (assets and liabilities) and company-managed programs.

The determination of the Company's liabilities to participants is calculated based on government regulations. Similarly, on the asset side, investment limits have also been regulated by the Minister of Finance Regulation and the Company's Internal Investment Policy. By understanding the business characteristics of the Company, asset and liability risk management can be carried out by applying the Asset Liability Management (ALMA) framework, where asset portfolio management considers the Company's liabilities (*liability-driven investment*).

c. Operational Risk Management

The Company has developed a methodology and risk assessment process that encompasses people, processes, systems, and external events.

1. Regarding human capital, the Company has policies, frameworks, and Human Capital systems that prioritize enhancing the quality of individual talent-based human capital. Additionally, the Company implements a robust succession plan to ensure smooth leadership transitions/replacements (especially due to retirement) are carried out. Furthermore, the Company is committed to a zero-tolerance policy towards fraud.
2. For effective and efficient control purposes, integration between processes in the first, second, and third lines of defense is established as part of routine business operations and supported by adequate systems. In terms of Good Corporate Governance (GCG), the Company has formulated Quality Management Systems Policies and Standard Operating Procedures (SOPs).
3. Concerning technology and information, the Company has established governance and standards for managing information systems and technology, covering technology architecture, infrastructure management, data security management, application management, databases, backup procedures,

penggunaan jasa pihak ketiga untuk mendukung layanan yang optimal kepada peserta.

4. Untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga / bencana yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional Perusahaan, Perusahaan menyusun Pedoman Manajemen Kontinuitas Bisnis (*Business Continuity Management*) termasuk di dalamnya *Crisis Management* yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kontinuitas operasional Perusahaan pada kondisi krisis/bencana/kejadian luar biasa. Selain itu, Perusahaan juga membangun *Disaster Recovery Center*, untuk menjamin sistem teknologi Perusahaan masih tetap bisa berjalan dalam keadaan terjadi bencana/krisis.

d. Pengelolaan Risiko Hukum

Perusahaan memiliki Unit Kerja yang mengelola risiko hukum untuk memastikan agar kelemahan aspek yuridis antara lain yang disebabkan oleh tuntutan hukum, perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perikatan serta perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tidak berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan memastikan tersedianya Prosedur/pengendalian internal/sumber daya yang memadai.

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pada aspek *Good Corporate Governance (GCG)*, Perusahaan menyusun Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, Perusahaan menyusun beberapa pedoman yang diperlukan sebagai acuan, antara lain Pedoman GCG, *Code of Conduct*, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Board Manual.

f. Pengelolaan Risiko Reputasi

Kualitas reputasi Perusahaan akan menentukan persepsi dan perilaku *stakeholders* terhadap Perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan selalu berusaha untuk menjaga reputasi melalui berbagai strategi komunikasi yang tepat kepada *stakeholders*.

Perusahaan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap penanganan risiko ini. Komunikasi dengan regulator, instansi pemerintah, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan media massa dikelola masing-masing secara spesifik sesuai kepentingannya demi menjaga reputasi dan kepercayaan kepada Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme penanganan keluhan baik

human capital management, and management of third-party services to ensure optimal services to participants.

4. To preempt unforeseen incidents/disasters that may disrupt the Company's operational continuity, the Company has devised Business Continuity Management Guidelines (including Crisis Management) aimed at enhancing the Company's operational reliability and continuity during crisis/disaster/extraordinary incidents. Additionally, the Company has established a Disaster Recovery Center to ensure the Company's technology systems can function in the event of a disaster/crisis.

d. Legal Risk Management

The Company has a Work Unit that manages legal risks to ensure that weaknesses in legal aspects, such as those caused by legal claims, differences in interpretation in contract execution, and differences in interpretation in the implementation of laws and regulations, do not have a significant impact on the Company by ensuring the availability of adequate internal control procedures/ resources.

e. Compliance Risk Management

In terms of Good Corporate Governance (GCG), the Company has compiled Quality Management Systems Policies and Standard Operating Procedures (SOPs). To ensure the application of good corporate governance, the Company has compiled several guidelines that are needed as references, including the Code of GCG, Code of Conduct, Conflict of Interest Manual, Whistleblowing System Manual, Gratification Control Guidelines, and Board Manual.

f. Reputation Risk Management

The quality of the Company's reputation will determine stakeholders' perceptions and behaviors toward the Company, which can affect the Company's target achievements. Therefore, the Company always strives to maintain its reputation through various appropriate communication strategies to stakeholders.

The Company appoints a work unit directly responsible for handling this risk. Communication with regulators, government institutions, shareholders, the Board of Commissioners, and the mass media is managed specifically according to their interests to maintain the Company's reputation and trust. The Company has a mechanism for handling external and internal complaints quickly



dari eksternal maupun internal secara cepat dan tepat, menyediakan sarana informasi dan penyampaian keluhan melalui *call center* yang berkualitas, mengembangkan aplikasi dan media sosial resmi sebagai sarana kemudahan layanan dan komunikasi dua arah. Secara khusus, Perusahaan melakukan analisis dan evaluasi terhadap keluhan peserta termasuk umpan balik yang diberikan, dan menetapkan tindak lanjutnya secara cepat dan tepat yang berfokus pada kepentingan peserta/*stakeholders*.

g. Pengelolaan Risiko Intra-Grup

Pengembangan bisnis Perusahaan dan Grup dapat menimbulkan transaksi antar Perusahaan di dalam Grup Perusahaan yang tidak dapat dihindari. Terkait hal ini Perusahaan mengelola transaksi intra-grup dengan selalu memperhatikan risiko dan dampaknya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tidak merugikan TASPEN/peserta, termasuk di dalamnya antara lain dampak dan risiko hukum, risiko kepatuhan, potensi benturan kepentingan dan ketidakwajaran transaksi.

h. Pengelolaan Risiko Underwriting

Risiko *underwriting* yang dihadapi Perusahaan antara lain terkait dengan risiko mortalitas, ketidakcukupan cadangan teknis yang dibentuk, pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perusahaan melakukan review minimal sekali setiap tahun terhadap asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan dan melaporkannya kepada manajemen.

i. Pengelolaan Risiko Dukungan Dana/Permodalan/ Solvabilitas

Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan permodalan dan rasio solvabilitas Perusahaan untuk dilaporkan kepada manajemen dan pemegang saham.

ANTI KORUPSI/SMAP [2-23, 2-24, GRI 205-2]

TASPEN menilai pemberantasan korupsi menjadi topik material yang penting untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan pada periode ini. Hal ini, anti korupsi merupakan upaya Perseroan dalam pencegahan dan pengendalian risiko praktik penyuapan yang berdampak negatif bagi kelangsungan Perseroan. Selain itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan menunjukkan semua unit telah membuat bisnis proses yang relevan dengan SMAP.

and accurately, providing information and complaint submission facilities through a quality call center, and developing official applications and social media as service convenience and two-way communication. Specifically, the Company analyzes and evaluates participant complaints, including feedback provided, and determines follow-up actions quickly and accurately, focusing on participant/stakeholder interests.

g. Intra-Group Risk Management

The Company's and Group's business developments can create inter-company transactions within the Company Group that cannot be avoided. Regarding this matter, the Company manages intra-group transactions by always considering the risks and impacts both in the short term and the long term so as not to disadvantage TASPEN/participants, including legal risks, compliance risks, potential conflicts of interest, and unreasonable transactions.

h. Underwriting Risk Management

The Company faces underwriting risks, including mortality risks, inadequacy of technical reserves formed, and claim payments that do not meet expectations. The Company conducts reviews of the actuarial assumptions used at least once a year and reports them to the management.

i. Fund/Capital/Solvency Support Risk Management

The Company periodically evaluates its capital adequacy and solvency ratio to be reported to management and shareholders.

ANTI-CORRUPTION/SMAP [2-23, 2-24, GRI 205-2]

TASPEN considers corruption eradication to be an important material topic to be disclosed in the sustainability report for this period. This is because anti-corruption is the Company's efforts to prevent and control the risks of bribery practices that negatively impact the sustainability of the Company. In addition, the Company is committed to implementing an Anti-Bribery Management System (SMAP) in carrying out its business activities by showing that all units have made business processes relevant to SMAP.

Sebagai bentuk dukungan dalam usaha pemberantasan korupsi, PT TASPEN (Persero) menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (*Anti-Bribery Management System*) dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Divisi Pengadaan dan Pemeliharaan
2. Proses Investasi pada Divisi Analisis Investasi, Divisi Bisnis Strategis dan Investasi Langsung, Divisi Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang.
3. Proses Kerjasama dengan rekan bisnis pada Divisi Layanan dan Kepesertaan dan Divisi Perbendaharaan.
4. Proses Rekrutmen, Promosi dan Mutasi karyawan di Divisi Sumber Daya Manusia.

Selain itu, sebagai bukti komitmen anti korupsi PT TASPEN (Persero) rutin menyelenggarakan kegiatan internalisasi antara lain *Compliance Movie Day*, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), *Compliance Quiz*, dan *Compliance Comic*.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi

Pada tahun 2023, PT TASPEN (Persero) berkerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pelatihan *e-Learning* Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI), yang dilaksanakan secara daring dengan peserta para pejabat di PT TASPEN (Persero).

Sosialisasi Anti Korupsi rutin diberikan kepada seluruh *stakeholders* dengan menggunakan media:

- a. Tatap muka
- b. Media Cetak (surat kabar, *flyer*)
- c. Media Sosial (Instagram, Twitter, Whatsapp, Youtube)

As a form of support in the effort to combat corruption, PT TASPEN (Persero) implements ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System with the following scope:

1. Procurement Process for Goods and Services in the Procurement and Maintenance Division
2. Investment Processes in the Investment Analyst Division, Strategic Business and Direct Investment Division, Capital and Money Market Investment Division
3. Collaboration Processes with business partners in the Service and Membership Division and Treasury Division.
4. Employee Recruitment, Promotion, and Mutation processes in the Human Capital Division.

Furthermore, as evidence of anti-corruption commitment, PT TASPEN (Persero) routinely organizes internalization activities such as Compliance Movie Day, World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) commemoration, Compliance Quiz, and Compliance Comic.

Anti-Corruption Training/Socialization

In 2023, PT TASPEN (Persero) collaborated with the Corruption Eradication Commission (KPK) to conduct an e-Learning Training on Basic Anti-Corruption Knowledge and Integrity (PADI), which was carried out online with participants being officials from PT TASPEN (Persero).

Regular anti-corruption socialization is provided to all *stakeholders* using various media:

- a. Face-to-face meetings
- b. Print media (newspapers, *flyers*)
- c. Social media (Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube)



PERMASALAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERAPAN PROGRAM BERKELANJUTAN [E.5]

PROBLEMS AND THEIR IMPACTS ON THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PROGRAMS [E.5]

TABEL PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI TAHUN 2023
Table of Important Cases Currently Faced in 2023

NO	POKOK-POKOK PERKARA Subject Matter	POSISI KASUS Case Position	STATUS PENYELESAIAN PERKARA Case Resolution Status	RISIKO TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Risk to the Company's Financial Condition
1	<p>Gugatan Akibat Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam perkara Perdata Nomor 598/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. antara PT Lamicitra Nusantara dan PT Jasamitra Propertindo sebagai Para Penggugat melawan PT TASPEN (Persero) sebagai Tergugat 1</p> <p>Lawsuit Due to Breach of Contract (Default) in Civil Case Number 598/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. between PT Lamicitra Nusantara and PT Jasamitra Propertindo as Plaintiffs against PT TASPEN (Persero) as Defendant 1</p> <p>PT Lamicitra Nusantara dan PT Jasamitra Propertindo mengajukan tagihan atas <i>service charge</i> dan biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada PT TASPEN (Persero) atas kepemilikan 18 Kios di Jembatan Merah Plaza</p> <p>PT Lamicitra Nusantara and PT Jasamitra Propertindo filed a lawsuit for service charge and extension fees for the Right to Build on 18 kiosks at Jembatan Merah Plaza against PT TASPEN (Persero).</p>	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat The Central Jakarta District Court</p>	<p>Telah selesai dan diputuskan Perdamaian dengan Para Pihak The case has been concluded, and a settlement has been reached with all parties involved.</p>	<p>TASPEN membayarkan Tagihan tersebut melalui rencana <i>nett off</i> pelepasan aset TASPEN paid the bill through a net-off plan by releasing assets.</p>

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (Persero) yang sedang menjabat yang memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2023, PT TASPEN (Persero) tidak mendapatkan sanksi administratif.

LEGAL ISSUES CURRENTLY FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

None of the serving members of the PT TASPEN (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners had civil or criminal legal issues during 2023.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

During 2023, PT TASPEN (Persero) did not receive administrative sanctions.



KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance



KINERJA EKONOMI

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

Dalam rangka membangun budaya keberlanjutan, TASPEN telah menetapkan kode etik sesuai dengan nilai-nilai Perseroan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Budaya Perseroan yang mengakar pada karakter Insan TASPEN diyakini dapat memperkuat pengelolaan usaha sesuai prinsip-prinsip GCG dan beretika, sehingga mampu memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik sebagai upaya mendukung efektivitas penerapan tata kelola Perseroan dengan sarana pelaporan atas pelanggaran yang bertujuan deteksi dini.

Penerapan kebijakan *Whistleblowing System* dalam pengelolaan Perseroan diatur dalam sebuah keputusan bersama yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yaitu PD-43/DIR/2021 dan KEP-09/DK-TASPEN/122021 tanggal 6 Desember 2021 tentang *Whistleblowing System* PT TASPEN (Persero) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kinerja ekonomi Perseroan sangatlah penting bagi para pemangku kepentingan. Hasil kinerja ekonomi Perseroan berdampak pada kompensasi karyawan, pemenuhan pajak, penggunaan laba ditahan, dan juga bagi perkembangan ekonomi lokal.

Perseroan diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja ekonomi setiap tahunnya dan menghasilkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya ini diselaraskan dengan visi Perseroan yaitu "Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya dan Berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia." Perwujudan visi Perseroan dilakukan melalui penyusunan strategi pengembangan usaha yang berkaitan dengan strategi pencapaian tujuan keberlanjutan secara optimal untuk menyeimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

ECONOMIC PERFORMANCE

Activities to Build Sustainability Culture [F.1]

TASPEN has established the Code of Conduct according to the Company's values: AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) to build a sustainability culture. The Company's culture, which is rooted in the characters of TASPEN Personnel, is believed to strengthen business management according to GCG and ethical principles to fulfill the rights of stakeholders and shareholders.

Enforcement efforts and sanction of code of conduct violations as an effort to support the effectiveness of corporate governance implementation with a means of violation reporting for the purpose of early detection.

Implementation of the Whistleblowing System policy in the management of the Company is regulated in joint decree established by the Board of Directors and Board of Commissioners, namely Joint Decree Number: PD-43/DIR/2021 and KEP-09/DK-TASPEN/122021 dated December 6, 2021, on Whistleblowing System of PT TASPEN (Persero), as well as the Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

As a State-Owned Enterprise (SOE), the Company's economic performance is crucial for stakeholders. The results of the Company's economic performance impact employee compensation, tax fulfillment, and the use of retained earnings and contribute to the local economy's development.

The Company is expected to improve its economic performance every year and generate maximum profits in line with the set targets. This effort is aligned with the Company's vision to become "An Excellent, Reliable, and Sustainable Social Insurance and Pension Fund Company in order to realize the welfare of Participants to increase Indonesia's economic and social values." The Company's vision is realized through business development strategies related to achieving sustainability goals optimally and balancing social, economic, and environmental impacts.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

TARGETS AND REALIZATION FOR 2023

LABA RUGI Profit or Loss

Disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in billion Rupiah, unless otherwise stated

URAIAN	RKAP 2023 2023 RKAP	REALISASI 2023 2023 Realization	PENCAPAIAN (%) % of Achievement	Description
Pendapatan	20.004,79	22.131,25	110,63	Income
Beban	19.626,97	20.996,76	106,98	Expenses
Laba sebelum pajak	377,83	1.134,49	382,35	Profit Before Income Tax
Laba tahun berjalan	140,22	804,77	573,92	Profit for the Year

Realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai 110,63% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2023, di sisi lain beban terealisasi sebesar 106,98% dengan adanya efisiensi biaya tersebut mengakibatkan realisasi laba sebelum pajak mencapai 382,35% dari target dalam RKAP tahun 2023. Perseroan juga mampu membukukan laba tahun berjalan 573,92% dari target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2023.

The income realization in 2023 reached 110.63% of the target set in the 2023 RKAP. On the other hand, the realized expenses amounted to 106.98%. This cost efficiency resulted in a profit before tax realization, reaching 382.35% of the target in the 2023 RKAP. The Company also managed to achieve a profit for the year of 573.92% of the target set in the 2023 RKAP.

POSISI KEUANGAN Financial Position

Disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in billion Rupiah, unless otherwise stated

URAIAN	RKAP 2023 2023 RKAP	REALISASI 2023 2023 Realization	PENCAPAIAN (%) % of Achievement	Description
Jumlah Aset	354.197,46	376.985,97	106,43	Total Assets
Jumlah Liabilitas	341.087,44	334.660,09	106,82	Total Liabilities
Ekuitas	13.110,02	12.625,04	96,30	Equity

Pada tanggal 31 Desember 2023, realisasi jumlah aset Perseroan sebesar 106,43%, jumlah liabilitas tercapai 106,82%, sedangkan jumlah ekuitas mencapai 96,30% dari target RKAP Tahun 2023.

On December 31, 2023, the realization of the Company's total assets amounted to 106.43%, the total liabilities reached 106.82%, and the equity reached 96.30% of the 2023 RKAP target.

Pada tanggal 31 Desember 2023 realisasi struktur modal (liabilitas dibagi dengan ekuitas) sebesar 28,86 yaitu lebih tinggi dari target dalam RKAP Tahun 2023 yaitu sebesar 26,02.

On December 31, 2023, the realization of the capital structure (debt-to-equity) amounted to 28.86, which was higher than the target in the 2023 RKAP, which was 26.02.

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [201-1]

Dengan pencapaian pendapatan sebagai perolehan nilai ekonomi Perusahaan, TASPEN mempunyai kesempatan dalam mendistribusikan nilai-nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan. Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi tanggung jawab Perusahaan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan, TASPEN berupaya untuk mendistribusikan nilai ekonomis yang diperoleh selama setahun periode operasional dalam bentuk manfaat.

ECONOMIC VALUE DISTRIBUTION [201-1]

By achieving income as the acquisition of the Company's economic values, TASPEN has the opportunity to distribute economic values to its stakeholders. As a form of commitment to fulfilling the Company's responsibility towards its stakeholders' interests, TASPEN strives to distribute the economic values obtained during one year operational period in the form of benefits.



BEBAN
Expenses

Disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Expressed in billion Rupiah, unless otherwise stated

URAIAN	TAHUN 2023 Year 2023	TAHUN 2022 Year 2022	Description
Beban Klaim dan Manfaat	19.513,84	39.871,45	Claims and benefits expenses
Beban Usaha	2.129,73	1.600,04	Operating expenses
Penggantian BOP Pensiun	(663,23)	(613,60)	Reimbursement of pension expenses
Beban di Luar Usaha	16,42	13,15	Other Operating Expense
Jumlah beban	20.996,76	40.871,04	Total Expenses

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021*)	Description
Distribusi Nilai Ekonomi					Economic Value Distribution
Pendapatan					Income
Iuran dan premi	Miliar Rp Billion Rp	8.411,23	8.681,33	8.632,54	Contribution and premium
Hasil investasi	Miliar Rp Billion Rp	8.487,02	9.025,38	9.776,56	Investment income
Pendapatan PSL pemberi kerja	Miliar Rp Billion Rp	3.694,71	22.176,51	-	
Pendapatan lain	Miliar Rp Billion Rp	1.538,30	1.370,17	2.025,29	Other income
Jumlah Pendapatan	Miliar Rp Billion Rp	22.131,25	41.253,39	20.434,38	Total Income
Jumlah Nilai Ekonomi yang Dihasilkan	Miliar Rp Billion Rp	22.131,25	41.253,39	20.434,38	Total Economic Value Generated
Beban					Expenses
Beban Klaim dan Manfaat	Miliar Rp Billion Rp	19.513,84	39.871,45	18.823,95	Claims and benefits expenses
Beban Usaha	Miliar Rp Billion Rp	2.129,73	1.602,55	1.778,62	Operating expenses
Penggantian BOP Pensiun	Miliar Rp Billion Rp	(663,23)	(613,60)	(682,36)	Reimbursement of pension expenses
Beban di Luar Usaha	Miliar Rp Billion Rp	16,42	13,15	29,86	Other Operating Expense
Jumlah beban	Miliar Rp Billion Rp	20.996,76	40.871,04	19.950,07	Total Expenses
Beban Pajak	Miliar Rp Billion Rp	(329,72)	(268,50)	(106,70)	
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	Miliar Rp Billion Rp	21.326,48	41.139,54	20.056,77	Total Economic Value Distributed
Nilai Ekonomi yang Ditahan	Miliar Rp Billion Rp	804,77	113,85	377,61	Retained Economic Value

*) Direklasifikasi (Catatan 62)

*) Reclassified (Note 62)

KONTRIBUSI PADA NEGARA

PT TASPEN (Persero) senantiasa menjaga komitmen terkait kepatuhan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam mewujudkan pembangunan negara, PT TASPEN (Persero) melakukan pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak lain yang berhubungan atau bertransaksi dengan perusahaan untuk disetorkan kepada Negara, PT TASPEN (Persero) telah melakukan Potongan/Pungutan Pajak Penghasilan, PPN, Bea & Materai yang dibayarkan ke Pemerintah sebesar Rp688,79 miliar sampai dengan 31 Desember 2023.

BIAYA INVESTASI PROYEK BERKELANJUTAN [F.3]

Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki proyek khusus terkait keberlanjutan. Walaupun demikian, setiap tahunnya Perseroan mempersiapkan sejumlah kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR). Dalam periode sampai dengan 31 Desember 2023 telah disalurkan dana Program TJSL BUMN sebesar Rp39.777.110.505,- atau 99,69% dari RKA 2023 sebesar Rp39.902.000.000,-.

BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH

Pada tahun 2023, Perseroan belum mendapatkan *benefit* bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah.

CONTRIBUTION TO THE STATE

PT TASPEN (Persero) consistently maintains its commitment to comply with tax regulations. As a form of contribution to national development, PT TASPEN (Persero) collects or withholds taxes from other parties involved in transactions with the Company to be remitted to the Government. PT TASPEN (Persero) has collected/withheld Income Tax, Value Added Tax (VAT), Customs, and Stamp Duty paid to the Government amounting to Rp688.79 billion as of December 31, 2023.

SUSTAINABLE PROJECT INVESTMENT COST [F.3]

In 2023, the Company did not have specific sustainability-related projects. Nevertheless, each year, the Company prepares activities as part of its corporate social responsibility (CSR). By the period until December 31, 2023, funds amounting to Rp39,777,110,505 have been disbursed for the State-Owned Enterprises TJSL Program, which was 99.69% of the 2023 Work Plan and Budget (RKA) of Rp39,902,000,000.

FINANCIAL ASSISTANCE RECEIVED FROM THE GOVERNMENT

In 2023, the Company did not receive any financial assistance benefits from the Government.



KINERJA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

PENGUNGKAPAN MANAJEMEN TOPIK MATERIAL [3-3]

TASPEN menyadari bahwa isu kelestarian lingkungan saat ini semakin menguat, mengingat kondisi empiris menunjukkan bahwa cuaca ekstrim yang kerap terjadi di berbagai daerah yang merupakan bagian dari fenomena perubahan iklim skala global yang ditengarai disebabkan oleh rusaknya ekosistem lingkungan secara global, yang memerlukan tindakan korektif bersama. TASPEN berkomitmen penuh untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif kegiatan operasional yang dijalankannya terhadap lingkungan.

Perseroan berkomitmen dan bertekad kuat untuk memastikan pengelolaan dampak lingkungan dilaksanakan oleh segenap jajaran. Perseroan bertekad merealisasikan program-program pengelolaan lingkungan dan mendukung upaya perbaikan lingkungan merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan menjalankan seluruh kegiatan terkait, bukan sekedar menjalankan kewajiban, namun lebih dari ketaatan yang dipersyaratkan (*beyond compliance*).

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Selama tahun 2023, TASPEN tidak memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

TASPEN bukan Perusahaan pemberi kredit, sehingga informasi mengenai pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah tidak dapat disajikan dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Pengaduan masalah lingkungan di Perusahaan diwadahi dalam bentuk pelaporan secara online maupun melalui kotak pengaduan dan dilaksanakan sesuai *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku di Perusahaan.

Jumlah dan Tindak Lanjut Pengaduan Terkait Masalah Lingkungan (F.16)

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan pengaduan mengenai masalah lingkungan di lingkungan TASPEN, sehingga informasi mengenai jumlah pengaduan dan tindak lanjut terkait masalah lingkungan tidak dapat disajikan dalam Laporan Keberlanjutan ini.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DISCLOSURE OF MATERIAL TOPIC MANAGEMENT [3-3]

TASPEN recognizes that environmental sustainability issues are gaining strength, given empirical evidence indicating the frequent occurrence of extreme weather conditions in various regions. These conditions are part of the global-scale climate change phenomenon attributed to the degradation of the global environmental ecosystem, requiring collective corrective actions. TASPEN is fully committed to preventing and reducing the negative impacts of its operational activities on the environment.

The Company is committed and determined to ensure that all levels of the organization carry out environmental impact management. The Company is committed to implementing environmental management programs and supporting environmental improvement efforts according to applicable laws and regulations. It conducts all related activities as obligations and more than the required obedience (*beyond compliance*).

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

In 2023 TASPEN did not have certification in the environmental field.

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS IN GRANTING CREDIT

TASPEN is not a credit provider company, so this Sustainability Report cannot present information regarding the consideration of environmental aspects in providing credit to customers.

Environmental Issues Complaints Mechanism

Complaints of environmental issues in the Company are accommodated in online reporting or through the complaints box and carried out according to *Good Corporate Governance* (GCG) in force in the Company.

Number and Follow-Ups of Complaints Regarding Environmental Issues (F.16)

In 2023, there were no complaints reports on environmental issues in the TASPEN environment. This Sustainability Report could not present information about the number of complaints and follow-ups related to environmental issues.

KONSUMSI ENERGI DAN UPAYA EFISIENSI ENERGI

ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY EFFICIENCY EFFORTS

Pandangan Manajemen Atas Topik Energi

Perseroan melaksanakan aktivitas operasional dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dari sejumlah program yang dilaksanakan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Penerapan Kebijakan dan sistem manajemen diharapkan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam menjalankan kegiatan CSR di bidang lingkungan, TASPEN berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk menjaga lingkungan mulai dari lingkungan Perseroan sendiri. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan, dengan harapan dapat membawa perubahan positif kepada masyarakat luas.

Penggunaan Energi [F.6]

Pemanfaatan energi digunakan untuk keperluan mendukung kegiatan operasional. Kegiatan operasional TASPEN tidak terlepas dari penggunaan energi langsung dan energi tidak langsung. Penggunaan energi langsung dari sumber energi primer ini berupa bahan bakar minyak (BBM).

Management's Views on the Topic of Energy

The Company carries out operational activities with due regard to environmental sustainability aspects. It is reflected in several programs implemented by Partnership And Social Responsibility Unit. In addition, implementing the policy and management system is expected to minimize negative environmental impacts.

In carrying out CSR activities in the environmental sector, TASPEN is committed to preserving environmental sustainability by implementing several policies to protect the environment, starting from the Company's environment. It is done on an ongoing basis to bring positive change to the wider community.

Energy Use [F.6]

Energy utilization is used to support operational activities. TASPEN's operational activities are inseparable from direct and indirect energy use. The use of direct energy from this primary energy source is in the form of fuel oil (BBM).

TABEL KONSUMSI BBM
Table of Fuel Oil Consumption

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
BBM	Juta Rp / Million Rp	3.096,03	3.019,02	2.458,62	Fuel Oil
	Liter / Liter	231.913	212.607	267.230	

Selain itu, Perseroan juga menggunakan energi tidak langsung dalam kegiatan operasional. Energi tidak langsung tersebut adalah energi listrik yang dipasok oleh PLN. Pemanfaatan energi ini untuk memenuhi kebutuhan kantor pusat, dan kantor-kantor cabang.

In addition, the Company also uses indirect energy in operational activities. The indirect energy is electrical energy supplied by PLN. Utilization of this energy to meet the needs of the head office and branch offices.

TABEL KONSUMSI LISTRIK
Table of Electricity Consumption

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Listrik	Juta Rp / Million Rp	14.065,30	14.410,46	12.052,17	Electricity



Komitmen terhadap efisiensi penggunaan energi [F.7]

Selain berupaya menggunakan energi secara efisien, Perusahaan juga melakukan inisiatif untuk mengurangi pemakaian energi. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut: [302-4]

1. Terus menggunakan LED yang lebih hemat sebagai sebagai lampu penerangan.
2. Pemanfaatan pencahayaan alami untuk penerangan perkantoran.
3. Mematikan pendingin udara pada saat tidak digunakan.
4. Pemasangan slogan himbauan penghematan listrik.
5. Penggunaan peralatan yang hemat listrik.

KONSUMSI AIR DAN UPAYA KONSERVASI AIR [F.8]

Pandangan Manajemen Atas Topik Air

Kebutuhan air digunakan oleh Perusahaan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran dan aktivitas di TASPEN. Mengingat air memiliki peran penting bagi jalannya kegiatan operasi TASPEN, maka topik ini menjadi topik yang penting untuk diungkapkan. Pemanfaatan air di kantor pusat dan kantor cabang bersumber dari PDAM. TASPEN turut melestarikan lingkungan dengan melakukan upaya konservasi air melalui himbauan hemat air dan efisiensi pemakaian air di wilayah operasi Perseroan. Secara terperinci, penggunaan air disajikan pada table berikut:

TABEL KONSUMSI AIR
Table of Water Consumption

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Air	Juta Rp / Million Rp	897,78	942,63	788,37	Water

REDUKSI PEMAKAIAN KERTAS

Peningkatan pemanfaatan TI dalam operasional maupun layanan jasa berdampak pada pengurangan penggunaan kertas. TASPEN berkomitmen untuk mengurangi penggunaan kertas dan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan usahanya. Pengelolaan limbah kertas bekas pakai diserahkan pada kebijakan masing-masing unit kerja, dan diolah oleh pihak ketiga dengan mempertimbangan kondisi sosial dan lingkungan setempat.

TABEL PEMAKAIAN KERTAS
Table of Paper Use

URAIAN	SATUAN Unit	2023	2022	2021	Description
Kertas	Juta Rp / Million Rp	143,74	111,64	1.185,12	Paper
	Rim / Ream	2.428	2.117	2.380	

Commitment to Energy Use Efficiency [F.7]

Apart from striving to use energy efficiently, the Company is also taking initiatives to reduce energy consumption. The efforts that have been made are as follows: [302-4]

1. Continuously using energy-efficient LED lighting.
2. Utilizing natural lighting for office illumination.
3. Turning off air conditioning when not in use.
4. Installing slogans encouraging electricity saving.
5. Using electricity-efficient equipment.

WATER CONSUMPTION AND WATER CONSERVATION EFFORTS [F.8]

Management Views on the Topic of Water

The Company's need for water is essential to support the smooth operation of office activities at TASPEN. Given the crucial role of water in TASPEN's operational activities, this topic is significant for disclosure. Water usage in both the head office and branch offices is sourced from the local water supply company (PDAM). TASPEN contributes to environmental conservation by promoting water conservation and optimizing water usage across the Company's operational areas. In detail, water consumption is presented in the following table:

REDUCTION OF PAPER USE

Increased utilization of IT in operations and services has an impact on reducing paper use. TASPEN is committed to reducing the use of paper and maximizing the use of technology in every business activity. The management of used paper waste is left to the policies of each work unit and is processed by a third party taking into account local social and environmental conditions.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PESERTA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES TO PARTICIPANTS

Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Peserta (F.17)

Salah satu pemangku kepentingan utama bagi TASPEN adalah peserta baik aktif maupun pensiunan. Dengan posisinya yang begitu penting, maka Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan kepuasan peserta, sekaligus meminimalkan peluang munculnya kekecewaan. Kepuasan peserta sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang disediakan. TASPEN menekankan kepada seluruh insan Perseroan agar menghadirkan layanan terbaik kepada semua peserta tanpa terkecuali.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah, Perseroan tidak akan membedakan peserta dalam memberikan pelayanan. TASPEN meyakini, hanya melalui upaya seperti itulah, kepuasan konsumen dapat diraih, ditingkatkan, dan dipertahankan.

Penanganan Keluhan Peserta

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pesertanya, Perseroan senantiasa memperhatikan setiap keluhan Peserta. Penanganan dan penyelesaian keluhan Peserta dilakukan melalui unit kerja *Customer Services* di Kantor Pusat maupun *Customer Services* di setiap kantor cabang dengan koordinasi unit kerja terkait. Peserta dapat menyampaikan keluhannya melalui berbagai media yang telah disediakan oleh Perseroan untuk mempercepat dan mempermudah Peserta dalam menyampaikan keluhannya, yaitu sebagai berikut :

KONTAK Contact	Telepon	: (021) 424 1808	Telephone	: (021) 424 1808
	Fax	: (021) 420 3809	Fax	: (021) 420 3809
	Website	: www.taspen.co.id	Website	: www.taspen.co.id
	Email	: taspen@taspen.co.id	Email	: taspen@taspen.co.id
	Call Center	: 1 500 919	Call Center	: 1 500 919
MEDIA SOSIAL Social Media	Twitter	: @TASPEN	Twitter	: @TASPEN
	Instagram	: @TASPEN	Instagram	: @TASPEN
	Facebook	: @Taspen.id	Facebook	: @Taspen.id
	Youtube	: TASPEN	Youtube	: TASPEN

INOVASI DAN PENGEMBANGAN (F.26)

Perseroan telah melakukan upaya-upaya inovasi dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan. Adapun kajian penelitian yang telah selesai dilaksanakan per 31 Desember 2023 antara lain:

1. TASPEN sebagai Pemotong Kredit Pensiunan
2. Kebutuhan Staf Divisi Perbendaharaan-Sub Departemen Pajak Berdasarkan Analisis Beban Kerja
3. Optimalisasi Mess PT TASPEN (Persero)

Commitment to Providing Services for Equal Products and/or Services to Participants (F.17)

One of the major stakeholders for TASPEN is active and retired participants. With such an important position, the Company is committed to realizing participant satisfaction while minimizing the chances of disappointment. The quality of services provided strongly influences participant satisfaction. TASPEN emphasizes that all Company personnel provide the best services to all participants without exception.

According to Law No. 8 of 1999 concerning Customer Protection, the Company will not discriminate between participants in providing services. TASPEN believes that customer satisfaction can only be achieved, improved, and maintained through such efforts.

Participant Complaints Handling

To provide the best services to its Participants, the Company always pays attention to every Participant's complaint. Handling and settlement of Participant complaints are carried out through the Customer Services work unit at the Head Office and Customer Services at each branch office in coordination with related work units. Participants can submit their complaints through various media provided by the Company to accelerate and facilitate Participants in submitting complaints, namely as follows:

INNOVATION AND DEVELOPMENT (F.26)

The Company has made efforts to innovate and provide support for improving service quality. Research studies that have been completed as of December 31, 2023, include:

1. TASPEN as Pension Credit Deductor
2. Staffing Needs of Treasury Division, Tax Sub-Department Based on Workload Analysis
3. Optimalisasi Mess PT TASPEN (Persero)



4. *Rightsizing* Kantor Cabang PT TASPEN (Persero)
5. Analisis Produktivitas Unit Kerja
6. Pengukuran Kepatuhan Perusahaan Terhadap Perjanjian Pihak Ketiga
7. Kerjasama Mitra Layanan
8. Penyesuaian Besaran Honorarium Bagi Pihak Ketiga PT TASPEN (Persero)
9. *Fee-Based* Pengecekan Data Debitur Meninggal Dunia
10. Pengukuran Pemahaman Peserta Terhadap Materi keTASPENan
11. *Fronting*
12. *Survey Digital Platform*
13. *Actuarial Software*
14. Kebutuhan Staf Layanan dan Keuangan KP dan KC untuk Sentralisasi Klaim
15. Tingkat Kepuasan User Divisi Kepatuhan
16. Sistem Manajemen Kepatuhan
17. Evaluasi Efektivitas Penggunaan Aplikasi New E-Dapem
18. *Survey* Kantor Unit Layanan PT TASPEN (Persero)
19. Evaluasi Pelaksanaan dan Pemetaan Titik Layanan Mal Pelayanan Publik PT TASPEN (Persero)
20. Kebutuhan *User* dan Mitra Binaan Aplikasi My_LA
21. Kajian Cuti Persiapan Pensiunan
22. Tingkat Pemahaman GCG, CoC, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan WBS Tahun 2023
23. Mekanisme Penggajian Karyawan Penempatan Mal Pelayanan Publik (MPP)
24. Kajian Cuti Besar
25. Tunjangan Kemahalan Daerah
26. Optimalisasi Aset Rumah Dinas *Deputy* dan Rumah dinas BM
27. Analisis Penggunaan Apartemen Aspenna *Residence* Bagi Kepala Unit Kerja KP, BM Jakarta I dan II, DM Tangerang
28. *Student Loan*
29. Pemanfaatan Media dan Ruang Layanan
30. Pengukuran Kemudahan *User* TI Tahun 2023
31. Evaluasi Kinerja *Learning Technologist* Tahun 2023
32. Analisis Efektivitas *E-Learning & Liber-T*
33. *Car Ownership Program*
4. Rightsizing of Branch Offices of PT TASPEN (Persero)
5. Analysis of Work Unit Productivity
6. Measurement of Company Compliance with Third Party Agreements
7. Partnership with Service Partners
8. Adjustment of Honorarium Amount for Third Parties at PT TASPEN (Persero)
9. Fee-Based Checking of Deceased Debtor Data
10. Measurement of Participants' Understanding of TASPEN Materials
11. Fronting
12. Digital Platform Survey
13. Actuarial Software
14. Staffing Needs for Service and Finance Departments at the Head Office and Branch Offices for Claims Centralization
15. User Satisfaction Level in the Compliance Division
16. Compliance Management System
17. Evaluation of the Effectiveness of New E-Dapem Application Usage
18. Survey of PT TASPEN (Persero) Service Unit Offices
19. Evaluation of Implementation and Mapping of PT TASPEN (Persero)'s Public Service Mall Service Points
20. User and Foster Partner Needs for My_LA Application
21. Study on Retirement Preparation Leave
22. Understanding Level of GCG, CoC, Gratification Control Guidelines, and WBS in 2023
23. Salary Mechanism for Employees Placed in Public Service Malls (MPP)
24. Study on Long Leave
25. Regional Exorbitant Allowance
26. Optimization of Deputy Official Residences and Branch Manager Official Residences
27. Analysis of the Use of Aspenna Residence Apartments for the Heads of Units at the Head Office, Branch Managers of Jakarta I and II, Deputy Managers of Tangerang
28. Student Loan
29. Utilization of Media and Service Spaces
30. Measurement of User Convenience for IT in 2023
31. Evaluation of the Performance of Learning Technologists in 2023
32. Analysis of the Effectiveness of E-Learning & Liber-T
33. Car Ownership Program

- | | |
|---|--|
| 34. Kajian Kompensasi dan Analisa Beban Kerja TAD Akibat Adanya Reklasifikasi Kantor Cabang PT TASPEN (Persero) | 34. Study of Compensation and Workload Analysis of Outsourced Workers (TAD) Due to the Reclassification of Branch Offices of PT TASPEN (Persero) |
| 35. Pengadaan Konsultan IT <i>Chargeback Model</i> | 35. Procurement of IT Consultant for Chargeback Model |
| 36. Pengelolaan Arsip pada Divisi Akuntansi | 36. Archive Management in the Accounting Division |
| 37. Pengukuran Kepuasan Peserta Terhadap Layanan Mitra Bayar Tahun 2023 | 37. Measurement of Participant Satisfaction with Payment Partner Services in 2023 |
| 38. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keterlanjuran Bayar Pensiun | 38. Analysis of Factors Affecting the Continuity of Pension Payments |
| 39. <i>Survey</i> Kepuasan Pemasok 2023 | 39. Supplier Satisfaction Survey 2023 |
| 40. Kajian Evaluasi Bank Mantap dan TASPEN Life | 40. Evaluation Study of Bank Mantap and TASPEN Life |
| 41. <i>Increasing Engagement</i> dan Loyalitas Peserta | 41. Increasing Participant Engagement and Loyalty |
| 42. TASPEN <i>Checking</i> dan Estimasi | 42. TASPEN Checking and Estimation |
| 43. <i>Fee-Based Income</i> Mutasi Kantor Bayar, <i>Flagging</i> Pensiun, dan <i>Flagging</i> THT | 43. Fee-Based Income for Payment Office Mutation, Pension Flagging, and THT Flagging |
| 44. Pembukaan Rekening Giro Penyaluran Dapem pada Bank Mandiri TASPEN | 44. Opening of Current Account for Payment List Distribution at Bank Mandiri TASPEN |
| 45. <i>Fee-Based</i> Pemanfaatan Data PNS Daerah oleh BP TAPERA | 45. Fee-Based Utilization of Regional Civil Servants Data by BP TAPERA |
| 46. Kajian <i>Chanelling</i> Mitra Bayar | 46. Study on Payment Partners Channeling |
| 47. Laporan Implementasi ESG Tahun 2023 | 47. Implementation Report on ESG (Environmental, Social, and Governance) for the Year 2023 |
| 48. Evaluasi Penggunaan Aplikasi Digitalisasi Klaim (TOOS) Pada Titik Layanan | 48. Evaluation of the Use of Claim Digitalization Application (TOOS) at Service Points |
| 49. Layanan Otentikasi Melalui Aplikasi Movin | 49. Authentication Service Through Movin Application |
| 50. Pembagian Wilayah Kerja KC Jakarta I dan KC Jakarta II | 50. Division of Work Areas for Jakarta I and Jakarta II Branch Offices |
| 51. Digitalisasi Pembayaran Pensiun | 51. Digitalization of Pension Payments |
| 52. Optimalisasi Aset Properti di Citapen | 52. Optimization of Property Assets in Citapen |
| 53. Kelayakan Implementasi <i>Solar Cell</i> Pada Gedung Kantor Pusat + 1 Rumah Dinas | 53. Feasibility of Implementing Solar Cells on the Headquarters Building + 1 Official Residence |
| 54. Analisis dan Rekomendasi Audit Persepsi Komunikasi PT TASPEN (Persero) | 54. Analysis and Recommendation of Communication Perception Audit at PT TASPEN (Persero) |
| 55. Perhitungan Kompensasi Digitalisasi Pembayaran Pensiun | 55. Calculation of Compensation for Digitalization of Pension Payments |
| 56. <i>Roadmap</i> dan <i>Frameworks</i> ESG | 56. ESG Roadmap and Frameworks |

PRODUK/JASA YANG SUDAH DIEVALUASI KEAMANANNYA BAGI PELANGGAN (F.27) (F.28) (F.29)

Tanggung jawab TASPEN terhadap produk/jasa salah satunya melalui evaluasi keamanan sebelum produk diluncurkan ke pasar. Beberapa divisi terkait yang terlibat dalam evaluasi produk/jasa keuangan akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko yang ditimbulkan dari produk/jasa serta memeriksa produk/jasa baik dari sisi prosedur operasional maupun teknologi. Pada tahun 2023, tidak ada produk/jasa yang telah diluncurkan oleh TASPEN

PRODUCTS/SERVICES THAT THEIR SECURITY HAVE BEEN EVALUATED FOR CUSTOMER (F.27) (F.28) (F.29)

TASPEN's responsibility for its products/services includes security evaluation before launching them into the market. Several relevant divisions involved in the evaluation of financial products/services ensure compliance with regulations in Indonesia, analyze risk mitigation arising from products/services, and examine products/services from both operational and technological procedures. In 2023, no products/services launched by TASPEN received complaints leading to their withdrawal. TASPEN is



yang mendapatkan pengaduan hingga kemudian ditarik kembali. TASPEN memiliki komitmen dalam menjaga keamanan peserta, diantaranya dengan secara berkala mengadakan *management privacy data* setiap tahunnya.

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PROGRAM/PRODUK PERUSAHAAN

Pelaksanaan audit oleh Satuan Pengawasan Internal dilakukan secara rutin untuk memberikan nilai tambah kepada Perseroan dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan operasional Perseroan sehingga program kerja yang telah dicanangkan dan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN (F.30)

TASPEN telah melakukan Survei Kepuasan Pelanggan secara rutin setiap tahun untuk mengukur kepuasan pelanggan. Pada tahun 2023, TASPEN melakukan pengukuran *Customer Satisfaction Index* (CSI), *Loyalitas Peserta* (CLI), *Keterikatan Peserta* (CEI) dan *Delighted Customer Service* (DCS). Periode pengumpulan data tanggal 31 Juli 2023 hingga 19 Agustus 2023. Jumlah responden adalah 805 peserta yang mengajukan klaim per kantor cabang di seluruh Indonesia.

committed to maintaining participant security, including holding annual data privacy management.

INTERNAL AUDIT IMPLEMENTATION FOR COMPANY PROGRAMS/PRODUCTS

Audit implementation by the Internal Audit Unit is carried out routinely to add value to the Company by evaluating and enhancing the effectiveness of risk management processes, internal controls, and corporate governance. This is also intended to improve the Company's operations so that planned work programs and products produced by the Company can benefit the wider community.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY (F.30)

TASPEN conducts Customer Satisfaction Surveys regularly every year to measure customer satisfaction. In 2023, TASPEN measured the Customer Satisfaction Index (CSI), Customer Loyalty Index (CLI), Customer Engagement Index (CEI), and Delighted Customer Service (DCS). The data collection period is from July 31, 2023, to August 19, 2023. The number of respondents was 805 participants who filed claims per branch office across Indonesia.

URAIAN Description	2021	2022	2023
<i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI) Nasional National Customer Satisfaction Index (CSI).	97,36%	97,56%	98,3%.
<i>Customer Loyalty Index</i> (CLI)	88,62%	94,3%	85,40%
<i>Customer Engagement Index</i> (CEI)	90,14%	96,1%	-
<i>Delighted Customer Service</i> (DCS)	-	81,5%	-

BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN

Pada tahun 2023, TASPEN telah mengeluarkan biaya peningkatan layanan pelanggan sebesar 1.450.229.000 miliar Seminar *Secrets to healthy life* sebesar Rp35.000.000 untuk karyawan TASPEN, Program Lansia Sehat TASPEN dengan melibatkan change agent PT TASPEN dan Persatuan Pensiunan Indonesia sebesar Rp215.229.000, Vaksinasi booster ketiga sinopharm sebesar Rp1.000.000.000 untuk masyarakat umum, pns, bumh, pensiunan, dan Rumah sehat Baznas bagi ASN dan pensiunan sebesar Rp200.000.000

EXPENSES INCURRED

In 2023, TASPEN spent Rp1,450,229,000 million on customer services improvement expenses For Seminar on *Secrets to a Healthy Life* for Taspem employees: Rp35,000,000, TASPEN Healthy Elderly Program involving change agents from PT Taspem and the Indonesian Pensioners Association: Rp215,229,000, Third Booster Vaccination with Sinopharm for the general public, civil servants, state-owned enterprises, and retirees: Rp1,000,000,000, Baznas Healthy Homes for civil servants and retirees: Rp200,000,000.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMASYARAKATAN

SOCIAL COMMUNITY RESPONSIBILITY

PENGUNGKAPAN MANAJEMEN TOPIK MATERIAL [3-3]

Aktivitas operasional Perseroan memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. TASPEN berkomitmen untuk terus menjalani aktivitas usaha yang bertanggung jawab agar dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dampak positif dari aktivitas usaha TASPEN secara tidak langsung dapat berasal dari aspek ekonomi masyarakat sekitar yang terbantu dengan kehadiran Perseroan. Sedangkan dampak negatif dapat berasal dari aktivitas operasional yang mungkin menimbulkan kebisingan, kemacetan, ataupun lainnya. [F.23]

Walaupun memiliki dampak negatif, namun tidak terdapat adanya keluhan dari masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas operasional Perseroan. Situasi saat ini terbilang positif bagi Perseroan untuk menjalankan aktivitas usaha. [F.24]

Perseroan memiliki komitmen dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dalam bidang pengembangan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kinerja Program TJSL Tahun 2023

Penyaluran Program TJSL BUMN dilakukan berdasar tujuan prioritas penyaluran berikut kinerja program TJSL BUMN PT TASPEN (Persero):

DISCLOSURE OF MATERIAL TOPIC MANAGEMENT [3-3]

The Company's operational activities have a social impact on the surrounding community. TASPEN is committed to continuously conducting business activities responsibly to maximize positive impacts and minimize negative impacts on the surrounding community. The positive impacts of TASPEN's business activities may indirectly come from the economic aspects of the local community assisted by the Company's presence. Meanwhile, negative impacts may arise from operational activities that may cause noise, traffic congestion, or others. [F.23]

Despite having negative impacts, there are no complaints from the community that could disrupt the Company's operational activities. The current situation is considered positive for the Company to carry out its business activities. [F.24]

The Company is committed and has policies in place to implement social responsibility programs and activities in the field of social and community development according to the Minister of SOEs Regulation Number PER-1/MBU/3/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

Performance of the TJSL Program in 2023

The distribution of the SOEs TJSL Program is based on the following distribution priority goals and the performance of the SOEs TJSL Program at PT TASPEN (Persero):

TABEL KINERJA PROGRAM TJSL BUMN
Table of Performance of SOEs TJSL Program

NO	PROGRAM Program	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
1	Program TJSL Unit TJSL TJSL Program of TJSL Unit	12.200.000.000	14.077.110.505	115,39
2	Program TJSL Divisi Lain TJSL Program of Other Divisions	502.000.000	-	-
	Jumlah Anggaran Non PUMK Total Non-PUMK Budget	12.702.000.000	14.077.110.505	-
3	Program Pendanaan UMK: Micro-Small Business (MSE/UMK) Funding Program:			
	• Penyaluran Mandiri Independent Distribution	-	-	-
	• Penyaluran PUMK Kerja Sama Sinergi dengan PT BRI (Persero) Tbk Micro-Small Business Funding (PUMK) Distribution in Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk	27.200.000.000	25.700.000.000	94,49
	Jumlah Anggaran PUMK Total PUMK Budget	27.200.000.000	25.700.000.000	94,49
	Jumlah Dana Program TJSL BUMN Total SOEs TJSL Program Funds	39.902.000.000	39.777.110.505	99,69



Alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp39.902.000.000,- dianggarkan untuk Program TJSJ Non Dana UMK sebesar Rp12.702.000.000,- (anggaran gabungan dari anggaran Unit TJSJ sebesar Rp12.200.000.000,- dan Anggaran dari Divisi lain (Divisi Kepatuhan) sebesar Rp502.000.000,-) sampai dengan 31 Desember 2023 telah tersalurkan sebesar Rp 14.077.110.505,- atau 110,83 % dari RKA 2023.

The budget allocation for the year 2023 amounted to Rp39,902,000,000, allocated for the TJSJ Program for Non-Micro Business Funding amounting to Rp12,702,000,000 (a combined budget from the TJSJ Unit allocation of Rp12,200,000,000 and the allocation from other divisions (Compliance Division) of Rp502,000,000). Until December 31, 2023, a total of Rp14,077,110,505 has been disbursed, which was equivalent to 110.83% of the 2023 RKA.

TABEL KINERJA PROGRAM TJSJ SESUAI 4 PILAR
Table of Performance of TJSJ Program According to 4 Pillars

NO	TPB SDGs	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
1	Pilar Sosial Social Pillar	7.890.000.000	9.674.318.715	122,61
2	Pilar Ekonomi Economic Pillar	29.240.000.000	26.421.317.800	90,36
3	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	2.120.000.000	3.681.473.990	173,65
4	Pilar Hukum & Tata Kelola Legal & Governance Pillar	150.000.000	-	-
Jumlah Alokasi Unit TJSJ Total TJSJ Unit Allocation		39.400.000.000	39.777.110.505	100,96
1	Pilar Hukum dan Kepatuhan Legal and Compliance Pillar	502.000.000	-	-
Jumlah Total		39.902.000.000	39.777.110.505	99,69

Penyaluran dana TJSJ BUMN sampai dengan periode Desember 2023 proporsi terbesar pada Pilar Sosial sebesar Rp 26.421.317.800,- atau 90,36 % dari RKA tahun 2023, dari ke 4 Pilar terdapat 2 Pilar yang mendapat proporsi penyaluran terbesar yaitu pada Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial hal ini sudah sejalan dan selaras dengan Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) arahan Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN.

The distribution of SOEs TJSJ funds until December 2023 was predominantly allocated to the Social Pillar, amounting to Rp26,421,317,800, or 90.36% of the 2023 RKA. Among the 4 (four) pillars, two pillars received the largest distribution proportion, namely the Economic Pillar and the Social Pillar, which aligned with the Priority Sustainable Development Goals (SDGs) directive from the Deputy Minister of Human Resources, Technology, and Information of the Ministry of SOEs.

TABEL KINERJA PROGRAM TJSJ BUMN 2023 BERDASARKAN TPB
Table of Performance of SOEs TJSJ Program 2023 Based on SDGs

NO	TPB SDGs	URAIAN TPB SDGs Description	JENIS PROGRAM BANTUAN Type of Assistance Program	RKA TAHUN 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 (Rp) Realization as of December 2023 (Rp)	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
A Pilar Sosial Social Pillar						
1	TPB 2	Tanpa Kelaparan Zero Hunger	Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Assistance	750.000.000	179.990.895	24,00
			Bantuan Sosial Kemasyarakatan Community Social Assistance	4.500.000.000	5.638.664.145	125,30

NO	TPB SDGs	URAIAN TPB SDGs Description	JENIS PROGRAM BANTUAN Type of Assistance Program	RKA TAHUN 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 (Rp) Realization as of December 2023 (Rp)	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
2	TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well-Being	Bantuan Kesehatan Health Assistance	1.000.000.000	2.293.659.000	229,37
3	TPB 4	Pendidikan Berkualitas Quality Education	Bantuan Pendidikan Education Assistance	1.640.000.000	1.562.004.675	95,24
Sub Jumlah Pilar Sosial Subtotal of Social Pillar				7.890.000.000	9.674.318.715	122,61
B Pilar Ekonomi Economic Pillar						
1	TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Decent Work and Economic Growth	a. Pendanaan UMK/ Micro-Small Business Funding (PUMK):			
			• Penyaluran Mandiri Independent Distribution	0	-	-
			• Penyaluran PUMK Kerja Sama Sinergi dengan PT BRI (Persero) Tbk PUMK Distribution in Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk	27.200.000.000	25.700.000.000	94,49
2			b. Bantuan Pendidikan/ Pelatihan Mitra Binaan Education/Training Assistance for Foster Partners	2.040.000.000	721.317.800	35,36
Sub Jumlah Pilar Ekonomi Subtotal of Economic Pillar				29.240.000.000	26.421.317.800	90,36
C Pilar Lingkungan Environmental Pillar						
1	TPB 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities and Communities	a. Bantuan Sarana Ibadah Religious Facility Assistance	500.000.000	1.022.675.000	204,54
			b. Bantuan Pelestarian Alam Environmental Preservation Assistance	780.000.000	549.537.500	70,45
			c. Bantuan Sarana dan Prasarana Umum Public Facilities and Infrastructure Assistance	840.000.000	2.109.261.490	251,10
Sub Jumlah Pilar Lingkungan Subtotal of Environmental Pillar				2.120.000.000	3.681.473.900	173,65



NO	TPB SDGs	URAIAN TPB SDGs Description	JENIS PROGRAM BANTUAN Type of Assistance Program	RKA TAHUN 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 (Rp) Realization as of December 2023 (Rp)	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
D Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar						
1	TPB 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Peace, Justice, and Strong Institutions	a. Bantuan Sertifikasi ISO/Sertifikasi Produk Unit TJSL Assistance for ISO Certification/TJSL Unit Product Certification	150.000.000	-	-
2			b. Hukum Anggaran Divisi Kepatuhan Budget Law of Compliance Division	502.000.000	-	-
Sub Jumlah Pilar Hukum dan Tata Kelola Subtotal of Legal and Governance Pillar				652.000.000	-	-
Jumlah Total				39.902.000.000	39.777.110.505	99,69

Pencapaian Program TJSL BUMN Unggulan/ Prioritas

Terdapat 3 (tiga) Program TJSL yang sejalan dengan program prioritas/unggulan untuk mendukung pencapaian TPB dan program yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Shared Value* (CSV) bagi Perusahaan yaitu :

1. CSV Korporasi :

- Bedah rumah ASN dengan sasaran peserta ASN golongan I dan II telah dilakukan pada 6 daerah meliputi Kota Tarakan, Cirebon, Pematang Siantar, Manokwari, Pamekasan dan Pangkal Pinang dengan sasaran peserta ASN golongan I dan II.
- Penyediaan Rumah sehat ASN/Pensiunan bekerja sama dengan Rumah Sehat Baznas yang sudah dilaksanakan pada 18 Agustus 2023.
- Program LANSIA Sehat TASPEN (LANTAS) adalah kegiatan berupa pelatihan kepada para *change agent* kantor pusat agar dapat di implementasikan pada peserta TASPEN dengan tujuan peserta lebih sehat dan produktif.
- Diserah terimakan kepada Baznas Kantor Pusat, Baznas Kabupaten Ende, KORPRI Pusat, dan KORPRI Cabang.

Achievements of Priority SOEs TJSL Programs

There are 3 (three) TJSL programs aligned with priority/flagship programs to support the achievement of SDGs and programs that support core business and create the *Creating Shared Value* (CSV) for the Company, namely:

1. Corporate's CSV:

- Civil Servant (ASN) House Renovation targeting ASN participants grade I and II have been conducted in six regions, including Tarakan City, Cirebon, Pematang Siantar, Manokwari, Pamekasan, and Pangkal Pinang. The target participants are ASN grades I and II.
- Provision of Healthy Homes for ASN/Retirees in collaboration with Baznas Healthy Homes, which was implemented on August 18, 2023.
- TASPEN Healthy Elderly Program (LANTAS) is a training activity for change agents at the head office to implement for TASPEN participants with the aim of making them healthier and more productive.
- It was handed over to the Baznas Central Office, Baznas of Ende Regency, Central KORPRI, and KORPRI Branch.

Bedah rumah ASN KC Pangkal Pinang
ASN House Renovation by Pangkal Pinang
Branch Office



Program LANSIA Sehat TASPEN (LANTAS)
berlokasi di Kota Bogor
TASPEN Healthy Elderly Program (LANTAS)
was located in Bogor City.

Program ini bertujuan untuk memperhatikan ASN/pensiunan serta peduli terhadap kesehatan sehingga tingkat keberlangsungan hidup semakin meningkat guna mempersiapkan ASN/pensiunan menjalani kehidupan sehari-hari. Program ini diharapkan membawa dampak positif terhadap semakin meningkatnya kesadaran para ASN/pensiunan terhadap kesehatan hidup. Nilai manfaat CSV bagi perusahaan yaitu menambah kepercayaan ASN terhadap PT TASPEN (Persero) yang memperhatikan dan peduli terhadap tingkat kesehatan untuk keberlangsungan hidup dalam mempersiapkan hari senja/masa purna tugas saat memasuki masa sebagai pegawai pensiun.

This program aims to prioritize civil servants/pensioners and care for their health, thereby increasing their life expectancy to better prepare them for everyday life. The program is expected to have a positive impact on increasing awareness among civil servants/pensioners regarding health. The value of Creating Shared Value (CSV) for the Company lies in increasing the trust of civil servants in PT TASPEN (Persero), which prioritizes and cares for health to ensure a sustainable life in preparing for retirement.

TABEL REALISASI PROGRAM CSV
Table of CSV Program Realization

NO	PROGRAM Program	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)	REALISASI (Rp) Realization (Rp)	PERSENTASE (%) Percentage (%)
1	Bedah rumah ASN ASN House Renovation	234.000.000	233.736.846	99,89
2	Rumah sehat ASN/Pensiunan Healthy Home for ASN/ Retirees	200.000.000	200.000.000	100
3	Program LANSIA Sehat TASPEN (LANTAS) TASPEN Healthy Elderly Program (LANTAS)	265.500.000	265.229.000	99,90
4	Ambulance Instansi Pemerintah Government Agency Ambulances	796.000.000	795.130.000	99,89
Jumlah Total		1.495.500.000	1.494.095.846	99,91



1. Program Unggulan :

Pengelompokan program unggulan berdasarkan RKA tahun 2023 dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Program prioritas di bidang pendidikan :
 - Beasiswa Anak Karyawan TASPEN dan ASN serta Lembaga Pendidikan untuk 40 Anak.
 - Bantuan Renovasi Sekolah, Perpustakaan dan Sarana TIK lainnya bekerjasama dengan 57 Kantor Cabang se-Indonesia.
 - Program kolaborasi Bantuan Pendidikan dalam Pembangunan SD di Tanah Lino. Dalam hal ini terdapat perubahan program menjadi Program Mitigasi Dampak El Nino sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-126/DSI.MBU/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

1. Flagship Programs:

The grouping of flagship programs based on the 2023 Work Plan and Budget (RKA) with the following priorities:

- a. Priority programs in the education field:
 - Scholarships for children of TASPEN and ASN employees, as well as educational institutions for 40 children.
 - Assistance in the Renovation of Schools, Libraries, and Other Information and Communication Technology (ICT) Facilities in collaboration with 57 Branch Offices throughout Indonesia.
 - Collaborative Program for Educational Assistance in the Development of Primary Schools in Tanah Lino. In this regard, there has been a program change to the El Nino Impact Mitigation Program in accordance with Letter from the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: S-126/DSI.MBU/10/2023 dated October 4, 2023.

NO	PROGRAM Program	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)	REALISASI (Rp) Realization (Rp)	PERSENTASE (%) Percentage (%)	LOKASI Location	STATUS Status
1	Beasiswa Anak Karyawan TASPEN dan ASN. Scholarships for children of TASPEN and ASN employees	165.000.000	164.400.000	99,64	Seluruh Indonesia Nationwide	Sudah realisasi s.d bulan Desember 2023 Fully realized until December 2023
2	Bantuan Renovasi Sekolah, Perpustakaan dan Sarana TIK Lainnya. Assistance in the Renovation of Schools, Libraries, and Other Information and Communication Technology (ICT) Facilities	431.000.000	417.604.675	96,89	Seluruh Indonesia Nationwide	Sudah realisasi s.d bulan Desember 2023 Fully realized until December 2023
3	Pendidikan Wirausaha / Program Mitigasi Dampak El Nino Entrepreneurship Education / El Nino Impact Mitigation Program	710.000.000	-	0,00	-	Tidak terealisasi Not realized
Jumlah Total		1.321.000.000	582.004.675	44,06		

Penyerahan Bantuan Renovasi Yayasan Setia Citra Abadi KC Tangerang

Handover of Renovation Assistance to Setia Citra Abadi Foundation by Tangerang Branch Office



Penyerahan Bantuan Beasiswa Pendidikan Anak KC Bekasi

Handover of Education Scholarship Assistance for Children by Bekasi Branch Office

b. Program prioritas di bidang lingkungan :

- Penanaman Pohon dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah meliputi Denpasar, Bekasi, Semarang, Cirebon, Kupang, Tanjung Pinang dan Pontianak.
- Konservasi Satwa Orang Utan di Palangkaraya dan Konservasi satwa Tukik di Kebumen.
- Taman Kota dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Program Kolaborasi BUMN Desa Pangan pada Desa Jurangjero Kab Sleman.

b. Priority programs in the environmental field:

- Tree Planting in collaboration with Regional Governments covering Denpasar, Bekasi, Semarang, Cirebon, Kupang, Tanjung Pinang, and Pontianak.
- Orangutan Conservation in Palangkaraya and Sea Turtle Conservation in Kebumen.
- City Park in collaboration with Regional Governments.
- SOEs Collaboration Program for Food Village in Jurangjero Village, Sleman Regency.



NO	PROGRAM Program	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)	REALISASI (Rp) Realization (Rp)	PERSENTASE (%) Percentage (%)	LOKASI Location	STATUS Status
Program TASPEN Lestari Sustainable TASPEN Program						
1	Penanaman Pohon (Pemda) Tree Planting (Regional Government)	275.000.000	274.975.000	99,99	6 kota tersebar di seluruh Indonesia 6 cities spread across Indonesia	Sudah terealisasi. Already realized.
2	Konservasi Satwa Wildlife Conservation	205.000.000	204.562.500	99,79	Purwokerto dan Palangkaraya Purwokerto and Palangkaraya	Sudah terealisasi. Already realized.
3	Taman Kota (Pemda) City Park (Regional Government)	70.000.000	70.000.000	100,00	Taman Lansia di Kota Semarang Elderly Park in Semarang City	Sudah terealisasi. Already realized.
4	Desa Pangan Food Village	238.000.000	71.184.000	29,91	Magelang Magelang	Sudah terealisasi. Already realized.
Jumlah Total		788.000.000	620.721.500	78,77		

TASPEN LESTARI Pembangunan Taman Lansia KC Semarang

SUSTAINABLE TASPEN, Construction of Elderly Park by Semarang Branch Office



Konservasi satwa tukik penyu di Kebumen.

Sea Turtle Hatchling Conservation in Kebumen.

c. Program prioritas di bidang pengembangan UMK :

- Pelatihan dan pendampingan mitra binaan ASN dan Non-ASN serta Mitra binaan existing yang dilakukan pada 10 KC dan 1 KC untuk Mitra binaan baru.
- Keikutsertaan Pameran/Kurasi produk mitra binaan sebanyak 8 *event*.
- *Branding Outlet* Mitra Binaan baru program kolaborasi PUMK sebanyak 454 Mitra binaan.
- Pemberian Sertifikasi Produk Halal 16 mitra binaan *existing*.
- Pembangunan Sentra UMKM di Temanggung dan Magelang.

c. Priority programs in the development of MSEs:

- Training and mentoring were conducted at 10 branch offices for both ASN and non-ASN foster partners, as well as existing foster partners, and at 1 branch office for new foster partners.
- Participation in Exhibitions/Curation of foster partners' products in 8 events.
- Branding Outlets of new foster partners for PUMK collaboration programs, totaling 454 foster partners.
- Provision of Halal Product Certification for 16 existing foster partners.
- Establishment of MSME Centers in Temanggung and Magelang.

NO	PROGRAM Program	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)	REALISASI (Rp) Realization (Rp)	PERSENTASE (%) Percentage (%)	LOKASI Location	STATUS Status
Program TASPENpreneur TASPENpreneur Program						
1	Pelatihan dan pendampingan mitra binaan ASN dan Non ASN Training and mentoring for both ASN and non-ASN foster partners.	158.000.000	157.478.000	99,67	Seluruh Indonesia Throughout Indonesia	Sudah realisasi s.d bulan Desember 2023 Already realized until December 2023
2	Kurasi/Pameran Mitra Binaan Curation/ Exhibitions of Foster Partners	353.000.000	351.267.000	99,51	Seluruh Indonesia Throughout Indonesia	Sudah realisasi s.d bulan Desember 2023 Already realized until December 2023
3	<i>Branding Outlet</i> Mitra Binaan Branding Outlets of Foster Partners.	93.000.000	91.842.800	98,76	Seluruh Indonesia Throughout Indonesia	Sudah realisasi s.d bulan Desember 2023 Already realized until December 2023
4	Sertifikasi Produk Product Certification	135.000.000	134.865.000	99,90	Seluruh Indonesia Throughout Indonesia	Selesai Completed
5	Sentra UMKM MSME Centers	136.000.000	135.100.000	99,34	Temanggung dan Magelang Temanggung and Magelang	Selesai Completed
Jumlah Total		739.000.000	735.452.800	99,52		



Pendampingan Program Wirausaha
PINTAR KC Surakarta

Mentoring for the PINTAR (Civil Servant
and Retiree Entrepreneurship for
Welfare) Program by Surakarta Branch
Office



TASPENpreneur in INACRAFT 2023

TASPENpreneur in INACRAFT 2023

KEGIATAN PENYALURAN PROGRAM TJSL

1. PILAR SOSIAL

Dalam Pilar Sosial terdapat 2 TPB, yaitu :

- a. TPB 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera :
 - 1) Bencana Alam dilakukan dalam kegiatan bantuan penanggulangan COVID-19, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll;
 - 2) Kesehatan dilakukan dalam kegiatan pemberian bantuan ambulance, vaksinasi COVID -19;
 - 3) Sosial Kemasyarakatan dalam kegiatan pemberian bantuan untuk sahabat difabel, paket sembako, bantuan panti asuhan yatim piatu/panti jompo, bantuan korban kebakaran;

TJSL PROGRAM DISTRIBUTION ACTIVITIES

1. SOCIAL PILLAR

In the Social Pillar, two SDGs are addressed, namely:

- a. SDG 3, Good Health and Well-being:
 - 1) Natural disaster relief efforts include providing assistance for COVID-19 mitigation, flood relief, landslide relief, earthquake relief, and more;
 - 2) Health-related activities entail providing support for ambulances and COVID-19 vaccinations.
 - 3) Community Social activities encompass aiding disabled individuals, distributing basic necessities packages, supporting orphanages/elderly homes, and assisting fire victims.

TASPEN PEDULI Pembagian Sembako Gratis Dalam Rangka HUT PT TASPEN (Persero) ke 60 Tahun KC Yogyakarta

TASPEN CARE for Free Distribution of Basic Necessities in Commemoration of PT TASPEN (Persero)'s 60th Anniversary by Yogyakarta Branch Office



TASPEN PEDULI Bantuan Bencana Banjir Kabupaten Natuna KC Tanjung Pinang

TASPEN CARE for Flood Relief Assistance for Natuna Regency by Tanjung Pinang Branch Office



Bantuan Pembangunan Kantor Sementara PWRI KC Jakarta

Assistance for the Construction of PWRI's Temporary Office by Jakarta Branch Office

Penyerahan Hewan Qurban Idul Adha 1444 H ke Pemda Setempat Se-wilayah Kantor Cabang Indonesia.

Handover of Qurban sacrificial animals for Eid al-Adha 1444 H to the Local Government within the jurisdiction of the Branch Offices throughout Indonesia.





b. TPB 4, Pendidikan Berkualitas :

- 1) Dilakukan dalam kegiatan beasiswa anak tidak mampu, beasiswa anak sekolah TASPEN, beasiswa pendidikan yayasan BUMN, bedah sekolah.

b. SDG 4, Quality Education:

- 1) Conducted through activities such as scholarships for underprivileged children, TASPEN schoolchildren scholarships, education scholarships of SOEs foundation, and school renovations.

Penyerahan Bantuan Renovasi Yayasan Setia Citra Abadi KC Tangerang.

Handover of Assistance for the Renovation of Setia Citra Abadi Foundation by Tangerang Branch Office.



Penyerahan Bantuan Beasiswa Pendidikan Anak KC Bekasi

Handover of Assistance of Education Scholarships for Children by Bekasi Branch Office

2. PILAR EKONOMI NON PENDANAAN UMK

Dalam Pilar Ekonomi terdapat TPB 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :

Pelatihan Mitra Binaan dilakukan dalam kegiatan TASPENpreneur yang akan dilakukan di beberapa lokasi kantor cabang PT TASPEN (Persero).

2. ECONOMIC PILLAR FOR NON MICRO-SMALL BUSINESS FUNDING (NON-PUMK)

In the Economic Pillar, there is SDG 8, Decent Work and Economic Growth, namely:

Training for Foster Partners will be conducted through TASPENpreneur activities and will be held at several PT TASPEN (Persero) branch offices.

Pendampingan Program Wirausaha PINTAR KC Surakarta

Mentoring for the PINTAR (Civil Servant and Retiree Entrepreneurship for Welfare) Program by Surakarta Branch Office





Pendampingan Program Wirausaha PINTAR KC Banda Aceh

Mentoring for the PINTAR (Civil Servant and Retiree Entrepreneurship for Welfare) Program by Banda Aceh Branch Office

3. PILAR LINGKUNGAN

Dalam Pilar Lingkungan terdapat TPB 11, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan yaitu:

- Sarana Ibadah yang dilakukan adalah kegiatan renovasi sarana ibadah masjid dan gereja.
- Pelestarian alam yang dilakukan dalam kegiatan penghijauan, pembangunan taman kota.
- Sarana dan Prasarana Umum dilakukan dalam kegiatan pembuatan sarana MCK, penyediaan air bersih, pembuatan jalan desa, pembuatan irigasi, pengolahan sampah, renovasi ruang belajar, pembangunan asrama pondok pesantren.

3. ENVIRONMENTAL PILLAR

In the Environmental Pillar, there is SDG 11, Sustainable Cities and Communities, which includes:

- Worship facilities are improved through activities that involve the renovation of mosques and churches.
- Environmental conservation activities include greening initiatives and the development of city parks.
- Public facilities and infrastructure are developed through activities such as constructing sanitation facilities, providing clean water, building rural roads, constructing irrigation systems, waste management, renovating classrooms, and constructing boarding.



Penyerahan Bantuan Renovasi & Sarana Prasarana Masjid Jami Ash-Shomad.

Handover of Jami Ash-Shomad Mosque Renovation Assistance & Facilities and Infrastructure.



Bantuan Pembangunan Majelis Ad'diba Nurul Yaqin KC Ternate.

Assistance for the Construction of the Ad'diba Nurul Yaqin Assembly by Ternate Branch Office.



Bantuan Mandatori Kementerian BUMN ke Pemerintah Desa Sumberejo, Kab. Blora.

Mandatory Assistance from the Ministry of State-Owned Enterprises to the Government of Sumberejo Village, Blora Regency.

TASPEN LESTARI Pembangunan Taman Lansia KC Semarang.

Sustainable TASPEN for the Development of Elderly Park by Semarang Branch Office.



Bantuan Kursi Roda KC Kepulauan Nias.

Wheelchair Assistance by Nias Islands Branch Office.



TASPEN Peduli Bantuan Bedah Rumah kepada ASN Setempat KC Pamekasan.

TASPEN Care: Assistance for Renovating Houses for Local Civil Servants by Pamekasan Branch Office.



4. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

Dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola terdapat TPB 16, Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yaitu Hukum dilakukan dalam kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

4. LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR

In the Legal and Governance Pillar, which encompasses SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions, legal activities include the implementation of the ISO 9001:2015 Quality Management System certification.



Pendanaan UMK

Program **Pendanaan UMK** bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Program Pendanaan UMK, Unit TJSL Taspen melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMK dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UMK dalam hal peningkatan kompetensi, meningkatkan akses pemasaran dan kemudahan akses permodalan dengan program terarah untuk menghasilkan UMK naik kelas.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dilakukan melalui penyaluran dana pinjaman, pendampingan dan pembinaan usaha. Penyaluran Dana Pinjaman Program Pendanaan UMK diberikan dengan nilai hingga Rp200.000.000,- dan jasa administrasi sebesar 3 % (persen) per tahun dengan tenor maksimal 3 tahun. Selain bantuan permodalan, Unit TJSL Taspen juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mitra binaannya sehingga dapat bersaing menjadi tangguh dan mandiri. Kemudian dalam rangka mendukung upaya UMK naik kelas, mitra binaan diberikan Pelatihan/ pendidikan melalui penyelenggaraan Kurikulum UMK mencakup *branding, packaging* produk, promosi dan *marketing, Go Digital, Go Online*, pembukuan keuangan serta kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas para mitra binaan.

Kinerja Penyaluran Program Pendanaan UMK Tahun 2023

Program pendanaan UMK dilakukan dalam 2 program yaitu pendanaan UMK mandiri dan penyaluran PUMK kerja sama sinergi dengan PT BRI (Persero) Tbk, berikut kinerja program pendanaan UMK tahun 2023 :

Micro-Small Business Funding (PUMK)

The Micro-Small Business Funding (PUMK) Program aims to enhance the capabilities of small businesses to become resilient and independent while providing a multiplier effect for the welfare improvement of society. Through the PUMK Program, the Taspen TJSL Unit provides mentoring and coaching to MSME players to address the main challenges in their business development, such as enhancing competency, improving marketing access, and facilitating capital access, with a focused program aimed at upgrading MSMEs to a higher level.

Efforts to enhance the capabilities of small businesses to become resilient and independent are conducted through the distribution of loan funds, business mentoring, and coaching. Distribution of Loan funds from the Micro-Small Business Funding Program is provided up to the value of Rp200,000,000,- with an administrative fee of 3% per year and a maximum tenure of 3 years. In addition to capital assistance, the Taspen TJSL Unit also provides training to improve the competency of its foster partners, enabling them to compete effectively and become resilient and independent. Furthermore, to support the efforts of upgrading MSMEs to a higher level, foster partners are provided with training/ education through the implementation of an MSME Curriculum covering branding, product packaging, promotion, and marketing, Go Digital, Go Online, financial bookkeeping, and other activities aimed at enhancing the productivity of foster partners.

The Distribution Performance of the Micro-Small Business (MSE/UMK) Funding Program in 2023

The MSE funding program is conducted through two programs, namely independent MSE funding and the distribution of PUMK in synergy with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Here is the performance of the MSE funding program in 2023:



TABEL KINERJA PROGRAM PENDANAAN UMK
Table of MSE Funding Program Performance

NO	URAIAN Description	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN Achievement
1	Penyaluran PUMK kerja sama sinergi dengan PT BRI (Persero) Tbk PUMK Distribution in Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk	27.200.000.000	25.700.000.000	94,49
Jumlah Total		27.200.000.000	25.700.000.000	94,49

TABEL SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA PUMK
Table of Funding Sources and Utilization of PUMK

NO	URAIAN Description	RKA-PUMK 2023 2023 RKA-PUMK	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023 Realization as of December 31, 2023	PENCAPAIAN Achievement
1	Sumber Dana Funding Sources			
	- Saldo 1 Januari/Balance as of January 1	1.126.373.309	1.691.519.677	150,17
	- Alokasi Tambahan Dana dari BUMN Pembina/ Additional Allocation of Funds from Supervising SOEs	-	-	-
	- Penerimaan/ Cash Receipts:			
	• Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan/ Loan Repayment from Foster Partners	24.813.909.227	23.264.046.631	93,75
	• Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur/ Refund from Other Supervising SOEs/Distributing institutions	550.000.000	-	-
	• Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman/ Loan Administration Service Income	1.546.917.277	1.282.759.671	82,92
	• Pendapatan Jasa Giro/ Interest income on Current Account	42.055.800	285.516.860	678,90
	• Pendapatan Lain-Lain/ Other Income		1.427.858	-
	• Penerimaan Lain-Lain/ Other Cash receipt		43.554.250	-
Jumlah/Total		28.079.255.613	26.570.031.255	94,63

NO	URAIAN Description	RKA-PUMK 2023 2023 RKA-PUMK	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023 Realization as of December 31, 2023	PENCAPAIAN Achievement
2	Penyaluran Dana dan Biaya Operasional/ Distribution of Funds and Operational Costs			
	- Penyaluran Pinjaman kepada Mitra/ Loan Distribution to Partners	-	-	-
	- Penyaluran PUMK kerja sama sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PUMK Distribution in Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk	27.200.000.000	25.700.000.000	94,49
	- Biaya Operasional Rekening Bank/ Bank Account Operational Costs		62.864.600	-
	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional Total Distribution of Funds and Operational Costs	27.200.000.000	25.762.864.600	94,72
	Saldo Dana Fund Balance	879.255.613	807.166.655	-

Berikut tingkat capaian dari Rencana Kerja Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Alokasi Tambahan Dana dari BUMN Pembina

Penyaluran dana Program Pendanaan UMK untuk tahun 2023 menggunakan dana pengembalian mitra binaan (bergulir) sehingga untuk alokasi beban pembina/perusahaan tahun 2023 tidak dianggarkan.
- b) Penerimaan Pengembalian Mitra Binaan

Penerimaan angsuran pokok pinjaman dari mitra binaan sebesar Rp 23.264.046.631,- atau 93,75% dari RKA 2023 sebesar Rp24.813.909.227,-
- c) Penerimaan Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur

Penerimaan angsuran pokok pinjaman dari BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur tidak ada.
- d) Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman

Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman sebesar Rp 1.282.759.671,- atau 82,92 % dari RKA 2023 sebesar Rp1.546.917.277,-
- e) Bunga Jasa Giro/Bunga Bank

Penerimaan Bunga Jasa Giro/Bunga Deposito adalah sebesar Rp 285.516.860,- atau 678,90 % dari RKA 2023 sebesar Rp42.055.800,-.
- f) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah sebesar Rp 1.427.858.
- g) Penerimaan Lain-lain

Penerimaan lain-lain adalah sebesar Rp 44.760.558.

The achievement level of the Work Plan and Budget can be explained as follows:

- a) Additional Allocation of Funds from Supervising SOEs

The distribution of funds for the Micro-Small Business (MSE) Funding Program for 2023 utilizes revolving funds from loan repayment from foster partners. Therefore, the allocation of supervisory/company expenses for 2023 was not budgeted.
- b) Receipt of Foster Partner Loan Repayments

The loan principal installments received from foster partners amounted to Rp23,264,046,631,- or 93.75% of the 2023 RKA of Rp 24,813,909,227,-.
- c) Receipt of Refund from Other Supervising SOEs/ Distributing institutions

No principal loan installments were received from other supervising SOEs/distributing institutions.
- d) Receipt of Loan Administration Fees

Receipt of loan administration fees amounted to Rp1,282,759,671,- or 82.92% of the 2023 RKA of Rp 1,546,917,277,-.
- e) Interest income on Current Account/Bank Interest

Interest income on current account/time deposits interest amounted to Rp285,516,860,- or 678.90% of the 2023 RKA of Rp 42,055,800,-.
- f) Other Income

Other income amounted to Rp1,427,858.
- g) Other Cash Receipt

Other cash receipts amounted to Rp44,760,558.



Kinerja Efektifitas Penyaluran Pendanaan UMK

Tingkat efektifitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman, pendapatan jasa administrasi, dan jasa giro bank, serta tingkat efektifitas penyaluran dana adalah sebagai berikut :

Effectiveness Performance of MSE Funding Distribution

The effectiveness level of fund distribution is calculated by dividing the total distributed funds by the total available funds. The total distributed funds comprise all funds distributed to small businesses and cooperatives within the respective year, including capital loans and grants. Meanwhile, the total available funds consist of the initial balance plus loan repayments, income from loan administration fees, and interest income on current account. The effectiveness level of fund distribution is as follows:

TABEL DANA TERSEDIA PENYALURAN UMK
Table of Available Funds for MSE Distribution

URAIAN Description	RKA-PUMK 2023 RKA-PUMK	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023 Realization as of December 31, 2023	PENCAPAIAN Achievement
Saldo Awal Initial Balance	1.126.373.309	1.691.519.677	150,17
Angsuran Pokok Pinjaman Mandiri Principal Loan Installments	24.813.909.227	23.103.414.295	93,11
Angsuran Pokok Pinjaman Sinergi Principal Installments of Synergy Loan	550.000.000	160.632.336	29,21
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income	1.546.917.277	1.282.759.671	82,92
Pendapatan Jasa Giro Interest income on Current Account	42.055.800	285.516.860	678,90
Biaya Operasional Bank Bank Operational Cost	-	-62.864.600	-
Jumlah Dana Tersedia (1) Total Available Funds (1)	28.079.255.613	26.460.978.239	94,24
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Loan Distribution to Partners	-	-	-
Penyaluran PUMK kerja sama sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PUMK Distribution in Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk	27.200.000.000	25.700.000.000	94,48
Jumlah Dana yang disalurkan Amount of distributed funds	27.200.000.000	25.700.000.000	94,48

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Penyaluran} &= \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana tersedia}} \times 100\% \\ \text{Effectiveness of Distribution} &= \frac{\text{Average Loans Collectability}}{\text{Amount of available funds}} \times 100\% \\ \text{Efektifitas Penyaluran} &= \frac{\text{Rp 25.700.000.000,-}}{\text{Rp 26.460.978.239,-}} \times 100\% = 97,12\% \\ \text{Effectiveness of Distribution} & \end{aligned}$$

Kinerja efektifitas penyaluran pendanaan UMK periode tahun 2023 sebesar 97,12 % .

The effective performance of distributing MSE funding for the 2023 period was 97.12%.

Kinerja Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Tingkat kolektibilitas pengembalian piutang merupakan indikator lain dalam penilaian kinerja unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang merupakan indikator kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Nilai bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk piutang dengan kategori Kurang Lancar, 50% untuk piutang dengan kategori Diragukan, dan 0% untuk piutang dengan kategori Macet, tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut :

Collectability Performance of Loan Repayments

The collectability rate of receivable repayment is another indicator in assessing the performance of the Social and Environmental Responsibility unit, which indicates the likelihood of loan recovery. The collectability rate of loan repayment is a comparison between the weighted average collectability of loans and the total loan disbursed amount (loan balance). The weighted average collectability of loans is calculated by multiplying the collectability weight (%) by the loan balance based on loan quality (current, less current, doubtful, and bad). The weight values used as multipliers are 100% for loans categorized as Current, 75% for Less Current loans, 50% for Doubtful loans, and 0% for Bad loans. The level of collectability of loan repayments is as follows:

TABEL KOLEKTIBILITAS PERIODE TAHUN 2023
Table of Collectability for the 2023 Period

STATUS PIUTANG Receivable Status	JUMLAH PIUTANG (Rp) Total Receivables (Rp)	BOBOT Weight	RATA-RATA TERTIMBANG Weighted Average
Lancar Current	33.759.503.013	100	33.759.503.013
Kurang Lancar Less Current	5.758.466.080	75	4.318.849.560
Diragukan Doubtful	1.035.081.102	25	258.770.276
Macet Bad	7.297.821.306	0	0
Total Piutang Total Receivables	47.850.871.501		38.337.122.849

Perhitungan tingkat kolektibilitas pengembalian dana pinjaman sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

The calculation of the collectability rate of loan repayments until December 2023 was as follows:

$$\text{Kolektibilitas Collectability} = \frac{\text{Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman Weighted Average Loans Collectability}}{\text{Jumlah Pinjaman yang Disalurkan Total Loan Disbursed}} \times 100\%$$

$$\text{Kolektibilitas Collectability} = \frac{38.337.122.849}{47.850.871.501} \times 100\% = 80,12\%$$



Kinerja Mitra Binaan Naik kelas

Perhitungan kinerja mitra binaan naik kelas sampai dengan bulan Desember untuk Program Pendanaan UMK adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Mitra Binaan Naik Kelas} &= \frac{\text{Realisasi Jumlah Mitra Binaan Naik Kelas}}{\text{Target Mitra Binaan Naik Kelas}} \times 100 \% \\ \text{Upgraded Foster Partners} &= \frac{\text{Realization of Total Upgraded Foster Partners}}{\text{Target Upgraded Foster Partners}} \times 100 \% \\ \\ \text{Mitra Binaan Naik Kelas} &= \frac{56}{56} \times 100 \% = 100 \% \\ \text{Upgraded Foster Partners} & \end{aligned}$$

Kinerja mitra binaan naik kelas sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 56 mitra binaan naik kelas atau 100 % dari target.

Performance of Upgraded Foster Partners

The calculation of the upgraded foster partners performance until December for the MSE Funding Program is as follows:

Upgraded Foster Partners performance until December 2023 was 56 upgraded foster partners or 100% of the target.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PENDANAAN UMK TAHUN 2023

Laporan Posisi Keuangan

Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah aset neto Program Pendanaan UMK adalah sebesar Rp 99.521.372.289,- atau 101,87 % dibandingkan dengan RKA tahun 2023 sebesar Rp97.694.430.500,-. Total liabilitas sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.206.308,-. Jumlah liabilitas dan aset neto sampai dengan akhir bulan Desember 2023 sebesar Rp 99.522.578.597,- atau 101,87 % dibandingkan dengan RKA tahun 2023 sebesar Rp97.694.430.500,-. Secara terperinci dapat kami sampaikan pada tabel berikut:

FINANCIAL STATEMENTS OF THE MSE FUNDING PROGRAM IN 2023

Statements of Financial Position

As of December 31, 2023, the net assets of the MSE Funding Program amounted to Rp99,521,372,289, or 101.87%, compared to the 2023 RKA of Rp 97,694,430,500. As of the end of December 2023, the total liabilities amounted to Rp1,206,308. As of the end of December 2023, the total liabilities and net assets amounted to Rp99,522,578,597, or 101.87%, compared to the 2023 RKA of Rp 97,694,430,500. A detailed breakdown can be found in the following table:

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023
Table of Statements of Financial Position for the Period Ending December 31, 2023

URAIAN Description	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI S.D DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
ASET ASSETS			
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	879.255.613	807.166.655	91,80
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash			
Piutang Bersih Net Receivables	40.381.967.588	43.604.578.190	107,98
Piutang lain-lain Other Receivables	515.207.299	692.833.752	134,48
Uang Muka Kerja Advances	-	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	41.776.430.500	45.104.578.597	107,97

URAIAN Description	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI S.D DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets			
Aset Tetap Bersih Net Fixed Assets	-	-	-
Aset Lain-Lain Other Assets	-	-	-
Piutang Jangka Panjang ke BRI Long-Term Receivables to BRI	55.918.000.000	54.418.000.000	97,32
Pinjaman Bermasalah Non-performing Loans	16.223.893.729	-	-
Akumulasi Pinjaman Bermasalah Accumulated non-performing Loans	(16.223.893.729)	-	-
Jumlah Aset Total Assets	55.918.000.000	99.522.578.597	177,98
LIABILITAS DAN ASET NETO LIABILITIES AND NET ASSETS			
Liabilitas Liabilities			
Hutang Pajak Tax Payable	-	-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified Installments	-	-	-
Kelebihan Pembayaran Angsuran Excess Installment Payments	-	1.206.308	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	-	1.206.308	-
Aset Neto Net Assets			
Aset Neto Tidak Terikat Unrestricted Net Assets	97.694.430.500	99.521.372.289	101,87
Aset Neto Terikat Restricted Net Assets	-	-	-
Jumlah Aset Neto Total Net Assets	97.694.430.500	99.521.372.289	101,87
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto Total Liabilities and Net Assets	97.694.430.500	99.522.578.597	101,87



Laporan Aktivitas Keuangan

Pada laporan aktivitas sampai dengan 31 Desember 2023, pendapatan secara keseluruhan yang terkait dengan jasa administrasi pinjaman sebesar Rp 117.844.329,- atau sebesar 7,62 % dibandingkan RKA tahun 2023 sebesar Rp1.546.917.277,-. Secara terperinci dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Financial Activity Report

In the financial activity report until December 31, 2023, the total income related to loan administration services amounted to Rp117,844,329, or 7.62%, compared to the 2023 RKA of Rp 1,546,917,277. Details can be found in the following table:

TABEL LAPORAN AKTIFITAS KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023
Table of Financial Activity Report for the Period Ending December 31, 2023

URAIAN Description	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI S.D DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
Pendapatan Income			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income	1.546.917.277	117.844.329	7,62
Pendapatan Jasa Giro Interest Income on Current Accounts	42.055.800	285.516.860	678,90
Pendapatan Lain-lain Other Income	-	44.982.108	-
Pendapatan pemulihan piutang Income from Recovery of Receivables		161.706.743	-
Jumlah Pendapatan Total Income	1.588.973.077	610.050.040	38,39
Beban Expenses			
Dana Pembinaan (Hibah) Development Funds (Grants)	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	-	4.852.458	-
Beban Penyisihan Piutang Allowance for Doubtful Accounts	-	213.494.820	-
Pajak Tax	-	57.096.799	-
Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Expenses and Expenditures	-	915.343	-
Jumlah Beban Total Expenses	-	276.359.420	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Increase (Decrease) in Unrestricted Net Assets	1.588.973.077	333.690.620	21,00
Aset Neto Awal Tahun Net Assets at Beginning of Year	97.694.430.500	99.187.681.669	101,53
Aset Neto Akhir Tahun Net Assets at End of Year	99.283.403.577	99.521.372.289	100,24

Laporan Arus Kas yang Disajikan Secara Komparatif

Sampai dengan 31 Desember 2023, posisi kas yang diterima dari pengembalian pokok pinjaman mitra binaan sebesar Rp 23.264.046.631,- atau 91,72 % dari RKA TJSJL Tahun 2023 sebesar Rp25.363.909.227,-. Secara terperinci dapat kami sampaikan pada tabel berikut :

Statements of Comparative Cash Flows

As of December 31, 2023, the cash position received from the repayment of principal loans from foster partners amounted to Rp23,264,046,631, or 91.72% of the 2023 TJSJL RKA of Rp 25,363,909,227. Details can be found in the following table:

TABEL LAPORAN ARUS KAS PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023
Table of Statements of Cash Flows for Period Ending December 31, 2023

URAIAN Description	RKA 2023 2023 RKA	REALISASI S.D DESEMBER 2023 Realization as of December 2023	PENCAPAIAN (%) Achievement (%)
Aktivitas Operasi Operating Activities			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Loan Repayment from Foster Partners	25.363.909.227	23.264.046.631	91,72
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Angsuran Refund of excess installment payment	-	1.206.308	-
Penerimaan Lain-Lain Other Receipts	-	43.554.250	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan administration services income	1.546.917.277	1.282.759.671	82,92
Pendapatan Jasa Giro Interest income on Current Account	42.055.800	285.516.860	678,90
Pendapatan Lain-Lain Other Income	-	1.427.858	-
Penyaluran Pinjaman Kemitraan Partnership Loan Distribution	(27.200.000.000)	(25.700.000.000)	94,49
Dana Pembinaan (hibah) Development Funds (Grants)	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	-	(4.852.458)	-
Pembayaran Pajak Tax Payments	-	(57.096.799)	-
Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Expenses and Expenditures Payment	-	(915.343)	-
Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi (1) Net Cash provided from (used in) Operating Activities (1)	(247.117.696)	(884.353.022)	357,87
Aktivitas Investasi (2) Investing Activities (2)			
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	-	-	-
Aktivitas Pendanaan Funding Activities			
ABT Berakhir Pembatasannya ABT Final Restrictions	-	-	-
Penyisihan Program BUMN Peduli BUMN Care Program Allowance	-	-	-
Penyaluran Program BUMN Peduli Distribution of BUMN Care Program	-	-	-
Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan (3) Net Cash provided from (used in) Funding Activities	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto dalam Kas dan Setara Kas (4)=(1)+(2)+(3) Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents (4) =(1)+(2)+(3)	(247.117.696)	(884.353.022)	357,87
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun (5) Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year (5)	1.126.373.309	1.691.519.677	150,17
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun (6)=(4)+(5) Cash and Cash Equivalents at the End of Year (6)=(4)+(5)	879.255.613	807.166.655	91,80



Monitoring

Sebagai salah satu dari kewajiban BUMN Pembina adalah melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan. Bentuk dari pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan yaitu dengan melakukan *monitoring*. Selain itu *monitoring* terhadap mitra binaan dilakukan untuk mengoptimalkan pengembalian pinjaman dana Program Pendanaan UMK, berikut adalah kegiatan *monitoring* yang dilakukan terhadap mitra binaan sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu :

Monitoring

One of the responsibilities of supervising SOEs is to monitor and coach foster partners. The form of monitoring and coaching for foster partners is through conducting monitoring. Additionally, monitoring of foster partners is carried out to optimize the loan repayment from the Micro-Small Business (MSE) Funding Program. The following were the monitoring activities conducted for foster partners until December 2023:

TABEL KOLEKTIBILITAS KCU/KC PERIODE S.D BULAN DESEMBER 2023
Table of Collectability by Branch Offices for Period until December 2023

NO	BA	CABANG Branch Office	KOLEKTIBILITAS (%) Collectability (%)
1	L100	KC JAKARTA I	78,54
2	L101	KC BANDAR LAMPUNG	75,53
3	L102	KC BENGKULU	95,48
4	L103	KC PALEMBANG	87,36
5	L104	KC PALANGKARAYA	85,78
6	L105	KC PONTIANAK	93,66
7	L106	KC PANGKAL PINANG	77,36
8	L107	KC TANGERANG	72,14
9	L108	KC TARAKAN	98,73
10	L109	KC JAKARTA II	92,30
11	L110	KC LUBUK LINGGAU	76,30
12	L200	KC MEDAN	50,39
13	L201	KC BANDA ACEH	78,90
14	L202	KC PEMATANG SIANTAR	84,05
15	L203	KC BUKIT TINGGI	90,12
16	L204	KC PADANG	86,84
17	L205	KC PEKANBARU	89,63
18	L206	KC JAMBI	73,81
19	L207	KC TANJUNG PINANG	74,49
20	L208	KC LHOKEUMAWA	89,55
21	L209	KC KEPULAUAN NIAS	89,90
22	L300	KC BANDUNG	89,70
23	L301	KC BOGOR	67,61
24	L302	KC TASIKMALAYA	91,34
25	L303	KC CIREBON	96,80
26	L304	KC SERANG	76,32
27	L305	KC DEPOK	96,90
28	L306	KC BEKASI	93,14
29	L400	KC SEMARANG	86,08
30	L401	KC PURWOKERTO	84,75

NO	BA	CABANG Branch Office	KOLEKTIBILITAS (%) Collectability (%)
31	L402	KC SURAKARTA	95,78
32	L403	KC YOGYAKARTA	78,58
33	L404	KC PEKALONGAN	87,01
34	L500	KC SURABAYA	82,66
35	L501	KC MALANG	94,86
36	L502	KC MADIUN	100,00
37	L503	KC KEDIRI	88,09
38	L504	KC JEMBER	93,13
39	L505	KC BANJARMASIN	74,56
40	L506	KC SAMARINDA	89,07
41	L507	KC ENDE	92,42
42	L508	KC PAMEKASAN	85,72
43	L600	KC MAKASSAR	99,35
44	L601	KC MANADO	86,37
45	L602	KC PALU	96,99
46	L603	KC KENDARI	75,98
47	L604	KC AMBON	91,65
48	L605	KC JAYAPURA	81,08
49	L606	KC GORONTALO	47,33
50	L607	KC TERNATE	65,13
51	L608	KC MAMUJU	82,21
52	L609	KC MANOKWARI	100,00
53	L610	KC PALOPO	91,08
54	L611	KC BONE	80,64
55	L700	KC DENPASAR	100,00
56	L701	KC KUPANG	81,64
57	L702	KC MATARAM	77,42

Permasalahan Unit Kemitraan

Permasalahan dalam pengelolaan program TJSL tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Permasalahan lebih banyak dijumpai pada pelaksanaan program pendanaan UMK. Permasalahan tersebut meliputi kondisi atau keadaan pada mitra binaan yaitu pinjaman yang diterima oleh mitra binaan tidak dimanfaatkan sesuai dengan proposal yang diajukan, walaupun sebelum menerima penyaluran sudah dijelaskan harus untuk keperluan usaha. Mitra Binaan pada umumnya juga enggan menyelenggarakan pembukuan walaupun sudah diberikan penjelasan saat pelatihan, dengan demikian mitra binaan kesulitan membuat laporan perkembangan usaha.

Issues with Partnership Unit

Issues in the management of the TJSL program cannot be separated from the problems faced. Most issues are encountered in the implementation of the MSE funding program. These issues include the condition or situation of foster partners, where the loans received by foster partners are not utilized according to the proposed plan, even though it was explained before disbursement that it should be used for business purposes. Foster partners generally also hesitate to organize their bookkeeping despite being given explanations during training. Consequently, foster partners have difficulty in preparing business progress reports.



Kegiatan penagihan harus lebih intensif karena masih adanya anggapan yang melekat di pihak mitra binaan bahwa pinjaman yang diterima dianggap hibah terutama pada mitra binaan lama sehingga pinjaman dianggap tidak perlu dikembalikan. Masalah lain adalah mitra binaan mulai kurang kooperatif dengan indikasi sulit ditemui saat dilakukan monitoring atau pihak keluarganya tidak mau membantu memberikan keterangan, nomor teleponnya yang biasa dihubungi berubah termasuk pindah alamat tanpa pemberitahuan.

Pada musim pandemi COVID-19 mitra binaan mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman karena pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada produksi dan penjualan sehingga dalam pendapatan sangat menurun sehingga banyak mitra binaan yang mengajukan kebijakan stimulus dan secara otomatis juga mengurangi tingkat kolektibilitas pinjaman. Terhadap pinjaman mitra binaan yang macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan sesuai peraturan dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. Lebih lanjut sesuai peraturan bahwa tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan oleh menteri.

Berdasarkan posisi sampai saat ini masalah pinjaman bermasalah belum terselesaikan karena tata cara penghapusbukuan belum ada tindak lanjut peraturannya, walau demikian terhadap pinjaman bermasalah tetap diupayakan penagihannya.

Collection activities need to be more intensive due to the persistent perception among foster partners that the loans received are considered grants, especially among long-time foster partners; thus, they deem it unnecessary to repay the loans. Another issue is that foster partners are becoming less cooperative, indicated by difficulties in locating them during monitoring or their families refusing to provide information, changing their contact numbers that are usually called, and moving addresses without notice.

During the COVID-19 pandemic, foster partners experienced difficulties in loan repayment because the COVID-19 pandemic significantly affected production and sales, leading to a drastic decrease in income. Consequently, many foster partners requested stimulus policies, which automatically reduced the loan collectability rate. Delinquent loans, which have been attempted to be recovered but remain unrecovered according to regulations, are categorized under other assets with Non-performing Loans. Furthermore, according to regulations, the minister will determine the procedures for writing off non-performing loans.

Based on the current situation, the issues of non-performing loans have not been resolved because there has been no follow-up action on the regulations for writing off the loans. Nevertheless, efforts are still being made to collect these non-performing loans.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

PENGUNGKAPAN MANAJEMEN TOPIK MATERIAL [3-3]

Perseroan meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu pemangku kepentingan dan mitra usaha yang strategis dengan kedudukan sentral sebagai ujung tombak dan penentu keberhasilan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Perseroan memiliki kebijakan umum pengelolaan SDM Perseroan yang berdasarkan pada persamaan hak dan kesetaraan kesempatan dalam bekerja, mengembangkan kompetensi, menjalani penilaian kinerja dan peningkatan jenjang karir, serta dalam hal paket remunerasi sesuai kinerjanya. [F.18]

HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS & BERMARTABAT

Perseroan meyakini bahwa hubungan industrial yang harmonis sangat penting dalam mendukung peningkatan produktivitas sehingga selalu berupaya membina relasi terbaik dengan para karyawan melalui komunikasi yang konstruktif dan memberikan kebebasan bagi setiap pekerja untuk berserikat.

Serikat Pekerja di lingkungan TASPEN adalah Serikat Karyawan TASPEN (SEKATA) yang tercatat di instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Keanggotaan SEKATA meliputi seluruh karyawan TASPEN. Antara TASPEN dengan SEKATA telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Nomor PD-15/DIR/2018 & KEP01/DPP-SEKATA/042018. Isi PKB tersebut sebagai berikut: [2-30]

Bab I	: Umum
Bab II	: Pengakuan, Kewajiban, dan Hak
Bab III	: Jaminan dan Hak Berorganisasi
Bab IV	: Hubungan Kerja
Bab V	: Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Bab VI	: Jenis-jenis Cuti dan Dispensasi
Bab VII	: Penghasilan Karyawan
Bab VIII	: Kesejahteraan Karyawan
Bab IX	: Perjalanan Dinas
Bab X	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bab XI	: Pembinaan dan Pengembangan Karir Karyawan
Bab XII	: Disiplin Karyawan
Bab XIII	: Keluh Kesah
Bab XIV	: Pemutusan Hubungan Kerja
Bab XV	: Ketentuan Peralihan
Bab XVI	: Penutup

DISCLOSURE OF MATERIAL TOPIC MANAGEMENT [3-3]

The Company believes that Human Capital (HC) is one of the stakeholders and strategic business partners with a central position as the backbone and determinant of success in realizing the vision and implementing the mission. The Company has a general policy for the management of the Company's HC based on the principles of equal rights and equal opportunities in work, competency development, performance assessment, career advancement, and appropriate remuneration packages based on performance. [F.18]

HARMONIOUS & DIGNIFIED INDUSTRIAL RELATIONS

The Company believes that harmonious industrial relations are crucial in supporting productivity improvement, and thus consistently strives to foster the best relations with employees through constructive communication and granting freedom for every employee to associate.

The Employee Union in TASPEN is the TASPEN Employee Union (SEKATA) registered with the relevant authority in the field of employment. SEKATA's membership includes all TASPEN employees. TASPEN and SEKATA have a Collective Labor Agreement (PKB) with Number PD-15/DIR/2018 & KEP01/DPP-SEKATA/042018. The contents of the PKB are as follows: [2-30]

Chapter I	: General Information
Chapter II	: Recognition, Obligations, and Rights
Chapter III	: Guarantees and the Right for Union
Chapter IV	: Employment Relationships
Chapter V	: Working Hours and Break Time
Chapter VI	: Types of Leave and Dispensation
Chapter VII	: Employee Income
Chapter VIII	: Employee Welfare
Chapter IX	: Business Travel
Chapter X	: Occupational Health and Safety
Chapter XI	: Employee Career Coaching and Development
Chapter XII	: Employee Discipline
Chapter XIII	: Complaints
Chapter XIV	: Termination of Employment
Chapter XV	: Transitional Provisions
Chapter XVI	: Closing



Pengelolaan SDM

Perseroan menjalankan pengelolaan SDM secara komprehensif, mulai dari pengelolaan perencanaan, perencanaan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia hingga pelaksanaan program pensiun, yang dikoordinasikan dan berada di bawah tanggung jawab Divisi SDM. Secara struktural, divisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM dan Teknologi Informasi.

Rekrutmen

Perseroan selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi, kejujuran, keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras dalam melaksanakan proses rekrutmen. Program rekrutmen dilaksanakan secara komprehensif, di mana setiap kandidat akan melalui proses evaluasi yang ketat, meliputi latar belakang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, media sosial, dan kondisi kesehatan. Proses seleksi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat.

Tingkat Turnover Pegawai

Tingkat persentase *turnover* pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar 10,60%. Perseroan mencatat sebanyak 149 pekerja yang keluar dikarenakan pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan pelanggaran peraturan disiplin. Secara rinci, informasi tingkat *turnover* pegawai pada tahun 2023 sebagai berikut: [401-1]

Human Capital Management

The Company conducts comprehensive human capital management, ranging from planning management, policy planning, and human capital development to the implementation of pension programs, which are coordinated and under the responsibility of the Human Capital Division. Structurally, this division reports directly to the Chief HC and Information Technology Officer.

Recruitment

The Company consistently upholds principles of transparency, honesty, and fairness, without discrimination based on ethnicity, religion, and race, in carrying out the recruitment process. The recruitment program is executed comprehensively, where each candidate undergoes a rigorous evaluation process, including background checks, educational history, work experience, social media, and health conditions. The selection process is also carried out according to the quantity and competencies the candidates require.

Employee Turnover Rate

The employee turnover percentage rate in 2023 was 10.60%. The Company recorded 149 employees who quit due to normal retirement, early retirement, resignation, death, and violations of disciplinary regulations. In detail, information on employee turnover rate in 2023 was as follows: [401-1]

TINGKAT TURNOVER KARYAWAN 2022-2023
Employee Turnover Rate 2022-2023

URAIAN	2022		2023		Description
	JUMLAH Total	PERSENTASE Percentage	JUMLAH Total	PERSENTASE Percentage	
Pensiun Normal	145	9,3%	137	92%	Normal Retirement
Pensiun dini	5	0,3%	4	3%	Early Retirement
Mengundurkan diri	14	0,9%	5	3%	Resignation
Meninggal dunia	4	0,3%	1	1%	Death
Pelanggaran Peraturan Disiplin	1	0,1%	2	1%	Violations of Disciplinary Regulations
<i>Turnover</i>	16	1%			Turnover
Jumlah Karyawan	1.556		1.406		Number of Employees
Tingkat <i>Turnover</i>	1,03%				Turnover Rate

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

Dalam pengelolaan karyawan, TASPEN tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Antara lain, usia minimal karyawan adalah 18 tahun, sedangkan jam kerja yang disepakati adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka selama tahun pelaporan, tidak tercatat temuan kasus pekerja anak dan kerja paksa di Perseroan.

Selain merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, komitmen Perseroan tidak mempekerjakan anak sejalan dengan Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), dan Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Sedangkan komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa selaras dengan Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*), dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of forced Labour*).

Kesetaraan Gender Dan Persamaan Hak [F.18] [405-1]

TASPEN memperlakukan setiap karyawan dengan adil dan objektif. Setiap karyawan memiliki hak asasi yang sama dan mengemban kewajiban sesuai dengan level jabatan. Hak dan kewajiban karyawan tertera dalam Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Dalam Pengembangan Karir Karyawan, Manajemen menetapkan Promosi/Mutasi Karyawan berdasarkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor PD-52/DIR/2018 tentang Sistem Pengembangan Karir Karyawan, tanpa membedakan gender dan unsur SARA

Berikut informasi mengenai komitmen PT TASPEN (Persero) dalam mengimpletasikan kesetaraan gender dan persamaan hak terhadap seluruh karyawan.

Child Labor and Forced Labor [F.19]

In the management of employees, TASPEN adheres to and complies with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Among other things, the minimum age for employees is 18 years old, while the agreed working hours are 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week for 5 (five) working days in 1 (one) week, according to Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. By implementing this policy, there were no recorded cases of child labor and forced labor in the Company during the reporting year.

In addition to referencing the Republic of Indonesia Law No. 13 of 2003, the Company's commitment to not employing children is in line with ILO Convention No. 138/1973 concerning Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182/1999 concerning the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Meanwhile, the commitment to avoiding forced labor aligns with ILO Convention No. 29/1930 concerning Forced or Compulsory Labor and ILO Convention No. 105/1957 concerning the Abolition of Forced Labor.

Gender Equality And Equality Of Rights [F.18] [405-1]

TASPEN treats every employee fairly and objectively. Every employee has the same human rights and carries out the obligations according to the position level. The rights and obligations of employees are stated in the Company Regulations and have been socialized to all employees.

In Employee Career Development, the Management determines the Promotion/Mutation of Employees based on the requirements as stated in the Board of Directors Regulation Number PD-52/DIR/2018 on Employee Career Development System, regardless of gender and SARA elements.

The following is information about PT TASPEN (Persero)'s commitment to implementing gender equality and equality of rights for all employees.



KESETARAAN GENDER
Gender Equality

GENDER	JUMLAH Total	Gender
Laki-laki	762	Male
Perempuan	644	Female
Total	1.406	Total

PERSAMAAN HAK
Equality of Rights

GENDER	KETERANGAN Information		Gender
	MUTASI Mutation	PROMOSI Promotion	
Laki-laki	148	125	Male
Perempuan	111	70	Female

Jumlah dan Tindak Lanjut Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan Tahun 2023

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan di lingkungan TASPEN.

Tunjangan Karyawan [GRI 401-2]

Remunerasi diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus meningkatkan keterikatan karyawan akan Perseroan. Pada prinsipnya, remunerasi atau kompensasi yang memadai akan mendukung laju perkembangan Perseroan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam memuluskan langkah bisnis Perseroan. TASPEN memberikan remunerasi berdasarkan kompetensi karyawan yang dimulai dari asesmen terkait kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Remunerasi setiap tahunnya akan dievaluasi guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan ekonomi Perseroan. Adapun komponen remunerasi karyawan yang disediakan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Gaji Dasar
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Transportasi.

Number and Follow-ups of Complaints of Employment Issues in 2023

In 2022, there were no reports of complaints related to employment issues within TASPEN.

Employee Benefits [GRI 401-2]

Remuneration is required to improve employee welfare while increasing employee engagement with the Company. In principle, adequate remuneration or compensation will support the pace of the Company's development, as each employee will work optimally in streamlining the Company's business steps. TASPEN provides remuneration based on the employees' competencies, starting from performance assessments in carrying out their duties and responsibilities in accordance with applicable regulations.

The annual remuneration will be evaluated for adjustment to the market and economic conditions of the Company. The employee remuneration components provided by the Company are as follows:

- Basic Salary
- Position Allowance
- Performance Allowance
- Transportation Allowance

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan, TASPEN memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

- a. Sistem gaji yang dikaitkan dengan Sistem Penilaian Kinerja;
- b. Pemberian Jasa Produksi;
- c. Pemberian Tunjangan Hari Raya;
- d. Pemberian Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar;
- e. Pemberian biaya perjalanan dinas bagi karyawan yang dimutasikan;
- f. Penghargaan karyawan masa bakti 10, 20, 25, 30 tahun, karyawan teladan, karyawan tewas dan karyawan berjasa;
- g. Pemberian Tunjangan Pakaian Kerja;
- h. Pemberian Tunjangan Pakaian Resepsi tiap 3 (tiga) tahun bagi Pejabat;
- i. Pemberian bantuan kontrak rumah, khusus bagi karyawan yang dimutasikan dan tidak mendapat rumah dinas;
- j. Pemberian bantuan biaya pindah sekolah, bagi anak-anak dari karyawan yang dimutasikan dan diberikan apabila yang bersangkutan mengalami perpindahan sekolah ke tempat yang baru;
- k. Pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari karyawan yang meninggal aktif;
- l. Pemberian fasilitas kendaraan dinas bagi Direksi, *Division Head, Desk Head dan Branch Manager*;
- m. Pemberian fasilitas rumah dinas Direksi, *Division Head, dan Branch Manager*;
- n. Pemberian bantuan biaya pengobatan bagi karyawan dan keluarganya;
- o. Pemberian program Pensiun bagi karyawan yang mencapai usia pensiun;
- p. Pemberian perlindungan Jaminan Sosial;
- q. Tunjangan transportasi;
- r. Bantuan rekening listrik, air bersih, gas, bahan bakar minyak, dan komunikasi bagi *Branch Manager, Desk Head, Social & Environment Unit Head dan Department Head* (hanya komunikasi);
- s. Pemberian bantuan alat komunikasi bagi Direksi, *Branch Manager, Department Head, Desk Head, Social & Environment Unit Head*;
- t. Tunjangan kemahalan daerah bagi Karyawan yang berada/tinggal di kelas Kantor Cabang yang mempunyai Indeks Lokal Daerah (ILD) tinggi sesuai kebijakan Direksi.

EMPLOYEE WELFARE PROGRAM

To increase work satisfaction and employee performance, TASPEN has several welfare programs, among others:

- a. Payroll that is linked to Performance Appraisal System;
- b. Provision of Production Service;
- c. Provision of Religious Holiday Allowance;
- d. Provision of Annual Leave and Long Leave Allowance;
- e. Provision of Business trip allowance for the employee whose job is transferred;
- f. Employee reward, covering: tenure of 10, 20, 25, 30 years, exemplary employees, dead employees, and meritorious employees;
- g. Provision of Working uniform allowance;
- h. Provision of reception cloth allowance every 3 (three) years for Officials;
- i. Provision of House for rent for an employee whose job is transferred and is not provided with an official house from the Company;
- j. Provision of school transfer assistance for the children of the transferred employee and provided if the child has moved to a new school;
- k. Provision of educational assistance for children of employees who died while active;
- l. Provision of Official Vehicle facility for Board of Directors, Division Heads, Desk Heads, and Branch Managers;
- m. Provision of Official House facility for Board of Directors, Division Heads, and Branch Managers;
- n. Provision of Medical allowance for employees and their families;
- o. Provision of Pension program for employees reaching pension age;
- p. Provision of Social insurance protection program;
- q. Transportation allowance;
- r. Assistance with electricity, clean water, gas, fuel, and communication expenses for Branch Managers, Desk Heads, Social & Environment Unit Head, and Department Heads (communication only);
- s. Provision of communication devices for Board of Directors, Branch Managers, Department Heads, Desk Heads, and Social & Environment Unit Head;
- t. Regional living cost allowance for employees residing in Branch Office classes with high Regional Local Index (ILD) as per Board of Director's policy.



PENGHARGAAN KARYAWAN TASPEN

Senantiasa memberikan apresiasi atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan, juga kesetiaan para karyawan. Untuk karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, TASPEN memberikan apresiasi dan penghargaan masa kerja. Sepanjang tahun 2023, penghargaan masa kerja diberikan kepada 8 karyawan yang telah melampaui masa kerja 10, 20, 25, dan 30 tahun. Selain penghargaan dengan masa kerja tertentu, TASPEN juga memberikan penghargaan terhadap karyawan teladan kepada 7 karyawan.

TASPEN EMPLOYEE REWARDS

TASPEN always gives an appreciation for performance, execution of duties, innovations or improvements, and loyalty of employees. To give appreciation to employees who have worked for a certain period of service, TASPEN grants an appreciation and long service reward. Throughout 2023, the long service rewards were given to 8 employees who have exceeded 10, 20, 25, and 30 years of service. In addition to the long service reward, TASPEN also gave exemplary employee rewards to 7 employees.

PENGHARGAAN KARYAWAN Employee Awards

JENIS PENGHARGAAN	2022	2023	Types of Awards
Masa kerja 10 tahun	114	0	10 years working period
Masa kerja 20 tahun	0	0	20 years working period
Masa kerja 25 tahun	0	1	25 years working period
Masa kerja 30 tahun	6	7	30 years working period
Karyawan teladan	51	7	Exemplary employee
Karyawan tewas	2	0	Dead employee
Jumlah	171	15	Total

Kewajiban Program Pensiun [GRI 201-3]

Selain memberikan gaji dan tunjangan kepada para karyawan, TASPEN mendistribusikan nilai ekonomi melalui program imbalan pensiun dengan jumlah imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. [GRI 3-3] Untuk mewujudkan hak tersebut, Perseroan menyediakan program pensiun manfaat pasti kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun.

Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kepada karyawan Perseroan yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo pensiun atau berhenti bekerja. Sedangkan, imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja jangka panjang yang dibayarkan ke karyawan pada saat karyawan masih aktif sebagai karyawan Perseroan.

Imbalan pasca kerja terdiri atas:

- Pesangon yang merupakan kekurangan antara manfaat sesuai UU No.13/2003 dengan Program Pensiun dan THT yang pendanaannya dilakukan oleh Perseroan ditambah bantuan duka.
- Biaya perawatan kesehatan bagi penerima pensiun dan batihnya.

Obligation of Pension Programs [GRI 201-3]

In addition to providing salaries and allowances to employees, TASPEN distributes economic value through a pension benefits program with a certain minimum benefit amount in accordance with Law No. 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation becoming Law. [GRI 3-3] To realize this right, the Company provides a defined benefit pension program to employees who have entered the retirement age.

Post-employment benefits are benefits to Company employees that will be paid upon reaching retirement age or cessation of employment. Meanwhile, other long-term employment benefits are long-term benefits paid to employees while they are still active as Company employees.

Post-employment benefits consist of:

- Severance pay is a deficiency between benefits in accordance with Law No. 13 Year 2003 with the Pension & THT Programs, the funding of which is carried out by the Company plus death grief money assistance.
- Health care costs for pension recipients and their dependents.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri atas:

- a. Cuti besar berimbalan
- b. Penghargaan masa kerja

Program Pensiun Manfaat pasti diselenggarakan untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan TASPEN (DP TASPEN) yang disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-36/MB.1/2019 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan TASPEN (DP TASPEN).

Pelatihan dan Pengembangan [F.22]

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan sehingga mampu menunjang pencapaian sasaran strategis. Adapun biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk pengembangan kapabilitas sumber daya manusia sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.187.767.197.

Other long-term post-employment benefits consist of:

- a. Paid-long leave
- b. Tenure rewards

A defined pension benefit program is provided for permanent employees who meet the requirements. The pension program is managed by the TASPEN Employee Pension Fund (DP TASPEN), which was endorsed by the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-36/MB.1/2019 dated May 24, 2018, concerning the Ratification of the Pension Fund Regulations from the TASPEN Employee Pension Funds (DP TASPEN).

Training and Development [F.22]

Throughout 2023, the Company has implemented education and training activities to enhance employee capabilities to support the achievement of strategic goals. The amount spent by the Company on human capital capability development in 2023 was Rp 24,187,767,197.

NO	AKUN Account	ANGGARAN Budget								
		2020			2021			2022		
		ALOKASI Allocation	REALISASI Realization	%	ALOKASI Allocation	REALISASI Realization	%	ALOKASI Allocation	REALISASI Realization	%
1	Seminar Lokakarya							9.535.000.000	4.282.732.499	44,92%
2	Soft Competency	7.488.000.000	-	0%	6.959.948.654	567.015.746	8%	3.825.000.000	3.820.561.775	99,88%
3	Hard Competency	27.000.000.000	10.125.748.890	38%	9.992.500.000	7.236.252.073	72%	9.664.999.942	9.106.396.446	94,22%
4	Rekrutmen Recruitment	4.020.000.000	612.011.664	15%	549.554.000	401.139.228	73%	6.733.000.000	6.226.007.534	92,47%
5	Karir Profesi Professional Career	11.717.500.000	4.635.598.629	40%	9.222.451.346	5.483.512.965	59%	9.004.000.000	5.034.801.442	55,92%

Rekapitulasi Pelatihan Karyawan Tahun 2023

Berdasarkan penyelenggaraan program Pendidikan dan pelatihan tersebut di atas, selama tahun 2023, total rata-rata jam pelatihan per karyawan adalah 47 jam/tahun [GRI 404-1]

Employee Training Recapitulation in 2023

Based on the implementation of the education and training programs mentioned above, during the year 2023, the total average training hours per employee was 47 hours/year [GRI 404-1].



Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan

Survei kepuasan karyawan dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan merujuk pada sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan ketidakterikatan karyawan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan *engagement* karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Kegiatan survei kepuasan dan keterikatan karyawan (*Employee Satisfaction & Engagement Survey*) PT TASPEN (Persero) telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

Employee Satisfaction and Engagement Survey

An Employee satisfaction survey is conducted to measure the extent of employees' satisfaction and engagement with the Company. The level of employee satisfaction and engagement refers to an employee's general attitude towards their job and the Company. High levels of satisfaction and engagement indicate a positive attitude towards the job. Conversely, dissatisfaction and disengagement of employees indicate a counterproductive attitude towards their work.

The employee satisfaction and engagement survey results, using the employee satisfaction index and employee engagement index, are expected to be utilized by the Company to improve its performance further.

The Employee Satisfaction and Engagement Survey activities of PT TASPEN (Persero) were carried out on June 2023.

URAIAN	TINGKAT KEPUASAN KARYAWAN Employee Satisfaction Index		Description
	2022	2023	
Tingkat Kepuasan Karyawan (ESI)	97,43%	89,91%	<i>Employee Satisfaction Index (ESI)</i>

URAIAN	TINGKAT KETERIKATAN KARYAWAN Employees Engagement Index		Description
	2022	2023	
Tingkat Keterikatan Karyawan (EEI)	97,71%	90,79%	<i>Employee Engagement Index (EEI)</i>

Penyesuaian Upah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan melaksanakan penyesuaian upah setiap tahun. Gaji seluruh pegawai baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. [F.20]. Selain itu, Perseroan juga memberikan sejumlah insentif berdasarkan kinerja pegawai sebagai bentuk apresiasi sehingga pegawai dapat senantiasa meningkatkan produktivitasnya. Program ini menjadi salah satu upaya Perseroan dalam mendukung pencapaian KPI Perseroan tahun 2023.

Wage Adjustments

To improve employee welfare, the Company implements wage adjustments every year. The salaries of all employees, both female and male, are according to the government's minimum wage provision. [F.20]. Besides, the Company also provides several incentives based on employee performance as a form of appreciation so that employees can continue to increase their productivity. This program was one of the Company's efforts to support the achievement of the Company's KPIs in 2023.

Rasio Gaji Perempuan dan Laki-Laki

Pada tahun 2023, rasio gaji antara perempuan dan laki-laki adalah 1:1. Secara keseluruhan imbalan kerja diberikan melalui gaji/ honorarium, tunjangan-tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan.

Female to Male Salary Ratio

In 2023, the salary ratio between women and men was 1:1. In general, employee benefits are provided through salary/honorarium, allowances, bonuses, service awards, as well as health programs and pension programs for employees.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) [F.21] [403-1]

TASPEN melaksanakan praktik K3L terbaik demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, dengan implementasi praktik K3L yang serius diharapkan akan tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Topik kesehatan dan keselamatan kerja dipandang memiliki dampak yang signifikan bagi Perusahaan, sehingga menjadi topik material yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.

Sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, seluruh karyawan Perseroan dilindungi dan diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan wajib melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan melalui Asuransi Kesehatan Komersial (Non-BPJS), serta mendapat bantuan biaya melahirkan dan bantuan pembelian kacamata. Adapun manfaat yang diberikan dari Asuransi Kesehatan Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Rawat Jalan;
2. Jaminan Rawat Inap;
3. Tunjangan kecelakaan diri (meninggal dunia dan cacat tetap total); serta
4. Santunan duka.

Mayoritas kegiatan karyawan berada di dalam Gedung bangunan, maka program K3 Perseroan dijalankan dengan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program dasar untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan memastikan kesehatan pegawai. Salah satunya dengan mengadakan latihan evakuasi dalam keadaan darurat. Perseroan juga menerapkan program standar keselamatan kerja di lingkungan perkantoran dengan menyiapkan peralatan dasar keselamatan yang memadai. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, maka pada tahun 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja. Pada tahun 2023, TASPEN telah memberikan pelatihan terkait K3 sebanyak 25 Orang.

Occupational Health and Safety and Environment (K3L) [F.21] [403-1]

TASPEN implements the best K3L practices to realize employee protection from the risks of occupational accidents and occupational diseases. Besides, with the implementation of serious K3L practices, it is hoped that a safe, comfortable, healthy workplace and productive workforce will be created, thereby increasing work productivity and company productivity. The topic of occupational health and safety is considered to have a significant impact on the Company, it is a material topic that is disclosed in the sustainability report.

As a form of occupational health and safety insurance, all employees of the Company are protected and registered in compulsory health insurance programs through programs of the Social Insurance Administration Body of Health (BPJS Kesehatan), additional health insurance through Commercial Health Insurance (Non-BPJS), and receive maternity benefits and optical glasses allowance. The benefits provided by Additional Health Insurance are as follows:

1. Outpatient Allowance;
2. Inpatient Allowance;
3. Personal accident allowance (for deceased and total permanent disability); and
4. Bereavement Payment.

Most of the employee's activities are conducted inside the office building. Thus the Company's K3 program is performed by emphasizing the implementation of basic programs to prevent work accident risk and ensure the employee's health. One of them is by conducting evacuation drills in an emergency. The Company also implements occupational safety standard programs in the office area by preparing adequate basic safety equipment. By paying attention to all these aspects, in 2023 there were no work accidents. In 2023, TASPEN has provided training on Occupational Health and Safety (K3/OHS) to 25 people.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP CORE SUBJEK HAK AZASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS CORE SUBJECT OF HUMAN RIGHTS

Pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara internasional melalui hukum dan konsep peradilan sosial. Meskipun belum memiliki kegiatan spesifik terkait HAM, Perseroan tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, termasuk terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait.

TASPEN menjunjung tinggi keberagaman dan tidak membedakan gender, ras, agama, suku dan golongan atau afiliasi politik. Hal ini tercermin pada lingkungan kerja sehari-hari maupun pelaksanaan rekrutmen pekerja karyawan baru, yang didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada seluruh karyawan dalam mengikuti program pelatihan dan pendidikan, baik dari tingkat pelaksana sampai dengan manajemen puncak.

TASPEN juga mematuhi kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Syarat usia minimal calon karyawan Perseroan adalah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO). Dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, Perseroan patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Perusahaan juga menentang segala diskriminasi dan memegang prinsip kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Recognition and respect for Human Rights (HAM) is recognized internationally through the law and the concept of social justice. Although not yet having specific activities related to human rights, the Company continues to uphold its responsibility to respect human rights, including to all relevant stakeholders.

TASPEN upholds diversity and does not differentiate between gender, race, religion, ethnicity and class, or political affiliation. This is reflected in the daily work environment and the implementation of recruitment of new employees, which are based on the results of the selection, evaluation results during the probationary period, and employee orientation. The same opportunity is also given to all employees in participating in training and education programs, both from the staff level to the top management.

TASPEN also adheres to the policy of not employing underage children. The minimum age requirement for a prospective employee is 18 years old. This is according to the Government's decision to ratify the International Labor Organization (ILO) Convention. In managing human capital management, the Company complies and is subject to the laws and regulations related to manpower. The Company also opposes all discrimination and upholds humanitarian principles and respects human rights in the management of human capital.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP CORE SUBJEK OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS CORE SUBJECT OF FAIR OPERATIONS

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan operasi perusahaan yang adil. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan operasi yang adil diantaranya:

1. Dukungan dan tindakan pencegahan korupsi (*AntiCorruption*) melalui:
 - a. Penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
 - b. Sosialisasi dan implementasi GCG, COC, Pengendalian Gratifikasi.
 - c. Saluran mekanisme pelaporan gratifikasi dan Laporan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyuarkan budaya anti korupsi.
2. Penghindaran terhadap perilaku pelanggaran hukum, terutama penggunaan pengaruh politik (*Responsible political involvement*)

Dalam menjalankan usaha, TASPEN mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum. Komitmen terhadap hal tersebut diantaranya telah dituangkan dalam pedoman etika (kode etik) terkait aktifitas politik.
3. Berkompetisi dengan pesaing setara jujur dan adil (*Fair Competition*), TASPEN berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. TASPEN menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya dan etika bisnis harus dibangun dan dijalankan dalam menjaga iklim bisnis yang kondusif.
4. Menghormati hak-hak kekayaan seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya (*Respect for property rights*).

The Company carries out various efforts to realize fair Company operations management. Efforts that have been made in order to carry out fair operations include:

1. Support and actions to prevent corruption (*AntiCorruption*) through:
 - a. Determination of gratification control guideline
 - b. Socialization and implementation of GCG, COC, gratification control,
 - c. Channels for gratification reporting mechanisms and State Officials' Wealth Report (LHKPN)
 - d. Take an active role in activities that voice the culture of anti-corruption.
2. Avoidance of illegal behavior, especially the use of political influence (*Responsible political involvement*).

In carrying out its business, TASPEN complies with the provisions and laws and regulations to avoid violations of law. Commitment to this has been included in the ethical guidelines (code of conduct) related to political activities.
3. Competing with competitors in Fair Competition, TASPEN is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. TASPEN makes fair business competition as a culture and business ethics must be built and implemented in maintaining a conducive business climate.
4. Respect for property rights, such as patents, copyrights, etc.

LEMBAR UMPAN BALIK (G.2)

FEEDBACK SHEET (G.2)

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax atau pos.

We would like to request all stakeholders to kindly provide feedback after reading this Sustainability Report by sending an email or send this form by fax or mail.

PROFIL ANDA | YOUR PROFILE

Nama (bila berkenan) | Name (if you please) : _____
 Institusi/Perusahaan | Institution/Company : _____
 Email : _____
 Telp/Hp | Phone/Mobile : _____

GOLONGAN PEMANGKU KEPENTINGAN | STAKEHOLDERS GROUP

<input type="checkbox"/> Pemerintah Government	<input type="checkbox"/> Media
<input type="checkbox"/> LSM NGO	<input type="checkbox"/> Akademik Academic
<input type="checkbox"/> Perusahaan Corporate	<input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan : _____
<input type="checkbox"/> Masyarakat Community	<input type="checkbox"/> Others, please state : _____

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai
 Please choose the most appropriate answer

1 Laporan ini bermanfaat bagi Anda :
 This report is useful to you:

Sangat Tidak Setuju Strongly Disagree Tidak Setuju Disagree Netral Neutral Setuju Agree Sangat Setuju Strongly Agree

2 Laporan ini menggambarkan kinerja Perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan:
 This report describes the Company's performance in sustainability development:

Sangat Tidak Setuju Strongly Disagree Tidak Setuju Disagree Netral Neutral Setuju Agree Sangat Setuju Strongly Agree

3 Laporan ini mudah dimengerti :
 This report is easy to understand:

Sangat Tidak Setuju Strongly Disagree Tidak Setuju Disagree Netral Neutral Setuju Agree Sangat Setuju Strongly Agree

4 Laporan ini menarik :
 This report is interesting:

Sangat Tidak Setuju Strongly Disagree Tidak Setuju Disagree Netral Neutral Setuju Agree Sangat Setuju Strongly Agree

5 Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Perusahaan :
 This report increases your trust in the Company's sustainability:

Sangat Tidak Setuju Strongly Disagree Tidak Setuju Disagree Netral Neutral Setuju Agree Sangat Setuju Strongly Agree

Mohon berkenan mengisi:
Please complete the below statements:

- 1 Bagian laporan mana yang paling berguna bagi Anda?
Which part of this report is most useful to you?

- 2 Bagian laporan mana yang kurang berguna bagi Anda?
Which part of this report is less useful to you?

- 3 Bagian laporan mana yang paling menarik bagi Anda?
Which part of this report is the most interesting to you?

- 4 Bagian laporan mana yang kurang menarik bagi Anda?
Which part of this report is less interesting to you?

- 5 Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:
Please give us your advice/suggestions/comments on this report:

Terima kasih atas partisipasi Anda.
Mohon agar formulir ini dikirimkan kembali kepada:

Sekretaris Perusahaan
PT TASPEN (Persero)
Jl. Letjen. Suprpto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Telpon : (021) 424 1808
Fax : (021) 420 3809
Website : www.taspen.co.id
Email : taspen@taspen.co.id
Call Center : 1 500 919

Thank you for your participation.
Kindly send this form to:

Corporate Secretary
PT TASPEN (Persero)
Jl. Letjen. Suprpto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Phone : (021) 424 1808
Fax : (021) 420 3809
Website : www.taspen.co.id
Email : taspen@taspen.co.id
Call Center : 1 500 919

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK (G.3)

Selama tahun 2023, TASPEN tidak menerima tanggapan dan umpan balik terhadap Laporan Keberlanjutan Tahun 2022. Namun demikian, Perseroan berupaya untuk menyempurnakan isi laporan tahun 2023 sesuai dengan kinerja keberlanjutan selama tahun pelaporan.

RESPONSE TO FEEDBACK (G.3)

In 2023, TASPEN did not receive any responses and feedback on the 2022 Sustainability Report. However, the Company strives to improve the 2023 report contents according to the sustainability performance during the reporting year.

REFERENSI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NO. 51/POJK.03/2017 (G.4)

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS AS REGULATORY REFERENCE (POJK) NO. 51/POJK.03/2017 (G.4)

NO	KRITERIA Criteria	HALAMAN Page
A	STRATEGI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY STRATEGY	
A.1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Description of Sustainability Strategy	10
B	IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF SUSTAINABILITY ASPECT	
B.1.	Aspek Ekonomi Economic Aspect	8
B.2.	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	8
B.3.	Aspek Sosial Social Aspect	9
C	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	
C.1.	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Values of Sustainability	36
C.2.	Alamat dan Sejarah Singkat Perusahaan Address and Brief History of the Company	24
C.3.	Skala Usaha Business Scale	38
C.4.	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha Products, Services, and Business Activities	70
C.5.	Keanggotaan pada Asosiasi Membership of Associations	91
C.6.	Perubahan Yang Bersifat Signifikan Significant Changes	92
D	PENJELASAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' EXPLANATION	
D.1.	Kebijakan Merespon Tantangan dalam Strategi Keberlanjutan Policy Responding to Challenges in Sustainability Strategy	10
D.2.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Finance Implementation	
D.3.	Strategi Pencapaian Target Strategy for Achieving Targets	
E	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY GOVERNANCE	
E.1.	Penanggungjawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Finance Implementation Person in Charge	107
E.2.	Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan Sustainability Finance Competency Development	139
E.3.	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment on Sustainability Finance Implementation	149
E.4.	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationships with Stakeholders	19
E.5.	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Problems with Sustainability Finance Implementation	149
F	KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build Sustainability Culture	156
	Kinerja Ekonomi Economic Performance	156

NO	KRITERIA Criteria	HALAMAN Page
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison Between Targets and Production Performance, Portfolio, Financing or Investment Targets, Income, and Profit or Loss	
	Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance	
F.6.	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Quantity and Intensity of Energy Used	161
F.7.	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements in Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy	162
	Aspek Air Water Aspect	
F.8.	Penggunaan Air Water Usage	162
	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment	
F.16.	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup Number and Materials of Environmental Complaints	160
F.17.	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Services for Equal Products and/or Services to Customers	
	Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspect	
F.18.	Kesetaraan Kesempatan Kerja Equal Job Opportunities	
F.19.	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	
F.20.	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wages	
F.21.	Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman Decent and Safe Work Environment	
F.22.	Pelatihan dan Pengembangan Training and Development	
	Aspek Masyarakat Community Aspect	
F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Operational Impact of Surrounding Communities	
F.24.	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	
F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Activities of Environmental Social Responsibility (TJSL)	
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk Product Development Responsibilities	
F.26.	Inovasi dan Pengembangan Innovation and Development	
F.27.	Jumlah dan Persentase Evaluasi Produk yang Dievaluasi Number and Percentage of Evaluation of Evaluated Products	
F.28.	Dampak Produk dan Mitigasi Penanggulangan Product Impact and Mitigation Countermeasures	
F.29.	Jumlah produk yang Ditarik Kembali Number of Recalled Products	
F.30.	Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	
G.1.	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Written Verification From Independent Parties	
G.2.	Lembar Umpan Balik Feedback Form	
G.3.	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Responses towards Feedback on Previous Year's Sustainability Report	
G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 List of Disclosures According to OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017	

STANDAR GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure		HALAMAN Page
	NO INDEKS Index Number	JUDUL Title	
PENGUNGKAPAN UMUM GENERAL DISCLOSURE			
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosure 2021	Organisasi dan Praktik Pelaporan The Organization and its Reporting Practices		
	2-1	Rincian organisasi Organizational details	
	2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi Entities included in the organization's sustainability reporting	
	2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan Reporting period, frequency, and contact point	
	2-4	Penyajian kembali informasi Restatements of information	
	2-5	Penjaminan eksternal External assurance	
	Aktivitas dan Pekerja Activities and Workers		
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya Activities, value chain and other business relationships	
	2-7	Tenaga kerja Employees	
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung Workers who are not employees	
	Tata Kelola Governance		
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola Governance structure and composition	
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	
	2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak Delegation of responsibility for managing impacts	
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	
	2-15	Konflik kepentingan Conflict of interest	
	2-16	Komunikasi masalah penting Communication of critical concern	
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata Kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	
2-19	Kebijakan remunerasi Remuneration policies		
2-20	Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration		
2-21	Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio		

STANDAR GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure		HALAMAN Page
	NO INDEKS Index Number	JUDUL Title	
Strategi, Kebijakan, dan Praktik Strategy, Policies and Practices			
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	10
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negative Processes to remediate negative impacts	
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Mechanisms for seeking advice and raising concerns	
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	
	2-28	Asosiasi keanggotaan Membership of associations	
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement			
	2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	

DISCLOSURE TOPIK SPESIFIK
DISCLOSURE OF SPECIFIC TOPICS

STANDAR GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure		HALAMAN Page
	NO INDEKS Index Number	JUDUL Title	
GRI 201: Kinerja Ekonomi Economic Performance	201-1	Distribusi Perolehan Ekonomi Distribution of Economic Income	8
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts	203-2	Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan Significant Indirect Economic Impacts	9
GRI 204: Praktik Pengadaan Procurement Practices	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	
GRI 302: Energi Energy	302-1	Konsumsi energi organisasi Energy consumption within the organization	8
	302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	
GRI 303: Air Water	303-1	Volume penggunaan air dan sumber air Volume of water use and water sources	
	303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air Water sources significantly affected by withdrawal of water	
GRI 401: Kepegawaian Employment	401-1	Perekrutan Karyawan Baru dan Pergantian (<i>Turn-over</i>) Karyawan New employee hires and employee turnover	
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja Occupational health and safety management system	

STANDAR GRI GRI Standard	PENGUNGKAPAN Disclosure		HALAMAN Page
	NO INDEKS Index Number	JUDUL Title	
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	174
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara Diversity and Equal Opportunity	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees	171


taspen


2023
LAPORAN KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY REPORT


**REALIZING COMMITMENT
TO DELIVER SUSTAINABLE VALUES**



PT TASPEN (PERSERO)

 Jl. Letjen Suprpto No.45
Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10520
Indonesia

 021 424 1808

 021 420 3809

 www.taspen.co.id